

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di era informasi ini dihadapkan pada berbagai problem, baik bersifat makro maupun mikro. Pada level makro ada dua permasalahan paling mendasar yaitu orientasi filosofis dan arah kebijakan. Secara tersurat, tujuan pendidikan nasional sangat ideal karena menjangkau semua dimensi kemanusiaan (idealisme, keilmuan, etis, fisik, religiusitas, serta *life skill*).

Kenyataan di lapangan berbeda dengan yang seharusnya, karakter bangsa bergerak semakin jauh dari idealnya. Pragmatisme, krisis moral, diskriminasi, pelecehan, pencitraan, plagiat, bisnis atas alasan keilmuan telah mewarnai perjalanan pendidikan kita di Indonesia, baik secara lembaga maupun pada peserta didiknya. Ditambah Implementasi pendidikan kita mayoritas bersifat mekanik, sehingga output pendidikan hanya mampu menghasilkan budak-budak modern, (dicerdaskan lalu dipekerjakan, bahkan dibuat menganggur).

Peserta didik dipaksa tunduk dan patuh pada sesuatu aturan yang linier sesuai temuan para pendahulu dan keinginan pemegang kebijakan, sehingga ruang ekspresi dan temuan baru pada siswa dan mahasiswa sebagai fitrahnya makhluk dinamis menjadi tumpul dan dirampas. Pada level mikro, bangsa ini dihadapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, kualitas yang masih tertinggal dibanding negara-negara lain yang SDA-nya tidak sehebat Indonesia.

Penyebab utamanya adalah lembaga pendidikan di Indonesia lebih banyak yang menyiapkan alumninya untuk menjadi pekerja pada perusahaan-perusahaan

milik asing, cara memasarkan produk-produk teknologi asing kepada masyarakat, bekerja di instansi, dan lain sebagainya. Mereka juga dipaksa tunduk untuk kepentingan penguasa dalam melanggengkan kekuasaan dan melancarkan ambisi duniawi. Ketika pendidikan telah tunduk pada penguasa dan pengusaha, maka pasti terjadi kehancuran dan nalar tumpul bangsa yang menyebabkan ketercerabutan karakter bangsa.

Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) melainkan sekaligus juga transfer nilai (*transfer of value*). Untuk itu, penanaman nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam pendidikan merupakan pilar utama demi tegaknya pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, persoalan budaya dan karakter bangsa tersebut kini menjadi sorotan tajam masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik di keluarga, sekolah, masyarakat, media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, para pengamat pendidikan, berbicara tentang persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar dan lokakarya, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pendidikan berbasis karakter bangsa yaitu prosesnya mengantarkan peserta didiknya menjadi penemu, pencipta, menjawab kebutuhan bangsa dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola secara mandiri Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Demikian akan tercipta lapangan pekerjaan serta kreatifitas dan inovasi sebagai tuntutan percepatan persaingan bangsa di percaturan global abad 21 ini, serta tantangan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang sudah berlangsung beberapa waktu ini.

Pendidikan di Indonesia belakangan ini dituding sarat dengan muatan-muatan intelektualistik dan materialistik, yang mengesampingkan nilai-nilai moral budaya dan budi pekerti dalam membentuk karakter siswa dan mahasiswa, sehingga menghasilkan siswa dan mahasiswa yang pintar tetapi kurang bermoral. Percepatan globalisasi ini menyisahkan tanda tanya, apakah akan berakibat pada merosotnya nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada generasi muda yang menjadi aset bangsa di masa depan.

Turunan dari problematika demikian membuat kita menyaksikan dinamika kebangsaan dan keumatan di Indonesia beberapa waktu belakangan ini mengalami berbagai sorotan negatif. Maraknya korupsi, reklamasi, penggusuran, menjamurnya industri asing yang mengeksploitasi kekayaan alam di berbagai wilayah di Indonesia. SDM Indonesia tidak memiliki kemampuan mengolah SDA sendiri. Mayoritas hasil peserta didik dari lembaga pendidikan formal tidak disiapkan membangun bangsanya, tetapi disiapkan menjadi kaki tangan perusahaan asing, konglomerat, atau pada instansi. Pendidikan formal yang semakin materialistik tidak menyuguhkan cara membangun karakter bangsa sesuai kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa dan negara sendiri.

Lembaga pendidikan dituding hanya mampu melahirkan alumni-alumni yang tingkat intelektualitas yang memadai. Penilaian bertumpu pada kecerdasan akademik yang berbasis angka-angka sebagai ukuran, hasilnya adalah mementingkan nilai kongkrit atau IPK, yang berujung pada ijazah. Percepatan simbol-simbol sebagai strata tertinggi dalam dunia pendidikan menyebabkan

hilangnya esensi dari pendidikan itu sendiri. Pencitraan angka-angka pragmatis lebih dipropagandakan daripada membangun kualitas peserta didik.

Lembaga pendidikan bergeser orientasi lebih menyiapkan seperangkat ijazah, tidak mengajarkan cara membangun kemandirian bangsa. Realitasnya, alumni yang dihasilkan banyak mengalami kegagalan menghadapi realitas lapangan. Banyak yang profesinya terpaksa membuka usaha kecil yang sesungguhnya merebut lahan rakyat kecil, atau merampas hak rakyat dengan arogansi pendidikannya. Atau simbol angka sebagai ukuran kecerdasannya hanya mampu sampai pada level pembantu dalam membesarkan anak perusahaan asing dan institusi yang mapan.

Di sisi lain, sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, birokrasi dan roda pemerintahan rata-rata di isi oleh alumni aktivis organisasi mahasiswa. Mereka banyak menempati posisi strategis yang meskipun tidak sesuai dengan jurusannya, sebab karakternya terbentuk dari organisasi. Kematangan keilmuan dari berbagai disiplin ilmu mengantarkan dirinya bisa berkarya dan mengabdikan dalam bidang apapun. Proses dalam organisasi membuat waktunya terkuras memikirkan bangsa dan negara dari berbagai aspeknya. Baginya hal yang terpenting adalah menumbuhkan kualitas diri dan kepekaan terhadap persoalan umat dan bangsa yang tidak diajarkan di sekolah dan di kampus.

Bagi HMI, kampus merupakan mitra dalam pengembangan dan penumbuhan insan-insan yang intelektual, kreatif. Tetapi di lapangan kampus cenderung resistensi terhadap organisasi ekstra termasuk HMI. Padatnya aktivitas kampus dan menyempitkan ruang mahasiswa dalam menimba ilmu dan mengasah

skill di organisasi ekstra, bahkan belum ada dorongan untuk terjadinya mitra. Di sini penulis ingin memaparkan pentingnya kerjasama dua lembaga pendidikan ini demi menumbuhkan mahasiswa dan sarjana yang berkualitas dan memiliki skill yang terbaik.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai organisasi mahasiswa Islam yang lahir dua tahun setelah Indonesia merdeka yaitu tahun 1947. Artinya hampir seumurannya republik Indonesia. Sejak itu HMI membuktikan kiprahnya mengawal bangsa Indonesia sampai hari ini. HMI telah menempatkan profesionalisme lembaga sebagai ujung tombak perkaderan. Dalam keanggotaan HMI tidak mengenal suku, ras dan keluarga, setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi bagian dalam keanggotaan HMI wajib mengikuti Latihan Kader I (LK I).

Kurikulum perkaderan HMI disusun secara rapi, format perkaderan yang revolusioner, mengantarkan kadernya meraih lompatan kuantum secara spiritual dan intelektual. Diajarkannya mengasah berbagai disiplin ilmu, membuat banyak kader HMI mampu mengembangkan kualitasnya pada bidang apa pun dia berkiprah, sebab terbiasa menjadi manusia pembelajar.

Tiga aspek ditekankan dalam perkaderan HMI yaitu pertama, pembentukan integritas watak dan kepribadian. Kedua, pengembangan kualitas intelektualitas atau kemampuan ilmiah. Ketiga, pengembangan kemampuan profesional atau keterampilan harus terintegrasi secara utuh.¹ Tipe ideal dari hasil perkaderan HMI adalah *“man of innovator”* (duta-duta pembaruan). Penyuaan *“idea of progress”* insan yang berkepribadian imbang dan padu, kritis, dinamis,

¹Solichin, *HMI Candradimuka Mahasiswa*, (Cet. I; Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation, 2010), hlm. 57.

adil, jujur, tidak takabur, dan bertakwa kepada Allah SWT. Terbentuk manusia-manusia yang beriman, berilmu, dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil).²

Dengan demikian akan lahir generasi-generasi baru yang kemudian hari menjadi kader umat dan kader bangsa. Memiliki kemampuan intelektual, kemampuan mengelola dan mengembangkan organisasi, lembaga, atau wadah pemberdayaan manusia. Dari proses itu lahirlah pemimpin yang mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konseptual secara professional dalam gerak perubahan sosial.

Sejak awal berdirinya, HMI telah memantapkan diri sebagai organisasi modern mahasiswa Islam di Indonesia. Kemoderenan dan profesionalisme selama ini yang membuat HMI tetap menjadi organisasi yang kompatibel dengan zaman. Alumni HMI yang menjabat dan mengabdikan serta mencipta dan berinovasi di berbagai bidang di negeri ini telah menunjukkan kualitas yang disertai nasionalisme yang tinggi.

Agussalim Sitompul (Sejarawan HMI) menyatakan, dua tugas yang diemban HMI sejak kelahirannya hingga sekarang, yaitu tugas negara dan agama. Memberi isyarat bahwa HMI merupakan bagian mutlak yang terus-menerus senafas kehidupan bangsa Indonesia. Isyarat tersebut terbaca dari rumusan tujuan HMI di awal berdirinya yaitu,

“Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat Rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.”

²*Ibid.*, hlm. 36.

Demikian menunjukkan HMI telah menempati posisi sebagai kader bangsa Indonesia dalam dimensi dulu, sekarang, dan yang akan datang. Konfigurasi politik, pendidikan, ekonomi, agama dan kebudayaan yang menjadi latar lakang berdirinya HMI, telah mengantar dan menempatkan pula HMI sebagai organisasi pembaruan.³

Victor Tanja mengatakan bahwa sejarah HMI terjalin sangat sempurna dengan sejarah Indonesia modern, sehingga orang akan gagal menimbanginya secara adil jika HMI dilihat sebagai suatu turunan belaka dari gerakan pembaru Muslim dunia Arab atau di anak benua India. HMI sebagai putera Indonesia dan Muslim sejati, sejak awal telah berusaha menemukan jawabannya dengan cara sendiri, agar dengan demikian dapat membangun identitasnya di dalam kerangka Indonesia.⁴

Di HMI keberagaman pemikiran akan ditemukan, seluruh pemikiran didiskusikan, bahkan tidak ada sekat mazhab dan dikembalikan pada tiap kadernya dan dianjurkan saling toleran dengan mengkaji, menyelidiki serta memahami konteksnya. Persoalan-persoalan kecil atau sepele seperti fiqhi, tidak dijumpai di HMI sebab pembahasan itu sampai kiamat tidak pernah selesai perbedaannya.

Hal yang dikaji di HMI seputar kebangsaan, keislaman, nasional, internasional, serta pembahasan pokok lainnya dalam Islam yang belum tersentuh secara serius sampai saat ini. Sehingga wajar pasca dari HMI kader dan alumni

³Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008), hlm. 1.

⁴Victor Tanja, *HMI Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1982), hlm. 169.

HMI dapat bereksplorasi baik ke lembaga masyarakat yang beragam termasuk juga pada partai politik, dunia akademik dan lainnya, dapat ditemukan alumni HMI. Dalam Anggaran Dasar (AD) HMI, pasal 6, bahwa sifat HMI yaitu independen, pasal 7, status HMI adalah organisasi mahasiswa, pasal 8, fungsi HMI sebagai organisasi kader, dan pasal 9, peran sebagai organisasi perjuangan.⁵ Demikian, sangat nampak upaya pembentukan karakter bangsa pada proses perjuangan yang rumit di organisasi HMI.

Di HMI terhimpun calon ilmunan, intelektual, cendekiawan, sarjana. Identitas, tugas dan fungsi mahasiswa, menjadi bahan kesadaran sejak memasuki pendidikan dasar HMI, atau Latihan Kader 1 (LK1) HMI. Sebagai organisasi kader merupakan fungsi HMI, yang dipersiapkan mengeksplorasi pemikiran-pemikiran yang relevan, nasional, regional, global dalam menjawab tantangan zaman. Proses demikian menumbuhkan karakter bangsa pada kader-kader HMI

Secara praktis, alumninya berhasil mengisi berbagai aspek, sosial, akademisi, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lainnya. Di tingkat birokrasi pemerintahan misalnya, mulai dari kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, menteri, wakil presiden, dan sebagainya. Di akademisi, melahirkan banyak guru besar, guru bangsa, dan berkiprah di luar negeri serta pemikir-pemikir unggul. Fakta ini merupakan keberhasilan HMI membangun karakter kadernya.

Pertanyaan selanjutnya, perkaderan di organisasi mahasiswa seperti HMI, merupakan lembaga pendidikan mahasiswa ekstra kampus. HMI mampu melahirkan generasi-generasi bangsa yang berkarakter yang dibuktikan oleh

⁵PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII*, (Jakarta: PB HMI, 2010), hlm. 59-60.

alumni-alumninya, berarti HMI merupakan lembaga pendidikan dan lembaga perkaderan bagi mahasiswa dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk membangun karakter bangsa.

Hanya saja beberapa dekade ini banyak birokrasi kampus mengalami sikap iri dan ketakutan dalam persaingan memproduksi manusia unggul, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghalangi mahasiswanya menimba ilmu dan berproses di HMI. Mulai dari propaganda dosen, pemfitnaan, jadwal kuliah yang padat, serta tugas-tugas pada mahasiswanya yang memberatkan demi menghalangi waktunya tidak berorganisasi ekstra kampus, termasuk organisasi di HMI. Mestinya kampus membuka ruang ekspresi yang membebaskan pada setiap mahasiswa untuk menempa dirinya lebih berkualitas dengan berbagai cara.

Pertanyaannya, apakah semestinya kebijakan di kampus harus memberi ruang yang besar pada mahasiswanya untuk mengembangkan dan mengasah berbagai potensinya di organisasi ekstra kampus seperti di HMI?. Atau sistem perkuliahan di kampus dalam rangka melahirkan output yang berkarakter pada mahasiswa atau pada peserta didik sebaiknya bermitra atau mengadopsi beberapa model pembangunan karakter bangsa pada sistem perkaderan HMI.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, berkesinambungan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Karena terlalu luasnya masalah, maka peneliti kualitatif akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Batasan penelitian dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.⁶

Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman terhadap makna judul dalam penelitian ini, maka peneliti menekankan penelitian dalam lingkup pembangunan karakter bangsa dan sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta. Jadi penelitian ini akan di pusatkan pada sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta dalam membentuk karakter bangsa.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana konsep karakter bangsa dalam perspektif HMI ?
- b. Bagaimana implementasi membangun karakter bangsa pada sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 285.

- a. Mendeskripsikan karakter bangsa dalam konsep HMI.
- b. Mendeskripsikan implementasi pembangunan karakter bangsa pada sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

(1) Hasil penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori tentang pendidikan karakter bangsa. Teori-teori tentang pendidikan karakter bangsa yang berkembang belakangan ini di antaranya teori dari Thomas Lickona, yang menguraikan dengan luas tentang karakter bangsa. Membandingkan teori karakter bangsa dalam perspektif pendidikan formal dengan teori karakter bangsa dalam perspektif HMI. (2) Memahami implementasi pembentukan karakter bangsa dalam sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

Pada ranah praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan yang dapat digunakan dalam mengembangkan: (1) sistem pendidikan yang berkarakter dan suasana pendidikan yang memberdayakan, membebaskan potensi anak didik untuk berkembang sesuai bakatnya. (2) memahami kekayaan keragaman dan kultur serta SDA di Indonesia dan berusaha memecahkannya dengan kurikulum pendidikan yang berbasis kebutuhan.

B. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Pemilihan dan penggalan uraian menjadi bab demi bab berdasarkan uraian tematis bertujuan agar tesis ini lebih mudah dipahami. Pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuan dari pendahuluan ini adalah agar pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian ini terutama alasan-alasan pentingnya sistem perkaderan HMI untuk diteliti. Isi penelitian semuanya diuraikan dalam bab IV.

Bab ke-Dua, memuat kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu untuk memberi gambaran posisi penelitian yang dikerjakan di antara penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan kerangka teori dimaksudkan sebagai kerangka berpikir untuk merumuskan suatu model yang ingin di uji.

Bab ke-Tiga, metode penelitian.

Bab ke-Empat, menguraikan konsep karakter bangsa dalam perspektif HMI. Menguraikan implementasi pembangunan karakter bangsa pada sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta.

Bab ke-Lima, berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditarik dari keseluruhan uraian penelitian ini. Pengambilan kesimpulan ini harus dilakukan untuk menemukan jawaban sebagai inti dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini karena sesungguhnya dalam suatu tesis kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Bab kelima ini juga sebagai bab penutup.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan melihat sampai sejauh mana masalah ini pernah ditulis orang lain, kemudian akan ditinjau, apa yang ditulis?, bagaimana pendekatan dan metodenya?, apakah ada persamaan dan perbedaaan?. Diharapkan dengan penelitian terdahulu ini penulis dapat melakukan penulisan yang berbeda. Ada beberapa karya tulis berupa hasil penelitian, tesis, dan disertasi yang membahas atau menyinggung tentang Karakter Bangsa dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Pertama, Saifullah SA, Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam. Pokok masalah yang dibahas adalah “Persepsi HMI tentang nasionalisme”. Saifullah SA dalam penelitian ini melakukan pendekatan sejarah dan pendekatan ideologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana termuat dalam beberapa pidato Dies Natalis HMI yang masih dalam bentuk konsepsional, pengejawantahannya dalam gerakan angkatan 1966 untuk memperjuangkan orde baru. Bagaimana pula hubungannya antara Islam dan nasionalisme.

Kedua, pada tahun 1979, Victor I. Tanja, dalam bukunya “*Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*”. Buku ini berangkat dari disertasi, yang dipertahankannya pada Dewan Pengajar *De Hartford Seminary Foundation, Harford, Connecticut, Amerika Serikat*, untuk

melengkapi syarat mencapai gelar *Doctor Of Philosophy (Ph.D.)*. Judul asli penelitian ini adalah *“Islamic Student’s Association: Its History and Its Place Among Muslim Reformist Movements in Indonesia”*.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan HMI, kegiatannya, kedudukan ideologi HMI, dan kedudukannya di tengah gerakan pembaru Muslim di Indonesia, sikap HMI tentang pembangunan, hubungan antar agama, sekularisasi, serta persoalan-persoalan yang terkait.

Pendekatan yang dipakai adalah sejarah, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggarap dokumen-dokumen HMI dan wawancara. Informan penelitian di antaranya Hamka, Ahmad Tirtosudiro, Lafran Pane, H.M. Rasyidi, Nurcholish Madjid, dan Endang Saifuddin Anshari.

Victor dalam kesimpulan penelitiannya mengatakan bahwa sejarah HMI terjalin sangat sempurna dengan sejarah Indonesia modern, sehingga orang akan gagal menimbanginya secara adil jika HMI dilihat sebagai sebuah turunan belaka dari gerakan pembaru Muslim dunia Arab atau di anak benua India. HMI sebagai putera Indonesia dan Muslim sejati, sejak awal telah berusaha menemukan jawabannya dengan cara sendiri, agar dengan demikian dapat membangun identitasnya di dalam kerangka Indonesia.⁷ Bangunan pemikiran ini mengenai HMI, keislaman, keindonesiaan, pembaruan.

Penelitian Victor Tanja menganalisis HMI dalam pendekatan sejarah, berbeda dengan penulis dalam tesis ini, menggunakan pendekatan pendidikan dengan melihat perkaderan HMI dari segi pembentukan karakter bangsa.

⁷Victor Tanja, *HMI.....*, hlm. 169.

Ketiga, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, karya Hasanuddin M. Saleh. Buku ini pertama terbit tahun 1996, merupakan hasil penelitian tesis pada program studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, yang berjudul “*Dinamika HMI dalam Isu Asas Tunggal Pancasila*”. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, kemudian gambaran umum tentang HMI digunakan pendekatan kepustakaan. Data yang dibutuhkan melalui wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kader HMI sejak awal berdirinya selalu bersikap akomodatif, namun kejutan terjadi tahun 1980-an HMI bergeser bersikap kritis berhadapan dengan upaya rekayasa ideologi politik Orde Baru yaitu Asas Tunggal yang memaksa organisasi masyarakat termasuk HMI yang semulanya berasas Islam, harus berganti asas yaitu Pancasila. Dampak dari itu tahun 1980-an terjadi polarisasi dalam tubuh HMI disebabkan cara pandang dan sikap yang berbeda ditunjukkan kader HMI.

(2) Sebelum Asas Tunggal, pemerintah sudah lama berusaha menguasai organisasi rakyat untuk melanggengkan kekuasaan. Dibentuknya KNPI merupakan organisasi pemuda yang mendapat perlindungan langsung dari pemerintah berdampak pada kurangnya andil HMI sebaagi organisasi mahasiswa dan pemuda yang sebelumnya mendapat akses yang baik dalam proses politik.

(3) HMI telah kehilangan relevansi baik dalam aspek politik maupun sosial. Kurangnya perhatian HMI pada politik praktis mulai berkurang akibat pemerintah menerapkan konsep NKK/BKK yang menuntut mahasiswa lebih berorientasi pada studi. (4) Dalam aksi-aksi sosial dan bidang keilmuan, peran HMI mulai juga menurun dan diambil alih oleh aktivis LSM dan kelompok-

kelompok studi. (5) Ternyata sumbangan HMI terhadap perubahan sosial dalam mewujudkan komunitas spiritual Islam dinilai masih sangat minim.

(6) Proses perkaderan HMI dinilai kurang memadai untuk mewujudkan insan cita yang dirumuskan HMI sendiri. Dengan tesis ini sangat kritis pada dinamika HMI dari intelektual, politik, perkaderan. Hanya saja belum mengurai pergeseran gerakan HMI ke penguatan internal kader melalui perkaderan yang sistematis tidak dibahas dalam tesis ini. Penelitian Hasanuddin ini memakai pendekatan sejarah dan politik, sedangkan penulis memakai pendekatan pendidikan yang menyoroatnya pada karakter bangsa. Dengan demikian nampak perbedaan penulis dalam tesis ini yang memprioritaskan dinamika perkaderan HMI dan model pembentukan karakter bangsa.

Keempat, *HMI MPO, dalam kemelut modernisasi politik di Indonesia*, karya M.Rusli Karim. Buku ini pertama terbit tahun 1997, merupakan hasil penelitian tesis di Universitas Kebangsaan Malaysia, tentang HMI yang diselesaikan tahun 1995. Terdiri dari 6 Bab yaitu : (1) *Pendahuluan*, (2) *Agama, Modernisasi dan Sekularisasi*, (3) *Aspirasi Politik Umat Islam Indonesia*, (4) *Peranan HMI dalam Era Orde Baru*, (5) *HMI MPO dalam konstalasi arus modernisasi politik Indonesia*, (6) *Kesimpulan*.

Tesis ini membahas dinamika HMI, politik dan campur tangan pemerintah yang mengakibatkan HMI terbagi dua. Dampak ini bersifat politis dan kader-kader HMI banyak meluangkan waktunya dalam persoalan politik tanah air dan dualisme HMI. Namun dalam tesis ini ada juga yang diungkap dinamika orientasi HMI dari politik kembali ke intelektual. Penelitian ini tidak menyinggung

persoalan kaderisasi HMI serta menguraikan HMI dalam pandangan sejarah dan politik. Berbeda dengan penulis dalam tesis ini yang melihat perkaderan HMI dalam upaya pembentukan karakter bangsa.

Kelima, *“Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: pemikiran KeIslaman-KeIndonesiaan HMI (1947-1997)”*. Penulis: Agussalim Sitompul. Buku ini pertama diterbitkan tahun 2002, dari disertasi berjudul *“Pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam tentang keIslaman dan keIndonesiaan 1947-1997*, pada program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diajukan pada ujian promosi doktor tanggal 2 Juli 2001.

Disertasi ini merupakan penelitian sejarah, karena itu pendekatan yang digunakan juga pendekatan sejarah dan hermeneutika. Penelitian ini mengutamakan sumber tertulis berupa dokumen-dokumen, naskah, sejumlah literatur yang memuat pemikiran, ide-ide, gagasan, dan konsep HMI tentang keislaman-keindonesiaan. Penelitian ini menganalisa partisipasi dan peran yang diambil HMI dalam ikut membentuk keperibadian dan identitas bangsa Indonesia di tengah-tengah realitas sosial budaya dengan ciri pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan dalam kurung waktu 50 tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersambungan pemikiran keIslaman dan keIndonesiaan di HMI sudah ada sejak pertama kali HMI didirikan di STI Yogyakarta oleh Lafran Pane, dkk. Dalam penelitian ini tidak diurai mendalam sistem perkaderan HMI dalam upaya pembangunan karakter bangsa. Penelitian Agussalim Sitompul dalam disertasi ini menguraikan HMI dalam pendekatan sejarah dan menafsirkan dokumen HMI dengan pendekatan

hermeneutika, berbeda dengan penulis dalam tesis ini, menggunakan pendekatan pendidikan dengan melihat HMI dari segi pembentukan karakter bangsa serta menggalinya dengan penelitian lapangan.

Keenam, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligencia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Karya Yudi Latif. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 2005, hasil disertasi doktoral (S3) di Australian National University (ANU) yang berjudul *The Muslim Inteligencia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th century*. Yudi Latif membagi karakter pemikir Muslim Indonesia, atau disebut intelegensia, menjadi 6 (*enam*) Generasi, Nama-nama yang diungkap di sini tentunya cukup banyak, namun untuk mewakili sesuai dengan kepentingan disertasi Yudi Latif, maka dipilihlah beberapa nama.

1. Generasi pertama inteligensia Muslim Indonesia seperti Tjokroaminoto, Agus Salim dan sebagainya.
2. Generasi kedua intelegensia Muslim Indonesia adalah M. Natsir, M. Roem dan K. Singodimedjo pada 1950-an
3. Generasi ketiga seperti Lafran Pane, A Tirtosudiro dan Jusdi Ghazali pada 1960-an merupakan anak revolusi kemerdekaan sehingga cenderung kooperatif.
4. Generasi keempat seperti Nurcholish Madjid, Imaduddin Abdurrahim dan Djohan Efendi pada 1970-an.
5. Generasi kelima, yakni Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada awal 1990-an dengan Habibie sebagai ikon sentralnya. Pengunduran diri Soeharto dan diganti Habibie pada 1998 lantas

membuka peluang tokoh ICMI untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik yang besar.

6. Generasi keenam yang sebagian anggotanya lahir pada 1970-an dan 1980-an seperti Ulil Abshar Abdalla, Fachri Hamzah, dll.

Dari pengelompokan ini terdapat beberapa pemikir Islam Indonesia yang lahir dari HMI, secara terus menerus. Demikian merupakan sumbangsih HMI yang mampu membuat kader-kadernya memiliki karakter bangsa. Karakter bangsa tersebut sudah banyak yang pemikirannya dikategorikan pemikir dalam kancah global atau internasional, yang dibuktikan beberapa tesis dan disertasi mahasiswa asing hasil dari pemikiran generasi bangsa Indonesia. Karakter bangsa diuraikan Yudi Latif dalam penelitian ini, namun tidak fokus pada HMI, namun berbagai organisasi yang diuraikan, sedangkan peneliti memfokuskan pada HMI.

Ketujuh, Radikalisasi Gerakan Mahasiswa Kasus HMI MPO, karya Ubedilah Badrun. Buku ini pertama terbit tahun 2006, merupakan karya penelitian tesis dalam S2 di Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Tujuan tesis ini mengulas dan memotret gerakan mahasiswa dan terutama terhadap HMI MPO dalam menghadapi fase-fase kebangsaan. Hasil dalam ujian penelitian tesis ini adalah bahwa radikalisasi gerakan mahasiswa sebagai bagian dari realitas politik di Indonesia, begitupun dengan mahasiswa HMI MPO.

Kedelapan, Buku Lafran Pane: Jejak Hikayat dan Pemikirannya, ditulis oleh Hariqo Wibawa Satria, pertama kali terbit tahun 2010. Karya ini berawal dari Skripsi di UIN Sunan Kalijaga. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap sisi

Lafran Pane dan tradisi pemikirannya. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah *sosiohistoris* atau pendekatan sejarah, dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah keperibadian dan gagasan-gagasan Lafran Pane dengan tindakan nyatanya dalam berupaya dan berhasil mencetak para intelektual Muslim Indonesia. Melalui organisasi HMI yang diprakarsainya, telah berhasil mempersembahkan mutiara-mutiara terbaik bangsa.

Kesembilan, Abu Tholib (Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2012.) Dalam penelitian berjudul *Strategi Pembentukan Karakter Siswa di SMA Al-Irsyad dan SMAN 1 Kota Tegal*. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Al-Irsyad mengembangkan empat cara dalam pembentukan karakter yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengondisian. Keempat cara ini telah dilaksanakan dengan sangat baik. Sedangkan SMA Negeri 1 Kota Tegal mengembangkan tiga cara pembentukan karakter yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan keteladanan. Tesis ini sama dengan penulis meneliti di lapangan dan memakai pendekatan fenomenologi, hanya saja Abu Tholib mengkaji karakter pada ranah siswa di sekolah, sedangkan penulis meneliti pada organisasi ekstra kampus yang berbasis mahasiswa.

Kesepuluh, Dadah Paridah (Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2012.) Dalam penelitian berjudul

Pendidikan Berbasis Karakter di Madrasah dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Siswa (Studi di MTs. Al-Ihsan Dangdeur Parungponteng Tasikmalaya). Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan berbasis karakter yang dilakukan pada MTs Al-Ihsan Dangdeur Parungponteng Tasikmalaya, dalam pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam berbagai aspek, antara lain, (1) Pendidikan berbasis karakter diintegrasikannya ke dalam proses belajar mengajar, meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar.

(2) Pendidikan berbasis karakter yang diintegrasikan ke dalam manajemen sekolah yang meliputi, pendidikan karakter dalam manajemen guru itu sendiri, pendidikan karakter dalam manajemen anak didik, pendidikan karakter dalam manajemen keuangan, dan pendidikan karakter dalam manajemen sarana dan prasarana, dan ketiga: pendidikan karakter dalam kegiatan pembinaan siswa, kegiatan tersebut di antaranya, kegiatan yang membentuk kepribadian anak, memiliki jiwa sosial.

Sedangkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa adanya keterpaduan pendidikan berbasis karakter dalam proses belajar mengajar, manajemen sekolah, dan keterpaduan dalam pembinaan siswa, pendidikan berbasis karakter berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku siswa. Penelitian tersebut memakai jenis penelitian kuantitatif dan mengkaji karakter pada ranah siswa di sekolah, sedangkan penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang meneliti pada organisasi ekstra kampus yaitu HMI.

Kesebelas, Denik Isrowati (Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2013.) Dalam penelitian berjudul *Halaqah Tarbawiyah Sebagai Strategi Pengembangan Karakter Siswa di SMPIT Ihsanul Fikri Mungkid Kabupaten Magelang*. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Hasil penelitian ini adalah kegiatan Halaqoh Tarbawiyah telah dilakukan secara rutin di SMPIT Ihsanul Fikri dengan sistem yang komprehensif, dengan melibatkan seluruh komponen. Siswa menilai bahwa halaqoh membangun hubungan dekat dengan guru yang berfungsi sebagai pembimbing, pemerhati, pengontrol terhadap perkembangan karakter siswa. Hanya Dalam rana evaluasi menuju pengembangan karakter masih lemah dalam melakukan administrasi dan dokumentasi.

Tesis ini memang mengkaji karakter pada lembaga pendidikan yang bersifat eksternal sekolah, dan karakter yang dibicarakan merupakan karakter siswa yang lebih bersifat pribadi dan emosional. Perbedaan penelitian ini adalah cenderung meneliti pada ranah organisasi mahasiswa, serta mengkaji karakter bangsa pada ranah yang lebih umum dan pada ranah HMI.

Keduabelas, Muh As'adi (Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2015.) Dalam penelitian berjudul *Strategi Peran Kegiatan Intrakurikuler, Ekstrakurikuler, dan Kokurikuler dalam Pembentukan Karakter Siswa di MAN Magelang*. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif bersifat deskripti analitik, dengan menggunakan pendekatan Psikologi dan komprehensif.

Hasil penelitian ini ditemukan: (1). Pembentukan karakter siswa di MAN Magelang dalam kegiatan intrakurikuler yaitu melalui kegiatan belajar mengajar, pembiasaan keagamaan, dan tata tertib madrasah dapat melahirkan karakter yang religius, disiplin, kerja keras, jujur, rasa ingin tahu, kreatif, mandiri, peduli sosial, cinta tanah air, dan tanggungjawab. (2). Dalam kegiatan ekstrakurikuler terdapat kegiatan pramuka, rabana/hadrah, seni tari topeng ireng, dan tenis meja dapat menumbuhkan karakter yang religius disiplin, kerja keras, jujur, rasa ingin tahu, kreatif, mandiri, peduli sosial, cinta tanah air, dan tanggungjawab.

(3) Dalam kegiatan Kokurikuler, yang meliputi penugasan siswa baik tertulis, lisan, praktek, perawatan jenazah, serangkaian kegiatan mabit, pengajian kelas, dan keputrian dapat menumbuhkan karakter yang religius, disiplin, kerja keras, jujur, rasa ingin tahu, kreatif, mandiri, peduli sosial, cinta tanah air, dan tanggungjawab. Peneliti dalam tesis tersebut menguraikan pembentukan karakter dengan pendekatan psikologi, sedangkan penulis dalam tesis ini menggunakan pendekatan fenomenologi.

Ketigabelas, Tonang Mallongi, Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Disertasi ini dipertahankan di hadapan dewan penguji tanggal 1 April 2015, untuk mendapatkan gelar Doktor dalam Pemikiran Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap respon HMI terhadap pergumulan politik di Indonesia mulai dari Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, sekaligus menemukan sebab-sebab keretakan HMI DIPO dan HMI MPO. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan sejarah dan hermeneutik. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi.

Pokok masalah yang dibahas adalah “Respon Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Terhadap Pergumulan Politik di Indonesia Pasca Reformasi”. Dalam tesis ini mengungkap berbagai pikiran-pikiran HMI dalam merespon situasi dan dinamika tanah air, termasuk politik. Sistem perkaderan HMI tidak disinggung, namun kerangka ideologis perjuangan HMI dibahas, termasuk Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI. Karakter bangsa juga dalam disertasi ini sangat nampak pada kader HMI waktu itu.

Disertasi ini banyak bersinggungan dengan HMI, sejarah dan politik, jadi berbeda dengan penulis yang menguraikan dengan perspektif pendidikan dengan memprioritaskan penelitian pada konsep karakter bangsa dalam perkaderan HMI. Penulis kemudian membandingkan di lapangan yang terjadi masa kini dengan pendekatan fenomenologi.

Keempatbelas, Implementasi Pembentukan Karakter Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Tanggul Jember, peneliti Depict Pristine A, dan Endang Suryani. Penelitian ini adalah jurnal pendidikan karakter yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun V, Nomor 1, April 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data dengan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini bahwa implementasi pembentukan karakter budi pekerti di SMP Negeri 1 Tanggul Jember di antaranya adalah melalui kurikulum yang terdiri dari komponen mata pelajaran, komponen muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban pembelajaran. Kemudian melalui Program

Pelaksanaan Pembentukan Karakter Budi Pekerti dengan implementasi yaitu, pengintegrasian nilai dan etika pada mata pelajaran, Internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh semua warga sekolah (kepala sekolah, guru dan orang tua). Pembiasaan dan latihan, pemberian contoh dan teladan, penciptaan suasana berkarakter di sekolah, dan pembudayaan.

Kelimabelas, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa, peneliti Binti Maunah. Penelitian ini adalah jurnal pendidikan karakter yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun V, Nomor 1, April 2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data primer dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu kepala sekolah, para waka, wali kelas, dan siswa.

Kesimpulan penelitian dalam tesis ini bahwa pembentukan karakter anak dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu internal sekolah dan eksternal sekolah. Kedua, strategi internal sekolah dapat dilakukan melalui empat pilar, yaitu kegiatan proses belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya sekolah, kegiatan pembiasaan, kegiatan ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler. Ketiga, strategi eksternal, dengan dilakukann melalui keluarga dan masyarakat. Keempat, kalau semua strategi di atas dilaksanakan dengan baik, maka karakter anak terbentuk dan kuat.

Keenambelas, Strategi Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP N 9 Yogyakarta, peneliti Reza Armin Abdillah Dalimunthe. Penelitian ini adalah jurnal pendidikan karakter yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan

dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun V, Nomor 1, April 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu kepala sekolah, siswa, dan guru.

Kesimpulan penelitian ini pertama, strategi pembelajaran pendidikan karakter di sekolah dapat diintegrasikan dalam 4 bentuk, yaitu, (1) pengintegrasian nilai dan etika pada mata pelajaran; (2) internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh semua warga sekolah; (3) pembiasaan dan latihan, pemberian contoh dan teladan; (4) penciptaan suasana berkarakter di sekolah, serta pembudayaan. Kedua, implementasi pendidikan karakter di SMPN 9 Yogyakarta dapat dilakukan melalui dua hal yaitu, pertama, keterpaduan antara pembentukan karakter dengan pembelajaran, kedua, manajemen sekolah dan ekstrakurikuler.

Ketujuhbelas, Ali Miftakhu Rosyad (Tesis, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana (UNY), 2017.) Dalam penelitian berjudul *Aktualisasi Pendidikan Karakter Berbasis Kultur Sekolah dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Juntinyuat Kabupaten Indramayu*. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pada proses perencanaan pembelajaran yang tercantum dalam RPP dan silabus, guru merancang dan memfasilitasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan melalui proses belajar-mengajar yang meliputi disiplin, demokrasi, religius, kerjasama, peduli sosial,

rasa hormat, jujur dan tanggungjawab. Proses pelaksanaan pembelajaran guru mengaktualisasikan proses pelaksanaan pembelajaran IPS dengan pendekatan dan metode komprehensif. Penilaian pembelajaran diketahui kompetensi sikap yang telah dikuasai siswa yang meliputi kognisi, afeksi, dan konasi dengan menggunakan rubrik penilaian dan tindakan lanjut.

(2) Peran kultur sekolah sebagai pondasi proses sosialisasi, internalisasi, aktualisasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS yang tercermin dalam tiga aspek pokok yaitu persepsi mengenai suasana sekolah, perilaku murid, dan kepemimpinan kepala sekolah. (3) Aktualisasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS menunjukkan bahwa, (a) aktualisasi pendidikan karakter dalam proses pendidikan dilakukan dengan keteladanan, menegur, memberi tahu, memberi sangsi, dan memberi tugas, (b) nilai-nilai karakter yang telah diaktualisasikan dengan baik dalam perilaku sehari-hari siswa di SMP Negeri 2 Juntinyuat Kabupaten Indramayu adalah nilai demokrasi, religius, kerjasama, peduli sosial, rasa hormat dan tanggungjawab. Penelitian ini meliputi siswa SMP, sedangkan penulis dalam tesis ini meneliti dalam skala mahasiswa dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Berdasarkan beberapa karya tulis di atas tergambar bahwa karya tulis tentang HMI dan karakter sudah cukup banyak dengan berbagai latar belakang dan perspektif yang berbeda-beda. Hampir semua karya tulis tentang HMI senantiasa mengikutkan pembahasan tentang intelektual, gagasan kader HMI terhadap situasi bangsa dan negara. Serangkaian dengan itu maka nampak bahwa perkaderan HMI mempunyai banyak andil dalam membentuk karakter bangsa

kader-kader HMI. Sedangkan penelitian tentang karakter juga sudah banyak, tetapi lebih condong penelitiannya hanya pada karakter individu dan budi pekerti keseharian di lembaga-lembaga sekolah, atau lembaga formal lainnya yang sasarannya pada siswa sekolah.

Dibandingkan dengan kajian di atas, dengan kajian pada tesis ini sangat berbeda. Membaca tinjauan pustaka di atas apabila ditarik kesimpulan dengan melihat tesis dan disertasi tentang HMI dan karakter, penulis belum melihat adanya pembahasan khusus mengenai sistem perkaderan HMI dalam membangun karakter bangsa apalagi pembahasan tentang perkaderan HMI Cabang Yogyakarta dalam membangun karakter bangsa.

Penelitian tentang HMI di atas lebih cenderung memakai pendekatan sejarah dan hermeneutika, sedangkan penulis memakai pendekatan pendidikan yaitu karakter bangsa. Jadi penelitian ini merupakan kelanjutan dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan orang lain tentang HMI, namun penelitian ini memiliki kekhasan pada dinamika perkaderan HMI dan pembangunan karakter bangsa. Penelitian ini juga mengarah pada pembentukan karakter generasi terpelajar yaitu mahasiswa yang memiliki tugas pada umat, bangsa dan negara yang lebih kompleks.

B. Kerangka Teori

Teori bisa diartikan sebagai penalaran yang wujudnya merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Kerlinger yang dikutip M. Djamal bahwa teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis mengenai gejala dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁸

Teori bagi ilmu pengetahuan sangat penting, karena tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja. Teori berfungsi sebagai generalisasi yaitu menyimpulkan hubungan antara fakta-fakta atau kelas-kelas fakta sosial. Teori juga dapat digunakan sebagai kerangka yang memberi pembatasan pada fakta-fakta kongkrit yang sangat banyak jumlahnya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian kerangka teori ini diperlukan untuk membantu dalam penentuan tujuan dan arah penelitian serta dalam memilih konsep-konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesis-hipotesis.⁹

Secara umum, teori memiliki tiga fungsi yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala. Fungsi teori pertama digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang diteliti. Fungsi teori yang kedua yaitu prediksi yang diperlukan untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Fungsi teori yang ketiga adalah

⁸M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 199.

⁹*Ibid.*

control digunakan untuk menyandra dan membahas hasil penelitian yang selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah.¹⁰

Teori merupakan pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris, sehingga bisa berfungsi menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena. Teori bagi peneliti kualitatif harus lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan, kemudian juga sebagai bekal untuk memahami konteks sosial dengan lebih luas dan mendalam.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang populer dalam ilmu sosial, pendidikan. Ciri khas studi fenomenologi yaitu terdapat penekanan pada fenomena yang ingin dieksplorasi berdasarkan sudut pandang konsep atau ide, seperti ide pendidikan tentang “karakter bangsa”. Kemudian eksplorasi fenomena terhadap kelompok individu yang telah terlibat dalam fenomena itu. Maka teori pendidikan terbuka untuk memahami fenomenologi karakter bangsa sebagai arena pembentukan manusia-manusia yang memiliki kualitas.

Untuk memberikan gambaran konseptual tentang fokus penelitian ini perlu disajikan landasan teori, atau konsep dasar mulai konsep pendidikan, konsep karakter, bangsa, budaya, agama, dan lainnya. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu dari tokoh pendidikan nasional yang meletakkan pembentukan karakter bangsa pada peserta didik sebagai hal yang utama. Kemudian Thomas Lickona juga merupakan salah satu dari tokoh pemikir dan aktivis pendidikan karakter saat ini.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 199-200.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 79-86.

Kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan karakter dapat dipahami melalui cita-citanya untuk meletakkan pengajaran dan pendidikan dengan dasar kebangsaan, supaya tercipta watak atau karakter bangsa.

1. PENDIDIKAN

Ki Hajar Dewantara memposisikan pendidikan nasional Indonesia sebagai watak bangsa Indonesia yang merupakan gairah atau roh pendidikan nasional yang juga terkandung tabiat-tabi'at yang dianggap baik dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia, meskipun bisa jadi bangsa lain memandang watak-watak itu kurang baik atau tidak baik, demikian itu menunjukkan bahwa sifat pendidikan itu banyak dan berkaitan dengan keadaan alam dan perikehidupan manusia di masing-masing negara. Namun paling pokok dalam pendidikan nasional Indonesia yaitu mengadakan pendidikan yang sesuai kebutuhan, kebangsaan, kodrat alam, kemanusiaan, dan perikehidupan kita sendiri.¹²

Pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran atau intelektual, dan fisik peserta didik yang saling berinteraksi di antara mereka, demi mengembangkan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan peserta didik yang dididik sesuai dengan dunianya.¹³

Sedangkan dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 Th. 1989) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan

¹²Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan*, (Cet. II; Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm. 90.

¹³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. XVII; Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2010), hlm. 338.

bagi peranannya di masa yang akan datang.¹⁴

Mencermati uraian di atas tentang pengertian pendidikan beserta tujuannya maka dipahami bahwa sebelum negara Republik Indonesia berdiri sampai hari ini, bangsa Indonesia telah merumuskan karakter bangsanya sendiri, melalui tokoh-tokohnya yang melakukan aktivitas-aktivitas mendidik. Di mana karakter bangsa itu lahir dalam lingkup keindonesiaan.

Sedangkan teori pendidikan dari tokoh-tokoh Barat di antaranya dalam pandangan Langeveld, mengatakan mendidik adalah mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Pandangan yang senada juga diungkap oleh Hoogeveld, berpendapat bahwa mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. Lebih lanjut Rousseau mengartikan pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.¹⁵

2. BUDAYA

Kultur atau kebudayaan merupakan buah dari keadaban manusia, adab ialah sifat keluhuran budi, sehingga hasil dari keluhuran budi kemudian dinamakan budaya. Kebudayaan selalu bersifat tertib, bermanfaat, luhur, memberi kedamaian, senang, bahagia. Sifat-sifat itu tercermin dalam kehidupan manusia yang sudah beradab, seperti dalam pengelolaan kekayaan alam, pemerintahan negeri, adat-istiadat, kerajinan, cara membuat rumah, pakaian, dan lainnya.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyanti, *Ilmu Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 69.

Mewujudkan itu semua dengan mendidik anak-anak atau generasi dalam segala kecakapan dan perbuatan. Dengan demikian sifat dari kultur atau kebudayaan selalu menjadi tanda dan ukuran tentang rendah atau tinggi keadaban dari masing-masing bangsa.¹⁶

Tiga macam keadaban yaitu pertama, munculnya adat baru, kedua, berubahnya adat lama, ketiga, kekalnya sementara adab atau keadaban. Terkadang terjadi penghalangan terhadap pergantian adat ketika itu dianggap merugikan, sebaliknya terkadang ada yang menganjurkan pergantian adat bahkan biasa ditempuh dengan sikap radikal, revolusioner, karena dirasa harus ada pembebasan diri dari ikatan adat yang menghalangi kemajuan.¹⁷

Dalam menghadapi zaman dan alam yang berubah, terdapat pengaruh pada jiwa masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri, maka itu merupakan watak. Watak setidaknya terbagi tiga, yaitu watak konservatif, watak liberal, watak radikal. Dari berbagai watak tersebut, menuntun masyarakat ke bidang sosial, politik, agama, seni, ekonomi, pengetahuan.¹⁸ Budi yang melahirkan kebudayaan, merupakan jiwa yang sudah matang, sudah cerdas, dari itu maka sanggup mencipta atau berkarya.¹⁹

Hidup dan berkembangnya kebudayaan seperti hidup berkembangnya manusia, yaitu yang berkarya atau mencipta. Kebudayaan ada waktunya lahir, tumbuh, maju, berkembang, berbuah, menjadi tua, mundur, sakit-sakitan. Kebudayaan ketika bertemu dengan kebudayaan lain bisa jadi selaras atau

¹⁶Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, (Yogyakarta: Bagian IIA; Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1967), hlm. 27-28.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 34-35.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 65.

berlawanan, ketika selaras, maka itu baik dan bisa ada kemajuan. Sebaliknya ketika berlawanan, bisa menyebabkan terjadinya pengaruh paksaan (kultur imperialisme) maka itu dapat menyebabkan kemunduran atau kematian kebudayaan asli.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa meskipun kebudayaan selaras atau berlawanan dengan budaya lain, kebudayaan yang lemah dan sakit-sakitan biasanya mudah terdesak oleh kebudayaan lain, yang kuat dan sehat. Namun ketika kebudayaan kuat lalu bertemu kebudayaan asing, kemudian disatukan atau terjadi asimilasi, maka kebudayaan asing bisa diolah oleh kebudayaan yang asli. Dengan demikian anak-anak dan turunannya tidak merupakan “copy” atau tidak menjiplak kebudayaan, tetapi mewujudkan turunan baru.²⁰

3. KARAKTER

a. Makna Karakter

Watak atau karakter merupakan paduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi ciri khas dalam membedakan orang yang satu dan orang lain. Dalam bahasa Yunani (Griek) dan latin “character”, itu asalnya dari perkataan “charassein”, mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa karakter itu terjadinya karena perkembangan dasar yang telah terkena pengaruh ajar. “Dasar” yang dimaksud adalah bekal hidup atau bakat anak dari alam sebelum dia lahir, yang sudah menjadi satu dengan kodrat hidupnya anak.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 67.

²¹Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan.....*, hlm. 407.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ajar” adalah segala sifat pendidikan dan pengajaran mulai anak dalam kandungan ibu sampai akil balig, yang bisa mewujudkan “intelligibel”, yaitu tabiat yang dipengaruhi oleh matangnya angan-angan. Karakter merupakan keseimbangan antara azaz batin atau jiwa dengan perbuatan lahir, maka baik atau tidak baiknya perangai, tergantung pada kualitas kebatinan. Kebatinan atau jiwa manusia wujudnya merupakan gabungan dari angan-angan, rasa dan kemauan (cipta, rasa, karsa), kemudian matangnya jiwa, kalau jiwa itu memunculkan tenaga, barulah karakter terlihat.²²

Filsuf kontemporer Michael Novak, dalam pengamatannya terhadap karakter merupakan campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, serta kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Tidak ada orang yang memiliki semua kebaikan itu, artinya setiap orang memiliki kekurangan.²³

b. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter

Masnur Muslich dalam bukunya Pendidikan karakter menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan atau pembinaan karakter itu terdapat beberapa faktor, yaitu:

- 1) Guru
- 2) Selebriti/artis
- 3) Pejabat
- 4) Tokoh Masyarakat

²²*Ibid.*, hlm. 408-409.

²³Thomas Lickona, *Educating For Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, alih bahasa Juma Abdu Wamaungu, Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab, Cet. V (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 81.

- 5) Teman Sejawat
- 6) Kedua Orang tua
- 7) Media Cetak
- 8) Media Elektronik.²⁴

c. Teori yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter.

Stephen Covey melalui bukunya *7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif*, menyimpulkan bahwa sebenarnya ada tiga teori utama yang mendasari pembentukan karakter, yaitu :

- 1) Determinisme Genetis, pada dasarnya mengatakan kakek-nenek andalah yang berbuat begitu kepada anda. Itulah sebabnya anda memiliki tabiat seperti ini. Kakek-nenek anda mudah marah dan itu ada pada DNA anda. Sifat ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya dan anda mewarisinya. Lagipula, anda orang Irlandia, dan itu sifat orang Irlandia.
- 2) Determinisme Psikis, pada dasarnya orangtua andalah yang berbuat begitu kepada anda. Pegasuhan anda, pengalaman masa anak-anak anda pada dasarnya membentuk kecenderungan pribadi dan susunan karakter anda. Itulah sebabnya anda takut berdiri di depan banyak orang. Begitulah cara orang tua anda membesarkan anda. Anda merasa sangat bersalah jika anda membuat kesalahan karena anda “ingat jauh di dalam hati tentang penulisan naskah emosional anda ketika anda sangat rentan, lembek dan berbantung. Anda “ingat” hukuman

²⁴Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab tantangan Krisis Multidimensional*, (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 141.

emosional, penolakan, perbandingan dengan orang lain ketika anda tidak berprestasi seperti yang diharapkan.

- 3) Determinisme Lingkungan, pada dasarnya mengatakan bos anda berbuat begitu kepada anda – atau pasangan anda, atau anak remaja yang berandal itu, atau situasi ekonomi anda, atau kebijakan nasional. Seseorang atau sesuatu di lingkungan anda bertanggungjawab atas situasi anda.²⁵

4. NILAI

Membicarakan tentang nilai, menurut Mulyana yang dikutip oleh Maragustam bahwa nilai-nilai (*value*) ialah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Mulyana mengklasifikasi nilai menjadi enam yaitu, Nilai Teoretis, ekonomis, Estetik, Sosial, Politik dan nilai agama.²⁶ Nilai teoretis adalah nilai yang melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai ekonomis yaitu nilai yang terkait dengan pertimbangan untung rugi atau nilai yang mengutamakan kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia.

Nilai estetik yaitu menempatkan nilai tertinggi pada bentuk dan keharmonisan, indah dan tidak indah, yang lebih mengandalkan penilaian subjektif. Nilai sosial ialah kasih sayang, yang kadar nilai ini bergerak pada rentang antara kehidupan yang individualistik dengan altruistik. Nilai politik yaitu nilai paling puncak adalah kekuasaan dan kadar nilainya akan bergerak dari

²⁵Dede Rahmat Hidayat, *Psikologi Kepribadian dalam konseling*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 9-12.

²⁶Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*, (Yogyakarta: Cet. II; Kurnia Kalam Semesta, 2016), hlm. 54.

intensitas pengaruh yang rendah sampai pada pengaruh yang tinggi (otoriter). Nilai agama yaitu nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat secara hakiki dibanding dengan nilai-nilai lainnya.²⁷

5. BANGSA

Istilah “bangsa” dalam bahasa Inggris disebut “nation”. Kata *nation* berasal dari bahasa latin “natio” yaitu “lahir”. Jadi *nation* dapat dipahami sebagai suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kesamaan keturunan. Kata “bangsa” memiliki asal dari bahasa Sansekerta “wangsa” yang berarti orang-orang yang satu keturunan. Pandangan dari Hans Khon, bahwa unsur yang terpenting dalam suatu bangsa adalah kemauan bersama yang hidup nyata, atau adanya kemauan hidup bersama sebagai faktor pembentuk bangsa.²⁸

Menurut Badri Yatim sebagaimana yang dikutip oleh Winarno bahwa konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu pengertian bangsa dalam perspektif sosiologis antropologis dan bangsa dalam pengertian politik. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis yaitu persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya, seperti Batak, Minangkabau, Sunda, Dayak, Banjar dan lainnya.²⁹

Bangsa dalam pengertian politis yaitu suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu

²⁷*Ibid.*

²⁸Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Cet. IV; Bumi Aksara, 2015), hlm. 2-3.

²⁹*Ibid.*, hlm. 3-4.

kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Mereka diikat oleh suatu kekuasaan politik, yaitu negara. Seperti bangsa Indonesia (arti politis) setelah terciptanya negara Indonesia. Sehingga bangsa dalam pengertian politik bisa terbentuk tanpa memiliki kesamaan keturunan atau kesamaan faktor seperti ras, bahasa, tradisi, daerah, dan agama. Dengan perkembangan bangsa dalam arti politik, maka bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis saat ini lebih dikenal dengan istilah etnic atau suku, suku bangsa atau paruh bangsa.³⁰

6. ORGANISASI

Organisasi menurut Chester I Barnard yaitu suatu sistem dari aktivitas yang dikordinasi secara sadar oleh dua orang atau lebih.³¹ Suatu organisasi mengandung empat karakteristik yaitu (1) adanya kordinasi usaha; (2) mempunyai tujuan bersama; (3) terdapat pembagian kerja; dan (4) adanya hierarki kekuasaan. Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan perjalanan waktu organisasi tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, organisasi harus berkembang sebagai organisasi pembelajaran.³²

Mencermati gagasan di atas dipahami bahwa organisasi sangat penting dalam penentu gerak perubahan lebuah baik. Organisasi berusaha mewujudkan tujuannya yang baik dengan dilakukan secara bersama-sama. Maka organisasi yang baik dan modern yaitu organisasi yang peka terhadap perubahan zaman dan perubahan situasi, sehingga dalam kepengurusan selalu ada inovasi dan kreativitas

³⁰*Ibid.*, hlm. 4-5.

³¹Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: Cet. IV; Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 419.

³²*Ibid.*

dalam memajukan organisasi, hal demikian bermanfaat secara internal organisasi dan memberi dampak baik pada eksternal organisasi.

Wibowo menguraikan bahwa pengembangan organisasi mencerminkan semua usaha pengembangan yang berorientasi pada membuat organisasi dan anggotanya efektif. Hal demikian merupakan usaha terencana secara terus-menerus untuk meningkatkan struktur, prosedur, dan aspek manusia dalam sistem. Sedangkan Tyagi berpendapat bahwa pengembangan organisasi yaitu usaha terencana, sistematis, terorganisir dan kolaboratif di mana prinsip pengetahuan tentang perilaku dan teori organisasi diaplikasikan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan yang tercermin dalam meningkatnya kesehatan dan vitalitas organisasi, meningkatkan anggota kelompok dalam kompetensi dan harga diri, dan semakin baiknya masyarakat pada umumnya.³³

Organisasi-organisasi masa depan yang dinamik dan fleksibel Menurut Kast dan Rosenzweig menunjukkan beberapa ciri yaitu;

- a. Organisasi-organisasi masa depan akan beroperasi dalam lingkungan yang penuh turbulensi, yang mengharuskan mereka melakukan perubahan dan penyesuaian terus-menerus.
- b. Perlu menyesuaikan diri dengan sejumlah nilai-nilai kultural yang makin meningkat diversitasnya di dalam lingkungan sosial.
- c. Kebutuhan orang lebih ke peramalan teknologikal dan sosial.

³³*Ibid.*, hlm. 420-421.

- d. Organisasi-organisasi akan terus mengekspansi batas-batas dan domein-domein mereka, serta akan bertambah besar dan kompleksitas mereka.
- e. Organisasi akan terus menerus mendiferensiasi kegiatan-kegiatan mereka, apa yang menyebabkan munculnya masalah-masalah yang makin bertambah dalam bidang integrasi dan kordinasi.
- f. Organisasi-organisasi terus-menerus akan menghadapi problem-problem pokok dalam hal mengakumulasi dan memanfaatkan pengetahuan. Akan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan intelektual.
- g. Orang akan lebih memperhatikan saran-saran dan persuasi dibandingkan dengan paksaan.
- h. Partisipan akan memperoleh banyak pengaruh pada semua tingkatan di dalam suatu organisasi. Organisasi masa mendatang akan lebih menerapkan suatu model ekualisasi (pemerataan) kekuasaan dibanding dengan suatu model diferensiasi kekuasaan.
- i. Jumlah orang-orang profesional dan para ilmuwan serta pengaruh mereka di dalam organisasi-organisasi akan meningkat.
- j. Tujuan-tujuan organisasi kompleks akan mengalami diversifikasi, akan lebih diperhatikan usaha dalam mencapai sejumlah tujuan-tujuan, dan bukan tujuan tunggal yang diupayakan secara maksimal.

- k. Evaluasi kinerja organisasi menjadi makin sulit. Akan dikembangkan banyak teknik-teknik administratif, untuk mengevaluasi kinerja pada semua bidang kegiatan.³⁴

7. PERKADERAN

Eksistensi suatu organisasi apapun, apalagi lembaga-lembaga kemahasiswaan sebagai sumber rekrutmen dan pembentukan kepemimpinan bangsa di masa depan, pasti memerlukan kader. Kader adalah anggota inti organisasi, mereka ini adalah ujung tombak dan penggerak organisasi. Karenanya mereka harus memiliki pandangan, visi, dan ideologi organisasi tersebut. Sebagaimana disebutkan bahwa setiap kader memerlukan sosialisasi politik dan pendidikan politik.³⁵

Menurut AS Hornby (dalam kamusnya *Oxford Advanced Learner's Dictionary*) dijelaskan, pengertian kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Hal ini dapat dijelaskan, *pertama*, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam berorganisasi, mengenai aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi.³⁶

Kematian suatu gerakan bisa dipastikan sebabnya yaitu berhentinya kelahiran kader gerakan. Setiap kematian gerakan memang bisa dimulai oleh represi yang keras dari rezim penguasa atau faktor eksternal lainnya. Namun kematian gerakan selalu diakhiri oleh tidak adanya kader yang meregenerasi atau

³⁴Winardi, *Manajemen Perubahan: The Management of Change*, (Jakarta: Cet. VI; Prenadamedia Group, 2015), hlm. 54-55.

³⁵Sidratahta Mukhtar, *HMI dan Kekuasaan* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 89-90.

³⁶PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVIII*, (Jakarta: PB HMI, 2013), hlm. 308.

kader-kader baru tidak ada yang tumbuh. Ketika kita bicara organisasi, maka hal paling pokok adalah terjaminnya regenerasi dengan melalui sistem kaderisasi.³⁷

8. KARAKTER BANGSA

Karakter bangsa bisa juga dipahai sebagai identitas kebangsaan atau identitas nasional, karena menjadi identitas bersama disebabkan kesepakatan bangsa-bangsa yang ada dalam negara. Identitas yaitu ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri, sehingga identitas itu bisa membedakan dengan yang lain. Maka identitas nasional Indonesia mengarah pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Proses pembentukan identitas nasional pada umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan yang lama karena identitas nasional merupakan hasil kesepakatan masyarakat suatu bangsa.³⁸

Bangsa Indonesia termasuk berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya, kecuali pada proses pembentukan ideologi “Pancasila” sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan untuk saling memberi dan menerima di antara warga bangsa. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yaitu bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, Konstitusi negara UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan

³⁷Tim Kaderisasi FSBKU, dkk. *Kaderisasi Organisasi Rakyat: Pengalaman Lima Organisasi Rakyat*, (Bandung: Cet. I; Garis Pergerakan dan Pergerakan-People Centered Advocacy Institute, 2006), hlm. 6-7.

³⁸Winarno, *Paradigma Baru*....., hlm. 12.

rakyat, konsepsi wawasan nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.³⁹

Ratna Megawangi menguraikan dua macam karakter bangsa, pertama, karakter SDM, yaitu negara memberikan prioritas pada pengembangan karakter Sumber Daya Manusia yang kondusif sehingga terbentuk masyarakat produsen (*producer society*) seperti membangun industri. Karakter ini disebut *self-denial* atau *represif* yaitu karakter bangsa yang mempunyai etos kerja tinggi, hemat, dan mau bersusah-susah dulu. Kedua, karakter bangsa konsumtif (*consumer society*), yaitu masyarakat yang suka instan, berorientasi konsumsi telah mengubah masyarakat menjadi ekspresif, mendapatkan kesenangan sekarang dan mengorbankan masa depan.⁴⁰

³⁹*Ibid.*, hlm. 13-14.

⁴⁰Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*, (Jakarta: Star Energy, 2004), hlm. 12-13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, adapun hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴¹

Penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁴² Jenis penelitian kualitatif dikaitkan dengan epistemologi interpretatif, yang biasanya digunakan untuk pengumpulan dan analisis data yang menyandarkan pada pemahaman, dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati.⁴³

Dengan demikian, karakteristik utama penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrument dalam pengumpulan data supaya bisa mendalami keadaan secara holistik. Artinya peneliti berusaha memahami fenomena-fenomena

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.....*, hlm. 15.

⁴²*Ibid.*, hlm. 6.

⁴³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.

sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.

Alasan peneliti memakai metode kualitatif karena penelitian ini lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan, sifat, dinamika, hakikat, nilai pada sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta. Dengan demikian peneliti bisa memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan model, hipotesis dan teori.

Pendekatan penelitian dipakai untuk memecahkan masalah. Istilah pendekatan merupakan terjemahan dari kata *approach* yang berarti mendekati. Dalam kamus Bahasa Indonesia pendekatan diartikan metode untuk mencapai pengertian tertentu masalah penelitian. Metode yang dimaksud di sini adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia, atau para fenomenologis ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain. Peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.⁴⁴

⁴⁴Lexi J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 15-17.

Dengan pendekatan fenomenologi, studi fenomenologi melibatkan wawancara, pengamatan, dan dokumen.⁴⁵ Fenomenologi di samping ada yang melibatkan wawancara, sebagian juga melibatkan berbagai sumber data seperti puisi, pengamatan dan dokumen.⁴⁶

Alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena sesuai dengan variabel penelitian ini.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di HMI Cabang Yogyakarta, yang meliputi berbagai lokasi training HMI dalam lingkup DIY, dan berbagai komisariat di setiap fakultas di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta.

C. Informan penelitian

BPL HMI Cabang Yogyakarta, Ketua Umum HMI Komisariat Seajaran Cabang Yogyakarta, Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Yogyakarta, Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta.

D. Teknik penentuan informan

Peneliti terlebih dahulu observasi diberbagai perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, dan melakukan wawancara pendahuluan. Tahap selanjutnya peneliti memilih informan sesuai kebutuhan variabel penelitian yang dipercayai memiliki pengalaman dan kecakapan dalam bidang yang ditangani, baik sebagai tim yang ditunjuk mengelolah perkaderan HMI, maupun yang bertanggungjawab melaksanakan berbagai perkaderan HMI.

⁴⁵Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXIV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5.

⁴⁶John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Fife Approaches*, Alih bahasa Ahmad Lintang Lazuardi, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 109.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data.

Tahap awal, peneliti melakukan pengamatan intens atau observasi partisipatif di setiap komisariat HMI dalam lingkup cabang Yogyakarta yang melakukan kegiatan Latihan Kader 1 (LK1) HMI. Peneliti mengamati kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal terhadap proses kegiatan LK1, Tim Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, dan kader HMI yang hadir dilokasi kegiatan yang dianggap mumpuni untuk dimintai keterangan.

Peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap Tim Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta selaku pengelolah training, Stering Commite (SC), Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang ketika berada di lokasi sekaligus meminta keterangan. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, hanya berpanduan pada garis-garis besarnya. Wawancara tidak berstruktur ini membuat peneliti mendapat banyak informasi mendalam dan hal-hal yang baru terhadap proses kegiatan Latihan Kader 1 (LK1) HMI, cara pembentukan karakter peserta training, cara pembentukan karakter kader-kader HMI dan lain-lain.

Peneliti juga memakai metode dokumen yaitu menganalisis bahan-bahan tertulis selama proses LK1 berlangsung, menganalisis dokumen tertulis dari pedoman perkaderan HMI atau buku tentang HMI yang membahas tentang sistem

perkaderan HMI. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap semua Ketua umum HMI Komsariat di bawah naungan HMI Cabang Yogyakarta.

F. Keabsahan data

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara Validitas Internal, Validitas Eksternal (Generalisasi), Realibilitas, Obyektivitas.

1. Validitas Internal atau Creadibility

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber yang sama dan wawancara dengan sumber yang baru yang juga terlibat menangani hal yang penulis teliti. Lamanya peneliti di lapangan dan sekaligus observasi partisipan, membuat data sangat jelas dan lebih terjalin komunikasi yang dekat dengan objek penelitian maupun informan penelitian. Sehingga semua data yang diberikan apa adanya dan terjamin kebenarannya.

b. Meningkatkan ketekunan

Setiap pelaksanaan training HMI Cabang Yogyakarta yang dilaksanakan 21 Komisariat yang terdiri dari berbagai universitas di Yogyakarta, penulis selalu terlibat dan terus mengikuti secara intens, baik melakukan observasi, wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Dengan seringnya peneliti berada di lapangan, maka mendapatkan perbandingan atau kepastian data yang diterima sebelumnya, baik hasil penelitian sementara, dokumen, maupun hasil bacaan buku yang

berkaitan dengan penelitian, sehingga ketekunan di lapangan membuat data semakin jelas.

c. Triangulasi

Peneliti menguji keabsahan data dengan berbagai sumber, teknik dan berbagai waktu. Kemudian data yang telah terkumpul diadakan *chek* dan *recheck* untuk mendapatkan data yang sah.

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data menggunakan: (1) penggunaan beberapa sumber data dilakukan dengan cara observasi dan membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara tidak terstruktur dari subjek penelitian yaitu Tim BPL HMI, Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum HMI Cabang, pelaksana LK1 dan kader HMI yang hadir di lokasi perkaderan.

(2) peneliti melakukan beberapa teknik dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan metode wawancara, dengan pengamatan maupun dengan metode dokumen. (3) Kemudian menjaga situasi dan kesegaran informan dengan melihat ketepatan waktu dan kondisi. Peneliti sering bermalam di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi atau data dari informan di waktu yang tepat.

d. Menggunakan bahan refrensi

Penulis menggunakan berbagai bahan refrensi, dokumen setiap training, buku modul training, catatan lapangan, recaman wawancara.

e. Melakukan Member Chek

Setelah pengumpulan data rampung dan mendapat gambaran atau hasil, maka penulis selanjutnya pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik

wawancara terstruktur kepada semua ketua umum HMI Komisariat di bawah naungan HMI Cabang Yogyakarta yang berjumlah 21 Komisariat.

2. Validitas Eksternal (Transfability)

Penulis menyusun hasil penelitian dengan rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Reliabilitas (Pengujian Depenability)

Penulis dalam penelitian ini melakukan audit terhadap semua proses penelitian. Penulis menggunakan auditor yang independen, seperti pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Obyektivitas (Pengujian Konfirmability)

Proses yang termasuk panjang yang penulis lakukan dalam penelitian, bisa dicek di dokumentasi yang semua aktivitas training peneliti terlibat. Adanya catatan lapangan baik berupa tertulis maupun rekaman menggunakan HP untuk khusus merekam. Proses penelitian yang penulis lakukan sebagai bagian dari HMI, selalu dinanti dan ditanyakan teman-teman HMI tentang perkembangan penelitian penulis. Hampir semua pengurus HMI Cabang Yogyakarta dari pengurus tingkat komisariat sampai level Cabang, mengetahui penulis sedang meneliti HMI, sehingga peneliti menjaga keotentikan dan obyektivitas penelitian.

G. Teknik analisis data

Miles and Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiyono bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan *conclusion drawing/verivication*.⁴⁷

Setelah peneliti mengumpulkan data, kemudian dilakukan analisis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai, temuan merupakan tujuan utama dalam penelitian kualitatif.⁴⁸

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya peneliti menyajikan data dengan berupa uraian naratif. Penyajian data disusun secara jelas agar data hasil reduksi terorganisir dengan baik sehingga mudah dipahami. Langkah ini memudahkan peneliti dalam menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

3. *Conclusion Drawing* (Verivication)

Selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti melakukan pemaknaan data melalui analisis korelasi, dan kontekstualisasi dengan teori,

⁴⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 91.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 338-339.

konsep, serta membangun kontruksi teori atau temuan baru.⁴⁹ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharap adalah temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar atau gelap, namun setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁰

⁴⁹Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 96-99.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

1. Sejarah berdirinya HMI

Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diprakasai oleh Lafran Pane, pada hari Rabu Pon 1878, 14 Rabiulawal 1366 H, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 M, jam 16.00. Tempat berdirinya HMI yaitu di salah satu ruangan kuliah STI, gedung di sebelah Timur Kantor Pos Besar Yogyakarta, berdampingan dengan gedung SMP Negeri II, Jalan Setyodiningratan 30. Sekarang jalan P. Senopati 30 dan saat ini gedung itu diwarisi Yayasan Marsudi Rini Yogyakarta, sebagai tempat sekolah-sekolah Katolik.⁵¹

Lafran Pane adalah mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), sekarang UII (Universitas Islam Indonesia) yang masih duduk ditingkat I atau *propaedeuse*. Untuk menjajaki lebih jauh akan lahirnya HMI, Lafran Pane mengadakan tukar pikiran dengan Bapak Prof. Abdul Kahar Mudzakkir, Presiden (Rektor) STI waktu itu. Abdul Kahar Mudzakkir sangat setuju dengan gagasan pendirian HMI, disertai harapan supaya jangan terlalu mencampuri urusan politik.⁵²

Pada jam kuliah Tafsir dari Bapak Husein Yahya yang kemudian hari menjadi (ex-Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lafran Pane meminta izin kepada Bapak Husein Yahya, supaya jam kuliah beliau itu dapat

⁵¹Sitompul, Idem: *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)* (Cet. II; Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008), hlm. 13.

⁵²*Ibid.*, hlm. 12.

digunakan untuk kepentingan suatu rapat sambil mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Husein Yahya memberi izin kepada mahasiswa Lafran Pane, meskipun beliau tidak tahu menahu maksud dan tujuan rapat tersebut. Husein Yahya hanya melihat pribadi Lafran Pane yang kesehariannya baik dan sebagai Ketua III Senat Mahasiswa STI.⁵³

Lafran Pane langsung berdiri di depan kelas, memimpin rapat dan dalam prakatanya ketika memimpin rapat itu mengatakan, antara lain,

“Hari ini adalah rapat pembentukan Organisasi Mahasiswa Islam, karena semua persiapan maupun perlengkapan yang diperlukan sudah beres.”

Kemudian pemimpin rapat meminta supaya Bapak Husein Yahya berbicara, tetapi beliau tidak bersedia karena kurang tahu apa yang akan disampaikan sehubungan dengan tujuan rapat itu, beliau juga berpendapat bahwa biarlah mahasiswa menyelesaikan masalah mereka sendiri.⁵⁴ Proses berikutnya Lafran Pane selaku pemimpin rapat antara lain mengatakan:

- a. Rapat hari ini adalah pembentukan Organisasi Mahasiswa Islam, di mana Anggaran Dasarnya sudah dipersiapkan.
- b. Pada hari ini bukan lagi mempersoalkan perlu atau tidaknya mendirikan Organisasi Mahasiswa Islam.
- c. Di antara saudara-saudara boleh ada yang setuju, dan boleh juga ada yang tidak setuju. Namun demikian, walaupun masih ada yang tidak

⁵³*Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁴*Ibid.*

setuju, pada hari ini juga Organisasi Mahasiswa Islam ini secara formal harus berdiri karena persiapannya sudah matang.⁵⁵

Diberbagai pertanyaan maupun penjelasan, rapat hari itu berjalan lancar dan tenang, dan semua hadirin setuju supaya hari itu juga Organisasi Mahasiswa Islam itu dapat didirikan. Semua hadirin sependapat dan menyetujui konsep Lafran Pane, di mana organisasi itu bernama: HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM, disingkat HMI. Disaksikan Bapak Husein Yahya, rapat berakhir dengan sukses dan telah berhasil mengambil keputusan yang mahapenting dan bersejarah bagi perjalanan sejarah umat Islam dan bangsa Indonesia.⁵⁶

Mahasiswa-mahasiswa STI (Sekarang UII) dalam rapat itu memantapkan hati mengambil keputusan:

- a. Hari Rabu Pon 1878, 14 Rabiulawal 1366 H, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, menetapkan berdirinya organisasi “Himpunan Mahasiswa Islam” disingkat HMI, yang bertujuan:
 1. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
 2. Menegakkan dan mengembangkan ajaran Agama Islam.
- b. Menegaskan Anggaran Dasar HMI. Adapun Anggaran Rumah Tangga akan dibuat kemudian.
- c. Membentuk Pengurus HMI, dengan susunan sebagai berikut.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

Ketua : Lafran Pane (Prof. Drs.)

Wakil Ketua : Asmin Nasution (Drs.)

Penulis I : Anton Timur Jailani (MA)

Penulis II : Karnoto

Bendahara I : Dahlan Husein

Bendahara 1I : Maisaroh Hilal

Anggota : Suwali

: Yusdi Ghozali (S.H.)

: Mansyur

d. Secretariat HMI dipusatkan di Asrama Mahasiswa, Jalan Setyodiningratan 5 (Jalan P. Senopati 5, Sekolah Asisten Apoteker-SAA-sekarang).⁵⁷

Peristiwa bersejarah 5 Februari 1947 itu, HMI telah menjadi kenyataan, berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia, yang sedang berjuang memanggul senjata mengusir penjajah Belanda, mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan kata Lafran Pane, bahwa kelahiran HMI mendapat sambutan baik dari pimpinan STI, sehingga tiap bulan, HMI mendapat

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 13-14.

subsidi sebanyak Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk pembiayaan aktivitas organisasi.⁵⁸

Sementara tokoh-tokoh pemula atau pendiri HMI kebetulan semuanya adalah mahasiswa STI Yogyakarta antara lain:

- 1) Lafran Pane
- 2) Karnoto Zarkasyi
- 3) Dahlan Husein
- 4) Maisaroh Hilal
- 5) Soewali
- 6) Yusdi Ghozali
- 7) Mansyur
- 8) Siti Zainah
- 9) M. Anwar
- 10) Hasan Basri
- 11) Marwan
- 12) Zulkarnaen
- 13) Tayeb Razak
- 14) Toha Mashudi

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 14.

15) Baidron Hadi

16) Beberapa mahasiswa STI tingkat I lainnya, yang nama-nama mereka,
Prof. Lafran Pane.⁵⁹

2. Empat permasalahan yang menjadi latar belakang sejarah berdirinya HMI.

a. Situasi Dunia Internasional

Berbagai argumen telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran ummat Islam. Tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran ummat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. Yang jelas ketika ummat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalu maka pada saat itu pula kemunduran menghingapi kita.

Akibat dari keterbelakangan ummat Islam, maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut Gerakan Pembaharuan. Gerakan Pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran Gerakan Pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al Qur'an dan Hadist Rassullulah SAW.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 16-17.

Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka Gerakan Pem-baharuan di dunia Islam bermunculan, seperti di Turki (1720), Mesir (1807). Begitu juga penganjurnya seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain.

b. Situasi NKRI

Tahun 1596 Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pulalah Indonesia dijajah Belanda. Imperialisme Barat selama ± 350 tahun membawa paling tidak 3 (tiga) hal:

Penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk implikasinya.

Misi dan Zending agama Kristiani.

Peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme.

Setelah melalui perjuangan secara terus menerus dan atas rahmat Allah SWT maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Sang Dwi Tunggal Proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya.

c. Kondisi Mikrobiologis Ummat Islam di Indonesia

Kondisi ummat Islam sebelum berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu: Pertama: Sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadatkan seperti dalam upacara perkawinan, kematian serta kelahiran. Kedua: Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga: Golongan alim ulama dan

pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. Keempat: Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia.

d. Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan

Ada dua faktor yang sangat dominan yang mewarnai Perguruan Tinggi (PT) dan dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri. Pertama: sistem yang diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya adalah sistem pendidikan barat, yang mengarah kepada sekulerisme yang "mendangkalkan agama disetiap aspek kehidupan manusia". Kedua: adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta dimana kedua organisasi ini dibawah pengaruh Komunis. Bergabungnya dua faham ini (Sekuler dan Komunis), melanda dunia PT dan Kemahasiswaan, menyebabkan timbulnya "Krisis Keseimbangan" yang sangat tajam, yakni tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.

Adapun latar belakang pemikiran Lafran Pane dalam pendirian HMI adalah: Melihat dan menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Keadaan yang demikian adalah akibat dari sitem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan tersebut.

Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan Negara Republik Indonesia kedalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat.

3. Faktor Pendukung Berdirinya HMI

Posisi dan arti kota Yogyakarta:

Yogyakarta sebagai Ibukota NKRI dan Kota Perjuangan

Pusat Gerakan Islam

Kota Universitas atau Kota Pelajar

Pusat Kebudayaan

Terletak di Central of Java

Kebutuhan Penghayatan dan Keagamaan Mahasiswa

Adanya tuntutan perang kemerdekaan bangsa Indonesia

Adanya STI (Sekolah Tinggi Islam), BPT (Balai Perguruan Tinggi)

Gajah Mada, STT (Sekolah Tinggi Teknik)

Adanya dukungan Presiden (Rektor) STI Prof. Abdul Kahar Muzakir

Ummat Islam Indonesia mayoritas

4. Faktor Penghambat Berdirinya HMI

Munculnya reaksi-reaksi dari:

Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY)

Gerakan Pemuda Islam (GPII)

Pelajar Islam Indonesia (PII)

5. Fase-Fase Perkembangan HMI dalam Perjuangan Bangsa Indonesia

Fase-Fase Perkembangan HMI dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Fase Konsolidasi Spiritual (1946-1947). Sudah diterangkan di atas.

a. Fase Pengukuhan (5 Februari 1947 - 30 November 1947)

Selama lebih kurang sembilan bulan, reaksi-reaksi terhadap kelahiran HMI baru berakhir. Masa sembilan bulan itu digunakan untuk menjawab berbagai reaksi dan tantangan yang datang silih berganti, dengan semua itu semakin mengokohkan eksistensi HMI sehingga dapat berdiri tegak dan kokoh. Upaya pemantapan di tubuh HMI selalu dilakukan dan berhasil memperanyak kader HMI bukan hanya dari mahasiswa STI, tetapi banyak juga dari mahasiswa di luar STI. Supaya kedudukan HMI bertambah kukuh, baik ditinjau dari segi organisasi, apalagi dipandang dari tingkat perjuangan segenap rakyat Indonesia mengusir penjajah, dilangsungkanlah Kongres I HMI di Yogyakarta tanggal 30 November 1947. Pemilihan Pengurus Besar (PB) HMI yang baru, dan diadakan penetapan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, yang mencakup intern organisasi dan program perjuangan menghadapi Kolonial Belanda. Semua ini

diperlukan untuk menghadapi fase-fase perjuangan selanjutnya, yaitu masa-masa mendatang, yang selalu meminta pengorbanan di segala bidang.⁶⁰

b. Fase Perjuangan Bersenjata (1947 - 1949).

Seiring dengan tujuan HMI yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa perang kemerdekaan, HMI terjun kegelanggang pertempuran melawan agresi yang dilakukan oleh Belanda, membantu Pemerintah, baik langsung memegang senjata bedil dan bambu runcing, sebagai staff, penerangan, penghubung. Untuk menghadapi pemberontakkan PKI di Madiun 18 September 1948, Ketua PPMI atau Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono dan wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro, ikut membantu Pemerintah menumpas pemberontakkan PKI di Madiun, dengan mengerahkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam kesumat PKI terhadap HMI tertanam. Dendam disertai benci itu nampak sangat menonjol pada tahun '64-'65, disaat-saat menjelang meletusnya G30S/PKI.⁶¹

c. Fase Pertumbuhan dan Pembangunan HMI (1950-1963)

Selama para kader HMI banyak yang terjun ke gelanggang pertempuran melawan pihak-pihak agresor, selama itu pula pembinaan organisasi terabaikan. Namun hal itu dilakukan secara sadar, karena itu semua untuk merealisasikan tujuan dari HMI sendiri, serta dwi tugasnya yakni tugas Agama dan tugas Bangsa. Maka dengan adanya penyerahan kedaulatan Rakyat tanggal 27 Desember 1949,

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 26-27.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 27.

mahasiswa yang berniat untuk melanjutkan kuliahnya bermunculan di Yogyakarta. Sejak tahun 1950 dilaksanakanlah tugas-tugas konsolidasi internal organisasi. Disadari bahwa konsolidasi organisasi adalah masalah besar sepanjang masa. Bulan Juli 1951 PB HMI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta.⁶²

d. Fase Tantangan (1964 - 1965)

Dendam sejarah PKI kepada HMI merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi HMI. Setelah agitasi-agitasinya berhasil membubarkan Masyumi dan GPII, PKI menganggap HMI adalah kekuatan ketiga ummat Islam. Begitu bersemangatnya PKI dan simpatisannya dalam membubarkan HMI, terlihat dalam segala aksi-aksinya, Mulai dari hasutan, fitnah, propaganda hingga aksi-aksi riil berupa penculikan, dan lainnya.

Usaha-usaha yang gigih dari kaum komunis dalam membubarkan HMI ternyata tidak menjadi kenyataan, dan sejarahpun telah membeberkan dengan jelas siapa yang kontra revolusi, PKI dengan puncak aksi pada tanggal 30 September 1965 telah membuatnya sebagai salah satu organisasi terlarang.⁶³

e. Fase Kebangkitan HMI sebagai Pelopor Orde Baru (1966 - 1968)

HMI sebagai sumber insani bangsa turut mempelopori tegaknya Orde Baru untuk menghapuskan orde lama yang sarat dengan ketotaliterannya. Usaha-usaha itu tampak antara lain HMI melalui Wakil Ketua PB Mari'ie Muhammad memprakasai Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) 25 Oktober 1965 yang bertugas antara lain: 1) Mengamankan Pancasila. 2) Memperkuat bantuan kepada ABRI

⁶²*Ibid.*, hlm. 37.

⁶³*Ibid.*, hlm. 38-39.

dalam penumpasan Gestapu/ PKI sampai ke akar-akarnya. Masa aksi KAMI yang pertama berupa Rapat Umum dilaksanakan tanggal 3 Nopember 1965 di halaman Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta, dimana barisan HMI menunjukan superioritasnya dengan massanya yang terbesar.

Puncak aksi KAMI terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 yang mengumandangkan tuntutan rakyat dalam bentuk Tritura yang terkenal itu. Tuntutan tersebut ternyata mendapat perlakuan yang represif dari aparat keamanan sehingga tidak sedikit dari pihak mahasiswa menjadi korban. Diantaranya antara lain: Arif rahman Hakim, Zubaidah di Jakarta, Aris Munandar, Margono yang gugur di Yogyakarta, Hasannudin di Banjarmasin, Muhammad Syarif al-Kadri di Makasar, kesemuanya merupakan pahlawan-pahlawan ampera yang berjuang tanpa pamrih dan semata-mata demi kemaslahatan ummat serta keselamatan bangsa serta negara. Akhirnya puncak tututan tersebut berbuah hasil yang diharap-harapkan dengan keluarnya Supersemar sebagai tonggak sejarah berdirinya Orde Baru.⁶⁴

f. Fase Pembangunan Nasional (1969 - 1970)

Setelah Orde Baru mantap, Pancasila dilaksanakan secara murni serta konsekuen (meski hal ini perlu kajian lagi secara mendalam), maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). HMI pun sesuai dengan 5 aspek pemikirannya turut pula memberikan sumbangan serta partisipasinya dalam era awal pembagunan. Bentuk-bentuk partisipasi HMI baik anggotanya maupun yang telah menjadi alumni meliputi diantaranya: 1)

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 78-97.

partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan, 2) partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran 3) partisipasi dalam bentuk pelaksana langsung dari pembangunan.⁶⁵

g. Fase Pergolakan dan Pembaharuan Pemikiran (1970 - sekarang)

Suatu ciri khas yang dibina oleh HMI, diantaranya adalah kebebasan berpikir dikalangan anggotanya, karena pada hakikatnya timbulnya pembaruan karena adanya pemikiran yang bersifat dinamis dari masing-masing individu. Disebutkan bahwa fase pergolakan pemikiran ini muncul pada tahun 1970, tetapi gejala-gejalanya telah nampak pada tahun 1968. Namun klimaksnya memang terjadi pada tahun 1970 di mana secara relatif masalah- masalah intern organisasi yang rutin telah terselesaikan. Sementara di sisi lain, persoalan ekstern muncul menghadang dengan segudang problematika.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 103-105.

B. Sejarah Perkaderan HMI

Meski sejak HMI didirikan tahun 1947, telah menyatakan diri sebagai organisasi perkaderan, namun perkaderan dalam arti yang sesungguhnya baru dilaksanakan beberap tahun kemudian. Sebagaimana dalam sejarah kelahiran HMI dikepeng oleh permasalahan umat dan bangsa Indonesia, sehingga perhatian pada perkaderan terkesampingkan untuk sementara waktu karena persoalan rill yang dihadapinya.

1. Perkaderan Semi Militer (periode 1947-1951)

Ketika HMI baru berusia beberapa bulan, HMI seperti berubah menjadi organisasi semi militer, karena sebagian besar anggotanya bergabung dalam Corps Mahasiswa yang dibentuk untuk mempertahankan negara republik Indonesia dari upaya kekuatan asing menguasai kembali negara Indonesia.⁶⁶

HMI juga ikut berjuang bersama kekuatan-kekuatan lainnya menghadapi pemberontakan PKI MUSO tahun 1948. Kiprah HMI dibidang militer tetap sejalan dengan tujuan HMI waktu itu, yaitu “Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia”.⁶⁷ Setelah periode bersenjata HMI telah selesai, fase pertumbuhan dan pembangunan HMI sudah

⁶⁶Korps Pengader HMI Cabang Yogyakarta, *Pedoman Kursus Pengader HMI*, (Yogyakarta: LAPMI, 1995), hlm. 5.

⁶⁷*Ibid.*

mulai di bawah kepemimpinan A. Dahlan Ranuwihardjo yang masuk pada periode ke-3 (1951-1953).⁶⁸

2. Mulai Tumbuhnya Perkaderan Intelektual

Hasil Kongres ke-3 di masa ini salah satu hasil keputusan adalah membentuk “Yayasan pendidikan Mahasiswa Islam” dibentuk HMI pada Kongres ke-3 di Jakarta 30 Agustus sampai 5 September 1953.⁶⁹ Kegiatan besar yang dirintis adalah Konfrensi Mahasiswa Asia-Arab (KMAA) tahun 1952, namun justru meluas menjadi Konfrensi Mahasiswa Asia-Afrika dan terwujud di kepengurusan berikutnya periode 1955-1957.⁷⁰ HMI terus aktif bekerjasama dengan berbagai organisasi-organisasi mahasiswa dan pemuda sebagai bentuk penempatan, penggemblengan dan kaderisasi di masa awal-awal HMI berdiri.

a. Perkaderan HMI Periode (1953-1955)

Tahun 1953 tepatnya tanggal 4-7 Desember, di bawah kepemimpinan Deliar Noer sebagai Ketua PB HMI, HMI memprakarsai terlaksananya Kongres Pemuda Islam Indonesia (KPII) di Jakarta yang sebagai Dewan Pimpinan Kongres, Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, yaitu Mashud. Hasilnya terbentuk “Persatuan Organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia” disingkat “PORPISI”.⁷¹

Menghadapi dunia Internasional, berjalan sesuai dengan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. Langkah pertama ditempuh adalah

⁶⁸Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan...*, hlm. 112.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 113.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*, hlm. 115.

memperkenalkan HMI kepada Kedutaan-kedutaan negara asing yang ada di Indonesia. Lalu diadakan hubungan langsung dengan Organisasi Mahasiswa di luar negeri. Di lapangan itu HMI telah pernah menempatkan perwakilannya di London, Kanada, Mesir, Swiss, Amsterdam, Italia, Jerman, Pakistan, Singapura, Kalimantan Utara, Australia dan New Zealand.⁷²

Anggota-anggota HMI yang berada di Nederland pernah membentuk HMI Eropa. Nama HMI di luar negeri dikenal dengan sebutan Islamic Association of Universiti Students. Untuk memperkenalkan HMI di dunia Internasional, dikeluarkanlah brosur What is HMI yang berisi penjelasan singkat tentang HMI, yang dibagi-bagi dalam forum-forum Internasional. Keputusan Kongres ke-3 membentuk World Moslem Students Organization, telah mulai diusahakan ketika Way (World Assembly of Yourth) melangsungkan sidang Umum ke-2 di Singapura pada bulan Agustus 1955, dan HMI mendelegasikan Dalier Noer, Ushuluddin Hutagalung, dan Ir. Mashud.⁷³

PORPISI yang telah dibentuk melalui Kongres Pemuda Islam Indonesia yang diketuai oleh HMI, berinisiatif menyelenggarakan Kongres Pemuda Islam Sedunia. Cita-cita itu mendapat sambutan baik dari organisasi-organisasi Pemuda Islam seluruh dunia, dan Pakistan sanggup sebagai tuan rumah. Kongres Pemuda Islam seluruh dunia jadi dan berlangsung di kota Karachi, sejak tanggal 1-7 Januari 1955, disebut Internasional Assembly of Muslim Youth (IAMY), ide

⁷²*Ibid.*, hlm. 115-116.

⁷³*Ibid.*, hlm. 116.

penciptaan IAMY ini disebut *The Biggest Muslim Country in the World*, yaitu Indonesia. Kongres ini dihadiri 33 negara dengan 147 peserta.⁷⁴

Delegasi Indonesia 11 orang, kemudian A. Mukti Ali bergabung yang kebetulan waktu itu menjadi mahasiswa di Kirachi University, yang aktif dalam kepanitiaan persiapan IAMY mewakili PORPISI. Kongres ini bertujuan membentuk kekuatan ketiga dari kekuatan organisasi-organisasi pemuda sedunia, karena sebelumnya sudah ada organisasi pemuda bersifat Internasional yaitu World Federation of Democratic Youth (WFDY) yang berbau Komunis, yang lain bernama World Assembly Youth (WAY) yang berhaluan Barat.⁷⁵

Kedua organisasi ini merupakan corong utama dari dua blok besar, Timur dan Barat. Keputusan mendirikan Organisasi Pemuda Islam Sedunia itu merupakan usaha yang kreatif untuk renesains Islam dan solidaritas antar umat Islam sedunia. IAMY bertujuan mendidik pemuda-pemuda Islam dalam kebenaran Islam sebagai agama yang dinamis, membangun susunan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁶

Luasnya perhatian dan bidang garap HMI di awal usianya terdorong kenyataan dibutuhkannya partisipasi HMI menangani berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Pada periode ke-4 tahun 1953-1955) ini, dinahkodai Ketua Umum PB HMI yaitu Daliar Noer, periode . Jejak-jejak keterlibatan HMI bisa juga dilihat dari berbagai keputusan-keputusannya di Kongres. Sebagai contoh, dari sebelas keputusan Kongres ke-4 di

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

Bandung, hanya tiga yang bersifat internal, tujuh di antaranya berisi statmen-statmen sosial dan kenegaraan. Kemudian disepakati adanya perubahan AD/ART HMI, sehingga tujuan HMI saat ini adalah:

“Ikut mengusahakan terbentuknya manusia Akademis, pencipta dan pengabdian yang bernapaskan Islam.”⁷⁷

b. Perkaderan HMI Periode (1955-1957)

Kemudian periode ke-5 (1955-1957) di bawah pimpinan Ketua Umum PB HMI yaitu Amir Rajab Batubara. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam skala internal organisasi yaitu pertama, HMI berkembang pesat sejalan dengan perkembangan Perguruan Tinggi. Di mana berdiri Universitas, Institut, Akademi, Fakultas, disusul pula berdirinya Cabang HMI. Kedua, Yayasan Pendidikan Mahasiswa Islam yang didirikan sejak kongres ke-3, telah dapat mengasuh SMA di Cabang Makassar dan Surabaya. Di Jakarta mengasuh SMP dan SMA, di Yogyakarta mengasuh SMA, PGA, dan SGTK.⁷⁸

Sedangkan keaktifan kader HMI di eksternal HMI dan Luar negeri juga terus berkembang. Ide pelaksanaan Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika (KMAA) yang dirintis tahun 1953, baru terlaksana 3 tahun kemudian di Bandung tanggal 30 Mei sampai 7 Juni 1956. KMAA dihadiri 300 Organisasi Mahasiswa dari 45 negara, dengan 245 orang peserta. Pembahasan dalam konferensi ini adalah;

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 118.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 119.

- 1) Membicarakan masalah kepentingan bersama di lapangan Kebudayaan, Olahraga, Pendidikan, dan Kesejahteraan Mahasiswa.
- 2) Memperkuat hubungan persaudaraan antara para mahasiswa.
- 3) Membicarakan sumbangan mahasiswa untuk memperkukuh perdamaian dan meredakan ketegangan-ketegangan Internasional.⁷⁹

Di Kaliurang, Yogyakarta dilangsungkan Konferensi Nasional ke-3 World University Service (WUS) Indonesia dari tanggal 31 Desember 1955 sampai 3 Januari 1956. Dihadiri 60 utusan dari berbagai universitas, organisasi mahasiswa, dan dosen. WUS yang beranggotakan mahasiswa dan pengajar bertujuan memberikan service kepada dunia Perguruan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian untuk keenam kalinya, World Assembly of Youth (WAY), bertempat di Berlin Barat dari tanggal 14 sampai 25 Agustus 1956.

WAY sebagai Young United Nations atau PBB-nya Anak Muda berpedoman pada Universal Declaration of Human Rights, dihadiri 65 negara, dan Indonesia mengirim 5 utusan: Hasbullah (HMI), Wartomo Dwijoyuwono (PII), Joko Sukaryo (PPMI-PMKRI), Dahlan Lukman (GPPI), dan Sabam Siagian (GMKI). Pembahasan kali ini meliputi kerja sama di kalangan pemuda, soal-soal

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 120.

training, perbaikan organisasi, program kerja, juga masalah kolonialisme dengan menyokong perjuangan bangsa Aljazair merebut kemerdekaannya.⁸⁰

Dengan demikian HMI sejak awal berdirinya telah banyak ditempa dan proses yang keras dalam membentuk karakter kader-kadernya, termasuk pengalaman-pengalaman kader HMI di dunia Internasional dan itu juga pengalaman yang luas dalam training atau pendidikan di organisasi termasuk kemudian di HMI. Di Indonesia sendiri terus berkembang pesat kegiatan HMI untuk umat dan bangsa, termasuk dalam bidang sosial terutama bidang pendidikan. Berikut kutipan pidato Bintoro Cokroamijoyo:

Bagi adik-adik kami yang masih belajar dalam tingkat menengah, HMI telah mengusahakan berdirinya sekolah-sekolah yang kini sudah berjumlah delapan buah di Yogyakarta dan membuka sebuah lagi di Payakumbuh. Sekolah itu meliputi SMP, SMA, SGB dan PGA. Yayasan Pendidikan Mahasiswa Islam berusaha mengembangkan usaha di bidang ini.⁸¹

c. Perkaderan HMI Mulai digagas Sebagaimana Saat ini, Periode (1957-1960)

Periode ini dipimpin oleh Ismail Hasan Matareum sebagai Ketua Umum PB HMI dengan masa jabatan periode ke-2 kepengurusan semacam reshuffle tanggal 5 Mei 1959 ketika sudah sampai waktunya periode pertama. Dalam kebijakan era ini, Kongres diadakan 3 tahun sekali dengan dinahkodai dua Ketua Umum bergantian masing-masing satu setengah tahun. Dipahami bahwa di

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Korps Pengader HMI Cabang Yogyakarta, *Pedoman Kursus...*, hlm. 5.

periode ini perhatian intens terhadap perkaderan (dalam artian seperti saat ini) baru dimulai dan masih bentuk gagasan.⁸²

Di Taruna Giri Puncak, dari tanggal 20-24 Juli 1959, berlangsung Konferensi HMI, dihadiri 13 Cabang dengan peserta 40 orang, salah satu keputusan yang diambil adalah masalah pendidikan yang berkaitan dengan sekolah-sekolah yang didirikan HMI, serta mengatur hubungan tata kerja antara Yayasan Pendidikan Mahasiswa Islam Pusat, Departemen Pendidikan PB HMI, dan Pusat Pengajaran HMI berkedudukan di Yogyakarta. Kemudian pendidikan yang berhubungan dengan Pendidikan Dasar (Training HMI), yang mengelolah tentang materi pelajarannya.⁸³

Pada tanggal 13 Maret 1959, delegasi mahasiswa Indonesia sebanyak 6 orang berangkat ke Australia untuk memenuhi undangan NUAUS (National Union of Australia University Student) tujuannya mengadakan study tour selama 11 bulan, mewakili PPMI, sebagai kunjungan balasan atas kedatangan NUAUS ke Indonesia tahun 1956-1957. Perwakilan dari HMI yaitu Hamid AL Hadad, Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri PB HMI. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Hamid membentuk perwakilan HMI di Australia yaitu di kota-kota Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane, dan Armidale. Di New Zealand dibentuk di kota Auckland dari Palmerston North.⁸⁴

Kemudian di Yelwal Mysore, India, WAY mengadakan International Center for Advanced Study and Training yang ke-13, tanggal 18 April sampai 14

⁸²*Ibid.*

⁸³Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan...*, hlm. 124.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 125.

Juli 1959. Dihadiri 21 orang peserta yang datang dari organisasi pemuda/mahasiswa meliputi 9 negara. Peserta dari Indonesia ada dua orang yaitu, Mr. Aisyah Amini mewakili HMI dan Drs. Soe' mewakili GPII, tetapi Drs. Soe' sekaligus eks Ketua II HMI Cabang Yogyakarta periode 1956-1957. Training ini terkenal dengan latihan "ALOKA" (Pusat Pelajaran dan Latihan).⁸⁵

Kongres ke-6 di Makassar tanggal 14-20 Juli 1960, dan dihadiri 23 Cabang HMI. Keluar beberapa keputusannya dalam ranah internal HMI yaitu,

- 1) Masa jabatan PB HMI ditetapkan 3 tahun lamanya, dengan dinahkodai 2 orang Ketua Umum, masing-masing satu tahun enam bulan tanpa melalui Kongres, dengan pergantian seperti reshuffle.
- 2) Ketua Umum PB HMI yang terpilih adalah Norsal di periode pertama dan Oman Komaruddin di periode kedua.⁸⁶

Kongres ke-6 di Makassar itu juga diputuskan beberapa kebijaksanaan umum dari HMI.

1. Kebijaksanaan ke dalam

- (1) Mengintensifkan pendidikan dasar bagi segenap anggota HMI, dan mempertinggi keinsyafan para anggota terhadap HMI.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 125-127.

- (2) Mengusahakan terbentuknya suatu opini yang kritis di kalangan anggota HMI, terhadap masalah-masalah yang timbul, baik di dalam maupun di luar HMI.
- (3) Menggariskan beberapa kebijakan umum kemasyarakatan, dan keagamaan mereka.⁸⁷

2. Kebijaksanaan ke luar

- (1) HMI tetap mengambil bagian dalam perjuangan untuk kepentingan Agama, Tanah Air, dan Bangsa dalam Bidang-bidang yang dimungkinkan oleh asan dan tujuan HMI.
- (2) HMI sebagai milik seluruh umat Islam tetap mengusahakan kerja sama serta persatuan dan kesatuan antar seganap golongan Islam dalam masyarakat Indonesia.
- (3) Mengusahakan hubungan kerja sama yang harmonis mahasiswa/badan-badan lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuannya serta tidak merugikan HMI.⁸⁸

d. Perkaderan HMI Periode (1960-1963)

Periode ini PB HMI diketuai oleh Norsal di periode pertama dan Oman Komaruddin di periode kedua. Pada periode pertama kepengurusan di bawah nahkoda PB HMI Norsal, hanya selang satu bulan setelah Kongres ke-6 di Makassar pada bulan Juli 1960, maka berdasarkan Keputusan Presiden No.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 125-128.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 128.

200/60 tanggal 17 Agustus 1960, dan Keputusan Presiden No. 201/60 tanggal 17 Agustus 1960, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dipaksa harus bubar. Maka dengan bubarnya Masyumi, PKI memanfaatkan momen ini untuk memojokkan HMI.

Segala upaya yang dilakukan PKI untuk memberi kesan pada pemerintah dan rakyat bahwa HMI tidak baik, atau membuat ragu pada HMI, seperti selalu menjegal HMI dengan berbagai daya dan cara. Ketua CC PKI DN Aidit selalu menggembor-gemborkan bahwa HMI sudah lama bubar, bersamaan bubarnya Masyumi. Maka situasi ini merupakan tantangan baru dan tantangan besar bagi eksistensi HMI.⁸⁹

Berdasarkan laporan kerja PB HMI periode 1960-1963, sebagaimana yang disampaikan dalam forum Kongres VII HMI di Jakarta tahun 1963, didokumentasikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1) Intern Organisasi

Sebagai kontrol dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan dari kebijakan umum HMI, di Gunung Leutik Bogor, bulan Oktober 1961 diadakan konsultasi dengan cabang-cabang, dengan dihadiri 9 Cabang HMI. Pertemuan ini telah memperkuat ketegasan dan tekad HMI, dan secara tegas diputuskan:

“Apapun yang terjadi obor HMI harus tetap menyala dan berjalan terus.”

Kemudian di Jakarta diadakan Musyawarah Studi HMI antar Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia, pada November 1962. Ada juga Musyawarah

⁸⁹*Ibid.*

Nasional HMI di Pekajangan Pekalongan tanggal 23-28 Desember 1962, dihadiri 19 Cabang dengan 120 peserta. Hal ini mempertegas sikap dan langkah HMI, yaitu HMI harus terus tampil dan mengambil andil di segala bidang, terus mengonsolidasi diri.

MUNAS Pekajangan telah “Merumuskan Kepribadian HMI”, “Metode Training”, juga disepakati mengadakan penulisan “sejarah HMI” secara nasional, dan setiap Cabang menulis sejarah Cabang masing-masing dan pilot proyek sebagai langkah penyempurnaan Organisasi. Demi keseragaman langkah dan tindakan menghadapi segala persoalan, PB HMI berusaha mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan baik melalui Badan Kordinator, waktu itu disingkat BK, dan sekarang disebut BADKO (Badan Kordinasi).

BK ini dibentuk pada keputusan Kongres ke-6 di Makassar. Saat itu baru BK Jawa Timur, BK Jawa Tengah/DIY, BK Sumatera Utara, dan BK Indonesia Timur berkedudukan di Makassar. PB HMI juga ikut dalam Seminar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh IAIN Yogyakarta pada bulan Juli 1963. Pendidikan dasar dan pendidikan kader juga telah berjalan di hampir semua Cabang.

Kemudian ada juga Musyawarah Studi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi se-Jawa yang dihadiri oleh UGM Yogyakarta, Airlangga Surabaya, UNDIP Bandung, dan UI Jakarta, diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 12-14 Agustus 1962, dengan beberapa pokok pembicaraan di antaranya:

- a) Tukar-menukar pengalaman studi dan kerja Ekstra-Universitas.

- b) Bagaimana mempelajari agama Islam seefektif-efektifnya, terutama yang berkaitan dengan ilmu Kedokteran.
- c) Bagaimana cara seefektif-efektifnya HMI Kedokteran dan Kedokteran Gigi turut memberi kontribusi dalam Dakwah Islamiyah melalui bidang Kedokteran.⁹⁰

Dengan berbagai kegiatan atau aktivitas HMI saat itu, sangat memberi gambaran betapa HMI merespon semua dimensi atau ranah di berbagai aspek keindonesiaan. Baik perkaderan HMI maupun pelatihan tambahan di luar HMI juga banyak dilaksanakan, demikian itu sangat bermanfaat dan mengembangkan wawasan serta skill kader HMI. Maka kader HMI sejak awal dan sampai sekarang bisa eksis di manapun dan bidang apapun yang dia senangi dan digeluti, karena di HMI perkaderan itu berbagai dimensi yang berikan dan dimatangkan.

Kemudian kongres ke-7 HMI di Masjid Agung Al Azhar Jakarta, tanggal 8 sampai 14 september 1963, ketua panitia Kongres yaitu Drs. Med. Sulastomo. Diantara keputusan kongres dalam ranah perkaderan HMI yaitu:

- 1) Drs. Med. Sulastomo diamanahkan sebagai Ketua PB HMI
- 2) Masa kepengurusan PB HMI kembali dua tahun, atau sama aturannya sebelum Kongres di Makassar.
- 3) Tujuan HMI sama dengan tujuan HMI yang disepakati di Kongres ke-4 HMI di Bandung bulan Oktober 1955. Artinya dalam waktu 11 tahun, tujuan HMI masih tetap sama.⁹¹

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 128-129.

Kemudian diantara keputusan kongres dalam ranah perkaderan HMI yaitu:

- 1) Pengesahan “Kepribadian HMI”, sebagai hasil rumusan Munas HMI di Pekajangan Pekalongan, tanggal 23-28 Desember 1962.
- 2) Merumuskan suatu “Metode Training” yang merupakan pegangan HMI dalam melaksanakan perkaderan, yang menetapkan tentang pengertian kader, tujuan pendidikan/latihan, sistem/metode training, klasifikasi kader, waktu dan penyelenggaraan, tingkatan-tingkatan training yang dibagi atas:
 - a) Basic Training
 - b) Intermediate Training
 - c) Advanced Training.

Di samping ketiga tingkatan training tersebut, sekaligus dibentuk kurikulum dari tiap tingkatan Training. Sebenarnya awal penyempurnaan Konsepsi Training yang pertama kali diadakan dalam konsultasi dengan cabang-cabang di Gunung Leutik Bogor, bulan Oktober 1961.

- 3) Dibentuk lembaga-lembaga HMI yang bersifat otonom dengan tujuan membina dan mengembangkan skill dan kreativitas kader HMI, di antaranya:
 - a) LDMI berpusat di Bandung.

3. LKMI berpusat di Surabaya.

⁹¹*Ibid.*, hlm. 131.

4. LSMI berpusat di Yogyakarta.

5. LPMI berpusat di Bogor.⁹²

e. Perkaderan HMI Periode (1963-1965)

Kongres ke-8 HMI diselenggarakan di Surakarta, tanggal 10-17 September 1966. Peserta Kongres berjumlah 2000 orang dengan 84 Cabang yang hadir dari 90 Cabang secara keseluruhan di Indonesia. Keputusan penting yang disepakati yaitu pemilihan Ketua Umum PB HMI:

1) Memilih Drs. Med Sulastomo sebagai Ketua Umum PB HMI

2) Merevisi tujuan HMI sehingga redaksinya yaitu:

“Membina insan akademis, pencipta, dan pengabdian yang bernapaskan Islam menuju terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah swt.”⁹³

Keputusan lain yang dibentuk untuk membantu aktivitas cabang dan berkaitan kaderisasi adalah:

3) Rayon yang berbasis kecamatan dan Koordinator Komisariat-komisariat KORKOM)

4) Menambah jumlah Lembaga HMI yang sebelumnya empat dan menjadi 10 lembaga.

5) Mengesahkan berdirinya Korps HMI Wati (KOHATI), dan Korps Alumni HMI (KAHMI)

⁹²*Ibid.*

⁹³Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI.....*, hlm. 187.

6) Menetapkan empat jenjang training di HMI yaitu:

- a) Basic Training, dilaksanakan di Komisariat dan Rayon.
- b) Intermediate Training, dilaksanakan oleh Pengurus Cabang.
- c) Ideopoliter II, dilaksanakan pengurus BADKO.
- d) Ideopoliter I, dilaksanakan oleh PB HMI.⁹⁴

f. Perkaderan HMI Periode (1966-1969)

1) Situasi di era 1966-1969

Masa kepengurusan periode 1966-1969 merupakan masa peralihan Orde Lama dan Orde Baru. PKI yang dibubarkan tanggal 12 Maret 1966, masih terus menjalankan gerilya politiknya untuk bangkit kembali, dengan dibantu para pewaris aspirasi Gestapu/PKI serta Orla. Menghadapi situasi ini, HMI memperkuat basis dan kekuatannya melalui perkaderan. Beberapa pelatihan perkaderan yang dilaksanakan adalah:

- b) Menyelenggarakan Seminar Kader dan Ideopolitor I di Pekalongan bulan Oktober 1967. Seminar kader menghasilkan kebijaksanaan materi Training dan pedoman kebijaksanaan Penyelenggaraan Training. PB HMI menerbitkan Diktat pegangan untuk para instruktur.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 187-188.

- c) Mengeluarkan keputusan tentang pelaksanaan pengenalan dalam HMI, serta menyeragamkan namanya yaitu Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA), yang dimuat dalam Peraturan PB HMI No. 2537/A/Sek/1967 tanggal 9 Januari 1967.
- d) Berdasarkan Keputusan Seminar Kader HMI di Pekalongan tanggal 10-17 Oktober 1967, meningkatkan instansi MAPERCA sebagai salah satu jenjang Training yaitu *Pre-entry Training*.
- e) Merumuskan pengertian “Independency HMI”.
- f) Merintis kembali penerbitan Majalah “MEDIA” yang sempat vakum pada tahun 1960.
- g) COHATI PB, telah berhasil mengesahkan 65 Cabang COHATI.⁹⁵

1) Keputusan Hasil Kongres HMI 1969

Kongres ke-9 HMI di Malang, 3-10 Mei 1969 dengan cabang yang hadir sebanyak 110, dengan peserta 1500 orang. Keputusan yang diambil adalah:

- a) Ketua Umum PB HMI terpilih adalah Nurcholish Madjid untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum PB HMI. Demikian itu sejarah pertama kali terjadi di HMI.

⁹⁵Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan...*, hlm. 143.

b) Tujuan HMI dirubah dengan redaksi

“Terbinya insan akademis, pencipta, dan pengabdian yang bernapaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah swt.”

c) Merumuskan Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI.

d) Program Kerja Nasional (PKN) meliputi enam bagian yaitu, pembinaan anggota, pembinaan kemahasiswaan dan PT, pembinaan umat, pembinaan organisasi, pembinaan demokrasi dan pembangunan, dan kerjasama Internasional.⁹⁶

g. Perkaderan HMI Periode (1969-1971)

1) Kegiatan Perkaderan yang dilaksanakan HMI

Periode ini masih dinahkodai oleh Nurcholish Madjid yang kedua kalinya sepanjang sejarah HMI, dan HMI makin maju dan berkembang.

a) Mengintensifkan bimbingan keagamaan kepada para anggota, supaya mereka lebih memahami ajaran Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari yang pelaksanaannya melalui training-training HMI.

b) Merumuskan kembali pengertian “Independensi HMI”, yang meliputi: merdeka, terbuka, demokratis, objektif, dan rasional.

⁹⁶Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI.....*, hlm. 188-189.

c) Melaksanakan Senior Course Nasional (SC) di Pekalongan tanggal 25-28 April 1970, dan Seminar Kader Nasional juga di Pekalongan tanggal 29 April sampai 2 Mei 1970, kemudian hasilnya diamanatkan di Kongres ke 11.

d) Menerbitkan buku-buku:

(1) Pedoman Perkaderan HMI (1970) yang merupakan hasil Seminar Kader di Pekalongan bulan Mei 1970.

(2) Cara Belajar di Perguruan Tinggi (1971) oleh Drs. Sujoko Prasajo.

(3) Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, tahun 1971.

(4) Menerbitkan Buletin PB HMI, sebagai alat komunikasi antara PB HMI dan pengurus-pengurusnya, serta penerbitan MEDIA MAHASISWA.

(5) Membantu penerbitan media massa yang disponsori tokoh-tokoh PB HMI, yaitu Surat Kabar “FORUM INDONESIA” dan majalah “MIMBAR”.

2) Hasil Kongres HMI 1971

Kongres HMI ke-10 di Palembang dilaksanakan 3-10 Oktober 1971 melahirkan beberapa keputusan di antaranya:

- a) Mencantumkan sifat HMI dalam Anggaran Dasar HMI Pasal 7 yang berbunyi: “HMI adalah Organisasi Mahasiswa yang bersifat Independen”.
- b) Merumuskan “Tafsir Tujuan HMI” yang memuat 5 Tafsiran.
- c) Memilih dan menetapkan secara aklamasi Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum PB HMI periode 1971-1973.⁹⁷

h. Perkaderan HMI Periode (1971-1973)

Aktivitas yang dilaksanakan

- a) Melaksanakan “Up-Grading Kader Nasional HMI”, tanggal 25-31 Juli 1972, dengan tema “Implementasi Pancasila dalam Pembangunan”.
- b) Melaksanakan “Seminar Kader Nasional HMI”, tanggal 26-31 Juli 1973 yang membahas berbagai aspek perkaderan.
- c) Melaksanakan Training yang dilakukan semua aparat HMI. Basic Training sebanyak 105 kali. Intermediate Training sebanyak 31 kali. Diskusi Group 119 kali, Training Khusus sebanyak 55 kali. Advance Training 6 kali.⁹⁸

i. Perkaderan HMI Periode (1974-1976)

⁹⁷Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan...*, hlm. 155.

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 158-159.

PB HMI dinahkodai Ridwan Saidi, kemudian dilaksanakan Kongres HMI ke 11 di Bogor, 23-30 Mei 1974 yang dihadiri 93 Cabang Penuh dan 39 Cabang Persiapan. Kongres telah menetapkan beberapa keputusan:

- 1) Mengamanatkan kepada PB HMI untuk menstimulasi pengalaman ajaran agama Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
- 2) Mengamanatkan kepada MPK;
 - a) Untuk merumuskan konsep ke arah terlaksananya pembinaan masyarakat intelektual Muslim
 - b) Mepersiapkan prosedur pembelaan anggota
- 3) Menugaskan PB HMI untuk menyelenggarakan Lokakarya Perkaderan HMI.
- 4) Menyampaikan Rekomendasi Kongres yaitu pembangunan nasional perguruan tinggi dan pendidikan, pembinaan generasi muda, dan dunia internasional.
- 5) Berdasarkan hasil penelitian sejarah HMI menetapkan Prof. Drs. Lafran Pane sebagai pemrakarsa lahir atau berdirinya organisasi HMI dan disebut sebagai pendiri HMI.⁹⁹

⁹⁹Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan...*, hlm. 189.

j. Perkaderan HMI Periode (1976-1978)

PB HMI dinahkodai Khumaidi Syarif Romas, dalam Kongres HMI ke 12 di “Kota Merah”, Semarang 10-17 Oktober 1976. Kongres telah menetapkan beberapa keputusan:

- 1) PB HMI menyiapkan text book materi perkaderan HMI.
- 2) Rekomendasi Kongres berkaitan dengan umat Islam meliputi 7 butir rekomendasi seperti pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya. Umat Islam merupakan faktor penentu pembangunan, dan lainnya.
- 3) Dalam bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan terdiri 6 butir rekomendasi, seperti suasana demokratis harus diciptakan lingkungan PT, dan hubungan internasional, dan lainnya.¹⁰⁰

k. Perkaderan HMI Periode (1979-1981)

PB HMI dinahkodai Abdullah Hehamahua, adapun Kongres HMI ke 13 diadakan di Ujung Pandang sekarang Makassar, berlangsung 5-13 Februari 1979. Kongres telah menetapkan beberapa keputusan:

- 1) Menugaskan PB HMI untuk menyempurnakan Pedoman Perkaderan HMI dan membuat atau menyiapkan sistem evaluasi perkaderan HMI.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 190.

- 2) Mengajukan rekomendasi Kongres di antaranya adalah pendidikan dan perguruan Tinggi, generasi muda, pembangunan politik, pembangunan sosial budaya, umat Islam, pemabangunan ekonomi, dan hubungan internasional.¹⁰¹

l. Perkaderan HMI Periode (1981-1983)

PB HMI dinahkodai Ahmad Zacky Siraj, Kongres HMI ke 14 ini diadakan di Bandung, berlangsung 23 April-1 Mei 1981.

m. Perkaderan HMI Periode (1983-1985)

PB HMI diketuai oleh Harry Azhar Azis, Kongres HMI ke 15 berlangsung di Medan, tanggal 21-29 Mei 1983. Kongres berlangsung dengan pro dan kontra tentang gagasan pemerintah untuk menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas pada partai dan organisasi kemasyarakatan. Kongres telah menetapkan beberapa keputusan:

- 1) Menegaskan kepada PB HMI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan NDP, Tafsir Tujuan HMI, yang harus selesai akhir semester 1 masa bakti PB HMI.
- 2) Menyempurnakan kemudian mengumumkan Pedoman Perkaderan HMI yang baru hasil Lokakarya Perkaderan di Surabaya tahun 1983.
- 3) Mengajukan rekomendasi Kongres HMI yaitu:

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 190.

- a) Pendahuluan
- b) Pembangunan Nasional di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional.
- c) Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan
- d) Masalah generasi muda
- e) Masalah umat Islam
- f) Perwujudan hubungan luar negeri.¹⁰²

n. Perkaderan HMI Periode (1986-1988)

PB HMI diketuai oleh Muhammad Saleh Khalid, Kongres HMI ke 16 berlangsung di Padan, tanggal 24-31 Maret 1986. Kongres berlangsung bertepatan telah ditetapkannya UU Nomor 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan, atau dikenal asas tunggal. Kongres telah menetapkan beberapa keputusan yaitu:

- 1) Megubah asas HMI dari asas Islam menjadi asas Pancasila, yang dituangkan dalam BAB II Pasal 4 AD HMI.
- 2) Mengubah NDP HMI menjadi Nilai Identitas Kader (NIK).¹⁰³

o. Perkaderan HMI Periode (1988-1990)

Ketua PB HMI yang terpilih adalah Herman Widyananda, Kongres HMI ke 17 berlangsung di Lhokseumawe, tanggal 29 Juni-6 Juli 1988.¹⁰⁴

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 192.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 192.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 192-193.

p. Perkaderan HMI Periode (1990-1992)

Ketua PB HMI yang terpilih adalah Ferry Mursyidan Baldan, Kongres HMI ke 18 berlangsung di Jakarta, tanggal 17-25 September 1990. Kondisi HMI sedang diliputi permasalahan internal.¹⁰⁵

q. Perkaderan HMI Periode (1992-1994)

Ketua PB HMI yang terpilih adalah Muhammad Yahya Zaini, Kongres HMI ke 19 berlangsung di Pekanbaru Riau, 29 November-Desember 1992.¹⁰⁶ Kondisi HMI masih sedang berusaha menyelesaikan konflik internal, namun sangat mengganggu perjalanan HMI sebagai organisasi kader.

r. Perkaderan HMI Periode (1994-1996)

PB HMI dinahkodai Taufik Hidayat, adapun Kongres HMI ke 20 diadakan di Surabaya, berlangsung 21-31 Januari 1995. Tidak ada pembahasan tentang perkaderan, baik metode, materi maupun materi yang disesuaikan dengan zaman ini.

s. Perkaderan HMI Periode (1997-1999)

PB HMI dinahkodai Anas Urbaningrum, adapun Kongres HMI ke 21 diadakan di Yogyakarta, berlangsung 20-26 Agustus 1997. Dicermati keputusan-keputusan yang lahir di Kongres ini juga tidak ada pembahasan tentang usaha atas majunya suatu perkaderan HMI.¹⁰⁷

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 193.

¹⁰⁶*Ibid.*,

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 194.

Dicermati dengan kritis maka nampak bahwa beberapa Kongres HMI telah lewat sampai saat ini, hasil keputusan kongres bisa dikatakan tidak ada yang berkaitan dengan perbaikan perkaderan di tengah kemajuan global yang pesat. Energi terus terkuras pada politik dan permasalahannya.

t. Poin Inti Perkaderan HMI dari masa ke masa.

Poin inti aturan perkaderan HMI terutama jenjang training HMI dari masa ke masa yang diputuskan di berbagai Kongres HMI bisa diringkas yaitu:

- 1) Jenjang Training HMI mulai dirumuskan pada Kongres ke-7 HMI di Jakarta 1963, Kongres menetapkan Metode Training yang meliputi: pengertian kader, tujuan pelatihan, sistem atau metode training, klasifikasi kader, waktu dan penyelenggaraan, serta tingkat perjenjangan training HMI dibagi 3 yaitu:
 - a) Basic Training
 - b) Intermediate Training
 - c) Advanced Training.¹⁰⁸
- 2) Kongres ke-8 HMI di Surakarta 1966 terjadi perubahan jenjang training HMI yang sebelumnya tiga jenjang menjadi empat jenjang yaitu:
 - a) Basic Training, diselenggarakan Komisariat dan Rayon
 - b) Intermediate Training, diselenggarakan oleh Cabang.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 202.

- c) Ideopoliter I dilaksanakan Badko
 - d) Ideopoliter II diselenggarakan PB HMI.¹⁰⁹
- 3) Kongres ke-9 HMI di Malang 1969 menyempurnakan sistem perkaderan HMI. Jenjang training HMI menjadi 5 tingkatan:
- a) Pre Entry Training atau Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA) dilaksanakan pengurus Cabang.
 - b) Basic Training diselenggarakan pengurus Komisariat dan Rayon
 - c) Intermediate Training, dilaksanakan Pengurus Cabang.
 - d) Advanced Training, diselenggarakan Pengurus Badko
 - e) Seminar Nasional dilaksanakan pengurus Besar HMI.
- 4) Perubahan jenjang training berubah lagi di Kongres ke-11 tahun 1974 yang terdiri dari:
- a) MAPERCA
 - b) Latihan Dasar
 - c) Latihan Lanjutan
 - d) Seminar¹¹⁰

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

5) Lokakarya Perkaderan HMI di Kaliurang 1975 untuk menyempurnakan perkaderan, maka diubah menjadi empat jenjang yaitu:

- a) MAPERCA
- b) Basic Training
- c) Intermediate Training
- d) Advanced Training¹¹¹

6) Aturan jenjang training ini tidak mengalami perubahan sampai 1983, ketika sampai digelarnya Lokakarya Perkaderan HMI di Surabaya 1983, itupun jejang training HMI tidak mengalami perubahan tetapi hanya perubahan istilah yaitu:

- a) MAPERCA diganti istilahnya dengan Latihan Kepemimpinan I
- b) Basic Training: (Latihan Kepemimpinan II)
- c) Intermediate Training: (Latihan Kepemimpinan III)
- d) Advanced Training¹¹²

7) Kongres HMI ke-17 di Lhoksemauwe tahun 1988 menetapkan jenjang training HMI direvisi jadi tiga:

- a) Basic Training diganti menjadi Latihan Kader I (LKI)

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

- b) Intermediate Training diganti menjadi Latihan Kader II (LKII)
 - c) Advanced Training diganti menjadi Latihan Kader III (LKIII)¹¹³
- 8) Sistem perjenjangan ini dikukuhkan dalam Sarasehan dan Lokakarya (Saloka) Perkaderan HMI di Surabaya 1988. Kemudian Kongres ke-18 tahun 1990, Kongres ke-19 tahun 1992, Kongres ke-20 tahun 1995, Lokakarya Perkaderan HMI di Jakarta 1997, serta Kongres HMI ke-21 di Yogyakarta tahun 1997, tidak ada perubahan jenjang training HMI sampai sekarang.¹¹⁴

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

C. Profil HMI Cabang Yogyakarta

1. Identitas HMI Cabang Yogyakarta Periode 2017-2018

- ☐ Nama Organisasi : HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(HMI) CABANG YOGYAKARTA
- ☐ Alamat Secretariat : Jln. Sidikan No. 71, Sorosutan, Umbulharjo
Yogyakarta. Kode pos 55581
- ☐ Nama Gedung : Pusat Kebudayaan Lafran Pane
- ☐ Email : hmicabangjogja@gmail.com
- ☐ Nama Ketua Umum : Elfi Suharni
- ☐ Periode Kepengurusan : 2017-2018
- ☐ No. HP Ketua Umum : 089 687 139 339

2. Visi, Misi dan Tujuan HMI Cabang Yogyakarta

a. Visi HMI Cabang Yogyakarta

“Menjadikan HMI Cabang Yogyakarta Sebagai Kiblat Perkaderan Terdepan dalam Pengelolaan Organisasi dan Pengawasan Kebijakan Publik”

b. Misi HMI Cabang Yogyakarta

- 1) Mengadakan supervisi terhadap kegiatan perkaderan komisariat secara berkala .
- 2) Meningkatkan kualitas kader melalui gerakan pakar intelektual.

- 3) Digitalisasi arsip dan penerapan sistem SAMSAT.
- 4) Membenahi management dan pengelolaan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk Pimpinan Komisariat, Badan Khusus, dan LPP.
- 5) Memperbaiki komunikasi internal dan eksternal organisasi ?
- 6) Memperkuat bidang eksternal sesuai kebutuhan kebijakan publik ?

3. Program Unggulan Periode 2017-2018

- a. Semiloka Perkaderan
- b. PUSDIKLAT Pimpinan
- c. Pekan Raya NDP
- d. Gerakan Pakar Intelektual

4. Program Kerja Periode 2017-2018:

- a. Program Kerja Bidang Pembinaan Anggota (PA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta

Tabel 3 Program Kerja Pembinaan Anggota (PA) 2017

PROGRAM KERJA					
PEMBINAAN ANGGOTA					
HIMPUNAN MAHASISWA CABANG YOGYAKARTA					
PERIODE 2017-2018					
N o.	Nama Program	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Capaian
1	Sekolah Perkaderan	Memberikan pemahaman mengenai pedoman perkaderan dan	Akhir November	Bidang PPPA seluruh komisariat HMI cabang	Seluruh pengurus komisariat terutama bidang PPPA

		SOP LK 1		Yogyakarta	memahami pedoman perkaderan dan mekanisme pelaksanaan LK 1
2.	Latihan Kader 2 Tingkat Nasional	Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk menentukan dan mengemban misi HMI	Desember/ Januari	Peserta 60% dari HMI Cabang Yogyakarta, 40% dari cabang di luar HMI Cabang Yogyakarta	Meningkatkan kemampuan Intelektual dan kemampuan Mengelola Organisasi Kader HMI.
3.	KTA dan Sertifikat LK 1	Ada legalitas yang menunjukkan identitas keanggotaan dan bukti telah mengikuti LK 1	Selama periode kepengurusan	Seluruh anggota HMI Cabang Yogyakarta	Setiap anggota HMI Cabang Yogyakarta memiliki KTA dan Sertifikat

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta, 2018

- b. Program Kerja Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta

Tabel 4 Program Kerja Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) 2017

No	Nama Program Kerja	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran
1.	Pendidikan Kilat (DIKLAT) Ke-PTKP-an	Untuk menanamkan pengertian dalam memaksimalkan peran dan fungsi sebagai pengurus PTKP. Selain	2x dalam periode kepengurusan	Seluruh PTKP Komisariat dan PTKP Korkom serta anggota

		itu juga untuk membangun semangat solidaritas antar kader.		komisariat pada umumnya.
2.	Diskusi Gerakan (Road to Komisariat-komisariat)	Membangun tradisi “Intelektual Organik” dan membangun mental kader yang tangguh.	Dua Minggu sekali (Road to Komisariat)	Seluruh PTKP Komisariat, PTKP Korkom serta seluruh anggota komisariat yang menjadi fasilitator dan PTKP Cabang sebagai pendamping.
3.	Pengawasan pemilwa dan Masalah kebangsaan	Membangun nalar kritis kader dalam berdinamika di Kampus, serta mempunyai kepekaan sosial yang kuat dan selalu aktif memperjuangkan hak-hak kaum tertindas.	Kondisional	Kampus, Masyarakat dan Negara.

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta, 2018

c. Program Kerja Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta

Tabel 5 Program Kerja Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) 2017

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	CAPAIAN
1	Sosialisasi Hasil-Hasil Kongres Terbaru	Mensosialisasikan hasil-hasil kongres terbaru.	2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan.	Pengurus HMI Cab. Yogyakarta dan Komisariat Di Lingkup HMI	Kader memahami dan mampu mengaplikasikan hasil-hasil kongres

				Cab. Yogyakarta.	terbaru dilingkup Cabang maupun di komisariat .
2	Tabulasi Struktural HMI	Penguatan struktural organisasi Cabang, Badan- badan khusus dan Komisariat di lingkup HMI Cab. Yogyakarta .	2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusa n.	Pengurus HMI Cab. Yogyakarta, Badanbadan khusus dan Komisariat dalam lingkup HMI Cab. Yogyakarta.	Terbentuk nya struktur organisasi yang kuat sesuai dengan AD/ART, Serta pedomanp edoman organisasi lainnya.
3	Tertib Administrasi	Penguatan data base anggota (kader komisariat dilingkup HMI Cab. Yogyakarta).	1 (Satu) kali dalam satu periode kepenguran.	Komisariat Di Lingkup HMI Cab. Yogyakarta	Terciptan ya data base komisariat yang transparan dan kuat.

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yagyakarta, 2018

d. Program Kerja Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Cabang Yogyakarta

Tabel 6 Program Kerja Bendahara Umum (BENDUM) 2017

PROGRAM KERJA BENDAHARA UMUM

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG YOGYAKARTA PERIODE 2017-2018					
No	Nama Program	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Capaian
1.	Digitalisasi Laporan Keuangan (<i>Online</i>)	Untuk mewujudkan pengelolaan organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan organisasi modern	Dua Semester	HMI Cabang Yogyakarta	Tersedianya Laporan Keuangan secara digital (<i>Online</i>)
2.	Pengadaan Rekening Komisariat dan Koordinator Komisariat	Untuk membantu komisariat menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Semester Pertama	Seluruh Komisariat dan Koordinator Komisariat Di bawah Naungan HMI Cabang Yogyakarta	Adanya Buku Rekening untuk Komisariat dan Koordinator Komisariat
3.	Iuran Alumni HMI	Untuk menambah pendapatan organisasi sekaligus menjalin kedekatan dengan alumni	Dua Semester	Seluruh Keluarga Alumni HMI yang berdomisili di Yogyakarta	-Adanya Pemasukan dana dari alumni Sebesar Rp. 20.000/orang - Terjalinnnya kedekatan emosional antara Pengurus dengan Alumni
4.	Membuat Koperasi dan Usaha Mandiri (<i>Photocopy</i>)	Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi HMI Cabang Yogyakarta	Dua Semester	HMI Cabang Yogyakarta	Terbentuknya lembaga Koperasi serta badan usaha <i>Photocopy</i>

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta, 2018

- e. Program Kerja Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Cabang Yogyakarta

Tabel 7 Program Kerja Sekretaris Umum 2017

No	Nama Program	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Capaian
1	Dokumentasi Kegiatan	Pengumpulan dokumen kerja/kegiatan Pengurus HMI Cabang Yogyakarta Periode 2017-2018	Satu Periode Kepengurusan	Seluruh Pengurus HMI Cabang Yogyakarta	Tersedianya dokumen kerja/kegiatan Pengurus HMI Cabang Yogyakarta HMI Cabang Yogyakarta 2017-2018
		Pengelolaan dokumen kerja/kegiatan Pengurus HMI Cabang Yogyakarta Periode 2017-2018			
2	Penyusunan Sejarah HMI Cabang Yogyakarta	Untuk membangun pemahaman yang tepat dan proporsional tentang dinamika HMI Cabang Yogyakarta di masa lalu, sebagai bahan pemikiran dalam memahami dan mengarifi berbagai persoalan di masa sekarang dan yang akan datang	Satu Periode Kepengurusan	Seluruh Pengurus HMI Cabang Yogyakarta	Buku sejarah HMI Cabang Yogyakarta

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta, 2018

f. Program Kerja Bidang HUKUM dan HAM Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Tabel 8 Program Kerja Bidang Hukum dan HAM 2017

N O	JENIS PROG RAM	BENT UK KEGI ATAN	TUJUAN	TARGET	SASARA N	INDIKATO R KEBERHA SILAN	WAK TU
1	Refleksi akhir tahun	Diskusi/dialog	Mentabulasi problematika penegak hukum di Indonesia khususnya di Yogyakarta	Memiliki kesadaran intelektual yang kritis, dinamis, progresif dalam memperjuangkan hukum dan HAM	Kader HMI lingkup cabang Yogyakarta dan pada umumnya	Peserta memiliki kesadaran hukum dan HAM	Desember 2017
2	Training Advokasi	Training	Memberikan pemahaman akan tentang materi advokasi maupun praktek	Peserta dapat memahami pokok persoalan tentang advokasi	Kader HMI lingkup cabang Yogyakarta	Peserta mampu mentransformasikan pengetahuan yang didapat dalam bentuk aplikatif. Peserta mampu mengadvokasi kasus	November 2017

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta, 2018

g. Program Kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Tabel 9 Program Kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2017

No	Nama Program	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Capaian
-----------	-------------------------	---------------	------------------------------	----------------	----------------

1	Pelatihan Kepemimpinan OSIS SMA Se-DIY	Memperkenalkan HMI di kalangan siswa SMA se-DIY khususnya. Memberikan pelatihan dasar kepemimpinan bagi siswa khususnya OSIS SMA se-DIY	Satu kali dalam satu kepengurusan	Siswa SMA se-DIY khususnya OSIS.	para siswa khususnya OSIS memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kepemimpinan.
---	--	---	-----------------------------------	----------------------------------	--

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta, 2018

h. Program Kerja Bidang Sosial Politik Himpunan Mahasiswa Islam

Tabel 10 Program Kerja Bidang Sosial Politik 2017

PROGRAM KERJA					
BIDANG SOSIAL POLITIK					
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG YOGYAKARTA					
PERIODE 2017-2018					
N O	NAMA PROGRAM	TUJUAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	CAPAIAN
1	Penyuluhan dan Check-up kesehatan	Mengembalikan peran HMI ke arahh back to society guna membangun masyarakat mencapai tujuan hidup sehat.	Satu kali dalam periode kepengurusan (bulan desember)	Masyarakat umum	Adanya kegiatan penyuluhan dan check up kesehatan yang didapat masyarakat.
2	diskusi publik (perkembangan peta politik nasional)	Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap kader HMI kondisi dan perkembangan perpolitikan nasional.	Satu kali dalam periode kepengurusan (bulan januari)	Pengurus dan kader HMI cabang yogyakarta	Adanya informasi dan pengetahuan mengenai kondisi dan perkembangan perpolitikan nasional.

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta, 2018

i. Program Kerja Bidang KORPS HMI-WATI (KOHATI) Cabang Yogyakarta

Tabel 11 Bidang KORPS HMI-WATI (KOHATI) Cabang Yogyakarta 2017

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	WAKTU P	SASARAN	CAPAIAN
1	LKK	Memotivasi HMI-WATI untuk segera melaksanakan LKK	1 kali dalam satu periode	Seluruh Pengurus dan Anggota HMI-WATI Cabang Yogyakarta	Untuk meningkatkan intelektual para KOHATI Cabang Yogyakarta
2	Diskusi Lintas Organ	Menjadikan HMI-WATI kritis,dan berani berpendapat sekaligus mengenal organ perempuan lain	2 kali dalam satu periode	Seluruh Pengurus dan Anggota HMI-WATI Cabang Yogyakarta	Untuk meningkatkan intelektual para KOHATI Cabang Yogyakarta
3	Bedah PDK	untuk membangun pemahaman HMI-WATI mengenal PDK	2 kali dalam satu periode	Seluruh Pengurus dan Anggota HMI-WATI Cabang Yogyakarta	Untuk meningkatkan intelektual para KOHATI Cabang Yogyakarta
4	Rekam Jejak	Pengumpulan Dokumentasi Kegiatan Pengurus KOHATI	1 kali dalam satu periode	Seluruh Pengurus dan Anggota HMI-WATI Cabang Yogyakarta	Tersedia dokumentasi kerja pengurus KOHATI Cabang Yogyakarta

Sumber: Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta, 2018

D. Konsep Karakter Bangsa dalam Perspektif HMI

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, penulis menganalisis dokumen atau konsep HMI terhadap pembangunan karakter bangsa dalam sistem perkaderan HMI. Dalam menelusuri pembangunan karakter bangsa oleh konsep sistem perkaderan HMI, penulis telah menemukan dokumen yang menguraikannya, sebagai perbandingan dalam penerapannya terutama pada objek penelitian penulis.

1. Konsep Karakter Bangsa dalam Perspektif HMI

Pendidikan karakter bagi HMI yaitu memasyarakatkan budaya prestasi (*Achievement Culture*). Budaya yang didasarkan pada dorongan individu dalam sekolah dalam suasana yang mendorong diri pada usaha keras untuk adanya independensi keilmuan adalah keberhasilan dan prestasi kerja. Budaya ini sudah seharusnya berlaku di dunia pendidikan tentang independensi dalam belajar, penelitian dan pengabdian. Sehingga lebih menekankan terciptanya manusia yang profesional, mandiri dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya.¹¹⁵

Perkaderan HMI diorientasikan kepada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan kemampuan untuk melakukan transformasi kepribadian dan kepemimpinan seorang muslim yang utuh (*kaffah*), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan *kritisisme*, serta orientasi kepada kemandirian dan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk menguatkan dan

¹¹⁵PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII.....*, hlm. 275.

memberikan nilai optimal bagi pengkaderan HMI, maka ada tiga hal yang harus diberi perhatian serius. *Pertama*, rekrutmen calon kader.¹¹⁶

Dalam hal ini, HMI harus menentukan prioritas rekrutmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan diri secara berkelanjutan, memiliki orientasi kepada prestasi yang tinggi dan potensi *leadership*, serta memiliki komitmen untuk aktif dalam memajukan organisasi. *Kedua*, proses perkaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. *Ketiga*, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif untuk perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong semangat belajar dan bekerja keras, menciptakan ruang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap kritis yang melahirkan pandangan *futuristik* serta menciptakan media untuk merangsang kepedulian terhadap lingkungan sosial.¹¹⁷

2. Pola perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam membentuk karakter anggota.

Perkaderan HMI adalah proses upaya organisasi untuk mengaktualisasikan potensi manusia bagi para anggota HMI sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kualitas dirinya menjadi kader yang memiliki kemampuan serta kesediaan menghayati, mengamalkan dan mengembangkan dalam dimensi kemasyarakatan, kebangsaan dan Negara. Hal itu berarti perkaderan HMI pada

¹¹⁶PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXIX*, (Jakarta: PB HMI, 2016), hlm. 290.

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 290-291.

dasarnya merupakan usaha meningkatkan kualitas kader HMI yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan secara menyeluruh.

Dahlan Ranuwihardjo (Ketua Umum PB HMI Periode 1951-1953) mengungkapkan bahwa awal tahun 1950-an belum ada rumusan tentang apa yang kemudian disebut kepribadian HMI. Namun HMI sendiri merupakan organisasi yang memiliki kepribadian sejak didirikan. Kepribadian itu mula-mula bersumber pada naluri, kemudian terungkap dalam sikap, tertulis atau terucap. Rangkaian ungkapan naluri itu kemudian disebut kepribadian HMI. Dari naluri orang-orang muda yang dididik dan dibesarkan dalam kancah perjuangan bangsa untuk kemerdekaan, yang tergolong terpelajar (apalagi sebagai mahasiswa calon sarjana) serta beragama Islam, telah terbentuk suatu kepribadian yang menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berintegrasi dengan dan dalam Kehidupan Nasional Bangsa.
- 2) Berfikir, bersikap dan melangkah secara mandiri.
- 3) Turut serta dalam dan turut memelihara Ukhuwah Islamiah.¹¹⁸

Pada hakikatnya tugas pokok HMI adalah perkaderan dan secara fungsional berperan sebagai lembaga perkaderan, maka secara totalitas juga mengembangkan potensi-potensi kader HMI. Guna melaksanakan perkaderan itu, maka diperlukan media-media perkaderan yang dikenal dengan training. Sebagian besar kegiatan HMI merupakan pendidikan kader yang menitikberatkan pada segi tertentu, meliputi:

¹¹⁸Agussalim Sitompul (ed.), *HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik*, (Cet. II; Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008), hlm. 22.

- 1) Watak dan kepribadian, yaitu memberikan kesadaran beragama, akhlak dan watak. Dengan modal itu diharapkan kader HMI memiliki nilai idealisme dan moralitas yang memadai.
- 2) Kemampuan ilmiah, dimana kader HMI harus memiliki ilmu pengetahuan, intelektualitas dan *wisdom* (kebijaksanaan). Aspek keterampilan dalam melaksanakan tujuan dan misi organisasi.¹¹⁹
- 3) Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI menggunakan pendekatan sistematis dalam keseluruhan proses perkaderannya. Semua bentuk aktifitas atau kegiatan perkaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi.¹²⁰

Dengan ungkapan tersebut dipahami bahwa sejak berdirinya HMI sudah memiliki keperibadian atau karakter kebangsaan. Karakter bangsa itu diawali dengan prinsip keislaman dan keindonesiaan. Islam dan Indonesia bagi HMI merupakan keserasian dan keharusan untuk memberi kontribusi pada umat dan bangsa Indonesia. Karakter keislaman dan keindonesiaan itu sangat jelas terlihat di dalam tujuan HMI sejak awal berdirinya tahun 1947, yaitu; “*Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat Rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.*”¹²¹

Dengan tujuan tersebut, Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip Solihin mengatakan bahwa pada awal berdirinya HMI, Lafran Pane merupakan

¹¹⁹Sidratahta Mukhtar, *HMI.....*, hlm. 90-91.

¹²⁰PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 308.

¹²¹Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 1.

personifikasi dari pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI. Lafran Pane di samping sebagai Muslim juga seorang nasionalis. Dikatakan demikian karena ketika mendirikan HMI lebih mengutamakan kepada semangat kebangsaan, mengingat ketika mendirikan HMI pada saat itu, usaha mewujudkan kebangsaan Indonesia baru berusia dua tahun.¹²²

Dahlan Ranuwihardjo kembali menguraikan bahwa, pembentukan karakter sangat baik lahir dari sumber potensi generasi muda. Sumber potensi yang dimaksud adalah lembaga-lembaga pendidikan dari TK sampai dengan SMA, yang formal atau informal, madrasah, pesantren, atau sekolah umum, begitupun organisasi remaja seperti Remaja Masjid dan lainnya. Di lembaga-lembaga pendidikan, anak-anak didik harus memperoleh pendidikan agama, dengan harapan ketika sampai remaja atau anak muda, mereka dapat disebut potensi.¹²³

Potensi belum cukup sebagai kekuatan, masih disebut calon kekuatan. Dengan memasuki suatu organisasi mahasiswa atau organisasi pemuda, potensi itu memperoleh latihan atau pembinaan, sehingga potensi itu akan berkembang menjadi kekuatan riil. Setelah potensi menjadi kekuatan riil, barulah organisasi dapat mempergunakannya untuk keperluan melaksanakan suatu program, kegiatan organisasi atau perjuangan.¹²⁴

Dengan demikian lembaga pendidikan formal seperti sekolah, sangat penting masuk sebagai pendidikan formal dan pusat pendidikan formal adalah organisasi atau ekstrakurikuler. Selama ini ekstrakurikuler atau kegiatan

¹²²Solichin, *HMI Candradimuka...*, hlm. 168.

¹²³Dahlan Ranuwihardjo, *Menuju Pejuang Paripurna*, (Cet. I; Jakarta: CV. Subeka Agung, 2000), hlm. 46.

¹²⁴*Ibid.*

pembentukan skill hanya sebagai tambahan dan tidak menjadi wajib, sehingga tidak serius dalam pengembangan diri yang sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor di Indonesia.

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa memerlukan berbagai perubahan dalam pelaksanaan proses pendidikan yang terjadi di sekolah pada saat ini. Perubahan yang diperlukan tidak mesti mengubah kurikulum yang berlaku tetapi menghendaki sikap baru dan kererampilan baru pada guru, kepala sekolah dan konselor sekolah. Hal itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi (*conditio sine qua non*) untuk keberhasilan implementasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Perubahan sikap dan penguasaan keterampilan yang dipersyaratkan itu hanya dapat dikembangkan melalui pendidikan dalam jabatan yang terfokus, berkelanjutan, dan sistemik.¹²⁵

Berbeda dari materi ajar yang bersifat “*masteri*”, sebagaimana halnya “*performance content*” suatu kompetensi, materi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa bersifat “*developmental*”. Perbedaan hakikat kedua kelompok materi tersebut menghendaki perbedaan perlakuan dalam proses pendidikan. Materi pendidikan yang bersifat “*developmental*” menghendaki proses pendidikan yang cukup panjang dan bersifat saling menguatkan (*reinforce*) antara kegiatan belajar dengan kegiatan belajar lainnya, antara proses belajar di kelas dengan kegiatan kurikuler di sekolah dan di luar sekolah.¹²⁶

Begitupun dalam ranah perguruan tinggi atau universitas, universitas yang artinya *universum* atau bulat-menyeluruh, tidak sempit dalam disiplin ilmunya

¹²⁵Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum..., hlm. iii.

¹²⁶*Ibid.*

sendiri yang sebenarnya hanya merupakan bagian (fakultas) dari pengetahuan yang bulat-menyeluruh (universitas). Mahasiswa sebagai lapisan masyarakat yang berpendidikan (berpengetahuan dan berkarakter atau berkepribadian) memegang tanggungjawab merealisasikan ideologi negara, apalagi jika sudah meninggalkan bangku kuliah dan turun dalam masyarakat dengan berbagai profesi.¹²⁷

Negara Republik Indonesia merupakan negara ideologi, artinya negara yang pada saat diproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 telah merumuskan tujuan (ideologi) yang menjadi perjuangannya yaitu berupa Pembukaan UUD-45 berikut Pancasila. Negara ideologi haruslah berjuang untuk dan selalu memperjuangkan tercapainya dan terlaksananya ideologi negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹²⁸

Dengan demikian tugas dan kewajiban mahasiswa dan para sarjana adalah terus berjuang mewujudkan ideologi negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Dalam lingkup kampus, kesalahan fatal ketika mahasiswa hanya dianggap kuliah atau belajar kalau sekedar di dalam ruangan tertutup, diajarkan oleh dosen kampus tersebut, dan hanya aktivitas di internal kampus. Kampus harus mewajibkan mahasiswa masuk di organisasi mahasiswa atau organisasi kepemudaan. Melalui organisasi terhimpun calon-calon pembaruan ummat dan bangsa yang terstruktur dan bergerak terus-menerus sebagai perjuangan.

Kesalahan fatal pendidikan utamanya dalam ranah kampus dalam puluhan tahun belakangan ini sampai saat ini ketika dua sumber potensi pembentukan

¹²⁷Dahlan Ranuwihardjo, *Menuju...*, hlm. 46.

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 32.

karakter bangsa berjalan secara terpisah. Bahkan semua bisa mengakui saling bermusuhan. Hampir semua universitas atau kampus hanya menghendaki mahasiswanya belajar di kampus dan segera selesai. Akibatnya para sarjana yang diproduksi mayoritas pragmatis, memikirkan hanya diri sendiri dan sekedar segera berkeluarga. Tanggungjawab sosial, tanggungjawab kebangsaan tidak diperjuangkan karena tidak tersampaikan dan tidak terlatih dengan tugas dan tanggungjawab itu.

Maka kegiatan pendidikan di kampus harus memasukkan tanggungjawab sosial-kebangsaan itu serta kebijakan kampus yang mengarahkan pengembangan potensi diri dan menumbuhkan karakter bangsa melalui organisasi mahasiswa atau organisasi kepemudaan. Tentu harus ada waktu yang diluangkan dan mengurangi mata kuliah yang berlangsung di dalam kelas dan mengurangi tugas-tugas mahasiswa yang banyak tidak masuk akal dan tidak mengembangkan potensi dirinya.

Sikap pragmatis yang diberlakukan kampus selama ini memasung gerakan perjuangan generasi muda untuk mengeksplor segala potensi dan bakatnya demi kemajuan bangsa dan negara kemudian hari melalui tangan pemuda. Maka lihatlah apa yang terjadi pada bangsa dan negara kita sampai tahun 2017 ini?. Penuh kekacauan, dan terjepit dan terkubur dalam ribuan masalah di negeri ini tanpa ada solusi yang memadai. Kemanakah para sarjana atau para intelektual yang dicetak ribuan banyaknya di setiap kampus setiap tahunnya di seluruh Indonesia.

Para sarjana lebih banyak menjadi pekerja, teknisi, karyawan, dibanding membuka lapangan pekerjaan. Karena miskin ide, miskin kreativitas, miskin bakat, miskin skill yang dimiliki selama kuliah dan sampai sarjana. Karena program kuliah di kampus memang hanya disiapkan menjadi karyawan, pekerja di bawa kaki-tangan perusahaan asing, konglomerat, atau pekerjaan praktis lainnya.

Pejuang untuk merealisasikan cita-cita negara melalui organisasi mahasiswa yang bersifat ekstra kampus mengalami perjalanan yang tertatih-tatih. Pelarangan mahasiswa untuk berorganisasi ekstra kampus dilarang tegas oleh pihak birokrasi kampus, mulai dari rektor, dekan, ketua jurusan, dosen, satpam, dan lainnya. Sesuatu yang terasa ganjal kenapa mahasiswa yang mau belajar, mau mengembangkan ilmu dan bakatnya kemudian dilarang. Seolah-olah pendidikan atau ilmu itu hanya didapat di bangku kuliah.

Kemudian mata kuliah yang padat dan tugas-tugas yang menyiksa mahasiswa yang tidak mengembangkan bakatnya menjadi penghambat dalam membentuk karakter bangsa dalam dirinya melalui organisasi mahasiswa yang bersifat perjuangan. Seperti HMI, organisasi yang dalam Anggaran Dasarnya telah diuraikan dalam BAB IV yaitu, pasal 7 status: HMI adalah organisasi mahasiswa, pasal 8 fungsi: HMI berfungsi sebagai organisasi kader, pasal 9 peran: HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.¹²⁹

Begitupun dengan organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan lainnya menggerakkan perjuangannya pada cita-cita bangsa dan negara. Saat ini sama-sama memiliki kendala dengan kader yang bergabung selalu sedikit, serta

¹²⁹PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 59-60.

ruang dan waktu untuk belajar di organisasi mengalami kendala keterbatasan waktu akibat tugas kampus sangat banyak. Serta pemahaman yang keliru yang disampaikan oleh tenaga pendidik di kampusnya hanya cepat selesai dan fokus hanya memikirkan kuliah. Pola seperti ini terjadilah kemudahan dalam penyelesaian tetapi tidak dibarengi pembentukan kualitas.

Kampus atau lembaga pendidikan tidak menyiapkan alumni atau sarjanyanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan SDA yang melimpah dan butuh pengelolaan. Ajaran di sekolah dan di kampus sangat melenceng dari kebutuhan masyarakat. Maka bisa terasa sampai saat ini mayoritas SDA di Indonesia tidak bisa diolah sendiri oleh rakyat Indonesia. Dikelolah pihak asing dan rakyat Indonesia yang jadi buruh, karyawan.

Organisasi seperti HMI memiliki berbagai lembaga pengembangan minat, bakat, potensi dan kreativitas sesuai tuntutan zaman, sesuai kebutuhan lingkungan sekitarnya maupun lingkungan yang lebih luas. Demikian itu menjadi jalan pembentukan karakter mahasiswa yang akan memberi kontribusi kemudian hari di segala sektor. Sehingga meskipun bukan dari latar belakang disiplin ilmu jurusan yang mereka pilih ketika kuliah, bisa menguasai atau memahami disiplin ilmu lainnya. Hal ini menjadikan alumni HMI bisa berkiprah dan eksis di mana-mana.

Karakter bangsa Indonesia harus tumbuh pada setiap generasi, terutama pada masyarakat berpendidikan. Karakter bangsa yaitu sikap menyintai dan bersedia berkorban untuk bangsa dan tanah air.¹³⁰ Nasionalisme atau karakter bangsa di seluruh dunia masing-masing berbeda tergantung pada latar belakang

¹³⁰Dahlan Ranuwihardjo, *Menuju Pejuang Paripurna...*, hlm. 39.

kebudayaannya, sejarah dan watak setiap bangsa. Nasionalisme atau karakter bangsa ada juga yang jahat seperti nasionalisme Barat, termasuk Jepang dengan perangai ekspansionisme pada masa lalu, dan sekarang masih terlihat mempraktekkan imperialisme ekonomi atau neo-kolonialisme terhadap negara-negara berkembang.¹³¹

Indonesia memiliki latar belakang kebudayaan, sejarah dan karakter masyarakatnya sendiri yang sangat beda dengan negara-negara lain. Seperti karakter bangsa yang religius, sebagaimana dalam ideologi Pancasila paling awal meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengindikasikan watak negara Indonesia yang bertuhan, religius, yang menentang kezaliman, kolonialisme, imperialisme, dan berbagai kejahatan lainnya.

Nurcholish Madjid kembali mengemukakan bahwa HMI adalah gejala Islam dan gejala Indonesia terpadu secara utuh, sehingga dalam mengekspresikan keislamannya, HMI telah sekaligus menyatakan keindonesiaannya, dan ketika HMI mengekspresikan keindonesiaannya telah sekaligus mengekspresikan keislamannya. Dalam perspektif HMI, komitmen kepada keindonesiaan merupakan kelanjutan dari sistem keimanannya. HMI mengindonesia karena ingin mengejawentahkan nilai-nilai luhur yang diserapnya dari ajaran agama, maka dalam mengislam, HMI mengislam dalam wadah yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, yaitu tanah air Indonesia. Keindonesiaan dan keislaman bagi HMI merupakan dua sisi dari sekeping mata uang.¹³²

¹³¹*Ibid.*

¹³²Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. vi-vii.

Lafran Pane mengatakan, HMI adalah organisasi kader yang lahir karena kebutuhan politik mahasiswa. Kondisi politik yang melingkupi ketika itu merangsang beberapa mahasiswa untuk membentuk suatu organisasi yang bisa berguna pada masyarakat, bangsa dan agama. Karena itu tujuan didirikannya HMI diantaranya mempertahankan Negara Republik Indonesia serta mempertinggi derajat dan martabat rakyat Indonesia. Juga untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam di muka bumi.¹³³

Kemudian Ahmad Syafi’I Maarif yang dikutip Solichin mengatakan, “masa depan Indonesia harus disiapkan dengan strategi yang mantap, supaya masyarakat Pancasila yang diinginkan itu menyatu dengan citra dan tata sosio-politik yang dicita-citakan Islam. Islam tidak mungkin dipisahkan dengan cita-cita kemasyarakatan karena demikian itu merupakan bagian yang menyatu dengan struktur ajarannya”.¹³⁴

Karakter seseorang berkembang berdasarkan potensi yang dibawa sejak lahir atau yang dikenal sebagai karakter dasar yang bersifat biologis. Menurut Ki Hadjar Dewantara, aktualisasi karakter dalam bentuk perilaku sebagai hasil perpaduan antar karakter biologis dan hasil hubungan atau interaksi dengan lingkungannya.¹³⁵ Oleh karena itu dalam Himpunan Mahasiswa Islam berupaya untuk melaksanakan perkaderan guna membentuk kader-kadernya menjadi individu yang berkarakter melalui interaksi lingkungannya. Sesuai dengan faktor-faktor pembentukan karakter yang terdiri dari heriditas dan juga lingkungan.

¹³³Lafran Pane, *4 Tulisan Lafran Pane*. (Cet. I; Jakarta Selatan: KAHMI Centre, 2015), hlm. 107.

¹³⁴Solichin, *HMI Candradimuka...*, hlm. 156.

¹³⁵Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 13.

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa keindonesiaan direspon secara keliru ketika hanya bertitik tolak dari ikatan primordial dan emosional yang didasarkan pada titik temu semangat kedaerahan serta obsesi kejayaan Indonesia masa lampau. Tetapi keindonesiaan erat kaitannya dengan sifat mental yang dibentuk melalui pendidikan. Hasil pendidikan itulah yang memberi kesadaran pada sejumlah orang yang merintis perjuangan kebangsaan, membukakan jalan menuju kemerdekaan. Paling besar dampaknya yaitu menyelenggarakan Kongres Pemuda, dengan Sumpah Pemuda.¹³⁶

Memahami ungkapan tersebut dipahami bahwa karakter keindonesiaan, atau karakter bangsa harus dibangun, karena karakter bangsa yang akan membuat generasi peka terhadap kemajuan bangsa dan negaranya. Pembentukan karakter bangsa itu melalui dengan pendidikan. Begitu juga dengan HMI yang menyatakan dirinya sebagai organisasi kader, maka HMI itu ada selama dia mengkader, dan kader merupakan tulang punggung perubahan mewujudkan cita-cita organisasi.

Rangkaian proses yang dilalui kader HMI dalam pembentukan karakter sangat panjang dan sistematis. Selain mendapatkan kaderisasi dari perguruan tinggi atau universitas dengan spesialisasi jurusannya, kader HMI juga banyak menimba ilmu melalui proses kaderisasi di HMI baik yang berjenjang seperti Latihan Kader I, Latihan Kader II, Latihan Kader III maupun melalui perkaderan non formal seperti kursus ideologi, strategi dan taktik, manajemen organisasi, retorika, dan lainnya serta pembentukan skill dan kreativitas.

¹³⁶Solichin, *HMI Candradimuka...*, hlm. 156.

Disamping kader-kader HMI melakukan ideologisasi melalui pengkajian nilai dasar perjuangan (NDP) melalui tahapan baik sebagai materi utama dalam basic training maupun follow up-nya misalnya Up grading instruktur NDP dan upaya pembaharuan pemikiran Islam.¹³⁷ Kemudian nilai-nilai yang telah ditransfer dalam proses perkaderan merupakan pembentukan pola pikir dan sikapnya, demikian itulah di sebut dengan karakter atau keperibadian.

Secara keseluruhan gerakan perkaderan HMI diarahkan untuk mencapai derajat sebagai kader yang memenuhi syarat sebagai insan cita, dengan kata lain dalam pola perkaderan HMI bertujuan untuk membentuk kader yang berkarakter Insan Cita. Namun selain karakter insan cita, secara umum pola perkaderan di HMI juga membentuk karakter lain seperti halnya dalam metode training yang dilakukan dengan sistem ceramah yang bertujuan membentuk sikap dan juga karakter toleransi terhadap orang lain, juga berfikir kritis dalam menyerap materi. Begitu juga dengan sistem diskusi yang pastinya menginginkan para anggota untuk bersikap berani dalam mengungkapkan pendapat, kemudian dalam sistem penugasan yang mengajarkan anggota untuk bersikap tanggungjawab atas tugas yang telah diberikan, dan lain-lain. Dan pastinya dalam tiap metode yang digunakan mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai untuk para anggota.

Menurut Ahmad Wahib bahwa insan cita HMI adalah mereka yang berkemampuan akademis, bersikap hidup kreatif, berwatak pengabdian, dan bernaafaskan Islam. Kemampuan akademis dan emosi kreatif yang dimilikinya akan melahirkan *Scientifity* atau *developed cretlivit*. Sedangkan insan akademis

¹³⁷Sidratahta Mukhtar, *HMI...*, hlm. 87.

tanpa kreasi adalah seseorang sarjana atau seorang tukang yang bekerja tanpa rutinitas. Mereka yang tergolong tukang ini tidak akan kecewa bila dirinya tidak mampu lagi memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat yang timbul.¹³⁸

Pada intinya insan cita HMI merupakan “*man of future*” insan pelopor yaitu insan yang berfikir luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan.¹³⁹

3. Fungsi pembentukan karakter kader bagi HMI

Fungsi pembentukan karakter kader bagi HMI berikhtiar melakukan perubahan sesuai dengan misi yang diemban oleh para Nabi, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Rahmat bagi seluruh alam menurut Islam adalah terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan universal (*universal brotherhood*), egaliter, demokratis, berkeadilan sosial (*social justice*), berakhlakul karimah, *istiqomah* melakukan perjuangan untuk membebaskan kaum tertindas (*mustadh'afin*), serta mampu mengelola dan menjaga keseimbangan alam.¹⁴⁰

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kader diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi sesuai cita-cita yang ingin diwujudkan sebagaimana tercantum di Anggaran

¹³⁸Sidratahta Mukhtar, *HMI...*, hlm. 98.

¹³⁹PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 113.

¹⁴⁰PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXIX...*, hlm. 290.

Dasar, bab 3, pasal 4 tentang tujuan, yaitu; “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.”¹⁴¹Tujuan ini pertama ditetapkan di Kongres HMI ke-9 di Malang, tanggal 3-10 Mei tahun 1969.¹⁴²

4. Konsep Perkaderan HMI

Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta’ala”. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pada hakikatnya seluruh aktivitas HMI merupakan proses pembinaan terhadap kader HMI agar setiap individu kader memiliki kualitas insan cita. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas pokok HMI secara organisatoris adalah menyediakan sumberdaya manusia yang akan berperan aktif dalam kehidupan umat dan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta’ala tersebut.¹⁴³

Penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, hanya dapat dicapai melalui serangkaian usaha sistematis, terarah, dan utuh-menyeluruh, diistilahkan dengan perkaderan. Secara sederhana pengertian dari perkaderan adalah serangkaian usaha organisasi yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan terus-menerus untuk pembentukan dan pengembangan diri dan karakter kader, supaya memiliki kepribadian kader sebagaimana yang diharapkan, yaitu Insan Cita. Dan

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 70.

¹⁴²Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan...*, hlm. 146.

¹⁴³PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXIX...*, hlm. 296.

yang dimaksud dengan kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar.¹⁴⁴

Untuk memberikan acuan dan arahan dalam pelaksanaan perkaderan agar sistematis, diperlukan suatu pedoman yang memuat konsep perkaderan untuk mengatur dan memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan perkaderan secara komprehensif, diantaranya meliputi: landasan/dasar, prinsip, ruang lingkup, pola, pengelolaan, dan monitoring evaluasi. Pedoman ini merupakan acuan umum dan arah perkaderan bagi seluruh elemen HMI dalam pelaksanaan perkaderan guna membentuk kepribadian kader sesuai yang dicita-citakan.¹⁴⁵

5. Landasan Perkaderan HMI

Landasan perkaderan HMI merupakan pijakan dasar bagi aktivitas HMI di dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi perkaderan. Nilai-nilai yang termaktub di dalam landasan ini tiada lain merupakan spirit yang harus dijiwai baik oleh HMI secara kolektif maupun kader HMI secara individual. Dengan demikian, aktivitas kaderisasi di HMI tidak akan keluar dari nilai-nilai yang dimaksud, agar setiap aktivitasnya selalu mengarahkan pada tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang dan terarah.¹⁴⁶ Maka landasan-landasan yang dimaksud, terbagi menjadi empat pokok landasan:

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶*Ibid.*

1) Landasan Teologis

Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Dia adalah makhluk yang menurut alam hakikatnya sendiri, yaitu sejak masa primordialnya selalu mencari dan merindukan Tuhan. Inilah *fitrah* atau kejadian asal sucinya, dan dorongan alaminya untuk senantiasa merindukan, mencari, dan menemukan Tuhan. Agama menyebutnya sebagai kecenderungan yang *hanif* (*Hanafiyah al-samhah*), yaitu “sikap mencari kebenaran secara tulus dan murni, lapang, toleran, tidak sempit dan tidak membelenggu jiwa.”¹⁴⁷

Kemudian, bahwa fitrah bagi manusia adalah adanya sifat dasar kesucian yang kemudian harus dinyatakan dalam sikap-sikap yang suci dan baik kepada sesamanya. Sifat dasar kesucian itu disebut dengan *hanafiyyah*, dan sebagai makhluk yang *hanif* itu manusia memiliki dorongan kearah kebaikan, kebenaran, dan kesucian. Pusat dorongan *hanafiyyah* itu terdapat dalam dirinya yang paling mendalam dan paling murni, yang disebut hati nurani, artinya bersifat *nur* atau cahaya (*luminous*). Kesucian manusia merupakan kelanjutan perjanjian primordial antara manusia (*ruh*) dan Tuhan, yaitu suatu perjanjian atau ikatan janji antara manusia sebelum lahir ke dunia dengan Tuhan, bahwa manusia akan mengakui Tuhan sebagai pelindung dan pemelihara (*rabb*) satu-satunya baginya.¹⁴⁸

Dengan demikian, ruh manusia dijiwai oleh kesadaran tentang yang Mutlak dan Maha Suci (*Transenden, Munazzah*), kesadaran tentang kekuatan yang Maha Tinggi yang merupakan asal dan tujuan semua yang ada dan yang

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 297.

¹⁴⁸*Ibid.*

berada diatas alam raya. Kesadaran ini merupakan kemampuan intelek (*Aql*), sebuah piranti pada manusia untuk mempersepsi sesuatu yang ada diatas dan diluar dataran jasad ini. Juga atas dasar perjanjian primordial itu pula, manusia diberikan amanah sebagai wakil Tuhan (*Khalifah*) di muka bumi ini, yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola alam raya dengan sebaik-baiknya, disertai dengan peniruan terhadap sifat-sifat Tuhan sebagai *Rabb Al-amin*.¹⁴⁹

Demi menjalankan fungsi kekhalfahan, manusia seringkali memiliki kecenderungan dan godaan untuk mencari “jalan pintas” yang gampang dengan mengabaikan pesan dan mandat dari Tuhan. Sebaliknya, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup dan keinsyafan akan datangnya masa pertanggung jawaban mutlak kelak diakhirat, membuat manusia terlindungi dirinya dari ketelanjangan spritual dan moral yang tercela. Itulah pakaian taqwa yang mesti dikenakan manusia setiap saat dan tempat. Taqwa itu sendiri memiliki arti *God Consiousness*, atau “kesadaran ketuhanan”, dan itulah sebaik-baik proteksi dari noda ruhani.¹⁵⁰

Sebagai bentuk dasar akan adanya “kesadaran ketuhanan” tersebut, maka manusia harus pula dapat menginternalisasi konsepsi tawhid yang merupakan perwujudan kemerdekaan yang ada padanya. Implikasi logis dari tawhid itu sendiri adalah meneguhkan sikap dan langkahnya sebagai khalifah, dengan cara tidak memperserikatkan-Nya kepada sesuatu apapun juga dengan cara

¹⁴⁹*Ibid.*

¹⁵⁰*Ibid.*

meninggalkan praktek mengangkat sesama manusia sebagai “tuhan-tuhan” (*arbab*), selain kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵¹

Mengangkat sesama manusia sebagai “tuhan-tuhan” ialah menjadikan sesama manusia sebagai sasaran penyembahan, dedikasi, devosi, atau sikap pasrah total. Dengan demikian maka tauhid mengharuskan adanya pembebasan diri dari objek-objek yang membelenggu dan menjerat ruhani. Ini adalah sejajar dan identik dengan semangat dan makna dari bagian pertama kalimat persaksian, “Aku bersaksi bahwasanya tiada suatu tuhan (*ilah*)...” yakni, aku menyatakan diri bebas dari kukungan kepercayaan-kepercayaan palsu yang membelenggu dan menjerat ruhaniku. Kemudian untuk menyempurnakannya, maka pernyataan kedua diteruskan sebagai proses pembebasan “...kecuali Allah, (*Al-Ilah, Al-Lah*, yakni Tuhan yang sebenarnya, yang dipahami dalam kerangka semangat ajaran ketuhanan yang maha esa atau *tauhid uluhiyya*, monoteisme murni-strict monotheisme).¹⁵²

Maka dari itu, tauhid bukan hanya melahirkan taqwa, melainkan inspirasi dan peneguhan fungsi dasar manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan sebagai akhir dari pada fungsi manusia tersebut, maka di hari akhirat kelak manusia akan di mintai pertanggung jawaban secara pribadi, yaitu pertanggung jawaban atas setiap pilihan yang ditentukannya secara pribadi di dunia. Sehingga tidak ada pembelaan berdasarkan hubungan solidaritas, perkawinan, kawan-karib maupun sanak-saudara. Manusia disebut berharkat dan bermartabat tiada lain merupakan konsekuensi dari adanya hak dasar manusia untuk memilih dan menentukan

¹⁵¹*Ibid.*, hlm. 297-298.

¹⁵²*Ibid.*, hlm. 298.

sendiri perilaku moral dan etisnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manusia harus senantiasa memberi makna atas hidup di dunia ini melampaui tujuan-tujuan duniawi (*terrestrial*), menembus tujuan-tujuan hidup ukhrawi (*celestial*).¹⁵³

2) Landasan Ideologis

Islam sebagai landasan nilai transformatif yang secara sadar dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Islam mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan dan idealisme yang dicita-citakan. Untuk tujuan dan idealisme tersebut maka umat Islam akan ikhlas berjuang dan berkorban demi keyakinannya. Ideologi Islam senantiasa mengilhami, memimpin, mengorganisir perjuangan, perlawanan, dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua *status quo*, belenggu dan penindasan terhadap umat manusia.¹⁵⁴

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad telah memperkenalkan Islam sebagai ideologi perjuangan dan mengubahnya menjadi keyakinan yang tinggi, serta memimpin rakyat melawan kaum penindas. Nabi Muhammad lahir dan muncul dari tengah masyarakat kebanyakan yang oleh Al-Qur'an dijuluki sebagai "ummi". Kata "ummi" yang disifatkan kepada Nabi Muhammad menurut Ali Syariati dalam karyanya Ideologi Kaum Intelektual, berarti bahwa beliau berasal dari kelas rakyat. Kelas ini terdiri atas orang-orang awam yang buta huruf, para budak, anak yatim, janda dan orang-orang miskin (*mustadh'afin*) yang menderita,

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴*Ibid.*

dan bukan berasal dari kalangan borjuis dan elite penguasa. Dari kalangan inilah Muhammad memulai dakwahnya untuk mewujudkan cita-cita Islam.¹⁵⁵

Cita-cita Islam adalah adanya transformasi terhadap ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (*Universal Brotherhood*), kesetaraan (*Equality*), keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan ekonomi (*Economical Justice*). Ini adalah cita-cita yang memiliki aspek liberatif sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya tentu membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen. Hal ini disebabkan sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (*committed*). Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita Islam, *pertama*, persaudaraan universal dan kesetaraan (*equality*), Islam telah menekankan kesatuan manusia (*unity of mankind*),¹⁵⁶ yang ditegaskan dalam al-Qur'an dalam QS. Al-Hujurat: 49: [13]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya, Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.¹⁵⁷

Ayat ini secara jelas membantah semua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan

¹⁵⁵*Ibid.*

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm. 299.

¹⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), hlm. 518.

pentingnya keshalehan, baik keshalehan ritual maupun keshalehan sosial, sebagaimana al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah; 5: [8]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya, Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁵⁸

Kedua, Islam sangat menekankan kepada keadilan di semua aspek kehidupan. Keadilan tersebut tidak akan tercipta tanpa membebaskan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada kaum *mustadh'afin* untuk menjadi pemimpin. Menurut Al-Qur'an, mereka adalah pemimpin dan pewaris dunia.¹⁵⁹ QS. Al-Qashash: 5)

“Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di muka bumi. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi”

QS. Al-A'raf: 37)

“Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas seluruh timur bumi dan baratnya yang kami berkati.”

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 109.

¹⁵⁹PB HMI, Hasil-hasil Kongres HMI XXIX..., hlm. 299.

Di tengah-tengah suatu bangsa ketika orang-orang kaya hidup mewah di atas penderitaan orang miskin, ketika budak-budak merintah dalam belenggu tuannya, ketika para penguasa membunuh rakyat yang tak berdaya hanya untuk kesenangan, ketika para hakim mernihak kepada pemilik kekayaan dan penguasa, ketika orang-orang kecil yang tidak berdosa dimasukkan ke penjara maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan *rabbulmustadh'afin*. QS. An-Nisa; 4: [75]

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berdo’a, Tuhan kami ! Keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim, dan berilah kami perlindungan dan pertolongan dari sisi Engkau.”

Dalam ayat ini menurut Asghar Ali Engineer dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan, Al-Qur’an mengungkapkan teori *kekerasan yang membebaskan* yaitu QS. Al-Anfal: 39: *“Perangilah mereka itu hingga tidak ada fitnah.”* (Q.S. Al-Anfal: 39) Al-Qur’an dengan tegas mengutuk Zulm (penindasan). Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar kecuali oleh orang yang tertindas. *“Allah tidak menyukai perkataan yang kasar atau jahat (memaki), kecuali bagi orang yang teraniaya....”* (QS. An-Nisa: 148).

Ketika Al-Qur’an sangat menekankan keadilan ekonomi berarti Al-Qur’an seratus persen menentang penumpukan dan penimbunan harta kekayaan. Al-Qur’an sejauh mungkin menganjurkan agar orang-orang kaya hartanya untuk anak yatim, janda-janda dan fakir miskin, QS. Al-Ma’un:

“Adakah engkau ketahui orang yang mendustakan agarna? Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang shalat, yang mereka itu lalai dari sholatnya, dan mereka itu riya, enggan memberikan zakatnya.”

Al-Qur'an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja QS. Al Hasyr:

“Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri (orang-orang kafir), maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk karib kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang berjalan, supaya jangan harta itu beredar antara orang-orang kaya saja diantara kamu ... “

Al-Qur'an juga memperingatkan manusia agar tidak suka menghitung-hitung harta kekayaannya, karena hartanya tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Orang yang suka menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung harta benar-benar akan dilemparkan ke dalam bencana yang mengerikan, yakni api neraka yang menyala-nyala, juga dalam QS. Al-Humazah:1-9), dan QS. At-Taubah: 34.

Al-Qur'an memberikan beberapa peringatan keras kepada mereka yang suka menimbun harta dan mendapatkan hartanya dari hasil eksploitasi (*riba*) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Pada masa Rasulullah SAW banyak sekali orang yang terjerat dalam perangkap hutang karena praktek *riba*. Al-Qur'an dengan tegas melarang *riba* dan memperingatkan siapa saja yang melakukannya

akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (lihat, QS. Al-Baqarah: 275-279 dan Ar-Rum: 39). Demikianlah Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan untuk melakukan perjuangan membela kaum yang tertindas dan mereka (Allah dan Rasul-Nya) telah memposisikan diri sebagai pembela para *mustadh'afin*.

Dalam keseluruhan proses aktifitas manusia di dunia ini, Islam selalu mendorong manusia untuk terus memperjuangkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kejahatan, melawan penindasan dan eksploitasi.¹⁶⁰ Al-Qur'an memberikan penegasan, QS. Ali-Imran; 3: [110]

"Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia supaya kamu menyuruh berbuat kebajikan (ma'ruf) dan melarang berbuat kejahatan (munkar) serta beriman kepada Allah.

Dalam rangka memperjuangkan kebenaran ini, manusia memiliki kebebasan dalam mengartikulasikan Islam sesuai dengan konteks lingkungannya agar tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat mekanis dan dogmatis. Menjalankan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan kehidupan yang serba kompleks sesuai dengan kemampuannya.¹⁶¹

Demikianlah cita-cita Islam yang senantiasa harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, demokratis, egaliter dan berperadaban. Dalam memperjuangkan cita-cita tersebut manusia dituntut untuk selalu setia (*committed*) terhadap ajaran Islam seraya

¹⁶⁰*Ibid.*, hlm. 301.

¹⁶¹*Ibid.*, hlm. 302.

memohon petunjuk Allah SWT, ikhlas, rela berkorban sepanjang hidupnya dan senantiasa terlibat dalam setiap pembebasan kaum tertindas (*mustadh'afin*).¹⁶²QS. Al-An'am; 6: [162-163]

"Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku, semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada serikat bagi-Nya dan aku diperintah untuk itu, serta aku termasuk orang yang pertama berserah diri.

3) Landasan Sosio Kultural

Islam yang masuk di kepulauan Nusantara telah berhasil merubah kultur masyarakat terutama di daerah sentral ekonomi dan politik menjadi kultur Islam. Keberhasilan Islam yang secara dramatik telah berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan nusantara. Tentunya hal tersebut dikarenakan agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. Sifat Islam ini termanifestasikan dalam cara penyebaran Islam oleh para pedagang dan para wali dengan pendekatan sosio-kultural yang bersifat persuasif.¹⁶³

Masuknya Islam secara damai berhasil mendamaikan kultur Islam dengan kultur masyarakat nusantara. Dalam proses sejarahnya, budaya sinkretisme penduduk pribumi ataupun masyarakat, ekonomi dan politik yang didominasi oleh kultur tradisional, feodalisme, hinduisme dan budhaisme mampu dijinakkan dengan pendekatan Islam kultural ini. Pada perkembangan selanjutnya, Islam

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVIII.....*, hlm. 358.

tumbuh seiring dengan karakter keindonesiaan dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kultur Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin modern.¹⁶⁴

Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, maka kultur Islam telah menjadi realitas sekaligus memperoleh legitimasi social dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Dengan demikian wacana kebangsaan di seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya Indonesia meniscayakan transformasi total nilai-nilai universal Islam menuju cita-cita mewujudkan peradaban Islam. Nilai-nilai Islam itu semakin mendapat tantangan ketika deras arus globalisasi telah menyeret umat manusia pada perilaku pragmatisme, permissivisme dibidang ekonomi, budaya dan politik. Sisi negatif dari globalisasi ini disebabkan oleh percepatan perkembangan sains dan teknologi modern dan tidak diimbangi dengan nilai-nilai etik dan moral.¹⁶⁵

Secara sosiologis dan historis, kelahiran HMI pada tanggal 5 Februari 1947 tidak terlepas dari permasalahan bangsa yang di dalamnya mencakup umat Islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Kenyataan itu merupakan motivasi kelahiran HMI sekaligus dituangkan dalam rumusan tujuan berdirinya, yaitu: *pertama*, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan syiar ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa HMI bertanggung jawab terhadap

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵*Ibid.*, hlm. 358-359.

permasalahan bangsa dan negara Indonesia serta bertekad mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia secara total.¹⁶⁶

Makna rumusan tujuan itu akhirnya membentuk wawasan dan langkah perjuangan HMI ke depan yang terintegrasi dalam dua aspek keislaman dan aspek kebangsaan. Aspek keislaman tercermin melalui komitmen HMI untuk selalu mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa sebagai pertanggungjawaban peran kekhalifahan manusia, sedangkan aspek kebangsaan adalah komitmen HMI untuk senantiasa bersama-sama seluruh rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkeadaban. Dalam sejarah perjalanan HMI, pelaksanaan komitmen keislaman dan kebangsaan merupakan garis perjuangan dan misi HMI yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian HMI dalam totalitas perjuangan bangsa Indonesia ke depan.¹⁶⁷

Melihat komitmen HMI dalam wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947 tersebut, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah di muka bumi dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadaannya sebagai kader

¹⁶⁶PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVIII...*, hlm. 357.

¹⁶⁷*Ibid.*, hlm. 357-358.

bangsa Indonesia yang bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita bangsa ke depan.¹⁶⁸

4) Landasan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan HMI di masa depan, HMI harus mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam pasal tiga (3) tentang azas ditegaskan bahwa HMI adalah organisasi berazaskan Islam dan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁶⁹

Penegasan pasal ini memberikan cerminan bahwa di dalam dinamikanya, HMI senantiasa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan semangat keislaman yang tidak mengesampingkan semangat kebangsaan. Dalam dinamika tersebut, HMI sebagai organisasi kepemudaan menegaskan sifatnya sebagai organisasi mahasiswa yang independen (Pasal 6 AD HMI), berstatus sebagai organisasi mahasiswa (Pasal 7 AD HMI), memiliki fungsi sebagai organisasi kader (Pasal 8 AD HMI) serta berperan sebagai organisasi perjuangan (Pasal 9 AD HMI).¹⁷⁰

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya secara berkelanjutan yang berorientasi futuristik maka HMI menetapkan tujuannya dalam pasal empat (4) AD HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernaafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan

¹⁶⁸*Ibid.*, hlm. 358.

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 357.

¹⁷⁰*Ibid.*

makmur yang diridhoi Allah SWT. Kualitas kader yang akan dibentuk ini kemudian dirumuskan dalam tafsir tujuan HMI. Oleh karena itu, tugas pokok HMI adalah *perkaderan* yang diarahkan kepada perwujudan kualitas insan cita yakni dalam pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan sebagai amal saleh.¹⁷¹

Pembentukan kualitas dimaksud diaktualisasikan dalam fase-fase perkaderan HMI, yakni fase rekrutmen kader yang berkualitas, fase pembentukan kader agar memiliki kualitas pribadi Muslim, kualitas intelektual serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan secara profesional dalam segala segi kehidupan, dan fase pengabdian kader, dimana sebagai *output* maka kader HMI harus mampu berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berjuang bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.¹⁷²

1. Prinsip Perkaderan

Prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan berperilaku. Dengan demikian prinsip pada perkaderan merupakan asas-asas yang dijadikan pijakan dalam menjalankan sistem perkaderan. Adapun yang dijadikan prinsip-prinsip dalam perkaderan adalah:

a. Integratif

Prinsip integratif mengarahkan agar keseluruhan aspek yang ada di dalam perkaderan dapat digunakan secara menyeluruh, terhubung, tidak parsial dan tidak

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²*Ibid.*

mendikotomikan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Hal ini dapat ditemukan dalam perintah Tuhan dalam Al-Qur'an, bahwa selain manusia diperintahkan untuk sholat, ia juga diperintahkan untuk berzakat. Dengan kata lain, selain perintah untuk membaca ayat-ayat yang bersifat *Qauliyyah* (Wahyu), manusia juga diperintahkan untuk memikirkan ayat-ayat semesta (*Kauniyyah*). Dengan demikian, prinsip integratif adalah menghubungkan satu aspek perkaderan dengan aspek-aspek lainnya secara menyeluruh.¹⁷³

b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan merupakan keharusan dalam pengembangan dan pembinaan manusia sehingga tidak adanya kepincangan dan kesenjangan antara material, spritual maupun unsur jasmani, dan rohani. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan iman dan amal secara bersamaan. Iman adalah unsur yang menyangkut dengan hal spritual, sedangkan amal adalah yang menyangkut dengan material, yaitu jasmani.¹⁷⁴ Hal ini diperjelas dalam firman Allah QS. Al-Anbiya: 94:

“Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, Maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan Sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.”

c. Persamaan

Dalam menjalani seluruh proses perkaderan, tidak ada yang harus diperbedakan antara satu kader dengan kader lainnya. Seluruh kader berhak

¹⁷³PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXIX...*, hlm. 304.

¹⁷⁴*Ibid.*, hlm. 305.

mendapatkan perlakuan, pembinaan serta pasilitas yang sama, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kader maupun instruktur. Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang tentang kemanusiaan itu sendiri,¹⁷⁵ sebagaimana firman Allah QS. Al-Hujurat: 13:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

d. Kasih Sayang

Prinsip kasih-sayang tiada lain merupakan sifat dasar dari Tuhan YME, yaitu Ar-Rahman dan Ar-rahim. Sebagaimana kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, maka sudah seharusnya manusia menirukan segala sifat yang ada pada-Nya, menifestasi dari sifat-sifat Tuhan tersebut seyogyanya pula teraktualisasikan dalam proses pendidikan dan perkaderan. Prinsip ini mengarahkan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi dan watak kebaikan, dan kecenderungannya selalu pada kebenaran.¹⁷⁶

Maka pendekatan kearah potensi dasar manusia tersebut harus didekati dengan cara memberikan kasih-sayang, sehingga para kader merasakan dirinya diayomi dan diamong, sehingga dikemudian hari bisa terwujud melalui sikap yang

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶*Ibid.*

sadar untuk menjalankan segala kewajibannya sebagai kader.¹⁷⁷ Sebagaimana perintah Allah QS. Al-Fath: 29

“Saling mengasihi dan menyayangi diantara mereka.”

e. Keteladanan

Prinsip keutamaan ini dimaksudkan bahwa perkaderan bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi para kader, tetapi lebih dari itu untuk turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh para pengkader. Penerapan prinsip keteladanan ini dijadikan pula sebagai landasan bagi penerapan konsep-konsep perkaderan lainnya.¹⁷⁸ Prinsip ini mendapat legitimasinya di dalam al-qur“an yang berbunyi QS. An-Nahl: 125:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran (teladan) yang baik.”

f. Ketaatan

Prinsip ketaatan ini lahir dari adanya ketundukan (din) dan sikap pasrah (al-islam) sehingga membentuk satu kesatuan dan sikap menaati setiap aturan-aturan yang telah diberlakukan. Sebab, tidak ada ketaatan tanpa adanya ketundukan dan sikap pasrah terhadap sesuatu yang sedang diyakininya. Dalam konteks ini, bahwa setiap kader hendaknya menaati segala aturan-aturan main perkaderan HMI yang diiringi oleh pengamalan dalam lingkup keseharian,

¹⁷⁷*Ibid.*, hlm. 305-306.

¹⁷⁸*Ibid.*, hlm. 306.

khususnya ketaatan dalam hal menjalankan ibadah yaumiyyah dalam aktivitas kesehariannya. Prinsip ketaatan ini bersumber pada kebijakan baik yang dihasilkan secara nyata dalam perintah Allah, rasul, maupun dari para pemimpin yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan.¹⁷⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman QS. Al-Nisa; 59:

“Ta’atilah Allah dan Rasulnya, dan para pemimpin di antara kalian.”

2. Perkaderan HMI

Perkaderan atau training-training di HMI merupakan “sekolah HMI”. Status HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berkecimpung dalam badan ilmu pengetahuan dan tujuan-tujuan seperti dibuat pasal 4 anggaran dasar HMI, kemudian ditopang dengan perpustakaan. Perpustakaan HMI yaitu buku-buku yang diperlukan oleh anggota dalam studinya. Dengan demikian, HMI merupakan lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah.¹⁸⁰

Dalam proses pembentukan dan pengembangan kader HMI, dimulai sejak anggota (kader) mengikuti Latihan Kader I sampai dengan habis masa keanggotaannya. Sedangkan maksud dengan pembentukan adalah serangkaian aktivitas perkaderan yang integratif untuk memberikan penanaman nilai, ilmu pengetahuan dan keahlian, yang sifatnya mendasar. Sedangkan yang dimaksud pengembangan adalah serangkaian aktivitas perkaderan yang integratif untuk pengembangan diri kader agar dapat berlatih menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan suatu

¹⁷⁹*Ibid.*

¹⁸⁰PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVI...*, hlm. 275.

perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Illahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan melalui terbentuknya kader Muslim Intelegensia (Insan Cita).¹⁸¹

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan perkaderan khususnya pembentukan dan pengembangan, sehingga seluruh aspek dapat dilakukan, maka berdasarkan bentuknya, pelaksanaan perkaderan pada fase pembentukan dan pengembangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perkaderan formal dan perkaderan informal.¹⁸²

a. Perkaderan Formal

Perkaderan formal adalah bentuk perkaderan yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan gradual. Praktik dari pelaksanaan perkaderan formal ini adalah pelatihan atau training. Perkaderan formal atau training dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Training Formal

Training formal merupakan perkaderan HMI yang berbentuk pelatihan, dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman dan aturan yang baku secara nasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Pelatihan ini dinamakan Latihan Kader yang berfungsi memberikan kemampuan dasar kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing-masing jenjang pelatihan. Latihan Kader merupakan media perkaderan formal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan

¹⁸¹PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXIX...*, hlm. 309.

¹⁸²*Ibid.*, hlm. 310.

tertentu dari pesertanya, pada masing-masing jenjang latihan ini menitikberatkan pada pembentukan watak dan karakter kader HMI melalui transfer nilai, wawasan dan keterampilan serta pemberian rangsangan dan motivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Latihan Kader terdiri dan 3 (tiga) jenjang, yaitu:

- a) Latihan Kader I
- b) Latihan Kader II
- c) Latihan Kader III¹⁸³

2) Training Non-Formal

Training non-formal merupakan pelatihan diluar training formal yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu. Dalam training ini diharapkan para kader dapat mengikutinya sebagai kebutuhan mengembangkan diri, baik sebagai kader, maupun pengurus.¹⁸⁴ Adapun macam-macam kegiatan dalam training ini adalah:

- a) Training Of Trainer (TOT)
- b) Senior Course (SC)
- c) Training Managemen Training (TMT)
- d) Training Instruktur NDP
- e) Training Instruktur Ideopolitorstratak
- f) Training Gender

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴*Ibid.*

- g) Sekolah Pimpinan HMI
- h) Kursus Studi Islam (KSI)

3) Training Lainnya

Training lainnya merupakan pelatihan di luar training formal dan non-formal yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan minat kader. Adapun jenis-jenis dari training ini antara lain:

- a) Latihan Khusus Kohati
- b) Kursus Manajemen
- c) Kursus Bahasa Asing
- d) Training Metodologi Riset
- e) Training Badan Khusus dan Keprofesian
- f) Training Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (KMO)
- g) Training Kewirausahaan/*Entrepreneurship*
- h) Training lain yang dianggap perlu¹⁸⁵

b. Perkaderan Informal

Perkaderan informal merupakan pelaksanaan perkaderan di luar training, yang dilakukan secara terus-menerus yang meliputi berbagai kegiatan dalam organisasi HMI. Perkaderan informal ini menempati porsi yang sangat besar, karena ditinjau dari waktu mengader diri di HMI mencapai lebih dari 95%-nya

¹⁸⁵*Ibid.*, hlm. 305-311.

adalah perkaderan informal. Meskipun perkaderan informal ini lebih bersifat flexible dalam bentuk aktivitasnya, tetapi muatan nilai, ilmu pengetahuan, dan keahlian harus tetap memiliki standarisasi yang terukur.¹⁸⁶

Perkaderan informal mencakup hampir seluruh kegiatan perkaderan HMI antara lain meliputi:

1) *Follow-Up*

Follow-up merupakan aktivitas pasca training yang berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan kader sesuai dengan levelnya. Hal ini dimaksudkan sebagai penguat pada materi-materi yang telah diberikan dalam jenjang training dan bentuk tindak lanjut dari training.

2) *Up-Grading*

Up-Grading merupakan kegiatan yang menitik beratkan pada pengembangan nalar dan kemampuan kader dalam rangka mempersiapkan menuju jenjang training berikutnya. *Up-grading* wajib di lakukan sebagai pengembangan dan kelanjutan dari tiap-tiap jenjang training yang berfungsi sebagai penguat dan pengembangan pada training yang sebelumnya di ikuti.

3) Aktivitas

Yang dimaksud dengan aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh kader dalam rangka membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga menjadi Muslim-Intelegensia (Insan Cita).

4) Promosi

¹⁸⁶*Ibid.*

Promosi adalah pendistribusian kader dalam aktivitas struktur organisasi, baik internal ataupun eksternal HMI

5) *Coaching* atau Pendampingan

Coaching atau pendampingan adalah aktivitas perkaderan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan atau bimbingan terhadap kader oleh pendamping atau pembimbing yang bersifat personal/individu. Setiap individu kader, wajib dibimbing dan diarahkan sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing.

6) Pembentukan iklim, suasana dan budaya positif

Yang dimaksud dengan pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkaderan yang selaras dengan prinsip-prinsip perkaderan dalam setiap aktivitas HMI, sehingga para kader nyaman dan dapat mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Penciptaan kondisi ini mesti didukung oleh regulasi organisasi yang dapat mendorong terbentuknya kebiasaan dan kepribadian kader sesuai dengan Muslim Intelegensia (Insan Cita).

7) Kegiatan lain yang dibutuhkan.¹⁸⁷

c. Pengertian perkaderan.

Dalam bahasa sehari-hari perkaderan bisa juga disebut dengan istilah training ataupun pelatihan. Dalam hasil kongres HMI disebutkan bahwa perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis,

¹⁸⁷*Ibid.*, hlm. 311-312.

selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader muslim, intelektual, professional yang memiliki kualitas insan cita.¹⁸⁸

Dalam suatu perkaderan pasti terdapat macam-macam pelatihan atau training yang ada di dalamnya. Dalam buku manajemen sumber daya manusia, disebutkan bahwa pelatihan adalah proses sistematis pengubahan perilaku para anggota dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Pelatihan merupakan hal yang penting, karena keduanya merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara anggota dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan produktivitasnya.¹⁸⁹

Sedangkan Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa pelatihan (training) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi¹⁹⁰ Pada dasarnya pelatihan (training) itu merupakan proses yang berlanjut dan bukan proses sesaat saja. Munculnya kondisi-kondisi baru, sangat mendorong pemimpin organisasi untuk terus memperhatikan dan menyusun program-program latihan dan pendidikan yang kontinyu serta semaksimal mungkin.¹⁹¹

Jadi kaderisasi merupakan hal terpenting dalam organisasi, tanpa adanya kaderisasi, organisasi tidak akan dapat meneruskan eksistensinya. Jantung suatu organisasi adalah kaderisasi, sehingga hampir seluruh organisasi memiliki suatu

¹⁸⁸PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 309.

¹⁸⁹Ambar Teguh S & Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm.175-176.

¹⁹⁰Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 50.

¹⁹¹Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 61.

lembaga yang mengurus kaderisasi. Kaderisasi merupakan media atau cara yang digunakan untuk menanamkan pemahaman dan doktrin kepada calon anggota agar mereka dapat mengenal organisasi lebih mendalam sehingga memahami karakteristik, kultur, potensi, arah dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, sebuah keharusan bagi setiap organisasi untuk melakukan proses perkaderan.

d. Pengertian kader

Berbicara tentang perkaderan (pelatihan) tentunya tidak lepas dari obyek atau individu yang di berikan pelatihan yang mana dalam HMI individu tersebut dinamakan dengan kader. Eksistensi suatu organisasi apapun, apalagi lembaga-lembaga kemahasiswaan sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan bangsa di masa depan, pasti memerlukan kader.

Kader adalah anggota inti organisasi, mereka ini adalah ujung tombak dan penggerak organisasi. Karenanya mereka harus memiliki pandangan, visi, dan ideologi organisasi tersebut. Sebagaimana disebutkan bahwa setiap kader memerlukan sosialisasi politik dan pendidikan politik.¹⁹²

Menurut AS Hornby (dalam kamusnya *Oxford Advanced Learner's Dictionary*) dijelaskan, pengertian kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Hal ini dapat di jelaskan, *pertama*, seorang kader

¹⁹²Sidratahta Mukhtar, *HMI dan...*, hlm. 89-90.

bergerak dan terbentuk dalam berorganisasi, mengena aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi.¹⁹³

Bagi HMI aturan-aturan itu sendiri dari segi nilai adalah nilai dasar perjuangan (NDP). Dalam pemahaman memaknai perjuangan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai keislaman yang membebaskan (*Libration force*), dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum tertindas (*mustadhafin*). Sedangkan dari segi operasionalisasi organisasi adalah AD/ART HMI, pedoman perkaderan dan pedoman serta ketentuan organisasi lainnya.

Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. *Ketiga*, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pola aspek kualitas. *Keempat*, seorang kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan “sosial *engineering*”.¹⁹⁴

Taufiq Hidayat (Ketua PB HMI) dalam pidato Dies Natalis ke-49 HMI mengatakan bahwa, tugas kader-kader HMI adalah untuk melibatkan sisi-sisi derivasi anekaragam pemikiran, dengan peningkatan intensitas dan kualitas diskursus keislaman di setiap tingkatan organisasi. Jika bisa dilaksanakan dengan

¹⁹³PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 308.

¹⁹⁴*Ibid.*, hlm. 308-309.

baik, maka sepantasnya optimis akan muncul generasi baru pemikir Islam di Indonesia.¹⁹⁵

e. Maksud dan Tujuan Perkaderan

Maksud dan tujuan perkaderan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui suatu proses sadar dan sistematis sebagai alat transformasi nilai ke-Islaman dalam proses rekayasa peradaban melalui pembentukan kader berkualitas muslim-intelektual-profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pedoman perkaderan HMI. Segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengetahuan ke dalam perbuatan nyata sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya secara konseptual, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal shaleh.¹⁹⁶

Penjelasan dari membentuk kader yang muslim-intelektual-profesional ialah, muslim adalah:

- 1) Pembentukan integritas watak dan kepribadian, yaitu kepribadian yang terbentuk sebagai pribadi muslim yang menyadari tanggung jawab kekhalifahannya dimuka bumi, sehingga citra akhlakul karimah senantiasa tercermin dalam pola pikir, sikap dan perbuatannya.
- 2) Pengembangan kualitas intelektual yaitu segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu (*sains*)

¹⁹⁵Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm.328.

¹⁹⁶PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 313.

pengetahuan (*knowledge*) yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam.

- 3) Pengembangan kemampuan Profesional yaitu Segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengetahuan ke dalam perbuatan nyata sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya secara konsepsional, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal shaleh.¹⁹⁷

f. Unsur-Unsur Training HMI

Unsur-unsur training adalah komponen yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan perkaderan di HMI. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu,¹⁹⁸

- 1) Pengurus HMI, yang meliputi :
- 2) Pengurus HMI cabang.

Pengurus HMI Cabang berperan dalam menyelenggarakan pelaksanaan Latihan Kader II (*Intermediate Training*) yang berstatus sebagai panitia pelaksana LK II, serta mengatur regulasi pelaksanaan latihan kader I (*Basic Training*), dan legalisasi atas pengukuhan kelulusan peserta yang dituangkan dalam surat keputusan tentang pengukuhan dan pengesahan Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Islam. Di samping itu pengurus cabang juga bertanggung jawab atas

¹⁹⁷*Ibid.*

¹⁹⁸PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 369.

pelaksanaan training PUSDIKLAT Pimpinan HMI, Senior Course, serta Latihan Kader Kohati (LKK).

3) Pengurus HMI Komisariat.

Pengurus HMI Komisariat bertanggung jawab atas terlaksananya latihan kader I (*Basic Training*) sebagai penyelenggara kegiatan, serta program-program yang ada di komisariat.

4) Badan Pengelola Latihan (BPL)

Badan Pengelola Latihan (BPL) merupakan institusi yang bertanggung jawab atas terlaksananya semua program perkaderan dan training.

5) *Organizing Committee (OC)*;

Organizing Committee(OC); bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu hal yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan kegiatan. Tugas-tugas OC secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Mengusahakan tempat, akomodasi, konsumsi dan fasilitas lainnya.
- b) Mengusahakan pembiayaan dan perijinan latihan.
- c) Menjamin kenyamanan suasana dan keamanan latihan.
- d) Mengusahakan ruangan, peralatan dan penerangan.
- e) Bekerja sama dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mensukseskan jalannya latihan.

Kriteria yang harus dipenuhi adalah : anggota biasa HMI, telah mengikuti *follow up* dan *Up Grading* LK I, minimal 30 hari diangkat oleh pengurus HMI komisariat dengan surat keputusan.¹⁹⁹

- 6) *Steering Committee (SC)*; bertugas dan bertanggung jawab atas pengarahan dan pelaksanaan latihan. Tugas-tugas SC secara garis besar adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan perangkat lunak latihan.
 - b) Mengarahkan OC dalam pelaksanaan latihan.
 - c) Menentukan pemateri, instruktur serta fasilitator.
 - d) Menentukan pemandu atau *Master Of Training (MOT)*.

Kriteria yang harus dipenuhi adalah: memenuhi kualifikasi umum pengelola latihan, terlibat aktif dalam perkaderan HMI, diutamakan anggota BPL cabang, pernah menjadi *Organizing Committee (OC)* LK I.²⁰⁰

7) Pemandu atau *Master Of Training*

Pemandu atau *Master Of Training*; bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin, mengawasi, dan mengarahkan latihan. Sejak dibukanya training, tanggung jawab pengelolaan latihan berada sepenuhnya dalam tanggung jawab pemandu atau *Master Of Training* sampai latihan dinyatakan ditutup. Tugas-tugas pemandu atau *Master Of Training* secara garis besar sebagai berikut:

¹⁹⁹*Ibid.*

²⁰⁰*Ibid.*

- a) Memimpin latihan, baik dalam forum ataupun diluar forum.
- b) Memberikan materi apabila pemateri/ instruktur/ fasilitator tidak dapat hadir.
- c) Melakukan penajaman pemahaman atas materi yang telah diberikan.
- d) Melakukan evaluasi terhadap peserta.
- e) Mengadakan koordinasi diantara unsur-unsur yang terlibat langsung dalam latihan.

Kriteria yang harus dipenuhi adalah: memenuhi kualifikasi umum dan khusus pengelola latihan. Terlibat aktif dalam perkaderan HMI, memahami dan menguasai materi LK I, dapat menjadi suri tauladan yang baik, ditentukan oleh SC.²⁰¹

8) Pemateri/instruktur/fasilitator

Pemateri/instruktur/fasilitator; bertugas untuk menyampaikan materi latihan yang dipercayakan kepadanya.²⁰²

Dalam kegiatan perkaderan tentunya tidak lepas oleh para instruktur yang berfungsi sebagai elemen yang menentukan jalannya sistem perkaderan HMI. Instruktur biasanya diambil dari aktivis HMI yang senior yang dianggap telah matang memahami dan mendalami proses perkaderan disertai berbagai

²⁰¹*Ibid.*, hlm. 370.

²⁰²*Ibid.*

pengalaman ke-HMI-an. Instruktur bertugas untuk menyampaikan materi, wawasan, bimbingan, pembinaan dan membentuk kader-kader HMI.

Seorang trainer (instruktur) harus melakukan pembinaan dan pendidikan secara efektif dan komprehensif. Mereka harus mengarahkan kader-kader HMI yang lebih junior untuk mencapai profil ideal kader-kader HMI yang membentuk integritas dan kepribadian, pengembangan kualitas intelektual dan pengembangan kemampuan profesional yang terpadu dan integralistik.

Dalam perkaderan HMI, para instruktur mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi:

- a) Lulus Latihan Kader 1 (LK 1)
- b) Mengikuti kursus senior course, yaitu suatu wadah yang melatih untuk menjadi instruktur, yang didalamnya dilakukan pendalaman materi-materi pokok maupun materi pendukung lainnya.²⁰³

Sementara itu dalam buku manajemen sumber daya manusia di jelaskan bahwa syarat-syarat menjadi pelatih sebuah training antara lain:²⁰⁴

9) *Teaching Skills.*

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik atau mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, dan mentransfer pengetahuannya kepada peserta pengembangan. Ia harus dapat memberikan

²⁰³Sidratahta Mukhtar, *HMI...*, hlm. 96

²⁰⁴Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 73-74.

semangat, membina, dan mengembangkan agar peserta mampu untuk bekerja mandiri serta dapat menumbuhkan kepercayaan pada dirinya.

10) *Communication Skills.*

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan secara efektif. Jadi dapat dikatakan seorang pelatih harus mempunyai suara jelas, tulisan baik, dan kata-katanya mudah difahami peserta.

11) *Personality Authority.*

Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta. Ia harus berperilaku baik, sifat dan kepribadiannya disenangi, kemampuan dan kecakapannya diakui.

12) *Sosial Skills.*

Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin kepercayaan dan kesetiaan dari para peserta pengembangan. Ia harus suka menolong, objektif, dan senang jika anak didiknya maju serta dapat menghargai pendapat orang lain.

13) *Technical Competent.*

Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan tangkas dalam mengambil suatu keputusan.

14) *Emotion Stability.*

Seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak didiknya, tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapakan, keterbukaan, tidak pendendam, serta memberikan nilai objektif.

15) Peserta

Peserta adalah calon-calon kader yang telah lulus seleksi dan telah dinyatakan sebagai peserta oleh penyelenggara. Kriteria yang harus dipenuhi adalah : terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi, dan tidak sedang menjalani skorsing akademik, muslim/muslimah, bisa membaca Al-Qur'an, Bisa melakukan Sholat (hafal bacaan sholat), bersedia mengikuti seluruh kegiatan training, lulus seleksi.²⁰⁵

g. Metode Training

Berdasarkan hasil-hasil studi mendalam yang pernah dilakukan HMI, ditetapkan metode perkaderannya. Metode yang dipakai terutama sejak masa tahun 1970-an adalah gabungan antara sistem diskusi (Aloka sistem), sistem ceramah, dialog dan sistem penugasan. Sistem aloka mengembangkan pemahaman terhadap materi-materi training HMI melalui model diskusi, sedangkan materi indoktrinasi dilakukan melalui metode ceramah.

Sedangkan penugasan adalah pemahaman materi-materi training HMI dengan menggunakan pelatihan keterampilan peserta dimana sasarannya adalah membangun kemampuan tertentu melalui penulisan, laporan kerja dan bentuk-bentuk uji coba lainnya. Akan tetapi metode yang digunakan dirancang agar tidak

²⁰⁵PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 370.

kaku dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan terutama kondisi perguruan tinggi dimana perkaderan itu dilaksanakan. Metode juga melibatkan unsur peserta untuk ikut melibatkan diri dalam proses pelaksanaan. Misalnya ada proses pelibatan peserta dalam kontrol belajar antara peserta dengan panitia khususnya *Master of Training*, sehingga metode pelatihan dan kaderisasi HMI mengikuti konsep pendidikan politik modern.²⁰⁶

²⁰⁶Sidratahta Mukhtar, *HMI...*, hlm. 95.

E. Implementasi Pembangunan Karakter Bangsa pada Sistem Perkaderan HMI Cabang Yogyakarta.

Implementasi pembangunan karakter bangsa terhadap sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, merupakan upaya penggalian penulis dari berbagai aktivitas perkaderan yang dilakukan HMI Cabang Yogyakarta, baik ditingkat Cabang, sampai pada tingkat Komisariat yang terdiri dari 21 Komisariat di bawah naungan HMI Cabang Yogyakarta yang tersebar di beberapa Universitas di Yogyakarta. Kesemua rangkaian kegiatan yang positif dan produktif yang dilakukan kader HMI Cabang Yogyakarta, baginya adalah merupakan sistem dan bentuk perkaderan yang bertujuan membentuk karakter atau kepribadian setiap kader-kadernya. Adapun proses kaderisasi pembentukan karakter bangsa dalam sistem perkaderan HMI Cabang Yogyakarta yang terdiri dari:

1. Visi-Misi Perkaderan HMI Cabang Yogyakarta

- a. Visi: Menjadikan HMI Cabang Yogyakarta sebagai kiblat perkaderan terdepan dalam pengelolaan organisasi dan pengawalan kebijakan publik.
- b. Misi:
 - 1) Mengadakan supervisi terhadap kegiatan perkaderan komisariat secara berkala.

- 2) Meningkatkan kualitas kader melalui gerakan pakar intelektual.²⁰⁷

2. Tujuan LK1 HMI Cabang Yogyakarta

Penulis wawancara pada Master of Training mengenai tujuan LK1 HMI Cabang Yogyakarta, dalam wawancara dia mengatakan

“Menurut Saddam AB, kami tetap mengikut tujuan LK1 HMI secara nasional yang ditetapkan di buku pedoman perkaderan, yaitu; Terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa.”²⁰⁸

3. Pola Perekrutan Calon Kader HMI Cabang Yogyakarta

a. Tahap Pertama

1) Membuka Stand

Penulis wawancara pada Ketua Umum HMI Komisariat USHULUDDIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2017-2018, dalam wawancara dia mengatakan: “menurut Muflikhatun Afrianti, cara perekrutan calon anggota di Komisariat Ushuluddin dengan membuka stand.”²⁰⁹ Hal yang sama disampaikan oleh Sekertaris Umum HMI Komisariat STMIK AKAKOM, bahwa dalam perekrutan kader baru HMI, masih relevan dengan membuka stand.²¹⁰

Dikesempatan lain penulis juga wawancara pada Ketua Umum HMI Komisariat FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2017, dalam

²⁰⁷Wawancara dengan, Elfi Suharni di Kompleks UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 22 Mei 2017.

²⁰⁸Wawancara dengan, Saddam (Tim BPL) di LK1 Komisariat Ahmad Dahlan, Gedung Pemuda Ambarbinangun Yogyakarta, tanggal 26 November 2016.

²⁰⁹Wawancara dengan, Muflikhatun Afrianti, Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

²¹⁰Wawancara dengan, Apipuddin, Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

wawancara dia mengatakan: “Menurut Aam Saiful Anam, rata-rata di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bebas membuka stand untuk merekrut calon anggota baru HMI, dan selama ini kami membuka stand.”²¹¹

Hal senada disampaikan oleh Ketua umum HMI Komisariat Muawiyah dalam wawancara dia mengatakan, “menurut Rifat Syauqi, pola perekrutan kami di HMI adalah membuka stand.”²¹² Senada yang disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Mercubuana, dia mengatakan:

“Menurut Alfrian Fajar Ismail, HMI Komisariat Mercubuana menaungi enam fakultas. Sudah 15 tahun Mercubuana dan Psikologi. LK1 dua kali dalam satu periode, karena pertama sedikit, menjelang pertengahan semester ada lagi mahasiswa baru. Buka stand, dan tidak ada perlawanan dari kapus, dibiarkan, itu dikampus 1 dan dikampus 2 tidak perlu izin., kalau di kampus 3 ada tahapan harus memiliki izin. Kemarin buka stand di kampus 3, yang menjaga dari kader yang kuliah di kampus 3.”²¹³

2) Kendala membuka stand sehingga melalui brosur

Penulis wawancara pada Ketua Umum HMI Komisariat Avicena UMY periode 2016-2017, dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Sukriadi Zuhri, sebelum open rekrutmen, kami mengetahui tanggal dan kesiapan mahasiswa untuk ikut pelatihan kapan, karena kondisi kampus padatnya perkuliahan dan tugas-tugas bisa menyebabkan terkendalanya mahasiswa untuk mengikuti pelatihan dasar tersebut. Setelah diketahui, kami merapatkan dan meminta teman yang aktif di kampus, setelah mengetahui dilakukanlah open rekrutmen. Banyak kendala yang dihadapi melihat kampus latar belakangnya berbeda dengan HMI. Di situlah kesusahan kita sebagai kader HMI, kadang kontra dengan pihak kampus. Seperti ketika memakai atribut di kampus, satpam menyuruh melepaskan atribut. Kadang kalau mau bersifat represif pada kampus, teman-teman khawatir dengan perkuliahannya. Kedua, kendalanya kurang minatnya mahasiswa di Ingkup UMY mau

²¹¹Wawancara dengan, Aam Saiful Anam, Semarang (via telpon), tanggal 25 Januari 2018.

²¹²Wawancara dengan, Rifat Syauqi, Kaliurang Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2018.

²¹³Wawancara dengan, Elfrian Fajar Ismail di Wirobrajan Yogyakarta, tanggal 13 Januari 2018.

berorganisasi, banyak tanggapan dari kawan-kawan, senior, kenapa mahasiswa kurang minat berorganisasi, itu karena realita saat ini mahasiswa sekarang condong ke hedonisme, atau tidak mau pusing memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan dirinya sendiri.²¹⁴

Penulis wawancara pada Ketua Umum HMI Komisariat Lafran Pane UII Yogyakarta periode 2017-2018, dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Abdullah Afif, tantangan HMI klasik, kalah dengan HMI MPO. Sulit mengimbangi pernah kita buka stand kami diusir atas nama LEM, tetapi yang dominasi HMI MPO. Buka stand, ada buku bertumpuk, diajak ngobrol MABA. Ada promosi tentang HMI seperti melalui brosur. Langkah selanjutnya ketika di usir, buka stand di pinggir. DIPO terahir 2013 bukan ketua tapi ikut di LEM. Pengurus LAFRAN tidak ada di LEM, hanya di Lembaga Jurusan, LDK. Harapannya cuma 1 adalah sekretariat, saya mau merevolusi kader, seadanya yang penting ada secret. Sudah ada upaya mengumpul-ngumpul uang untuk kontrak, lebih memilih kost, karena sudah terlanjur kost atau mengontrak.”²¹⁵

3) Melalui media sosial

Ketua Umum HMI Komisariat Avicena dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Sukriadi Zuhri, cara open rekrutmen seperti melalui media sosial, buka stand di kampus, buat pamflet kemudian disebar dan ditempel di tempat-tempat mahasiswa berkumpul. Kemungkinan besar dapatkan kader melalui tempel pamflet, kalau buka stand, sedikit mahasiswa merapat, karena tidak ada atribut, sehingga tidak diketahui ada open rekrutmen. Jadi kita mainkan di sosial media dan disebar pamflet. Di antara media yaitu instagram, group-group line, di facebook. Setiap kader wajib menyebarkan informasi rekrutmen.”²¹⁶

Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan Janabadra dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar, kendala pertama saat sosialisasi pembukaan stand, ada dua HMI Jogja Raya dan Cabang

²¹⁴Wawancara dengan, Sukriadi Nuhri di Wates Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

²¹⁵Wawancara dengan, Abdullah Afif di Kaliurang Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

²¹⁶Wawancara dengan, Sukriadi Nuhri di Wates Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

Yogyakarta. Kami kecolongan mereka memanipulasikan data bahwa sudah cabang legal. Hampir 70% masuk di HMI Cabang Jogja Raya. Ketika diajak masuk di HMI Cabang Yogyakarta dia menjawab tidak enak lagi masuk ke HMI Yogyakarta. Kami juga kemarin sosialisasi, tetapi kami tidak bisa leluasa, dari pihak kampus yang tidak membolehkan, umumnya organisasi ekstra kampus.²¹⁷

4) Menampilkan kualitas kader HMI

Penulis dalam wawancara apada Ketua Umum HMI Komisariat Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Nadrhuna’im Abdilla, perekrutan calon anggota HMI, pertama membentuk panitia LK1, supaya terorganisir dalam merekrut kader, diadakan pas tahun ajaran baru. Kita buat stand di kampus. Tidak hanya menunggu, siapa saja yang mau bergabung di HMI. Setiap anggota bertanggungjawab membawa anggota untuk dikader di HMI. Mempengaruhi secara tidak langsung, seperti aktif di kelas, atau menunjukkan skillnya.”²¹⁸

Senada dengan Ketua Umum HMI Komisariat HB IX, dia mengatakan, pola perekrutannya kita pasang kader HMI yang berkualitas dan vokal di kepanitiaan, atau di atas panggung, jangan sampai ada kesalahan. Kita juga buka stand.²¹⁹

5) Asmaranisasi

Ketua Umum HMI Komisariat Hemengku Buwono IX dalam wawancara dia mengatakan “Menurut Syafiqurrohman, di samping buka stand, ada juga cara ASMARANISASI, yaitu pengurus HMI yang punya wajah lumayan tampan untuk mendekati perempuan atau sebaliknya pengurus yang cantik dipasang untuk

²¹⁷Wawancara dengan, Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar di Timoho Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²¹⁸Wawancara dengan, Nadrhuna’im Abdilah di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

²¹⁹Wawancara dengan, Syafiqurrohman di Patang Puluhan Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

cowok, untuk membuka diri tetap ada batasan untuk membuat nyaman kader baru.²²⁰

6) Pola perekrutan dengan terbuka

Penulis dalam wawancara dengan Ketua Umum HMI Komisariat Ahmad Dahlan mengenai pola perekrutan kader baru HMI, dia mengatakan:

“menurut Mahmud Mukadar, tidak ada kriteria khusus, yang penting mahasiswa itu muslim dan mau berorganisasi itu sudah cukup. Nanti di HMI berlatih sama-sama, mengasah kemampuan, tidak ada spesialisasi kader.

Tidak sepakat kalau ada kualifikasi tertentu, beberapa orang tidak masuk pada kriteria khusus, karena sama semua pertama masuk kuliah kapasitas sederhana saja. HMI harus lebih terbuka dalam merekrut kader, karena HMI organisasi perkaderan.²²¹

b. Tahap Kedua

1) Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA) HMI

Yogyakarta

Sebelum calon anggota HMI masuk di perkaderan LK1 atau Basic Training, terlebih dahulu dilaksanakan MAPERCA (Masa Pengenalan Calon Anggota), dan Screaning. Tujuan diadakannya MAPERCA untuk memperkenalkan wawasan intelektual, orientasi perjuangan HMI serta cara pandang HMI terhadap keislaman, keindonesiaan, organisasi, kemahasiswaan dan lainnya serta disampaikan berbagai konsekuensi perjuangan kemudian hari di HMI untuk mewujudkan cita-cita. Sehingga yang masuk di HMI adalah orang yang sadar, keinginan sendiri tanpa paksaan sebagai manusia merdeka.

Sedangkan screning bertujuan menguji sejauh mana wawasan kebangsaan, keislaman, kemahasiswaan, keorganisasian serta kesiapannya untuk terus

²²⁰Wawancara dengan, Syafiqurrohmah di Patang Puluh Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²²¹Wawancara dengan, Mahmud Mukadar di Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

berproses di HMI. Hasil screening ini pengurus, dan panitia perkaderan mengetahui peta kemampuan dan kekurangan kader, selanjutnya dilaporkan ke Pengelolah Latihan yang dimandat oleh Cabang untuk mengelolah perkaderan yang telah ditetapkan, biasanya diisi oleh anggota Badan Pengelolah Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, atau yang sudah lulus Senior Course (SC). Senior Course ini diiikuti oleh kader yang sudah LK2 (Intermediate Training) kemudian dalam SC akan dididik dan dilatih sebagai calon-calon guru di HMI dalam mengelolah perkaderan yang berkualitas.

Penulis melakukan wawancara dengan berbagai Ketua Umum HMI Komisariat sejajaran HMI Cabang Yogyakarta yang bertanggung jawab mengadakan perkaderan HMI disetiap kepengurusan. Penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum Tunas Bangsa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tentang, pembentukan wawasan intelektual calon anggota HMI. Ketua Umum HMI Komisariat Tunas Bangsa UMY yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Restu Pamuji, proses sebelum LK1, ada MAPERCA. Di MAPERCA kita mengenalkan HMI, keislaman dan keindonesiaan. Kita tekankan bahwa keislaman sejalan dengan keindonesiaan, umat Islam harus menghidupi NKRI karena tidak ada kontradiksi.”²²²

Selanjutnya dalam wawancara Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan Janabadra mengatakan, menurut Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar, “sebelum

²²²Wawancara dengan, Restu Pamuji di Kasihan Bantul Yogyakarta, tanggal 12 Januari 2018.

LK1 HMI yang terpenting calon anggota adalah niatnya mau mengabdikan, ikut MAPERCA dan screening sebagai proses sebelum LK1.”²²³

Penulis juga wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM UIN Sunan Kalijaga, menurut Abdu Alifah, “sebelum LK1 HMI ada MAPERCA, kita dipertegas bahwa HMI organisasi perkaderan, sudah ditegaskan bahwa waktu akan tersita dan ada konsekuensi ketika menjadi kader HMI, kita tekankan loyalitas dalam organisasi, dan ketika masuk di LK1, itu berarti ada kesiapan.”²²⁴

Penulis juga wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat Psikologi Mercubuana, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Kurnia, “Proses LK1 diadakan MAPERCA pertama, kegiatannya biasanya kita tergantung apa ketertarikan pengurus di tahun itu, seperti mampu membedah buku. Kita buka stand, boleh pinjam, boleh baca, boleh bertanya, setelah itu buka pendaftaran. Ada juga dengan cara membagi stiker HMI, tahap ini baru memberi tahu bahwa ada HMI. Kemudian MAPERCA kedua, diadakan suatu acara dan mereka mendaftar baru dijelaskan HMI, kami mendatangkan senior dari HMI Cabang mengenalkan HMI. Materi turun di MAPERCA, apa itu HMI, apa saja dilakukan, belajar apa saja.”²²⁵

Kemudian penulis juga wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat Mercubuana, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Elfrian Fajar Ismail, “MAPERCA ada, baik bentuknya jalan-jalan ke tempat wisata di Jogja sebagai pendekatan, kemudian bentuknya toksow, diundang dari HMI Cabang, dan BEM Universitas. Materi MAPERCA adalah ke-HMI-an, keislaman dan keindonesiaan. Kesediaan mengikuti LK1 pasti ditanyakan karena tidak ada pemaksaan, memang

²²³Wawancara dengan, Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar di Timoho Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²²⁴Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²²⁵Wawancara dengan, Kurniawati di Kampus 3 Universitas Mercubuana Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

harus benar-benar mau ikut, keinginan dia, dan berproses benar-benar mau.”²²⁶

Hal yang serupa juga diungkapkan Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Mulkhan Abdreza, ada MAPERCA sebelum LK1, tujuan MAPERCA ingin diketahui keislamannya seperti apa, keindonesiaannya, dan kemahasiswaan, itu nanti kita dapat gambaran dia mau di bawah ke mana di LKL, dan ada screning setelah MAPERCA sebelum LK1.”²²⁷ Penulis juga wawancara kepada Ketua Umum HMI Komisariat Universitas Ahmad Dahlan (UAD, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Mahmud Mukadar, sebelum LK1 diadakan wawancara, harus buat motivation latter, seperti apa keinginanmu masuk HMI, apa harapanmu masuk HMI, itu ditulis dalam berbentuk esay minimal 1 lembar kertas folio, itu menjadi bahan evaluasi pengurus bidang PPPA, setelah LK1. Setelah itu masuk pada rangkaian-rangkain acara seperti pedoman perkadern HMI diantaranya, MAPERCA, screaning, kemudian Basic Training (LK1).”²²⁸

Melihat data yang diungkapkan di atas, bahwa sebelum HMI melakukan perkaderan terhadap calon anggota baru, terlebih dahulu telah disampaikan gambaran umum pemikiran HMI, terutama pada keserasian antara Islam dan Indonesia dan pemikiran yang inklusif (terbuka). Ini merupakan suatu karakter atau ciri khas tersendiri yang dimiliki HMI. Ketika yang bergabung di HMI atas keinginan mereka sendiri artinya telah siap menerima konsekuensi pemikiran yang terbuka dan pemahaman keislaman dan keindonesiaan yang menjadi nafas

²²⁶Wawancara dengan, Elfrian Fajar Ismail di Wirobrajan Yogyakarta, tanggal 13 Januari 2018.

²²⁷Wawancara dengan, Mulkhan Andreza di Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

²²⁸Wawancara dengan, Mahmud Mukadar di Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

perjuangan. Juga bertujuan untuk memahami kekurangan di ranah apa, serta harapannya kemudian diberi solusi.

2) Term of Refference (TOR) MAPERCA

Term of Refference

Masa Perkenalan Calon Anggota

“Muslim-Intelegensia sebagai Kepribadian Kader untuk Mengaktualisasika
Mahasiswa Islam yang Akademis dan Organisatoris”

a) Latar Belakang

Salah satu konsep perkaderan HMI dijabarkan dalam kepribadian kader. Kepribadian kader ini diistilahkan juga sebagai muslim-Intelegensia. Yaitu suatu kepribadian seseorang yang menganut ajaran agama islam secara sempurna dan merujuk pada strata sosial yang mengindikasi respon kolektif dari identitas kolektif tertentu. Organisasi HMI ini dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkan kualitas kader Muslim-Inteligensia ini.

Sebagai suatu kepribadian kader, muslim-intelegensia ini memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- (1) Memiliki kemampuan membumikan ajaran-ajaran Islam dalam amaliyah sehari-hari, dan prilaku.
- (2) Memiliki kemampuan mentransformasikan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam lingkup kehidupan dimana ia berpijak.
- (3) Memiliki kemampuan leadership dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Secara ringkas, ketiga ciri tersebut dapat disebut sebagai ciri islamis, ciri akademis, dan ciri organisatoris. Jadi dapat dikatakan seorang mahasiswa islam yang akademis dan organisatoris adalah aktualisasi itu sendiri dari seorang muslim-intelegensia.

Ketiga ciri muslim intelegensia tersebut bukanlah sesuatu yang tumpang tindih, saling menegasi ataupun saling tolak - menolak. Ketiganya adalah sesuatu yang saling melengkapi. Sifat islamis memberikan jalan nilai (arah) bagi kader. Nantinya, sifat akademis digunakan agar arah yang ditetapkan memiliki manfaat. Lalu pelaksanaan teknisnya membutuhkan sifat organisatoris agar terlaksana secara baik bahkan sempurna.

Oleh karena itu, ber-HMI bukan berarti kita belajar keislaman saja, atau malah menjadi aktivis saja. Ber-HMI berarti memiliki kepribadian kader HMI, kepribadian yang diaktualisasikan sebagai mahasiswa islam yang akademis dan organisatoris.

b) Tujuan

- (1) Memahamkan mahasiswa akan kepribadian kader HMI dan wujudnya.
- (2) Menyadarkan mahasiswa akan pentingnya berorganisasi di HMI.
- (3) Memahamkan keseimbangan akademis dan organisatoris untuk mahasiswa islam.

c) Kegiatan

- (1) Nama Kegiatan

Kegiatan ini bernama MAPERCA (Masa Perkenalan Calon Anggota) dengan tema “Muslim-Intelegensia sebagai Kepribadian Kader untuk Mengaktualisasikan Mahasiswa Islam yang Akademis dan Organisatoris”

(a) Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan seminar dengan pembicara dimoderatori dalam membawakan materi. Bentuk kegiatan MAPERCA ini adalah sebagai berikut :

Pertama, pembukaan

Kedua, pemaparan Pemateri dipandu Moderator.

Ketiga, tanya Jawab

Keempat, penutup

(b) Waktu dan Tempat

Waktu :

Jam :

Tempat :

(c) Peserta

Peserta dalam MAPERCA ini adalah mahasiswa calon anggota HMI Komisariat.

(d) Penyelenggara

Penyelenggara pelatihan kepenulisan ini adalah bidang Panitia LK I HMI Komisariat.²²⁹

²²⁹Documen MAPERCA HMI Cabang Yogyakarta.

c. Tahap Ketiga

Screening calon peserta baru HMI

Penulis wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat SAINTEK, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Ulin Nuha, LK1 HMI Komisariat SAINTEK UIN Sunan Kalijaga ada screening calon peserta baru, untuk menguji sampai di mana pemahaman calon peserta baik aspek keislamannya maupun aspek keindonesiaannya.²³⁰ Hal senada yang disampaikan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Insan Cita, yang diwawancarai mengatakan:

Menurut Rangga Tritama, bahwa ada screening sebelum LK1 dimulai, untuk menjadi acuan oleh MOT bagian mana yang kurang pada peserta dan akan dibenahi melalui materi HMI.²³¹ Begitupun ungkapan dari Ketua Umum HMI Komisariat ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diwawancarai mengatakan:

Menurut Fauzan Anwar, screening dilaksanakan sebelum dimulai LK1, meskipun bukan untuk seleksi diterima atau tidak, semua diterima, tetapi screening memberikan gambaran pada pengurus komisariat dan MOT bagian mana yang kurang pada peserta akan dibenahi.²³²

Berdasarkan informasi di atas, di pahami bahwa sebelum calon anggota masuk di LK1 HMI, banyak rangkaian yang harus dia lewati, terutama tahap screening dengan menguji berbagai wawasan.

²³⁰Wawancara dengan, Ulin Nuha, Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2018.

²³¹Wawancara dengan, Rangga Tritama, Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2018.

²³²Wawancara dengan, Fauzan Anwar, Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2018.

d. Tahap Keempat

1) Proses LK1 (Basic Training) HMI Cabang Yogyakarta

a) Peserta

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Sekertaris Badan Pengelola Latihan (BPL) periode 2015-2016 tentang peserta training LK1. Dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Muslim Pohan, peserta LK1 HMI mahasiswa Islam yang telah lulus screaning dan telah dinyatakan sebagai peserta oleh penyelenggara kegiatan. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah: terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian bisa membaca Al-Qur'an, bisa melaksanakan sholat, kemudian bersedia mengikuti seluruh materi atau rangkaian training.”²³³

b) Kegiatan di lapangan

Ketika berlangsung LK1 HMI di setiap Komisariat, peserta ditanamkan berbagai pembentukan karakter. Bukan hanya materi yang diterima, tetapi ketika sudah materi berlangsung diminta membuat resume dari apa yang sudah dipahami dalam penyampaian materi telah berlangsung sampai selesai training dikumpulkan pada Master Of Training (MOT), sebagai pengelolah perkaderan. Training dari 07.00 pagi sampai sekitar jam 00.00 dini hari. Setelah itu dilanjut Forum Group Diskusi (FGD) membahas isu-isu kenegaraan terkini setiap kelompok memilih atau dipilhkan pembahasan yang berbeda. Kemudian jam 04.00 dibangunkan

²³³Wawancara dengan, Muslim Pohan di LK1 HMI Komisariat Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 25 Maret 2017.

shalat subuh dilanjut olahraga dan mandi, kemudian jam 07.00 dilanjut kembali materi.²³⁴

Proses LK1 demikian juga dilakukan di LK1 HMI Tunas Bangsa, dan ada tradisi penilaian kader dengan ketat dan sistematis dilakukan oleh MOT. Baik penilaian dari sikap peserta dalam forum, biasanya dibantu oleh Sterring Committee atau panitia pelaksana menilai sikap peserta. Setelah itu dilaporkan kepada MOT supaya mengimput nilai dan mengakumulasi penilaian dari psikomotorik dan afektifnya.²³⁵

Kemudian penulis temukan juga dalam LK1 Komisariat Insan Cita Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, ada tradisi saling menilai antara antara peserta ke MOT (pengelola training) dan ke pemateri. MOT kemudian menyampaikan kritikan peserta kepada pemateri sambil MOT juga memberi penilaian dan saran, supaya kedepannya ketika mengisi kembali materi di HMI, memperhatikan segala masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk kualitas setiap training.²³⁶

Demikian juga di LK1 Komisariat Avicena.²³⁷ Kemudian ada pelatihan mental puncaknya diselenggarakan di malam terahir sebelum pengukuhan, biasanya dimulai sudah isya dan berahir menjelang shalat shubuh. Pola latihan mental harus melewati beberapa pos-pos yang diisi oleh kader-kader HMI hampir

²³⁴Observasi LK1 HMI Komisariat UAD di Ambarbinangun Yogyakarta, tanggal 25 November 2016.

²³⁵Observasi LK1 HMI Komisariat Tunas Bangsa di Waduk Sermo Kulonprogo, tanggal 19 November 2016.

²³⁶Observasi LK1 HMI Komisariat Insan Cita di Gedung Pusat Kebudayaan Yogyakarta, tanggal 27 November 2016.

²³⁷Observasi LK1 HMI Komisariat Avicena di Dlingo Bantul Yogyakarta, tanggal 3 Desember 2016.

semua komisariat ada utusan, dan dibagi setiap pos biasa diisi 3 atau sampai 5 orang bahkan lebih tergantung seberapa banyak kader HMI yang hadir di malam penutupan. Peserta diuji satu-persatu dalam keadaan ditutup matanya pakai kain dan dituntung oleh panitia pelaksana. Kegiatan latihan mental ini adalah untuk diuji semua materi yang telah dia dapatkan sejak pertama pelatihan sampai terakhir, dan rangkaian beberapa latihan mental yang lain.²³⁸

Penulis juga melakukan wawancara pada salah satu kader senior HMI Komisariat Avicena, dia mengatakan:

“Menurut Firman, tujuan dipaksa semua bisa berbicara di malam terakhir pelatihan itu dengan ditanya berbagai materi yang telah berlangsung demi melatih mental mereka dalam menyampaikan pendapat, karena bisa jadi di dalam forum training kurang aktif dan tidak berani berbicara maka di kegiatan ini pasti berani semua berbicara. Kedua ditutup matanya karena biasa ada peserta yang malu berbicara karena melihat objek yang diajak berbicara, maka cara ini akan membuat dirinya bisa berbicara dengan leluasa.”²³⁹

Demikian penempatan dan pengembangan pada kader HMI di proses LK1. Sistematis, ketat dan manajemen training yang baik dan berjalan berdasarkan mekanisme di pedoman perkaderan yang telah ditetapkan di PB HMI secara nasional. Bukan hanya penanaman wawasan intelektual, tetapi juga melatih mental peserta untuk berani menyampaikan pendapat atau gagasan. Bagi HMI bahwa keberanian itu sangat utama, karena keberanian bisa mengingatkan semua ilmu yang pernah didapat. Sebaliknya ketidak beranian, meski pintar maka akan

²³⁸Observasi LK1 HMI Komisariat Mercubuana dan Psikologi di Yogyakarta, tanggal 15 April 2017.

²³⁹Wawancara dengan, Firman di Wates Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2017.

disimpan sendiri dan tidak diekspresikan dengan berbicara, baik ngobrol biasa, diskusi, seminar, rapat, dan lainnya.

c) Pengelola Training LK1 HMI Cabang Yogyakarta

(1) Badan Pengelola Latihan (BPL)

Berdasarkan wawancara penulis tentang BPL terhadap Ketua Badan Pengelola Latihan (BPL) periode 2015-2016 tentang pengelolaan training. Dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Indah Purmasari, badan Pengelola Latihan (BPL) merupakan lembaga yang tingkat HMI Cabang, seperti BPL HMI Cabang Yogyakarta, kami yang bertanggung jawab melaksanakan semua program perkaderan dan training HMI Cabang Yogyakarta. Yang berhak masuk di BPL adalah kader HMI yang sudah melewati pelatihan Senior Course (SC), berarti sudah juga LK1, dan LK2”²⁴⁰

(2) Panitia

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Master Of Trainig tentang panitia pelaksana training HMI. Dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Binti Maisorah, panitia bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan training. Kriteria menjadi panitia adalah ekstrainer baru atau anggota biasa HMI, telah mengikuti follow-up LK I. Tugas yang dilakukan seperti, mengusahakan tempat, akomodasi, konsumsi, pembiayaan dan perijinan latihan. Serta mengusahakan efektifitas dan kenyamanan pelatihan, seperti ruangan, peralatan dan penerangan.”²⁴¹

²⁴⁰Wawancara dengan, Indah Purmasari di LK1 HMI Komisariat Avicena, Dlingo Bantul Yogyakarta, tanggal 3 Desember 2016.

²⁴¹Wawancara dengan, Binti Maisorah di LK1 HMI Komisariat Adab, Wonosari Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2017.

(3) *Steering committee (SC)*

Kemudian penulis juga wawancara terhadap Ketua Bidang Pembinaan Anggota (KABID PA) HMI Cabang Yogyakarta periode 2017-2018 tentang *Steering committee (SC)* dalam pelaksana training HMI. Dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Moh. Masykur Habibi, *Steering Committee (SC)*, diutus minimal 1 orang MOT dari BPL mendampingi *Steering Committee (SC)* yang dibentuk di komisariat. Tugas SC bertanggung jawab menyiapkan perangkat lunak latihan dan mengarahkan panitia dalam pelaksanaan latihan. Menentukan pemateri, instruktur serta fasilitator, dan menentukan pemandu atau *Master Of Training (MOT)*. Kriterianya memenuhi kualifikasi umum pengelola latihan, terlibat aktif dalam perkaderan HMI, pernah menjadi panitia LK I.²⁴²

(4) Pemandu atau *Master Of Training*

Penulis wawancara terhadap Master Of Training (MOT) dari pengurus BPL HMI Cabang Yogyakarta tentang kriteria pemandu di LK1 HMI Cabang Yogyakarta. Dalam wawancara dia mengatakan:

Menurut Saddam AB, pemandu atau *Master Of Training*; bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin, mengawasi, dan mengarahkan latihan. Sejak dibuka training, tanggung jawab pengelolaan latihan berada sepenuhnya dalam tanggung jawab pemandu atau *Master Of Training* sampai latihan selesai. Tugas-tugas pemandu atau Master yaitu: Pertama, memimpin latihan, baik dalam forum ataupun diluar forum, memberikan materi apabila pemateri/ instruktur/ fasilitator tidak dapat hadir. Kedua, melakukan penajaman pemahaman atas materi yang telah diberikan. Ketiga melakukan evaluasi pada peserta. Keempat, mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemateri. Kriteria yang harus

²⁴²Wawancara dengan, Moh. Masykur Habibi di Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2018.

dipenuhi adalah: sudah lulus Senior Course HMI, memenuhi kualifikasi umum dan khusus pengelola latihan. Terlibat aktif dalam perkaderan HMI, memahami dan menguasai materi LK I, dapat menjadi suri tauladan yang baik.²⁴³

(5) Pemateri/instruktur/fasilitator

Penulis juga wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat Muawiyah tentang kriteria pemateri di HMI Cabang Yogyakarta. Dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Rifat Syauqi, pemateri/instruktur/fasilitator; bertugas untuk menyampaikan materi latihan yang dipercayakan oleh *Steering committee (SC)*, BPL. Tentu sudah melewati LK2, Senior Course, atau sudah LK3 dan memiliki keahlian di bidang yang dipercayakan.”²⁴⁴ Hal yang senada juga disampaikan oleh Moh. Masyukur Habibi, Ketua Bidang Pembinaan Anggota (KABID PA) HMI Cabang Yogyakarta periode 2017-2018.²⁴⁵

Dengan demikian, dipahami bahwa dalam kegiatan perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, instruktur atau pemateri sangat diperlukan dalam pembentukan karakter peserta didik. Instruktur berfungsi sebagai elemen yang menentukan jalannya sistem perkaderan HMI. Instruktur biasanya diambil dari aktivis HMI yang senior yang dianggap telah matang memahami dan mendalami proses perkaderan disertai berbagai pengalaman ke-HMI-an. Instruktur bertugas untuk menyampaikan materi, wawasan, bimbingan, pembinaan dan membentuk kader-kader HMI.

²⁴³Wawancara dengan, Saddam AB, Yogyakarta, tanggal 25 November 2016.

²⁴⁴Wawancara dengan, Rifat Syauqi, Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2017.

²⁴⁵Wawancara dengan, Moh. Masykur Habibi di Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2018.

Pemateri harus melakukan pembinaan dan pendidikan secara efektif dan komprehensif, dengan harus mengarahkan kader-kader HMI yang lebih junior untuk mencapai profil ideal kader-kader HMI yang membentuk integritas dan kepribadian, pengembangan kualitas intelektual dan pengembangan kemampuan profesional yang terpadu dan integralistik.

Sedangkan dalam buku manajemen sumber daya manusia dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi pelatih, pemateri pada suatu training yaitu:

(a) *Teaching Skills.*

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik atau mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, dan mentransfer pengetahuannya kepada peserta pengembangan. Ia harus dapat memberikan semangat, membina, dan mengembangkan agar peserta mampu untuk bekerja mandiri serta dapat menumbuhkan kepercayaan pada dirinya.

(b) *Communication Skills.*

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan secara efektif. Jadi dapat dikatakan seorang pelatih harus mempunyai suara jelas, tulisan baik, dan kata-katanya mudah difahami peserta.

(c) *Personality Authority.*

Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta. Ia harus berperilaku baik, sifat dan kepribadiannya disenangi, kemampuan dan kecakapannya diakui.

(d) *Sosial Skills.*

Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin kepercayaan dan kesetiaan dari para peserta pengembangan. Ia harus suka menolong, objektif, dan senang jika anak didiknya maju serta dapat menghargai pendapat orang lain.

(e) *Technical Competent.*

Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan tangkas dalam mengambil suatu keputusan.

(f) *Emotion Stability.*

Seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak didiknya, tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapakan, keterbukaan, tidak pendendam, serta memberikan nilai objektif.²⁴⁶

(6) Metode Training

Berdasarkan wawancara penulis kepada Master Of Training HMI (MOT), dalam wawancara dia mengatakan: “Menurut Ahmad khoerudin, metode perkaderan yang dipakai adalah ceramah, dialog, diskusi, dan penugasan. Penugasan merupakan pemahaman materi-materi training HMI dengan menggunakan pelatihan keterampilan peserta dimana sasarannya adalah membangun kemampuan tertentu melalui penulisan, laporan kerja dan lainnya.”²⁴⁷

²⁴⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 73-74.

²⁴⁷Wawancara dengan, Ahmad khoerudin di Wonosari Yogyakarta, tanggal 5 Mei 2017.

(7) Materi Training

Tabel 12 Silabus Latihan Kader 1 Di Lingkungan HMI Cabang Yogyakarta

SILABUS LATIHAN KADER I DI LINGKUNGAN HMI CABANG YOGYAKARTA

No	Materi	Tujuan	Target	Indikator	Pokok bahasan	Waktu
1	Stadium General LK-1 HMI Cabang Yogyakarta dengan tema <i>“Terbinanya Kader Muslim Intelektual Profesional”</i>	Peserta dapat memahami tema LK 1 HMI Cabang Yogyakarta dengan baik dan benar	1. Peserta dapat meningkatkan kesadaran dalam bermuslim yang memiliki kualitas intelektual dan profesional 2. Peserta dapat meningkatkan semangat kebermuslimannya, keberilmuannya dan keberprofesionalannya	1. Terciptanya suasana belajar bersama antara peserta dan pemateri. 2. Tersampainya materi secara sistematis dan mudah difahami. 3. Materi bersifat dialogis dan menjunjung tinggi kreatifitas peserta dalam mengemukakan pendapat.	Pengertian tentang Kader yang berkualitas Muslim, Intelektual dan Profesional	1,5 Jam
2	Ekspektasi,	Peserta dapat	1. Peserta	1. Peserta	1. Perkenalan	30

	Perkenalan & Eksistensi Training	saling berkenalan satu sama lain dan memahami setiap komponen yang terlibat dalam training.	dapat menyebutkan nama temannya, minimal 10 Peserta. 2. Peserta mengetahui setiap elemen yang terlibat dalam pelaksanaan LK 1 HMI Cabang Yogyakarta serta dapat menjelaskan peran dan fungsi masing-masing elemen.	mampu mengekspresikan perasaannya dengan teman-teman yang lainnya. 2. Terciptanya suasana awal training yang penuh kekeluargaan. 3. Setelah saling mengenal peserta diharapkan mampu menciptakan sebuah atmosfer intelektual dalam menunjang tujuan training. 4. Pemahaman terhadap fungsi komponen training sehingga mampu memberikan keberhasilan	Peserta 2. Pembahasan Komponen LK 1 HMI Cabang Yogyakarta, peran dan fungsi Pemandu, Panitia, Peserta, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat.	Menit
--	----------------------------------	---	---	--	--	-------

				terhadap proses training secara keseluruhan.		
3	Penjabaran Landasan Perkaderan HMI dan Tujuan Perkaderan HMI.	Peserta mampu memahami pola umum perkaderan yang ada di HMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan secara eksplisit landasan perkaderan HMI. 2. Peserta mampu memahami dan menerapkan landasan perkaderan selama proses training berlangsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersampaikannya seluruh materi ini dengan sistematis dan menyeluruh. 2. Proses penyampaian dilakukan dengan semudah mungkin sehingga mampu dengan mudah difahami oleh peserta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan Teologis Perkaderan HMI. 2. Landasan Ideologis Perkaderan HMI 3. Landasan Konstitusi Perkaderan HMI. 4. Landasan Historis Perkaderan HMI 5. Landasan Sosio-Kultural Perkaderan HMI. 6. Tujuan Perkaderan HMI 	2 Jam
4	Kontrak belajar dan Penyusunan Harapan dan Ketakutan Peserta.	Peserta Mampu Merumuskan Aturan Main selama berlangsungnya LK 1 HMI Cabang Yogyakarta serta merumuskan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kontrak belajar yang bersifat mengikat selama proses training berlangsung. 2. Peserta diwajibkan untuk tunduk dibawah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan secara aturan main selama proses belajar berlangsung. 2. Menjunjung tinggi azas kebersamaan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Garis-Garis besar Materi LK 1 HMI Cabang Yogyakarta. 2. Perumusan kontrak belajar dengan melihat kesesuaian dengan kebutuhan dan manual acara training. 	20 menit Dan Tambahan 30 Menit. (1 jam)

		harapan dan ketakutannya selama menjalani training	aturan yang telah dirumuskan melalui kontrak belajar. 3. Peserta dapat menuliskan harapan dan ketakutannya selama training.	menentukan sebuah aturan. 3. Mendahulukan kepentingan belajar daripada individu.	3. Pemberian lembar harapan dan ketakutan peserta.	
5	Screening Latihan Kader 1 HMI Cabang Yogyakarta dan Pre Test.	Peserta mampu menjabarkan gagasannya mengenai Keislaman, Keindonesiaan dan Kemahasiswaan.	1. Peserta dapat menjelaskan pemahamannya tentang Islam yang selama ini diyakininya. 2. Peserta mampu memberikan pendapat tentang spirit Keindonesiaan sesuai dengan pemahamannya. 3. Peserta mampu memberikan gambaran tentang fungsi dan peran dari dunia kemahasiswaan.	1. Peserta mengemukakan argumentasinya terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh screener. 2. Peserta dapat menjelaskan maksud dari Keislaman, Keindonesiaan dan Kemahasiswaan. 3. Peserta mampu memberikan jawaban terhadap tes tulis yang diberikan.	1. Materi Keislaman. 2. Materi Keindonesiaan. 3. Materi Kemahasiswaan. 4. Soal-Soal terkait dengan selang pandang HMI dll.	4 jam

6	Sejarah Perjuangan HMI	Peserta dapat memahami sejarah dan dinamika perjuangan HMI	<p>4. Peserta dapat menjelaskan latar belakang berdirinya HMI.</p> <p>5. Peserta dapat menjelaskan gagasan dan visi pendiri HMI</p> <p>6. Peserta dapat mengklasifikasikan fase-fase perjuangan HMI</p>	<p>4. Peserta mampu memahami ilmu sejarah dan relevansinya terhadap peradaban.</p> <p>5. Penjelasan dan pemahaman latar belakang berdirinya HMI.</p> <p>6. Penjabaran fase perjuangan HMI dari masa ke masa.</p>	<p>5. Pengantar Ilmu Sejarah</p> <p>a. Pengertian Ilmu Sejarah.</p> <p>b. Manfaat dan Kegunaan mempelajari Sejarah</p> <p>6. Misi Kelahiran Islam.</p> <p>a. Masyarakat Arab Pra Islam</p> <p>b. Priode Kenabian Muhammad.</p> <p>i. Fase Makkah</p> <p>ii. Fase Madinah</p> <p>7. Latar Belakang Berdirinya HMI.</p> <p>a. Kondisi Islam di Dunia</p> <p>b. Kondisi Islam di Indonesia</p> <p>c. Kondisi Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Islam.</p> <p>d. Saat Berdirinya HMI</p> <p>8. Gagasan dan Visi Pendiri HMI.</p> <p>a. Sosok Lafran</p>	4 jam
---	------------------------	--	---	--	--	-------

					<p>Pane.</p> <p>b. Gagasan Pembaharuan Pemikiran ke-Islaman.</p> <p>c. Gagasan dan Visi Perjuangan Sosial-Budaya.</p> <p>d. Komitmen ke-Islaman dan Kebangsaan sebagai dasar perjuangan HMI.</p> <p>9. Dinamika Sejarah Perjuangan HMI dalam Sejarah Perjuangan Bangsa.</p> <p>a. HMI dalam Fase Perjuangan Fisik.</p> <p>b. HMI dalam Fase Pertumbuhan dan Konsolidasi Bangsa.</p> <p>c. HMI dalam Fase Transisi Orde Lama dan Orde Baru.</p> <p>d. HMI dalam Fase Pembangunan dan Modernisasi Bangsa.</p> <p>e. HMI dalam Fase</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					pasca Orde Baru (Reformasi).	
7	Pendalaman Materi (season 1). Dinamika Kelompok (Presentasi dan Debat antar Peserta dll)	Peserta mampu memahami dan mendiskusikan kembali materi yang telah disampaikan (Sejarah Perjuangan HMI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. eserta mampu melakukan review terhadap materi yang telah diberikan (Sejarah Perjuangan HMI). 2. eserta mampu secara menjelaskan kembali materi yang telah diberikan secara kritis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas materi yang telah diberikan. 2. Pada sesi ini akan digunakan strategi belajar <i>active learning</i>. Dll. 3. Munculnya perdebatan yang dialogis antara masing-masing peserta terhadap materi yang memiliki kaitan dengan keislaman dan keindonesiaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan kembali materi Sejarah Perjuangan HMI. 2. Penugasan terhadap peserta terkait dengan materi yang telah diberikan. 	3 jam
8	Mission HMI	Peserta dapat memahami misi HMI dan hubungannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. eserta dapat menjelaskan fungsi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dengan gambalng mampu 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Makna HMI sebagai Organisasi Mahasiswa. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Mahasiswa. 	4,5 Jam

		<p>dengan status, sifat, asas, tujuan, fungsi dan peran organisasi HMI secara integral.</p>	<p>perannya sebagai mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. eserta dapat menjelaskan tafsir tujuan HMI. 3. eserta dapat menjelaskan hubungan status, sifat, azas, tujuan, fungsi dan peran HMI secara integral. 	<p>mendefinisikan Misi HMI yang tercantum di Pasal 4 AD organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengklasifikasi asian oleh peserta antara hubungan status, sifat, azas, tujuan, fungsi dan peran HMI. 3. pemahaman akan pentingnya tujuan sebagai orientasi perjuangan dalam sebuah organisasi. 4. Peserta mampu menangkap bahwa tujuan adalah alat perjuangan dalam memimpin organisasi yang lebih besar lagi. 	<ol style="list-style-type: none"> b. Mahasiswa sebagai inti kekuatan perubahan. c. Dinamika gerakan Mahasiswa. 3. Hakikat keberadaan HMI <ol style="list-style-type: none"> a. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam. b. Makna Independensi HMI. 4. Tujuan HMI. <ol style="list-style-type: none"> a. Arti Insan Akademis, pencipta, pengabdikan yang bernafaskan Islam. b. Arti masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. 5. Fungsi dan Peran HMI <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Fungsi HMI sebagai organisasi kader. b. Pengertian peran 	
--	--	---	--	--	---	--

				(negara).	HMI sebagai organisasi perjuangan. c. Totalitas fungsi dan peran sebagai perwujudan dari tujuan HMI. 6. Hubungan antara status, sifat, asas, tujuan, peran dan fungsi HMI secara integral.	
9	Konstitusi HMI	Peserta dapat memahami ruang lingkup Konstitusi HMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan ruang lingkup konstitusi HMI dan hubungannya dengan pedoman pokok organisasi lainnya. 2. Peserta dapat mempedomani konstitusi HMI dan pedoman-pedoman pokok organisasi dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pemahaman akan pentingnya konstitusi dalam berorganisasi. 2. Peserta telah mampu mendapatkan gambaran awal tentang aturan organisasi yang ada di HMI. 3. Peserta telah mampu menemukan sinergitas antara konstitusi dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar ilmu Hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Fungsi Hukum. b. Hakekat Hukum. c. Pengertian Konstitusi dan arti pentingnya dalam organisasi. 2. Ruang Lingkup Konstitusi HMI. <ol style="list-style-type: none"> a. Makna Muqaddimah AD HMI. b. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan 	4 Jam

			kehidupan berorganisasi.	rutinitas organisasi.	Islam. c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI. d. Masalah Keanggotaan. e. Masalah Struktur Kekuasaan. f. Masalah Struktur Kepemimpinan. 3. Pedoman-Pedoman dasar Organisasi. a. Pedoman Perkaderan. b. Pedoman Kohati. c. Pedoman Lembaga Profesi. d. Pedoman Atribut HMI. e. GPPO dan PKN. 4. Hubungan Konstitusi AD/ART dengan pedoman-pedoman Organisasi lainnya.	
10	Pendalaman Materi (Season 2). Review Matereri	Peserta dengan seksama dan secara mampu memahami	1. eserta mampu menunjukkan potensi yang ada	1. Pemecahan studi kasus yang diberikan secara bersama-sama	1. Review Materi Mission HMI 2. Review Materi Konstitusi HMI	3 jam

	Mission HMI dan Konstitusi HMI. (Dinamika Kelompok, Penugasan, Debat antar Peserta, dll)	kembali materi-materi yang telah diberikan.	<p>pada dirinya melalui keberanian mengemukakan pendapat.</p> <p>2. Peserta mampu mengajak temannya untuk berpikir kritis dalam menyikapi sebuah persoalan.</p> <p>3. Peserta dapat menangkap intisari dari materi Mission HMI dan Konstitusi HMI.</p>	<p>oleh peserta.</p> <p>2. Peserta berinteraksi satu sama lain dalam pematangan intelektual dan pemecahan masalah.</p> <p>3. Peserta dapat menyelesaikan sekian persoalan yang terkait dengan materi yang telah diberikan.</p> <p>4. Pada sesi ini akan digunakan strategi belajar <i>Giving Questions and Getting Answer</i>.</p>	3. Presentasi dan debat antar peserta terkait dengan materi yang telah diberikan.	
11	Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI	Peserta dapat memahami latar belakang perumusan dan	1. Peserta dapat menjelaskan sejarah	1. Terbangunnya kemampuan dalam menceritakan	1. Sejarah perumusan NDP dan kedudukan NDP dalam organisasi HMI	5 jam

		kedudukan NDP serta subtansi materi secara garis besar dalam organisasi.	<p>perumusan NDP dan kedudukannya dalam organisasi</p> <p>2. eserta dapat menjelaskan hakikat sebuah kehidupan</p> <p>3. eserta dapat menjelaskan hakikat kebenaran</p> <p>4. eserta dapat menjelaskan hakikat penciptaan alam semesta</p> <p>5. eserta dapat menjelaskan hakikat penciptaan manusia</p> <p>6. eserta dapat menjelaskan</p>	<p>sejarah perumusan NDP.</p> <p>2. Terbangunn ya Gambaran awal tentang kedudukan NDP di HMI.</p> <p>3. Memahami NDP sebagai cara pandang HMI terhadap Islam.</p>	<p>a. Pengertian NDP</p> <p>b. Sejarah Perumusan dan lahirnya NDP</p> <p>c. NDP sebagai kerangka Global Pemahaman Islam dalam konteks organisasi HMI</p> <p>d. Hubungan antara NDP dan Mission HMI</p> <p>e. Metode pemahaman NDP</p> <p>2. Garis besar Materi NDP</p> <p>a. Hakikat Kehidupan</p> <p>i. Analisa Kebutuhan Manusia</p> <p>ii. Mencari kebenaran sebagai kebutuhan dasar manusia</p> <p>iii. Islam sebagai sumber</p>	
--	--	--	---	---	--	--

			<p>hakikat masyarakat</p> <p>7. eserta dapat menjelaskan hubungan antara iman, ilmu dan amal</p>		<p>kebenaran</p> <p>b. Hakikat Kebenaran</p> <p>i. Konsep Tauhid La Ilaha Illallah</p> <p>ii. Eksistensi dan sifat-sifat Allah</p> <p>iii. Rukun iman sebagai upaya mencari kebenaran</p> <p>c. Hakikat Penciptaan Alam Semesta</p> <p>i. Eksistensi Alam</p> <p>ii. Fungsi dan Tujuan Penciptaan Alam</p> <p>d. Hakikat-hakikat penciptaan Manusia</p> <p>i. Eksistensi Manusia dan Kedudukannya diantara makhluk lainnya</p> <p>ii. Kesetaraan dan kedudukan manusia sebagai</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>khalifah dimuka bumi</p> <p>iii. Manusia sebagai hamba Allah</p> <p>iv. Fitrah, kebebasan dan tanggungjawab manusia</p> <p>e. Hakikat Masyarakat</p> <p>i. Perlunya menegakan keadilan dalam masyarakat</p> <p>ii. Hubungan Keadilan dan Kemerdekaan</p> <p>iii. Hubungan Keadilan dan kemakmuran</p> <p>iv. Kepemimpinan untuk menegakkan keadilan</p> <p>f. Hakikat Ilmu</p> <p>i. Ilmu sebagai jalan mencari kebenaran</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					ii. Jenis-jenis Ilmu 3. Hubungan antara Iman, Ilmu dan Amal.	
12	Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi	Peserta dapat memahami pengertian, dasar-dasar, sifat dan fungsi kepemimpinan, manajemen dan organisasi.	1. Peserta mampu menjelaskan pengertian, dasar-dasar sifat serta fungsi kepemimpinan 2. Peserta mampu menjelaskan pentingnya fungsi kepemimpinan dan manajemen dalam organisasi 3. Peserta dapat menjelaskan dan mengapresiasi n karakteristik kepemimpinan dalam Islam	1. Peserta bisa mendefinisikan arti kepemimpinan, manajemen, dan organisasi 2. Peserta bisa menyebutkan karakter kepemimpinan Islam 3. Peserta bisa membedakan antara manajerial organisasi dan kepemimpinan.	1. Pengertian, tujuan dan fungsi kepemimpinan, manajemen dan organisasi 2. Karakteristik kepemimpinan <ol style="list-style-type: none"> Sifat-sifat Rasul sebagai etos kepemimpinan Tipe-tipe kepemimpinan Dasar-dasar manajemen Unsur manusia dalam manajemen Model-model manajemen 3. Organisasi sebagai alat perjuangan <ol style="list-style-type: none"> Teori-teori organisasi Bentuk-bentuk organisasi 	4 Jam

					c. Struktur organisasi 4. Hubungan antara kepemimpinan, manajemen dan organisasi	
13	Perkenalan 2 (Apresiasi Aku)	Peserta mampu saling mengenal satu sama lain, dan mengekspresikan potensinya serta pengalaman hidupnya kepada sesama temannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat lebih terbuka dalam pemikiran dan keinginannya. 2. Peserta lebih berani dalam menentukan sikap yang akan diambil kedepannya. 3. Peserta memiliki keberanian dalam menceritakan perjalanan hidupnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta bersedia untuk menceritakan permasalahan-permasalahan pribadinya. 2. Peserta dapat memberikan saran-saran kepada peserta lain dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. 3. Peserta memiliki rasa kekeluargaan antar sesama temannya. 	Perkenalan dengan menggunakan metode "Apresiasi Aku"	1,5 Jam.
14	Evaluasi Akhir Latihan Kader 1	Mengevaluasi keseluruhan	1. Peserta mampu dan Secara kritis	1. Peserta mampu	1. Refleksi perjalanan LK 1 (Tujuan dan Target)	2 jam

	HMI Cabang Yogyakarta	proses LK 1 HMI Cabang Yogyakarta yang telah dilalui baik dari Pemandu, Panitia, Peserta dan Pengurus Komisariat.	mengevaluasi kinerja dari Panitia LK 1 HMI Cabang Yogyakarta. 2. Peserta mampu dan secara kritis mengevaluasi kinerja dari pengurus. 3. Peserta mampu dan secara kritis mengevaluasi kinerja dari pemandu.	membangun nalar kritis dalam melakukan evaluasi. 2. Peserta secara obyektif dapat melihat setiap kelemahan yang terjadi selama berlangsungnya training. 3. Peserta memahami kembali fungsi dan peran setiap elemen dalam proses LK 1 HMI Cabang Yogyakarta.	2. Evaluasi secara keseluruhan dari pemandu. 3. Evaluasi peserta kepada Panitia, Pengurus Komisariat dan Pemandu.	
15	Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pasca LK 1 HMI Cabang Yogyakarta. (Pembentukan Ekstrainer, dll)	Peserta dan Pengurus merekomendasikan rencana tidak lanjut yang akan dilaksanakan kedepannya pasca LK 1 HMI	1. Peserta mampu memberikan gagasannya guna rencana follow up LK 1 HMI Cabang Yogyakarta yang akan	1. Terlihatnya kekritisan dari peserta dalam mengemukakan pendapatnya. 2. Peserta saling	1. Pembentukan Ekstrainer. 2. Penyusunan Struktur Ekstrainer. 3. Perumusan Agenda Follow Up.	1 Jam.

		Cabang Yogyakarta terlaksana.	<p>dilaksanakan selanjutnya.</p> <p>2. Peserta dapat secara aspiratif merumuskan materi yang akan diagendakan pasca LK 1 HMI Cabang Yogyakarta.</p>	<p>memacu diri dalam memberikan sumbnagsih pemikiran dalam rencana follow up yang akan diadakan.</p>		
16	Pelurusan Motivasi dan Pelantikan	Peserta dapat menyadari peran dan fungsinya sebagai mahasiswa serta amanah yang di emban sebagai kader HMI.	<p>1. Peserta dapat memahami kembali intisari dari proses LK 1 HMI Cabang Yogyakarta yang telah dilaksanakan.</p> <p>2. Peserta sadar akan peran kemahasiswaan yang diemban sebagai agen perubahan.</p> <p>3. Peserta memahami fungsi HMI sebagai</p>	<p>1. Tebangunnya semangat kebersamaan dari masing-masing peserta dalam memahami kembali intisari proses LK 1 HMI Cabang Yogyakarta.</p> <p>2. Peserta merefleksikan peran kemahasiswaanny a.</p> <p>3. Peserta secara sadar dan kritis</p>	<p>1. Penyampaian kembali tujuan dilaksanakannya LK 1 HMI Cabang Yogyakarta.</p> <p>2. Pembangunan semangat itas kepada peserta.</p> <p>3. Pembumian orientasi perjuangan HMI kepada peserta.</p> <p>4. Pelantikan Peserta oleh MOT/ Pengurus Cabang.</p>	2 Jam.

			organisasi perkaderan dan berperan sebagai organisasi perjuangan.	siap dalam tugas kemanusiaan bersama HMI.		
--	--	--	---	---	--	--

Sumber: Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, 2018

(8) Evaluasi Training

Evaluasi training di perkaderan HMI Cabang Yogyakarta terdiri dari beberapa unsur:

(a) Evaluasi Pada Peserta training

Pertama, Kartu Screaning Peserta

**KARTU SCREENING PESERTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KOMISARIAT**

Tabel 13 Kartu Screaning Peserta LK1

.....	
.....	

Yogyakarta,.....
Panitia

.....

Sumber: Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yagyakarta, 2018

Kedua, Panduan Tim Screening

PANDUAN TEAM SCREENING

LATIHAN KADER I DI LINGKUNGAN HMI CABANG YOGYAKARTA

a) Pendahuluan

Latihan Kader 1 dilaksanakan sesuai dengan sistem perkaderan HMI yang berorientasi pada proses ideologisasi. Posisi LK 1 sebagai pintu masuk HMI tentu saja memiliki peranan penting dalam pembentukan kader guna menjadi penerus estafeta perjuangan HMI. Maka dari itu sebuah usaha yang bisa dilakukan dalam ikhtiar tersebut diatas adalah melakukan proses screening terhadap peserta. Hal ini dibutuhkan guna melihat sejauh mana pemahaman dasar peserta terhadap materi yang akan disampaikan. Maka untuk menyukseskan hal tersebut dalam penyampaian materi screening nantinya mencakup tiga aspek yaitu, Keislaman, Keindonesiaan dan Kemahasiswaan.

Dalam pelaksanaan LK 1, juga harus dibangun iklim keterbukaan yang ditekankan pada informasi dan komunikasi yang harmonis, baik antara para MOT dengan MOT, maupun MOT dengan aparat organisasi penyelenggara latihan. Dengan demikian target training dapat tercapai secara maksimal.

Team screening sebagai salah satu unsur organisasi dalam proses pelatihan ini, diharapkan bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan rencana untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Organisasi

(1) Panitia

(a) Mempersiapkan kelengkapan screening

(b) Mengatur ketertiban proses screening

(c) Memenuhi kebutuhan team screening

(2) Team Screening

(a) Mengukur tingkat kecakapan peserta dari sisi intelektual

(b) wawasan dan kematangan psikologi

(c) Menetapkan peserta yang lulus melalui mekanisme penilaian.

c) Materi

(1) Materi wawasan ke-Islaman-an, dengan pokok bahasan:

(2) Tes baca tulis Al-Qur'an

(3) Pengetahuan dasar tentang Islam (Tauhid, Sejarah Kebudayaan

(4) Isal dan Fiqh - Ushul Fiqh

d) Selayang Pandang Tentang HMI

(1) Materi wawan ke-Indonesia-an, dengan pokok bahasan.

(2) Pancasila sebagai dasar.

(3) Kearifan Lokal Nasionalisme.

e) Materi wawasan ke-Mahasiswaan, dengan pokok bahasan:

(1) Fungsi mahasiswa sebagai agent of social change.

(2) Seputar dunia kemahasiswaan.

(3) Pentingnya organisasi dalam menopang akademik mahasiswa.

f) Pendekatan

(1) Ta'aruf (saling mengenal). Pendekatan ini dilakukan agar antara peserta dengan team screening bisa saling mengenal, sehingga terjalin komunikasi yang akrab dan hubungan yang dialogis. Saling

mengenal disini adalah pengenalan dan memperkenalkan diri sedalam-dalamnya mengenai latar belakang pendidikan, keluarga, sosial budaya dan lingkungan serta adat istiadat masing-masing, sehingga dengan demikian diharapkan tumbuh rasa kasih sayang dengan memiliki rasa ukhuwah antar sesama berdasarkan kecintaan kepada Allah SWT.

- (2) Tafahum (saling bersefaham). Pendekatan ini dilakukan agar antara peserta dengan team screening saling memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing dengan berusaha memulai dari diri sendiri untuk bersikap introspektif akan kekurangan, kesalahan atau kekhilafan masing-masing disamping upaya menumbuhkan suasana saling mengingatkan.
- (3) Ta'awun (saling menolong). Pendekatan ini dilakukan agar antara peserta dengan team screening terjalin sikap saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan kebenaran.
- (4) Taklaful (saling berkesinambungan). Pendekatan ini dimaksudkan agar terjalin kesinambungan antara rasa dan rasio/intuisi serta kesamaan ide pemikiran ke dalam hubungan yang dialogis dan harmonis disamping terciptanya suasana kondusif antara peserta dengan team screenin.

h. Metode

(1) Interview

Untuk mengetahui wawasan peserta dengan melakukan proses tanya jawab.

(2) Analisa teoritis

Untuk mengetahui kualitas referensi peserta dengan meminta tanggapan tentang suatu permasalahan.

(3) Studi kasus

Untuk mengetahui tingkat analisa peserta dengan memberikan kasus-kasus tertentu untuk dipecahkan.

i. Sistematika Penilaian

Bentuk penilaian

j. Screening (interview)

Aspek penilaian

- (1) Wawasan ke-Islam-an
- (2) Pengetahuan obyektif
- (3) Analisa teoritis
- (4) Penalaran
- (5) Wawasan ke-Indonesia-an
- (6) Pengetahuan obyektif
- (7) Analisa teoritis
- (8) Penalaran

k. Wawasan ke-Mahasiswa-an

- (1) Pengetahuan obyektif
- (2) Analisa teoritis
- (3) Penalaran

1. Standar penilaian

Tiap aspek penilaian screening memiliki bobot nilai 1 s.d. 100

- (1) Bobot 1-50 = Kurang
- (2) Bobot 51-60 = Cukup
- (3) Bobot 61-70 = Sedang
- (4) Bobot 71-80 = Baik
- (5) Bobot 81-90 = Sangat baik
- (6) Bobot 91-100 = Sempurna

Sumber: Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, 2018

m. Form penilaian peserta LK1

Tabel 15 Form penilaian Peserta LK1



FORM PENILAIAN PESERTA LATIHAN KADER I
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KOMISARIAT

.....

Sekretariat:.....

No	Nama	Jurusan/ Fakultas/ Universitas	A	K	P

Keterangan: A = Afektif, K = Kognitif, dan P = Psikomotorik. Angka yang digunakan adalah puluhan.

Yogyakarta, 1436 H
 2015 M

(.....)

MASTER OF TRAINING

Sumber: Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, 2018

n. Kebutuhan Berkas MOT LK1

Kebutuhan Berkas MOT Latihan Kader I HMI:

- (1) Absensi peserta LK I. Ada dua jenis, yang pertama (yg ada parafnya) untuk diisi oleh peserta dan yang kedua (berisi kolom masuk-keluar) dipegang oleh MOT. Dua jenis absen itu digunakan setiap materi. Dua lembar ini diperbanyak sebanyak jumlah materi dan diskusi
- (2) Kartu screening. Kartu ini untuk peserta. Kartu ini diperbanyak sesuai jumlah peserta.
- (3) Lembar penilaian screening. Lembar ini dipegang oleh tim screener. Lembar ini diperbanyak sesuai kebutuhan.
- (4) Ikrar pelantikan anggota baru. Diperbanyak sebanyak 1x.
- (5) Curriculum vitae pemateri. Diperbanyak sebanyak jumlah pemateri dan lembaga yang akan sosialisasi lembaga.
- (6) Lembar evaluasi Latihan Kader I. Diperbanyak sebanyak 2x. Setelah diisi, lembar ini diserahkan kepada pengurus BPL HMI Cabang Yogyakarta.
- (7) Lembar penilaian peserta. Lembar ini dipegang oleh MOT dan diperbanyak sebanyak jumlah materi.
- (8) Lembar harapan dan ketakutan peserta LK I. Lembar ini diserahkan kepada peserta untuk diisi sebelum pembukaan LK I berlangsung. Diperbanyak sebanyak jumlah peserta.

- (9) Panduan team screening. Panduan ini diberikan kepada tim screener yang bersangkutan. Diperbanyak sesuai kebutuhan.
- (10) Silabus LK I HMI. Dipegang oleh MOT dan diperbanyak sebanyak 1x.
- (11) Lembar evaluasi harian. Lembar ini untuk diisi oleh setiap peserta pada malam harinya setelah materi LK I di hari itu. Diperbanyak sebanyak jumlah peserta berapa malam.²⁴⁸

²⁴⁸Sumber: Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, 2018

o. Harapan Peserta

Tabel 16 Harapan Peserta LK1



**LEMBAR HARAPAN DAN KETAKUTAN PESERTA LK
I**

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

KOMISARIAT

Sekretariat:.....

.....

Nama :

Jurusan/Asal :

ISILAH FORM DIBAWAH INI SESUAI DENGAN APA YANG ANDA INGINKAN
Apa yang menjadi harapan anda mengikuti pelatihan HMI ini?
<i>Diisi oleh peserta...</i>
Apa yang menjadi tujuan anda mengikuti pelatihan HMI ini?
<i>Diisi oleh peserta...</i>
Apa yang anda takutkan dalam dinamika pelatihan HMI ini?
<i>Diisi oleh peserta...</i>

Demikian lembar harapan dan ketakutan peserta ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1436 H

..... 2015 M

Peserta

Sumber: Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yagyakarta, 2018

p. Evaluasi Harian oleh peserta

Tabel 17 Evaluasi Harian oleh Peserta LK1

Hari/ Tanggal : Hari Ke :
.....

Nama Lengkap : Asal :
.....

<p>Beri tanda (X) pada kolom penilaian sesuai dengan pilihan anda. (5= sangat setuju, 4= setuju, 3= ragu-ragu, 2= kurang setuju, dan 1= tidak setuju)</p>						
PENILAIAN UNTUK PENYELENGGARA		1	2	3	4	5
	Tujuan latihan hari ini tercapai					
	Materi tersampaikan dengan jelas dan sistematis					
INFORMASI TEKNIS		1	2	3	4	5
	Saya mempelajari hal baru hari ini					
	Sekarang saya mampu untuk:					
METODOLOGI PELATIHAN		1	2	3	4	5
	Penyampaian pemateri jelas dan sistematis					
	Diskusi kelas menyumbang pembelajaran saya					
	Saya telah mempelajari keterampilan praktis					
	Bacaanya informatif					
	Pemateri mendorong pertanyaan & masukan buat saya					
APA KATA-KATA/KALIMAT BIJAK YANG ANDA DAPATKAN HARI INI?						
<i>Diisi oleh peserta...</i>						

BAGIAN APA YANG KURANG PENTING DARI LATIHAN HARI INI?
<i>Diisi oleh peserta...</i>
APA YANG BISA DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN LATIHAN INI?
<i>Diisi oleh peserta...</i>
APA YANG INGIN ANDA DAPATKAN ESOK HARI?
<i>Diisi oleh peserta...</i>

Sumber: Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, 2018

q. Evaluasi peserta kepada MOT, panitia dan Pemateri

Tabel 18 Evaluasi Peserta kepada MOT, panitia, Pemateri



**EVALUASI LATIHAN KADER I
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KOMISARIAT**

.....

Sekretariat:.....
.....

Hari/ Tanggal :

.....

Tempat :

.....

Nama-Nama MOT : 1.

.....

2.

.....

3.

.....

Nama-Nama Pemateri : 1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

.....

5.

.....

6.

.....

1. Evaluasi terhadap Panitia

Disi oleh peserta...

2. Evaluasi terhadap Pemateri

Disi oleh peserta...

3. Evaluasi terhadap MOT

Disi oleh peserta...

Sumber: Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, 2018

e. Tahap Kelima

1) Setelah LK1 HMI Cabang Yogyakarta

a) Follow-Up

Follow-Up atau pendalaman keilmuan kader HMI melalui diskusi, kajian, bedah buku atau segala kegiatan yang mengarah pada pembentukan wawasan kader HMI. Setelah selesai LK1 HMI, penempatan diri kader untuk kualitas dirinya yang selama ini dijunjung tinggi HMI adalah wawasan intelektual kader. Wawasan intelektual merupakan ranah atau cakupan yang sangat luas, sehingga membutuhkan ruang-ruang atau pelatihan-pelatihan yang lebih sistematis dan terencana. Proses penumbuhan kualitas kader-kader pasca LK1 di setiap komisariat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Terutama follow-up

merupakan kewajiban kader HMI yang baru (ekstrainer) untuk mengikuti follow-up (pendalaman materi LK1 dan wawasan lainnya di HMI maupun di luar HMI) selama 6 bulan.

Penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Bidang Penelitian, Pembinaan dan Pengembangan Anggota (KABID PPPA) HMI Komisariat Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, periode 2016-2017. Dalam wawancara dia mengatakan, “Menurut Islahurrohman, kultur di SAINTEK, setelah follow up, dilakukan screening dari hasil follow-up atau kajian sebelumnya, sambil memperkenalkan persiapan LK2. Follow Up 5 materi wajib.”²⁴⁹

Sedangkan dalam wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengenai follow-up untuk mengembangkan wawasan kader baru, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Jeki Sahrawi, Follow-Up 1x dalam seminggu. Kita datangkan kader-kader secara perkaderan sudah dijenjang yang lebih tinggi, mereka sudah LK2, sudah SC yang sesuai bidang keilmuannya baik materi ke-HMI-an maupun materi yang berkaitan dengan ilmu sosial karena kita Dakwah dan Komunikasi.”²⁵⁰ Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Sri Sultan Hemengkubuwono IX (HB IX) adalah:

“menurut Syafiqurrohman bahwa, follow-up lancar dan pemateri kita pakai dari dalam, karena sudah banyak senior HMI di kampus yang sebelumnya

²⁴⁹Wawancara dengan, Islahurrohman di Sekretariat Komisariat SAINTEK, Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2017.

²⁵⁰Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

sudah masuk di HMI komisariat lain. Hampir setiap hari di tengah kampus kami selalu berkumpul dan banyak berdiskusi.”²⁵¹

Penulis juga melakukan wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia mengatakan:

“Menurut Abdu Alifah, follow-up diadakan 2x seminggu, sudah 9 kali follow-up, untuk ukuran HMI Cabang Yogyakarta itu termasuk melonjak. Selama ini termasuk mengalami degradasi kegiatan-kegiatannya sedikit. Ukuran follow-up ini adalah tahun-tahun yang paling progresif, karena hampir setiap minggu kita melakukan kegiatan 3 sampai 4 kegiatan. Karena setiap bidang hampir semua bidang melaksanakan program mingguan, ada 4 bidang. Ada juga program kerja FISHUM MENGAJI. Memang mahasiswa UIN tetapi mayoritas dari alumni non santri, sehingga pemahaman keislamannya belum kuat dan mengajinya belum maksimal, maka kita melihat dari keresahan itu dan sudah 2 periode program kerja cukup sukses dan memberikan dampak untuk kemajuan baca tulis al-Qur'an kader. Bidang PPPA juga yang menangani itu. Kemudian diskusi buku setiap minggu, diselingi kegiatan PP, KPP, SEKUM kegiatan protokoleran, kesekretariatan.”²⁵²

Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan Janabadra, Fakhrurozi Farras AL Husein Siregar mengatakan, seminggu sekali follow-up, dan sudah ada 4 kali follow-up selama LK1.²⁵³ Hal senada juga disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Avicena, mengatakan:

“Menurut Sukriadi Nuhri, follow-up (pendalaman ilmu) untuk kader-kader HMI setelah perkaderan. Melihat kesibukannya kami jadi 2x dalam 2 minggu follow-up. Atau kita tanyakan pada ekstrainer kapan kalian punya waktu follow-up, bukan pengurus yang menentukan. Setiap angkatan ada nama angkatannya dan memiliki group komunikasi sesama ekstrainer dan ada pengurus masuk memantau. Setelah selesai masa follow-up baru bisa bergabung di Group keluarga besar HMI Avicena.”²⁵⁴

²⁵¹Wawancara dengan, Syafiqurrohman di Patang Puluhan Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²⁵²Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²⁵³Wawancara dengan, Fakhrurozi Farras Al Husein Siregar di Timoho Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²⁵⁴Wawancara dengan, Sukriadi Nuhri di Wates Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

Hal yang diungkapkan di atas, Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah, Mulkhan Andreza juga mengungkapkan bahwa “Follow-Up, setelah LK1, dikumpulkan kader baru menentukan jadwal kapan mau diadakan follow-up. Setelah disepakati diminta komitmen kader baru untuk konsisten mengikuti follow-up yang disesuaikan jadwal kader baru, hari apa, dan lumayan ramai dalam kepengurusan ini.”²⁵⁵ Hal senada juga disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Tunas Bangsa, mengatakan:

“Menurut Restu Pamuji, follow-up dilaksanakan enam bulan dan dilaksanakan 1x seminggu. Pembahasan follow-up adalah materi wajib HMI yang 5. Kemarin terbaru hanya dua materi wajib salah satunya NDP HMI, yang lainnya materi Kerangka Berpikir Kritis, analisis sosial. Untuk mensiasati materi wajib yang 5 nanti menjadi PROKER PPPA Komisariat, supaya tidak terfokus pada follow-up, karena pikiran kader-kader selama ini bahwa follow-up dikira hanya untuk ekstrainer (kader baru), sehingga yang hadir pun kadang hanya mengobrol di luar. Sehingga kita mensiasati kita buat di PROKER, supaya semua hadir dan ikut belajar, berdiskusi 5 materi wajib HMI. Kemudian ketika ada diskusi di organisasi lain, kita selalu berangkat ramai-ramai.”²⁵⁶

Penulis juga melakukan wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat Ahmad Dahlan, UAD Yogyakarta tentang follow-up, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Mahmud Mukadar, setelah follow-up, diprioritaskan pada latar belakang kader HMI, banyak kajian pada kebutuhan kader per fakultas, seperti fakultas hukum kajiannya tentang Tata Negara. Ada juga dari Psikologi, komunikasi, selalu mengeluh kalau hanya bicara konstitusi, sehingga ada kajian Psikologi, Komunikasi.”²⁵⁷

²⁵⁵Wawancara dengan, Mulkhan Andreza di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

²⁵⁶Wawancara dengan, Restu Pamuji di Kasihan Bantul Yogyakarta, tanggal 12 Januari 2018.

²⁵⁷Wawancara dengan, Mahmud Mukadar di Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

Ketua Umum HMI Komisariat Syariah dan Hukum yang diwawancarai, Nadhruna'im Abdilah mengatakan, “sesuai dengan skema, kontinyu follow-up, 1x seminggu sesuai dengan lima materi wajib selama dua bulan dan selesai, selanjutnya kita diskusi.”²⁵⁸ Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Umar bin Khattab Universitas Islam Indonesia (UII), “menurut Wilman Al-Farizy, terus mengusahakan follow-up, biasa bentuknya di ajak ngopi bareng dan dihubungi kawan lain datang diskusi.”²⁵⁹

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Ketua Umum HMI Komisariat Psikologi Mercubuana mengenai follow-up, “menurut Kurniawati, follow-up biasanya kita mendatangkan pemateri dari pengurus cabang, alumni atau yang lebih menguasai. Materi wajib 5, dan dilaksanakan 1x seminggu.”²⁶⁰ Hal yang lain diungkapkan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Mecubuana yang merupakan satu naungan di sekretariat dan hampir semua kegiatan komisariat dilaksanakan bersama, dia mengatakan:

“Menurut Elfrian Fajar Ismail, follow-up banyak keluhan dari kader, dia kurang mendapatkan apa inti dari follow-up. Ada juga keluhan lain dari kader baru bahwa pemateri follow-up itu belum menguasai, kalau ditanya dia juga tidak tau, sehingga ada juga kader baru berpendapat bahwa yang lama saja ber-HMI masih seperti ini kualitasnya lalu untuk apa saya ber-HMI.”²⁶¹

²⁵⁸Wawancara dengan, Nadhruna'im Abdilah di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

²⁵⁹Wawancara dengan, Wilman Al-Farizy di Kaliurang Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

²⁶⁰Wawancara dengan, Kurniawati di Kampus 3 Universitas Mercubuana Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

²⁶¹Wawancara dengan, Elfrian Fajar Ismail di Wirobrajan Yogyakarta, tanggal 13 Januari 2018.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Umum HMI Komisariat Lafran Pane UII yang mewakili Ketua Umum Komisariat yang sudah tidak berada di Yogyakarta, dia mengatakan:

“Menurut Abdullah Afif, follow-up dengan ngumpul bareng, dibuatkan group, diberi materi seperti ke-HMI-an, Feminisme, karena belum ada sekretariat, biasanya kumpul di warkop. Perempuan tinggal 1 orang dan hanya diam, yang sering datang hanya 5, 6, atau 7 orang. Pengurus kurang aktif, termasuk saya sebagai SEKUM Lafran Pane. Kendala pertama adalah jarak, kedua, sudah bosan dengan mengurus-ngurus orang, jujur, susah diajak bicara, sudah diajak bertemu, meskipun datang 1, atau 2, 4, 5, 6, yang datang itu-itu saja.”²⁶²

Berdasarkan data di atas bahwa rata-rata setiap komisariat di HMI Cabang Yogyakarta, implementasi pembentukan karakter kadernya dengan perkaderan internal yaitu follow-up, kajian, diskusi berjalan lancar dan terus dilakukan, adapun 3 komisariat yang disebut terakhir memiliki kendala akhir-akhir ini dalam penataan Komisariat, sehingga follow-up kader ikut tidak intens.

Nurcholish Madjid sebagaimana yang dikutip Solichin mengatakan bahwa pemikiran keislaman dan keindonesiaan HMI memiliki nilai universal dan realistis dalam konteks Indonesia. Maka HMI dapat dikatakan merupakan miniatur Indonesia yang dapat mempresentasikan berbagai hal, seperti asal daerah dan pemikiran.²⁶³

Maksud dari asal daerah dan pemikiran bagi penulis itu sudah mencakup, budaya, ras, suku, agama, bahasa, karena setiap daerah memiliki itu dan sering berangkat dari pemikiran-pemikiran dari penduduk atau para pendahulu di setiap

²⁶²Wawancara dengan, Abdullah Afif di Kaliurang Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

²⁶³Solichin, *HMI Candradimuka...*, hlm. 169.

daerah itu. Maka dalam pemikiran HMI yang paling khas dimiliki setiap kader HMI adalah keserasian antara Islam dan Indonesia.

b) Muatan materi HMI di berbagai pelatihan dan berbagai jenjang HMI dalam rangka membangun karakter bangsa.

(1) Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan merupakan karakter HMI, bagi HMI kebangsaan atau keindonesiaan adalah mutlak perjuangan dan pengabdian. Memperhatikan keindonesiaan merupakan implementasi dari keimanan sebagai seorang muslim. Maka keperibadian atau karakter HMI senantiasa peduli umat, peduli rakyat, dan negara tercinta Indonesia. Maka membangun dan mewujudkan karakter bangsa perlu diasah sedemikian rupa. Penulis dalam hal ini memaparkan implementasi pembangunan wawasan kebangsaan kader HMI Cabang Yogyakarta sebagai bukti telah membangun karakter bangsa.

Sebagai gambaran dalam menelaah karakter bangsa yang dibangun HMI Cabang Yogyakarta dalam seluruh aktivitas kaderisasinya, maka penulis menguraikan pembangunan karakter bangsa yang dimaksud Kebijakan Nasional yaitu:

Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan

Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁶⁴

Dengan demikian pembangunan karakter bangsa merupakan upaya yang terus-menerus, utuh untuk menciptakan sikap atau perilaku yang sesuai dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi bangsa dan negara baik dalam konteks nasional, regional, begitupun dalam merespon konteks global. Demikian itu diharap terbentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila.

(2) Penanaman Cinta Tanah Air

Mencintai tanah air atau kebangsaan Indonesia, dengan perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan, serta segala aturan main dalam bernegara, merupakan tindakan berkarakter bangsa. Penulis melakukan wawancara dengan berbagai Ketua Umum HMI Komisariat sejawaran HMI Cabang Yogyakarta yang memegang tongkat estafet dari amanah para pedahulu untuk terus memproduksi manusia-manusia yang mencintai tanah airnya. Sebab di Komisariatlah ladang perkaderan HMI paling dasar sebagai pondasi.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang, pembentukan cinta tanah air pada kader HMI. Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM yang diwawancarai mengatakan:

²⁶⁴Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, (Jakarta: 2010), hlm. 7-8.

“Menurut Abdu Alifah, pemahaman keislaman dan keindonesiaan kita mendidik untuk paham tanah airnya. Ada diskusi-diskusi bidang PTKP Komisariat kajiannya berkaitan dengan isu-isu nasional. Jarang mengkaji tokoh-tokoh dunia, FISHUM tidak masuk ke situ, lebih fokus pada nasional. Kalau nonton bersama itu paling film Soe Hok Gie, film G30 SPKI, atau program Bioskop FISHUM, menampilkan film-film sejarah, supaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme, dan supaya tidak JASMERAH. Kaitannya dengan sisi pemuda saat ini mulai kehilangan nasionalismenya, maka perlu kita tingkatkan nilai-nilai nasionalisme di FISHUM. Kita juga selalu ikut iven-iven atau hari-hari besar seperti Sumpah Pemuda, kita diskusi. Maulid juga kajian tentang Nabi. Tahun baru juga kajian tentang tahun baru, resolusi-resolusi tahun 2018, dan lainnya. Kita banyak bicara kebangsaan, 17 Agustus, atau 10 November. Baik kajian, baca al-Qur'an, tausyiah. Pringatan Sumpah Pemuda kami turun ke jalan bersama pengurus HMI Cabang Yogyakarta. Menguatkan pemahaman Islam dan Indonesia kita dorong terus ikut proses perkaderan yang ada di HMI, karena itu ciri khas HMI.”²⁶⁵

Kemudian penulis juga wawancara kepada Ketua Umum HMI Komisariat

Persiapan Janabadra, dia mengatakan bahwa:

“Menurut Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar, kader HMI Janabadra didorong memahami Pancasila dan UUD, mengetahui perumusan pancasila, P4 (Pengamatan, pengamalan, pelaksanaan, Pancasila). Harus memahami wawasan kebangsaan dan keadilan sosial. Pengamalannya dengan diskusi, mengembangkan minat baca buku dan sekaligus mempersentasikannya dengan cara bergiliran semua kader HMI Janabadra. Buku tentang hukum, politik, ekonomi dan lainnya.”²⁶⁶

Mansyur Ramly dalam kata pengantar naskah Program Kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II menguraikan bahwa karakter sebagai suatu “*moral excellence*” atau akhlak dibangun di atas berbagai kebajikan (*virtues*) yang hanya memiliki makna ketika dilandasi atas nilai-nilai yang berlaku dalam budaya (bangsa). Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki warga negara

²⁶⁵Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²⁶⁶Wawancara dengan, Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar di Timoho Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

bangsa Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia.²⁶⁷

Dalam membentuk karakter bangsa sebagaimana uraian di atas, penulis juga wawancara kepada Ketua Umum HMI Komisariat Avicena untuk mengetahui lebih dalam pembentukan karakter bangsa HMI Cabang Yogyakarta, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Sukriadi Nuhri, kami sering memberi wadah, seperti diskusi, bagaimana kabar tanah air kita hari ini. Apabila sudah mengetahui, tindakan apa yang ingin kita berikan untuk bangsa ini. Contoh kemarin hari Sumpah Pemuda, kami membuat diskusi, bagaimana peran-peran pemuda hari ini, realita pemuda saat ini menurun hal intelektualnya, kurang peka pada ranah sosialnya. Di situlah harus diperbaiki, begitu cara kita menumbuhkan rasa cinta pada tanah air.”²⁶⁸

Hal yang sama disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah, bahwa kecintaan pada tanah air dilakukan “menurut Jeki Zahrawi, melalui training-training, penguatan di wacana dan diskusi. Secara geneologi ke-HMI-an itu yang cukup penting, terutama kajian-kajiannya, karena kita sadar bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh pola pikirnya.”²⁶⁹ Senada yang disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Hemengkubuwono IX,

“Menurut Syafiqurrohman, diskusi, follow-up, baca buku, kajian, serta penguatan bahwa HMI ini kader umat dan kader bangsa. Tidak ada agenda khusus bahas nasionalisme, tetapi setiap kajian selalu ditegaskan bahwa kita ini bukan hanya kader umat tetapi juga kader bangsa, sebaliknya juga bahwa yang kita urus bukan hanya negara tetapi juga agama, satu padu.”²⁷⁰

²⁶⁷Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*, (Jakarta: 2010), hlm. iii.

²⁶⁸Wawancara dengan, Sukriadi Nuhri di Wates Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

²⁶⁹Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

²⁷⁰Wawancara dengan, Syafiqurrohman di Patang Puluhan Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

(3) Penanaman nilai-nilai Pancasila

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang penanaman pemahaman dan nilai-nilai Pancasila pada kader HMI. Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Abdu Alifah, HMI di Jogja dan di UIN ini berkembang dua HMI, HMI MPO dan DIPO, sehingga pemahaman kita tentang Pancasila cukup kuat karena kita kan terkenal dengan Pancasila, dan MPO anti Pancasila, akhirnya menguat sendiri. Memori penjelasan Islam sebagai azas, di dalamnya terdapat pembahasan dari Islam ke Pancasila, Pancasila ke Islam.”²⁷¹

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20, pasal 3, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dinyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.²⁷²

UU Sisdiknas di atas berisi perumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Demikian itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Maka

²⁷¹Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²⁷²Citra Umbara, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas & Peraturan-Pemerintah RI Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Wajib Belajar”. (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 6.

rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.²⁷³

Pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang selalu terhubung peserta didik dari lingkungan sosial, budaya, masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan dan budaya bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pengembangan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.²⁷⁴

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang berbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri dari serangkaian nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat serta menghargai orang lain. Interaksi individu dengan individu lainnya menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa.²⁷⁵

Untuk membentuk watak dan peradaban bangsa maka HMI Cabang Yogyakarta melakukan penanaman karakter bangsa melalui pendidikan di HMI dengan memegang teguh Pancasila. Sebagaimana penulis juga melakukan wawancara terhadap Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan Janabadra yaitu:

“Menurut Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar, kalau membaca saja tanpa menerapkan itu kurang, maka teori dan praktek harus dikembangkan. Pancasila harga mati, karena kita mengetahui perjuangan Indonesia bagaimana sejarah

²⁷³Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan...*, hlm. 2.

²⁷⁴*Ibid.*, hlm. 4.

²⁷⁵*Ibid.*, hlm. 3.

dirumuskannya Pancasila, dari sila pertama sampai lima bersifat keadilan. Pada saat materi-materi HMI berlangsung sudah ada nilai-nilai Pancasila.”²⁷⁶

Sedangkan wawancara terhadap Ketua Umum HMI dakwah, mengatakan, “menurut Jeki Sahrawi, kita mengupayakan pemahaman mereka nilai-nilai Pancasila, kita tergetkan turun pada tindakan, setidaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.”²⁷⁷

Berdasarkan temuan di atas, maka HMI sangat menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila harus terus dikaji dan dipahami di era ini generasi muda sangat terlihat memudarnya pemahaman dan pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus menjadi nafas dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Semua nilai dalam karakter telah termuat dalam lima sila dalam Pancasila, dalam mengejawantahkan semua itu diperlukan perpaduan dari pikiran, hati, raga, rasa dan karsa.

Sebagaimana dalam draf Kebijakan Nasional Pembangun Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 dinyatakan bahwa:

Karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.”²⁷⁸

Dengan demikian dipahami bahwa pembangunan karakter yang dimaksud bukan sekedar perbaikan moral, akhlak, atau perilaku, tetapi perpaduan berbagai

²⁷⁶Wawancara dengan, Fakhrurrozi Farras Al Husein Siregar di Timoho Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²⁷⁷Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

²⁷⁸Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional Pembangunan.....*, hlm. 7.

kompetensi dan kecakapan dalam ranah pikiran, hati, raga, rasa dan karsa. Kecakapan itu memancar dan memberi pengaruh baik pada lingkungan.

(4) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang Bhinneka Tunggal Ika pada kader HMI. Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Abdu Alifah, Kalau FISHUM keberagamannya cukup tinggi, kita banyak mahasiswa non santri, sehingga ada pelajaran mengaji setiap minggu. Toleran, tidak ada fundamental dan bahkan plural. Bahkan ada yang muallaf masuk HMI, sekarang sebagai MPKPK HMI FISHUM, keturunan China dan memperjuangkan pluralisme.”²⁷⁹

Kemudian penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum HMI dakwah, mengatakan:

“Menurut Jeki Sahrawi, mulai di kehidupan di HMI, sebagai miniatur Indonesia yang latar belakang berbeda-beda etnis, suku dan ras ternyata kita bisa hidup rukun di HMI. Nanti ketika selesai di HMI mereka sudah orang yang nasional. Bukan lagi orang etnis tetapi sudah bersikap nasional. Merespon dengan Bhinneka Tunggal Ika mereka tidak ada masalah lagi hidup dengan latar belakang apa pun, berusaha bisa hidup beriringan dan berdampingan.”²⁸⁰

Sedangkan menurut Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan Janabadra adalah:

“Menurut Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar, tidak ada perbedaan pada sesama, saling menghormati, saling menghargai, agama, ras, maupun suku. Sudah tertanam di HMI dan kita sudah berada di Indonesia maka harus dipahami dan diterima kebhinnekaan. Pancasila ketika mau diganti akan merusak moral bangsa dan negara, sudah dibentuk oleh para

²⁷⁹Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²⁸⁰Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

pendahulu kerja keras merumuskan maka kita harus mengembangkan dan memahami, banyak tokoh mengatakan bahwa Pancasila itu terbaik.”²⁸¹

Hal yang senada disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Lafran Pane UII, “menurut Abdullah Afif, menghargai keberagaman, perbedaan, dari berbagai daerah ketika kumpul kita menggunakan bahasa Indonesia.”²⁸² Kemudian hasil dari wawancara penulis dengan Ketua Umum HMI Komisariat Hemengku Buwono IX, dia mengatakan:

“Menurut Syafiwurrohman, kita HMI sebagai kader umat dan kader bangsa selalu kita himbau. Apalagi di kampus kami bukan hanya Islam, ada non Islam. Jadi kadang kalau mengajak calon kader untuk masuk HMI kita tanya dulu agama apa. Tidak berjilbab pun ketika Islam diajak juga bergabung. Ada dua perempuan tidak berjilbab setelah masuk HMI jadi berjilbab, bahkan dapat ancaman dari bosnya menantang supaya melepas hijab, dan sampai sekarang tetap memakai jilbab dan tidak dipecat bahkan bosnya salut atas pendiriannya. Ada yang satu tomboy metal setelah masuk HMI malu sendiri kalau tidak berjilbab, itu kader HMI Hemengkubuwono IX. Tidak ada doktrin berjilbab di HMI, tetapi ketika masuk proses kaderisasi aturannya berjilbab dan HMI basis beragama Islam diajari untuk menutup aurat, sehingga ada tanggungjawab moral akhirnya berjilbab terus sampai sekarang. HMI menghargai keragaman dan tidak menjauh, bahkan orang seperti itu yang harus dipikirkan, tidak ada kekhawatiran akan jadi virus pada kader lainnya.”²⁸³

Dengan data di atas dipahami bahwa HMI sangat menghargai keragaman, perbedaan, sudah menjadi prinsip kehidupan bahwa manusia semua berbeda dari segala hal. Demikian itu fitrah dari Tuhan dan menuntut kedewasaan saling memahami dan mencari makna terdalam dari setiap perbedaan.

²⁸¹Wawancara dengan, Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar di Timoho Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

²⁸²Wawancara dengan, Abdullah Afif di Kaliurang Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

²⁸³Wawancara dengan, Syafiqurrohman di Patang Puluhan Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

Mencermati data di atas, bahwa karakter bangsa yang dibangun HMI Cabang Yogyakarta secara terus-menerus sejalan juga dengan karakter bangsa yang dimaksud oleh Kebijakan Nasional yang telah dirumuskan selama ini:

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap NKRI.²⁸⁴

Maka karakter bangsa Indonesia yaitu perilaku kebangsaan yang khas berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan NKRI.

(5) Komitmen terhadap NKRI

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang komitmen kader HMI terhadap NKRI. Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Abdu Alifah, komitmen mempertahankan NKRI, tidak perlu diajarkan atau perkaderan khusus NKRI, dalam perkaderan HMI sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, pancasila pasti hafal. Pendidikan khusus untuk mempertahankan NKRI tidak perlu, karena di HMI sejak LK1 sudah diajarkan, dan sebelum LK1 di MAPERCA itu sudah ditanamkan harus hafal Pancasila, Indonesia Raya, Sumpah Pemuda, teks Proklamasi, itu discreaning untuk masuk LK1 HMI.”

Komitmen pada NKRI merupakan wujud karakter bangsa HMI, karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan

²⁸⁴Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional Pembangunan.....*, hlm. 7.

negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang tercermin dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat dan estetika.²⁸⁵

Maragustam mengatakan bahwa membangun karakter bangsa mengharuskan adanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter ialah mengukir dan mematrikan nilai-nilai ke dalam diri peserta didik melalui pendidikan, endapan pengalaman, pembiasaan, aturan, rekayasa lingkungan, serta pengorbanan dipadukan dengan nilai-nilai intrinsik yang sudah ada dalam diri peserta didik sebagai landasan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku secara sadar dan bebas.²⁸⁶

Membangun Indonesia lebih maju, mandiri dan berkualitas sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pembangunan karakter bangsa. Alasan pentingnya membangun karakter bangsa baik secara filosofis, ideologis, normatif, historis maupun sosiokultural. Secara filosofis bahwa membangun karakter bangsa merupakan suatu kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter atau jati diri yang akan eksis. Secara ideologis, pembangun karakter merupakan upaya

²⁸⁵Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 41.

²⁸⁶Maragustam, *Filsafat Pendidikan.....*, hlm. 245.

mengejewantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸⁷

Secara normatif, membangun karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sesuatu dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi terus-menerus dalam pergerakan sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa multikultural.²⁸⁸

Jadi, karakter merupakan hasrat dan kebiasaan-kebiasaan manusia yang selalu mengarah pada tujuan-tujuan positif. Sehingga yang disebut orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai spirit, gairah dan kebiasaan positif. Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional.

Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional,

²⁸⁷Ida Zusnani, *Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa*, (Cet. I; Platinum, 2013), hlm. I47.

²⁸⁸*Ibid.*, hlm. I47-148.

yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan untuk mengembangkan pendidikan nasional di Indonesia. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 3.

Sedangkan W.S Winkel menjelaskan bahwa Karakter merupakan keseluruhan hasrat manusia yang terarah pada tujuan-tujuan yang mengandung nilai moralitas atau nilai etis.²⁸⁹ Karakter memuat nilai-nilai yang harus terus dikembangkan. Nilai dalam perspektif Richard Eyre and Linda sebagaimana dikutip Heri Gunawan menguraikan bahwa nilai yang benar dan diterima secara universal yaitu nilai yang menghasilkan suatu perilaku dan perilaku itu berdampak positif, baik yang melakukan tindakan begitupun dengan orang lain.²⁹⁰

Richard kemudian menambahkan bahwa yang dimaksud dengan nilai adalah, suatu kualitas yang dibedakan menurut, (1) kemampuan untuk berlipat ganda atau bertambah, meskipun sering diberikan kepada orang lain, dan (2) kenyataan bahwa semakin banyak nilai yang diberikan kepada orang lain semakin banyak juga nilai serupa yang diterima atau dikembalikan dari orang lain.²⁹¹

²⁸⁹W.S. Winkel & Sri Hastuti, *bimbingan dan konseling di institusi pendidikan*, Jogjakarta: media abadi, 2004, hlm. 218.

²⁹⁰Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Cet. III; Alfabeta, 2014), hlm. 31.

²⁹¹*Ibid.*

Sedangkan Ngainun Naim menjelaskan bahwa karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*).²⁹² Jadi, karakter merupakan hasrat dan kebiasaan-kebiasaan manusia yang selalu mengarah pada tujuan-tujuan positif. Sehingga yang disebut orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai spirit, gairah dan kebiasaan-kebiasaan positif.

Character Count di Amerika sebagaimana dikutip Heri Gunawan, mengidentifikasi bahwa karakter yang menjadi pilar yang harus ditanamkan kepada siswa, meliputi 10 karakter utama, (1) dapat dipercaya (*trustworthiness*); (2) rasa hormat dan perhatian (*respect*); (3) tanggungjawab (*responsibility*); (4) jujur (*fairness*); (5) peduli (*caring*); (6) kewarganegaraan (*citizenship*); (7) ketulusan (*honesty*); (8) berani (*courage*); (9) tekun (*diligence*); dan (10) integritas (*integrity*).²⁹³

Indonesian Heritage Foundation (IHP) yang dikutip Heri Gunawan merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter, yaitu; (1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya; (2) tanggungjawab; (3) jujur; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang, peduli dan kerjasama; (6) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik, rendah hati; (9) toleransi, cinta damai dan persatuan.²⁹⁴

Plutarch mendefinisikan karakter yaitu “*Character is simply habit long continued*”, Aristoteles berpendapat bahwa “*We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit*”, sedangkan Arthur Wellesley

²⁹²Ngainun Naim, *Character Building*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 55.

²⁹³Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter...*, hlm. 32.

²⁹⁴*Ibid.*

mengatakan bahwa “*Habit is ten times nature*”.²⁹⁵ Karakter akan terbentuk dengan melakukan aktivitas berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan (habit).

Enam pilar karakter (*the six pillars of character*) yaitu kejujuran (*trustworthiness*), rasa hormat (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), keadilan (*fairness*), kepedulian (*caring*), dan warga negara yang baik (*good citizenship*). Kemudian pembentukan karakter selalu beriringan dengan *life skill*. *Life skill* sangat berkaitan dengan kemahiran, mempraktekkan, berlatih, kemampuan, fasilitas, dan kebijaksanaan. Pembelajaran *life skill* meliputi *learning to know* (belajar untuk tahu), *learning to be*, *learning to do* (belajar untuk berbuat).²⁹⁶

Tiga langkah pembentukan karakter, (1) Terapi Kognitif, seperti memperbaiki cara berfikir dengan cara (mengosongkan benak dari berbagai bentuk pemikiran yang salah, menyimpang, tidak berdasar, baik dari segi agama maupun akal yang lurus), pengisian (mengisi kembali benak dengan nilai-nilai baru dari sumber keagamaan, yang membentuk kesadaran baru, logika baru, arah baru, dan lensa baru dalam cara memandang berbagai masalah). Kontrol (mengontrol pikiran-pikiran baru yang melintas dalam benak sebelum berkembang menjadi gagasan yang utuh), dan doa (pencerahan ilahi dalam berpikir).

(2) Terapi mental, dengan cara pengarahan (arah perasaan yang jelas), penguatan (menguatkan perasaan dalam jiwa, adanya keyakinan, kemauan, dan tekad sebelum melakukan suatu tindakan). Kontrol (memunculkan kekuatan tertentu yang berfungsi mengendalikan semua warna perasaan), dan doa

²⁹⁵Daryanto dan Suryatri Darmiatun, *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), hlm. 2.

²⁹⁶*Ibid.*, hlm. 3.

(mengharapkan adanya dorongan Ilahi yang membantu semua proses pengarah, penguatan, dan pengendalian mental).

(3) Perbaiki fisik, dengan cara memadukan tiga unsur (gizi makanan, olahraga, dan istirahat) dengan baik.²⁹⁷

Buku yang diterbitkan Kemendiknas (2010) yakni “Panduan nilai karakter bangsa” yang digali dari nilai-nilai agama, norma sosial, peraturan atau hukum etika, akademik, dan prinsip-prinsip HAM telah ditemukan 80 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu; *pertama*, nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, nilai-nilai dalam hubungannya dengan diri sendiri yang mencakup jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu.²⁹⁸

Ketiga, nilai dalam hubungannya dengan sesama manusia, yang meliputi sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, dan demokratis. *Keempat*, nilai-nilai dalam hubungannya dengan lingkungan. *Kelima*, nilai-nilai dalam hubungannya dengan kebangsaan yang meliputi nasionalis dan menghargai keberagaman.²⁹⁹

Berdasarkan berbagai pandangan karakter bangsa di atas, penulis membandingkan fakta di lapangan yang dilakukan HMI dalam melestarikan atau membangun karakter bangsa melalui aktivitas kaderisasinya yang

²⁹⁷*Ibid.*, hlm. 7-8.

²⁹⁸Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter...*, hlm. 32.

²⁹⁹*Ibid.*, hlm. 32-35.

berkesinambunga. Sebagaimana wawancara penulis pada Ketua Umum HMI HMI

Komisariat Dakwah, yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Jeki Sahrawi, kader memiliki komitmen yang cukup kuat, salah satunya tidak menentang NKRI. Ketika ada isu-isu yang berkaitan dengan itu teman-teman meliki respon yang cukup cepat membela, walaupun secara pemikiran, mungkin dalam ranah diskusi tidak terlaui berperan ke luar, tetapi kematang diri mereka tetap mempertahankan keberpihakannya pada NKRI.”³⁰⁰

Hal senada disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan Janabadra adalah:

“Menurut Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar, menjaga keutuhan warga dan negara, seperti ada pihak-pihak asing yang mau merusak bangsa dan negara ini harus melakukan perlawanan dan pencegahan. Kita melakukan diskusi dengan pejabat pemerintahan, di komisariat juga dilakukan diskusi-diskusi.”³⁰¹

Hal senada dari Ketua Umum HMI Komisariat Lafran Pane UII, “menurut Abdullah Afif, kader Lafran Pane wawasan kebangsaannya bagus, masih berpedoman pada prinsip hubbul wathon minal iman.”³⁰² Demikian juga hasil dari wawancara penulis dengan Ketua Umum HMI Komisariat Hemengku Buwono IX, dia mengatakan:

“Menurut Syafiqurrohman, kami semua di komisairat sampai kapanpun tetap NKRI. Ketika ada kader yang mengikuti organisasi yang sekiranya menyimpan akan kami pertanyakan, jangan sampai ada kader yang keluar dari kerangka NKRI, selama ini tidak ada.”³⁰³

Berdasarkan data di atas bahwa komitmen HMI terhadap NKRI sejak berdirinya sudah menjadi tujuan di tahun 1957, sampai 2018 ini masih terus

³⁰⁰Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

³⁰¹Wawancara dengan, Fakhurrozi Farras Al Husein Siregar di Timoho Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

³⁰²Wawancara dengan, Abdullah Afif di Kaliurang Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

³⁰³Wawancara dengan, Syafiqurrohman di Patang Puluhan Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

menjadi ladang perjuangan. NKRI bagi HMI merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dirawat sebagai tanda kesyukuran dan keimanan. Cinta dengan NKRI adalah bagian dari keimanan. Tetapi NKRI bagi HMI tidak cukup, harus ditopang dengan kemanusiaan. Kedua hal ini harus sejalan.

c) Profesionalisme

Pembentukan profesionalisme kader HMI dengan berbagai kualitasnya harus dibangun atas kebutuhan mereka berdasarkan minat dan bakatnya. Penulis dalam hal ini memaparkan cara pembentukan Olehnya itu setiap kader HMI.

Penulis melakukan wawancara dengan berbagai Ketua Umum HMI Komisariat sejawaran HMI Cabang Yogyakarta yang terus berupaya mencetak kader-kader yang profesional.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang, pembentukan profesionalisme pada kader HMI. Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Abdu Alifah, kita mendidik kader sesuai dengan minat bakatnya, kalau bakatnya di bidang profesional kita arahkan seperti menulis. Kalau minatnya kewirausahaan kita arahkan ke Bidang KPP, tahun ini mau dibuat Lembaga Pecinta Alam Mahasiswa Islam, mengingat banyak berminat dan suka main-main dan jalan-jalan, awalnya seperti itu, tetapi harapan ke depannya lembaga yang menyediakan outbond, tour, parawisata. Karena HMI FISHUM karakternya adalah akademis dan profesional, itu mottonya. Karakter ke arah profesioanl, bukan politisi, karena jurusan memang mengarah ke akademis, profesioanal, keahlian. Kalau ada yang mau ke ranah politik, diberi ruang cuma fokus kita ke arah akademis, intelektualnya. Yang menonjol profesional, kita sudah punya web, wirausaha jalan, jurnalistik, pelatihan desain, itu rutin sampai bisa,

sekarang beranjak ke Video Grafer, kita arahkan ke hal-hal menunjang program studi mereka, kita jadikan komisariat melatih itu semua.³⁰⁴

Sedangkan wawancara kepada Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah mengatakan:

“Menurut Jeki Sahrawi, pertama, pendekatan kultural sangat penting, membuat mereka merasa nyaman dulu, ke mana pun kesukaan mereka kita ikuti dulu, kedua, kita dapat menggali ke mana minat mereka, bidang apa. Kemudian mewadahnya menyatukan mereka yang memiliki minat serupa kita tampung, meski belum semua minat bakat bisa kita wadahi, yang mayoritas diprioritaskan.”³⁰⁵

Sedangkan Ketua Umum HMI Komisariat Lafran Pane UII, mengatakan: “menurut Abdullah Afif, Kami memberi buku, dan banyak kader yang menulis. Selalu dapat penghargaan penulisan di sosial media, eksternal kampus. Kemampuan menulis dari komisariat kita menyediakan buku referensi.”³⁰⁶

Dengan itu bahwa profesionalisme merupakan hal sangat penting dalam pengembangan bakat dan minat kader HMI. Bakat dan minat ini merupakan hal yang terus didorong oleh HMI untuk berkembang. Disadari bahwa dalam dunia pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, bakat dan minat tidak terwadahi meskipun sering ada pendataan dan pemetaan. Tetapi tidak ada garapan yang serius dan hanya mementingkan materi-materi yang bersifat pengajaran disertai angka-angka dari penilaian. Di HMI semua bakat dianjurkan untuk terus di asah dan dimatangkan, HMI menyediakan atau mewadahi semua itu. Ketika di komisariat kebetulan alat atau sarana belum menunjang minat dan bakat tertentu, maka menggunakan jaringan atau relasi di berbagai elemen baik di kampus maupun di luar kampus untuk disalurkan minat bakatnya para anggota.

³⁰⁴Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

³⁰⁵Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

³⁰⁶Wawancara dengan, Abdullah Afif di Kaliurang Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

d) Kemandirian

Kemandirian generasi bangsa Indonesia di era ini makin penting untuk terus ditubuhkan dan dibangun yang terwujud pada skill. Selama ini ketergantungan pada siapapun termasuk kepada asing telah memasung gerak perubahan bangsa Indonesia lebih baik. Hal inilah yang penulis telusuri bagaimana pembangunan kemandirian kader HMI yang dilakukan oleh pengurus-pengurus HMI Cabang Yogyakarta yang tercermin dalam setiap Komisariat yang dinaunginya. Sebab kunci kemajuan suatu negara terletak pada kemandirian manusia-manusia di dalamnya.

Dengan demikian penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang, pembentukan kemandirian pada kader HMI. Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Abdu Alifah, pertama kita selalu survey dari tahun ke tahun, pada semua kader, baik yang sudah disurvei tahun lalu tetap disurvei lagi, juga sebagai data base. Psikologi sudah paham metodologi survey minat dan bakat bahkan sangat detail bikin surveynya. Up-Grading juga ada daftar rencana ke depannya, minat, cita-citanya, keinginan, dan bakatnya. Lalu kita buat proker yang jadi kebutuhan kader, dan ada minat lain-lain yang belum disediakan untuk memfasilitasi minat bakat mereka dan kita fasilitasi, kewirausahaan, futsal, naik gunung, diskusi buku mingguan, buku apa yang diminati dibedah semua. Itu bukan rekomendasi dari RAKER tapi kebutuhan kader. Ada juga kegiatan wajib yang tidak sesuai minat mayoritas kader, seperti pelatihan keprotokoleran, minat atau tidak minat itu wajib, harus paham, karena itu untuk mengelola iven, organisasi, kegiatan, kesekretariatan. Untuk minat itu banya kader ikut, sampai 15 atau 30 orang seperti jurnalistik. Tetapi ketika keprotokoleran hanya sampai 5 atau 7 orang. Ada perbedaan program yang minat dan bukan minat. Kalau pelatihan *Tibel Miner*, perempuan sangat suka mengikuti, seperti cara kita makan, cara duduk di restoran, cara kita bersikap ketika menerima tamu orang penting dan lainnya, itu dilaksanakan karena memperhatikan minat-minat berdasarkan survey kader, apa pun yang diinginkan kader kalau kita memang berbasis minat, bakat, dan profesional

kita wadahi, kita prioritaskan animo kader. Itu untuk kepentingan kader dalam menunjang karier mereka, kebutuhan, kebutuhan akademis, kebutuhan profesioanl mereka.”³⁰⁷

Abdu Alifah kemudian melanjutkan bahwa,

“Abdu Alifah kemudian melanjutkan, ada malam seni, bisanya diisi perpaduan musik dan puisi. Kami komisariat cukup mandiri, jarang minta ke senior, kita bayar sendiri komisariat, seperti sekretariat sebelumnya itu empat juta dibayar hasil dari keuntungan jual baju. Hasil ada 6 sampai 7 juta, baju kaos untuk HMI. Bidang KPP FISHUM yang mewadahi, dijual secara nasional, ada juga pesan dari Malaysia. Itu mendongkrak kemandirian kita dan tidak terlalu bergantung pada senior tentang finansial, saya pikir HMI sudah harus sampai di situ, mandiri. Bahkan LAPMI juga kita buka iklan, meski awal-awal iklan dari usaha senior, itu dapat hasil. Kita jarang minta uang, tapi kita minta proyek, bang apa yang bisa kami kerjakan?. Ada outbond mialnya, di Parawisata, kamu temui tamu turis. Kemudian jual baju ke senior, ada lebihnya dari harga baju, ada yang ditukar, biasanya ke dosen-dosen FISHUM. Ke senior jauh, seperti di Medan, Sulawesi, dan lainnya.”³⁰⁸

Kemudian bagi Ketua Umum HMI Komisariat Dakwahm Jeki Sahrawi bahwa merangsang mintanya ke mana dan digali, diwadahi.³⁰⁹ Hal senada dari HMI Komisariat Hemengku Buwono IX, dia mengatakan:

“Menurut Syafiqurrohman, banyak dari kader kami ada yang dari resaler (jual barang), dropsif, kadang saya pemandu wisata pengunjungnya bule mancanegara, saya bisa bahasa Inggris. Akses di situ dari pejabat kampus, saya dulu ikut lomba bahasa Inggris mewakili kampus dan juara 1 di kampus. Kebetulan kampus kenal dengan Idohostel dan kami dikabari dan diminta. Ada juga SEKUM Komisariat jadi Dj di banyak kafe-kafe dan berpenghasilan. Kita tunjukkan juga kita bukan hanya kuliah kita juga cari uang meski freelance, selama ada waktu silahkan kembangkan bakat masing-masing. Saya jadi Gubernur HUKUM teman saya jadi gubernur FISIPOL. Saya kemudian menjadi ketua umum HMI, teman seangkatan saya jadi Presiden mahasiswa. Semua dari HMI, dan saya juga pernah

³⁰⁷Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

³⁰⁸Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

³⁰⁹Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

menjadi mahasiswa berprestasi, pada saat acara DIES NATALIS kampus kami dipanggil.”³¹⁰

Dari data ini ditemukan bahwa kemandirian bagi perspektif HMI adalah hal yang sangat penting apalagi di dunia globalisasi ini, Indonesia tidak hanya sebagai negara yang terbatas pada teritorial keindonesiaa, tetapi sudah menjadi Global Society (Masyarakat Global). Konsekuensi masyarakat global adalah persaingan yang ketat dan yang memiliki skill yang menjadi pemenang. Kompetisi ini sangat terbuka, bukan hanya di tataran Asia dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tetapi juga sudah berkompetisi ditingkat internasional.

Bangsa Indonesia selama ini lebih banyak sebagai konsumen daripada memproduksi produk atau sesuatu yang bernilai materi. Kebutuhan sehari-hari terus digempur dengan barang-barang impor, olehnya itu HMI terus berjuang mencetak kader-kadernya mandiri. HMI Hadir membangun kader umat dan kader bangsa yang mandiri, yang memiliki kemampuan, skill dan lainnya.

d) Pembentukan Keilmuan Kader

Penulis melakukan wawancara dengan berbagai Ketua Umum HMI Komisariat sejawaran HMI Cabang Yogyakarta yang terus berupaya melahirkan kader-kader yang intelektual.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang, pembentukan intelektual pada

³¹⁰Wawancara dengan, Syafiqurrohman di Patang Puluhan Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

kader HMI. Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Abdu Alifah, Intelektual belum terlalu menonjol tetapi terus menggenjot. Diskusi PTKP, bahkan ada rencana wacana politik, diskusi tiap minggu, kajian NDP khusus, diskusi isu kontemporer, kita paling genjot adalah diskusi buku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas baca kader. Kader tau buku apa yang bagus untuk dibaca dan kurang bagus. Diskusi hanya sebagaai wadah memberikan informasi, selajutnya harus baca buku sendiri untuk meningkatkan intelektul. Ada perpustakaan masih kurang bukunya baru sekitar 50 buku.”³¹¹

Kemudian wawancara terhadap Ketua Umum HMI DAKWAH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia mengatakan:

“Menurut Jeki Sahrawi, kita mulai dengan diskusi-diskusi kecil, bedah karya, apapun bentuknya dari karya teman-teman baik itu karya ilmiah, karya sastra, karya populer, kita bedah bersama. Kita apresiasi setinggi-tingginya. Pembentukan skill lainnya kita melihat sepak terjang alumni-alumni kalau di politisi hampir tidak ada lebih banyak ke wirausaha, sehingga pelatihan wirausaha itu ada dalam komisariat.”³¹²

Hal senada dari HMI Komisariat Hemengku Buwono IX, dia mengatakan,

“menurut Syafiqurrohman, kami diskusi bergiliran, sudah ditunjuk besok yang pamerinya ini dan moderatornya ini, dengan cara itu kader terpaksa suka baca buku karena malu ketika tampil tidak menguasai. Sebelum mengisi sudah ada persiapan, baik dari kader baru begitupun dari pengurus.”³¹³

Dengan demikian bahwa karakter bangsa tidak akan mungkin terbentuk tanpa ditopang oleh keilmuan yang matang. Karena sikap atau tindakan, sangat tergantung pada pola pikir. Perubahan perilaku seseorang harus dimulai dari paradigma atau pola pikir yang dibentuk. Ketika pola pikir yang tidak terbentuk dengan baik, maka bukan hanya mengancam keberlangsungan masyarakat

³¹¹Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

³¹²Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

³¹³Wawancara dengan, Syafiqurrohman di Patang Puluhan Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

Indonesia, tetapi juga akan mengancam pertahanan negara Indonesia dan SDA yang dimilikinya. Maka langkah utama bagi HMI Cabang Yogyakarta sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa adalah penguatan keilmuan.

e) Merespon Lingkungan Sosial

Penulis melakukan wawancara dengan berbagai Ketua Umum HMI Komisariat sejawaran HMI Cabang Yogyakarta yang terus bergerak peduli pada lingkungan sosial sebagai wujud karakter bangsanya. Gotong-royong, saling menolong, dan lainnya merupakan budaya Indonesia.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Umum FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang, kepedulian sosial kader HMI FISHUM. Ketua Umum HMI Komisariat FISHUM yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Abdu Alifah, kerja bakti kita ikut ada jadwal di sini. Pada tetangga juga saling berbagai seperti makanan, ketika ada yang wisuda, atau ada yang balik dari kampung bawa oleh-oleh pada tetangga. Penanaman pohon, setiap LK1 ada bakti sosial dengan cara survey ke pak RT, mendata nama-nama anak yatim piatu, janda-janda tua atau fakir miskin, dicatat biasanya sampai 15 bungkus diberikan SEMBAKO, seperti beras, minyak goreng, mie dan lainnya, untuk sosial. Itu kewajiban kader baru dan ditambah pengurus.”³¹⁴

Kemudian wawancara terhadap Ketua Umum HMI DAKWAH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia mengatakan:

“Menurut Jeki Sahrawi, kepekaan sosialnya cukup, merespon ketidak benaran, ketidak adilan, baik itu di internal kampus seperti sistem PEMILWA yang kurang berpihak pada kelompok-kelompok minoritas, begitupun kasus lainnya seperti di Kulon Progo. Sekitar UIN mahasiswa secara ekonomi di kost agak kurang kita merespon itu dengan Gerakan Jumat Berkah. Bentuknya setiap jumat kita menyediakan sekitar 50 sampai 150 nasi bungkus kita donasikan di masjid-masjid sekitar UIN. Rata-rata di

³¹⁴Wawancara dengan, Abdu Alifah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

sekitar masjid adalah kost-kost mahasiswa. Keuntungannya untuk komisariat karena ada donatur baik alumni HMI maupun HMI sukarela mendonasika itu. Misi tetapi misi sosial.”³¹⁵

Kemudian dari HMI Komisariat Hemengku Buwono IX, dia mengatakan:

“Menurut Syafiqurrohman, kalau aksi pernah diadakan, memprotes penghapusan larangan ikut ujian hanya karena telat bayar, dan menuntut transparansi keuangan kampus. Dulu kalau mau mengadakan acara kampus pelit mengeluarkan dana, setelah aksi transparan dana kampus, kita diberi kebebasan dan transparan berapa dana dari kampus setiap tahun. Tidak menjadi musuh karena HMI sudah memberi prestasi dan pihak kampus paham bahwa itu kebaikan.”³¹⁶

Data di atas memberi penegasan bahwa ketimpangan dan kesewenang-wenangan bisa saja dilakukan oleh manusia, maka butuh kepedulian sosial di sekitarnya. Kepedulian sosial bukan sekedar berbagai materi, berbagi sembako dan hal pragmatis lainnya. Bagi HMI bahwa merespon lingkungan sosial dengan kritis terhadap kebijakan pemimpin dari berbagai elemen yang tidak berpihak pada rakyat, yang tidak berpihak pada yang dipimpinnya atau pada kaum mustad’afin.

Bagi HMI bahwa wujud tauhid adalah perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan. Maka apapun resikonya dihadapi meski itu taruhan nyawa. Karena diam dalam ketertindasan, kezaliman dan ketidakadilan, itu merupakan dosa paling besar dari orang yang berbuat zalim, karena diamnya itu mengisyaratkan memberinya tanda izin pada pelaku kejahatan untuk terus berbuat. Namun HMI sangat menjunjung tinggi aturan main dalam berbangsa dan bernegara, maka HMI terus melakukan cara-cara yang konstitusional.

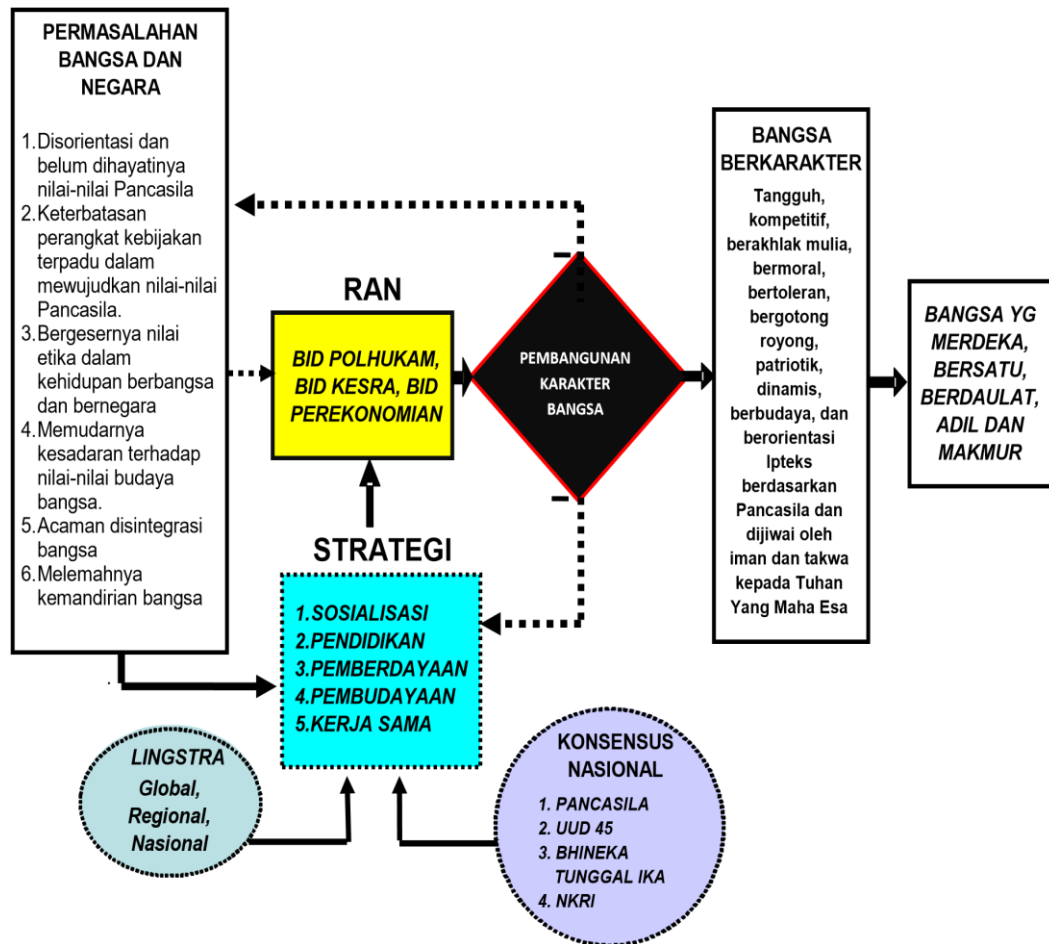
³¹⁵Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

³¹⁶Wawancara dengan, Syafiqurrohman di Patang Puluhan Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2018.

B. Kerangka Dasar Pembangunan Karakter Bangsa

1. Alur Pikir Karakter Bangsa

Alur pikir pembangunan karakter bangsa dapat digambarkan sebagai berikut.³¹⁷



Gambar 1 Alur Pikir Pembangunan Karakter Bangsa 2010

Sumber: Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia, 2010

³¹⁷Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional...*, hlm. 8.

2. **Konsensus Dasar Pembangunan Nasional**

a. **Pancasila**

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.³¹⁸

Dengan demikian Pancasila merupakan landasan utama pembangunan karakter bangsa, maka lahirlah manusia berkarakter Pancasila, yaitu berwatak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

b. **Undang-Undang Dasar 1945**

Asal mula nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dengan demikian itu, landasan kedua yang harus menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa adalah norma konstitusional UUD 1945. Ada empat minimal kandungan isi dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan untuk terus dipertahankan. Pertama, di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma dasar universal bagi berdiri

³¹⁸*Ibid.*, hlm. 9.

tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Implikasi dari norma ini adalah berdirinya negara merdeka dan berdaulat merupakan suatu keniscayaan.

Alasan kedua adalah di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma yang terkait dengan tujuan negara atau tujuan nasional yang merupakan cita-cita pendiri bangsa atas berdirinya NKRI. Tujuan negara itu meliputi empat butir, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita itu luhur dan tidak akan lekang oleh waktu.

Alasan ketiga, Pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Alasan keempat adalah karena nilainya yang sangat tinggi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, sebagaimana tersurat di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dalam pengembangan karakter bangsa, norma-norma konstitusional UUD 1945 menjadi landasan yang harus ditegakkan untuk kukuh berdirinya negara Republik Indonesia.³¹⁹

c. Bhinneka Tunggal Ika

Landasan ketiga yang mesti menjadi perhatian semua pihak dalam pembangunan karakter bangsa adalah semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Semboyan itu bertujuan menghargai perbedaan atau keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam

³¹⁹*Ibid.*, hlm. 9-10.

kemakmuran dan makmur dalam keadilan dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.

Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Indonesia. Namun keberagaman itu harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* harus dapat menjadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.³²⁰

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kesepakatan yang juga perlu ditegaskan dalam pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkuat komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air (patriotisme) perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme), bukan untuk memecah belah bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, landasan keempat yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap NKRI.³²¹

Mencermati uraian di atas bahwa kerangka dasar dalam pembangunan karakter bangsa sangat sistematis dan memiliki landasan yang cukup. Kemudian bagaimana landasan pembangunan karakter bangsa dalam perspektif HMI. Sebagaimana wawancara penulis terhadap Akbar Tanjung, yang diwawancarai mengatakan:

³²⁰*Ibid.*, hlm. 10-11.

³²¹*Ibid.*, hlm. 32-35.

Menurut Akbar Tanjung, HMI adalah suatu organisasi mahasiswa yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa Islam, yang memiliki tujuan terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT, dan juga dalam rangka untuk menegakkan, mengembangkan ajaran agama Islam, terutama tahun didirikannya HMI tahun 1947, ditujukan pada waktu itu pada para mahasiswa. Di situlah kemudian menjadi karakter pada kader-kader HMI sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki suatu komitmen yang dilakukan kepada umat, bangsa dan negara, komitmen keislaman dan komitmen keindonesiaan. Seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam perspektif itulah organisasi HMI juga turut dalam organisasi yang sudah ada, organisasi kader yang dipersiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan kepemimpinan. Baik dalam organisasi mahasiswa Islam, baik dalam lingkungan HMI, maupun di luar HMI, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi pemerintahan, organisasi kewirausahaan, organisasi kenegaraan kita, dan HMI telah menghasilkan mereka-mereka yang memiliki kemampuan masing-masing dan menghasilkan tokoh-tokoh dengan lintas kemampuan.³²²

3. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Global

Globalisasi dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan internasionalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran dan batas-batas suatu negara yang disebabkan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk interaksi. Globalisasi juga dapat memacu pertukaran arus manusia, barang, dan informasi tanpa batas. Ditambah saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar di berbagai sektor kehidupan manusia dan berdampak pada pergeseran nilai dan perilaku kehidupan bermasyarakat

Hal itu dapat menimbulkan dampak terhadap penyebaran pengaruh budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi dan agama dalam suatu bangsa yang sulit dikendalikan. Pada gilirannya hal ini akan dapat mengancam jati diri bangsa.

³²²Wawancara dengan, Akbar Tanjung di Masjid Karangajen Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2018.

Negara maju juga semakin mengembangkan pasar modal yang membuat mereka melakukan investasi di manapun dengan leluasa tanpa harus mempertimbangkan batas-batas suatu negara. Di samping itu, perkembangan iptek juga ikut mengalirkan berbagai informasi yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat, tetapi sangat mudah untuk ditiru sehingga terjadilah perilaku yang tidak sejalan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dampak lainnya global society adalah bergesernya orientasi nilai yang diyakini seseorang dan cara pandanganya terhadap keberhasilan hidup. Orientasi nilai idealis yang mengedepankan nilai akhlak, etika, moral, budi pekerti, dan harga diri seringkali tampak tergeser menjadi materialistik, hedonis, duniawi semata. Untuk itu, diperlukan upaya dan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tidak kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

Globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Berbagai bentuk perjanjian kerja sama ekonomi telah diluncurkan, seperti kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC), perdagangan bebas ASEAN (AFTA), kesepakatan perdagangan antara negara-negara ASEAN dan China (ACFTA), dan sebagainya yang pada dasarnya menuntut adanya penyesuaian kepentingan suatu negara dengan kepentingan negara lain yang lebih luas. Perjanjian tersebut memaksa suatu negara membuka diri sebagai pangsa pasar dalam proses perdagangan. Hal ini secara tidak langsung menjadi kendala untuk beberapa negara di dalam mengembangkan sektor produksinya karena masuknya produk dari teknologi yang lebih canggih dengan harga yang sangat bersaing.

Dari kenyataan ini terlihat bahwa pada akhirnya beberapa negara akan mengalami kekalahan dalam persaingan dan kemenangan ada pada negara lain yang telah menguasai modal dan ipteks. Beberapa negara pada umumnya hanya memiliki sumber daya alam yang belum mampu diolah sendiri atau sumber daya manusianya banyak, tetapi rendah kualitasnya. Kondisi ini kelihatannya masih dialami Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, namun relatif belum mampu mengolah lebih jauh untuk peningkatan nilai jualnya.

Apabila kondisi tersebut diperhatikan dengan baik, telah terjadi aliran bahan baku ke luar negeri dengan harga murah dan masuknya produk berteknologi dengan harga mahal. Hal ini tidak perlu terjadi, apabila bangsa ini mengembangkan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang direncanakan dengan baik dan konsisten.

Di samping itu perdagangan narkoba merupakan fenomena dunia yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk ditanggulangi. Hal ini karena jaringannya telah meliputi seluruh dunia dan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Perdagangan gelap narkoba di samping menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Apapun latar belakangnya, narkoba akan mengancam masa depan suatu negara karena konsumen utamanya generasi muda. Apabila pemerintah Indonesia tidak bertindak tegas untuk memerangi perdagangan narkoba tersebut, maka dapat dipastikan bahwa masa depan negara ini akan semakin tidak menentu.

Berdasarkan indikasi tersebut, globalisasi dapat membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama

masyarakat kalangan generasi muda yang cenderung mudah terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya dan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tidak kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.³²³

b. Lingkungan Regional

Perkembangan regional dipengaruhi oleh global yang mendorong tumbuh-kembangnya kesadaran dan komitmen regional, seperti Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kesadaran dan komitmen tersebut mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di kawasan tersebut. Perkembangan regional juga dikaitkan dengan kesamaan karakteristik historis, geopolitik, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan komunikasi.

Pada lingkungan regional, pengaruh globalisasi juga membawa dampak terhadap terkikisnya budaya lokal di zona negara-negara Asia Tenggara. Dampak tersebut berwujud adanya ekspansi budaya dari negara-negara maju yang menguasai teknologi informasi. Meskipun telah dilaksanakan upaya pencegahan melalui program kerja sama kebudayaan, namun melalui teknologi informasi yang dikembangkan, pengaruh negara lain tetap saja masuk. Produk-produk budaya disebarluaskan melalui berbagai teknologi media yang membentuk perilaku baru,

³²³*Ibid.*, hlm. 11-14.

kebudayaan baru, dan kemungkinan jati diri baru. Hal ini tentunya merupakan ancaman bagi pembinaan sikap, perilaku, dan jati diri sebagai suatu bangsa.

Perkembangan regional Asia atau lebih khusus ASEAN dapat membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia.³²⁴

c. Lingkungan Nasional

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebanyak 219 juta lebih menjadi potensi yang dapat diandalkan, apabila kualitas kemampuannya dapat ditingkatkan dengan baik, sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal dasar perkembangan suatu negara. Dalam kondisi inilah sebenarnya, makin terlihat pentingnya sistem pendidikan yang baik dan konsisten bagi kemajuan suatu bangsa. Apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dibina dan dikembangkan dengan baik, hal itu akan menjadi beban anggaran negara.

Perkembangan politik di dalam negeri dalam era reformasi telah menunjukkan arah terbentuknya demokrasi yang baik. Selain itu telah direalisasikan adanya kebijakan desentralisasi kewenangan melalui kebijakan otonomi daerah. Namun, sampai saat ini, pemahaman dan implementasi konsep demokrasi dan otonomi serta pentingnya peran pemimpin nasional masih belum

³²⁴*Ibid.*, hlm. 14.

memadai. Sifat kedaerahan yang kental dapat mengganggu proses demokrasi dan bahkan mengganggu persatuan nasional.

Dorongan untuk mewujudkan supremasi hukum di negara hukum ini cukup kuat, namun masih memerlukan kerja keras untuk menjadi lebih baik. Proses penegakan hukum sampai dengan saat ini masih sangat belum berjalan seperti yang diharapkan. Masih cukup banyak kasus-kasus hukum yang terlaksana sebagaimana mestinya, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan lembaga peradilan, timbul gejala masyarakat untuk melaksanakan proses peradilan jalanan atau sering disebut dengan main hakim sendiri.

Keragaman budaya, bahasa, agama, dan etnis merupakan potensi kekayaan bangsa Indonesia, yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan luar negeri. Potensi tersebut juga didukung oleh potensi alam yang relatif indah, sehingga dapat mendatangkan devisa bagi negara melalui sektor pariwisata budaya atau alam. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Keamanan nasional merupakan bagian pokok dalam upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional, dan selalu dipertanyakan oleh para investor setiap akan mengembangkan usahanya di Indonesia. Keamanan nasional selalu menjadi pertanyaan pertama dari investor luar negeri sebelum mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Nasional yang jelas dan tegas dalam kaitannya dengan keamanan nasional, agar aparat keamanan dan sistemnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Harus diakui bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia sejak lebih dari enam puluh tahun merdeka. Pembangunan fisik dimulai dari zaman orde lama, orde baru, orde reformasi hingga pasca reformasi terasa sangat pesat, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung pembangunan yang mencapai tingkat kemajuan cukup berarti. Misalnya, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jalan raya, berbagai sumber energi, serta prasarana dan sarana pendukung lainnya. Kemajuan fisik yang terlihat kasat mata adalah banyaknya gedung bertingkat di kota-kota besar di Indonesia yang mengindikasikan kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang pembangunan. Selain itu, kemajuan penting yang dicapai dalam tata pemerintahan adalah diluncurkannya Undang-undang tentang Otonomi Daerah pada tahun 2001 yang memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun daerah dengan kekuatan dan potensi yang dimilikinya.

Kemajuan di bidang fisik harus diimbangi dengan pembangunan nonfisik, termasuk membangun karakter dan jati diri bangsa agar menjadi bangsa yang kukuh dan memiliki pendirian yang teguh. Sejak zaman sebelum merdeka hingga zaman pasca reformasi saat ini perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan karakter terus mendapat perhatian tinggi. Pada awal kemerdekaan pembangunan pendidikan menekankan pentingnya jati diri bangsa sebagai salah satu tema pokok pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Lama, *Nation and Character Building* merupakan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Baru, pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui mekanisme penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada zaman

Reformasi, sejumlah elemen kemasyarakatan menaruh perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan.³²⁵

Berbicara pada persoalan karakter bangsa sebagaimana telah diuraikan, maka isinya banyak muatan nilai-nilai dalam lingkungan sosial yang diserap sebagai dasar atau pondasi dalam membangun karakter bangsa. Dalam HMI juga memiliki akar dari karakter bangsa yang selama ini diperjuangkan, sebagai mana wawancara penulis dengan KAHMI:

Menurut Akbar Tanjung, bahwa pendidikan karakter diinspirasi dengan nilai-nilai dasar perjuangan, itulah yang menjadi karakter NDP produk resmi HMI secara konstitusional diputuskan dalam Kongres HMI di Malam tahun 1969. Itulah menjadi karakter HMI dalam berjuang sebagai organisasi perjuangan. Karakter penting betul, inti pada NDP HMI itu adalah menghasilkan manusia-manusia beriman, berilmu dan beramal, itulah menjadi karakter utama HMI, dan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keilmuan, nilai amal. Nilai-nilai yang terkait komitmen iman, ilmu dan amal itu, terkandung dalam dirinya nilai-nilai karakter yang tinggi. Organisasi HMI telah ikut memberikan kontribusi, sumbangan, pemecahan masalah pemimpin di Indonesia, yang telah HMI miliki kemampuan kepemimpinan yang diawali dengan sistem perkaderan yang diikuti mereka di HMI. Dan salah satu nilai yang sangat penting pada sistem perkaderan HMI adalah karakter. Karakter yang bersumber dari nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai kebangsaan.³²⁶

4. Permasalahan Bangsa Saat Ini

a. Disorientasi dan belum Dihayatinya Nilai-nilai Pancasila sebagai Filosofi dan Ideologi Bangsa

Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersumber dari budaya Indonesia telah menjadi ideologi dan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa hakikat hidup

³²⁵*Ibid.*, hlm. 15-16.

³²⁶Wawancara dengan, Akbar Tanjung di Masjid Karangajen Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2017.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dijiwai oleh moral dan etika yang dimanifestasikan dalam sikap perilaku dan kepribadian manusia Indonesia yang proporsional baik dalam hubungan manusia dengan yang maha pencipta, dan hubungan antara manusia dengan manusia, serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Namun dalam kehidupan masyarakat prinsip tersebut tampak belum terlaksana dengan baik. Kekerasan (domestik maupun nasional) dan hempasan globalisasi sampai kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih belum dapat diatasi.

Masalah tersebut muncul karena telah terjadi disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila yang diakui kebenarannya secara universal. Pancasila sebagai sumber karakter bangsa yang dimaksudkan adalah keseluruhan sifat yang mencakup perilaku, kebiasaan, kesukaan, kemampuan, bakat, potensi, nilai-nilai, dan pola pikir yang dimiliki oleh sekelompok manusia yang mau bersatu, merasa dirinya bersatu, memiliki kesamaan nasib, asal, keturunan, bahasa, adat dan sejarah Indonesia.³²⁷

Dengan uraian di atas, terdapat juga pandangan yang serupa dari hasil wawancara penulis terhadap Ketua Umum KAHMI DIY:

Menurut Khamim bahwa Rezim mana pun, secara teori, filsafat negara kita bagus, Cuma biasanya kadang kekuasaan yang mempertahankan status quo dan tidak stabil, kadang-kadang melakukan semacam penyimpangan. Saya kira kaderisasi di HMI termasuk salah satu fungsinya adalah untuk menetralsir dari upaya-upaya untuk membentuk karakter yang tidak sesuai dengan cita-cita NKRI. Contoh di zaman orde baru, ada pemaksaan nilai-nilai Pancasila yang penafsiran tunggal. Padahal penafsiran Pancasila tidak boleh tunggal, penafsiran Pancasila itu multi perspektif. Sekarang pun nampaknya ada penafsiran tunggal, itu yang selalu kita kritik, pembinaan karakter di HMI untuk menyadarkan bahwa ada persoalan kita

³²⁷*Ibid.*, hlm. 16-17.

lihat dengan pembinaan karakter, secara idealitas benar, tetapi secara mengatasi kepentingan politik menjadi terkontaminasi.³²⁸

b. Keterbatasan Perangkat Kebijakan Terpadu dalam Mewujudkan Nilai-nilai Esensi Pancasila

Substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sudah tertuang secara implisit maupun eksplisit dalam produk-produk hukum yang ada. Substansi hukum mengarah pada pemenuhan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, terutama dalam pemenuhan rasa keadilan di depan hukum. Namun berbagai kebijakan dan produk hukum tersebut masih belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan untuk mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akibatnya, penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai wahana dan sarana membangun karakter bangsa, meningkatkan komitmen terhadap NKRI serta menumbuhkembangkan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia belum optimal. Oleh karena itu, pewujudan nilai-nilai esensi Pancasila pada semua lapisan masyarakat Indonesia perlu didukung perangkat kebijakan terpadu.³²⁹

c. Bergesernya Nilai-nilai Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah dilaksanakan selama ini memang mengalami berbagai kemajuan. Namun, di tengah-tengah kemajuan tersebut terdapat dampak negatif, yaitu terjadinya pergeseran terhadap

³²⁸Wawancara dengan, Khamim Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2017.

³²⁹*Ibid.*, hlm. 17.

nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran sistem nilai ini sangat nampak dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, seperti penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan santun, kejujuran, rasa malu dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Perilaku korupsi masih banyak terjadi, identitas ke-"kami"-an cenderung ditonjolkan dan mengalahkan identitas ke-"kita"-an, kepentingan kelompok, dan golongan seakan masih menjadi prioritas. Ruang publik yang terbuka dimanfaatkan dan dijadikan sebagai ruang pelampiasan kemarahan dan amuk massa.

Benturan dan kekerasan masih saja terjadi di mana-mana dan memberi kesan seakan-akan bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral sosial yang berkepanjangan. Banyak penyelesaian masalah yang cenderung diakhiri dengan tindakan anarkis. Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat seringkali melewati batas-batas ketentuan, merusak lingkungan, bahkan merobek dan membakar lambang-lambang Negara yang seharusnya dijunjung dan dihormati. Hal tersebut, menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bisa jadi kesemua itu disebabkan belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif dan ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.³³⁰

d. Memudarnya Kesadaran terhadap Nilai-nilai Budaya Bangsa

³³⁰*Ibid.*, hlm. 17-18.

Pembangunan di bidang budaya telah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman nilai-nilai budaya bangsa. Namun arus budaya global yang sering dikaitkan dengan kemajuan di bidang komunikasi mencakup juga penyebaran informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronika berdampak terhadap ideologi, agama, budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.

Pengaruh arus deras budaya global yang negatif menyebabkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dirasakan semakin memudar. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya bangsa, baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri.

Berdasarkan indikasi di atas, globalisasi telah membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama masyarakat kalangan generasi muda yang cenderung mudah terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya dan strategi yang tepat agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa sehingga tidak kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.³³¹

e. Ancaman Disintegrasi Bangsa

Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah sangat terkait dengan posisi geografis Indonesia, kekayaan

³³¹*Ibid.*, hlm. 18-19.

alam yang melimpah, serta belum tuntasnya pembangunan karakter bangsa, terutama pemahaman masalah multikulturalisme yang telah berdampak munculnya gerakan separatis dan konflik horisontal. Selain itu, belum meratanya hasil pembangunan antardaerah, primordialisme yang tak terkendali, dan dampak negatif implementasi otonomi daerah cenderung mengarah kepada terjadinya berbagai permasalahan di daerah.³³²

f. Melemahnya Kemandirian Bangsa

Kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi adalah kunci untuk membangun kemandirian bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, kemandirian aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang semakin kukuh, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Namun hingga saat ini sikap ketergantungan masyarakat dan bangsa Indonesia masih cukup tinggi terhadap bangsa lain. Konsekuensinya bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kurang memiliki posisi tawar yang kuat sehingga tidak jarang menerima kehendak negara donor meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan.

³³²*Ibid.*, hlm. 19.

Kurangnya kemandirian, juga tercermin dari sikap masyarakat yang menjadikan produk asing sebagai primadona, etos kerja yang masih perlu ditingkatkan, serta produk bangsa Indonesia dalam beberapa bidang pertanian belum kompetitif di dunia internasional.³³³

5. Konsep Jati Diri dan Esensi Karakter Bangsa

Jati diri merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh kembang selama mata hati manusia bersih, sehat, dan tidak tertutup. Jati diri yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi karakter dan selanjutnya karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang dapat mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang baik, sehingga perilaku yang dihasilkan juga baik.

Karakter pribadi-pribadi akan berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa. Untuk kemajuan Negara Republik Indonesia, diperlukan karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif .

Mounier sebagaimana dikutip Doni Koesoema mengatakan bahwa karakter dapat dipandang dari dua hal, pertama, sebagai kumpulan kondisi yang diberikan begitu saja, atau telah ada begitu saja, yang lebih dipaksakan dalam diri.

³³³*Ibid.*

Karakter demikian disebut sesuatu yang telah ada sejak dulunya (*given*). Kedua, karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui di mana seseorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter yang demikian ini disebutnya sebagai suatu proses yang dikehendaki.³³⁴

C. Nilai-Nilai Karakter

HMI sampai saat ini terus berjuang dan membentuk nilai-nilai karakter para anggotanya. Sebagaimana wawancara penulis terhadap penulis buku tentang HMI, yang diwawancarai mengatakan:

Menurut Alfian Alfian, bahwa Menurut Alfian Alfian, membangun karakter bangsa, sebelum NDP HMI tahun 1969 sebelumnya ada keperibadian HMI itu karakter HMI. Tujuan HMI lima kualitas insan cita itu juga karakter bangsa. Ber HMI sampai kapan, kalau orientasinya hanya pada kepengurusan, cuma sampai di situ karakternya.³³⁵

Data ini menunjukka bahwa HMI telah memiliki nilai-nilai karakter sejak dari awal beridirinya HMI. Kemudian di sisi lain, karakter berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak itulah yang disebut karakter. Jadi suatu karakter melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Karenanya tidak ada perilaku anak yang tidak bebas dari nilai. Hanya barangkali sejauhmana kita memahami nilai-nilai yang terkandung didalam perilaku seorang anak atau sekelompok anak memungkinkan berada dalam kondisi tidak jelas. Dalam arti bahwa apa nilai dari suatu perilaku amat sulit dipahami oleh orang lain dari pada oleh dirinya sendiri.

³³⁴Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam ...*, hlm. 244-245.

³³⁵Wawancara dengan, Alfian Alfian, Balai Kota Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2017.

Thomas Lickona menguraikan bahwa pembaruan pendidikan karakter di sekolah dalam beberapa kasus, di seluruh masyarakat semestinya menyadari bahwa kita berdiri di persimpangan budaya. Apakah kita bersatu berusaha memecahkan masalah budaya kita atau akan melihat kemunduran sosial dan kemunduran moral yang sangat cepat. Ada yang memandang bahwa persoalan moral dan spiritual merupakan masalah yang berbeda. Terjadi kerusakan pada demokrasi kita dan kerusakan keluarga, dengan ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Pada pandangan yang lain melihat kerusakan dari dua karakter dewasa dan anak-anak oleh budaya seksual.³³⁶

Dalam kehidupan manusia, begitu banyak nilai yang ada di dunia ini, sejak dahulu sampai saat ini. Beberapa nilai yang dapat kita identifikasi sebagai nilai yang penting bagi kehidupan anak baik saat ini maupun dimasa yang akan datang, baik untuk dirinya maupun untuk kebaikan lingkungan hidup dimana anak hidup saat ini dan dimasa yang akan datang.

Thomas Lickona kemudian berkomentar, saya belum menjadi guru, tetapi saya perlu merasakan harapan bahwa guru bisa membantu mengubah nilai-nilai yang mengguncang masyarakat sekarang; materialisme, sikap apatis, serta pengabaian terhadap kebenaran dan keadilan.³³⁷

Dalam referensi Islam, nilai yang sangat terkenal dan melekat yang mencerminkan akhlak atau perilaku yang luar biasa tercermin pada nabi

³³⁶Thomas Lickona, *Character Matters*, Alih bahasa Juma Abdu Wamaungo & Jean Antunes Rudolf Zien, *Persoalan Karakter*, Cet. IV (Jakarta: Remaja PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 42-43.

³³⁷Thomas Lickona, *Educating For Character*, Alih bahasa Lita S, *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*, Cet. II (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 27.

Muhammad SAW, yaitu: siddik, amanah, fatonah, dan terakhir tablig. Tentu dipahami bahwa empat nilai ini merupakan esensi, bukan seluruhnya. Karena Nabi Muhammad SAW, juga terkenal dengan karakter kesabarannya, ketangguhannya, dan berbagai karakter lain.

Siddik yang berarti benar, mencerminkan bahwa Rasulullah berkomitmen pada kebenaran, selalu berkata dan berbuat benar, dan berjuang untuk menegakkan kebenaran. *Amanah* yang berarti jujur atau terpercaya, mencerminkan bahwa apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan Rasulullah dapat dipercaya oleh siapapun, baik oleh kaum muslimin maupun nonmuslim. *Fatonah* yang berarti cerdas atau pandai, arif, wawasan luas, terampil dan profesional. Artinya perilaku Rasulullah dapat dipertanggung jawabkan keahliannya dalam memecahkan masalah.

Serta *Tablig* yang bermakna komunikatif mencerminkan bahwa siapapun yang menjadi lawan bicara Rasulullah, maka orang tersebut akan mudah memahami apa yang dibicarakan atau dimaksudkan oleh Rasulullah. Banyak nilai-nilai yang dapat menjadi perilaku atau karakter dari berbagai pihak. Sebagaimana di atas berbagai nilai yang dapat kita identifikasi sebagai nilai-nilai yang ada di kehidupan saat ini.³³⁸

D. Nilai-nilai Karakter Bangsa

Nilai-nilai karakter bangsa bagi HMI telah ada sejak awal berdirinya, dan memiliki landasan yang kokoh setelahnya melalui perkaderan HMI. Sebagaimana wawancara penulis kepada Ketua KAHMI DIY, yang diwawancarai mengatakan:

³³⁸Dharma Kesuma, *Pendidikan karakter kajian teori dan praktik disekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 11-12.

Menurut Khamim, bahwa Kita bicara Indonesia yang berkemajuan, kita selalu berbicara Islam dan Indonesia, yaitu Islam yang sesuai dengan kondisi di Indonesia tetapi lebih melihat perspektif ke depan, bukan dari masa lalunya. Karakter bagi bangsa Indonesia bagi HMI merupakan perpaduan keislaman, keindonesiaan dan modernitas. Itu implementasi bagaimana dia bisa mengaplikasikan nilai-nilai kerahmatan Islam dalam berbangsa dan bernegara. Negara-negara Asia khususnya Indonesia, bisa merdeka adalah kontribusi besar dari Agama, di Indonesia adalah agama Islam. Maka harus ada relasi agama dan negara, harus selalu beriringan. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang sekuler, maka itu bertentangan dengan apa yang diperjuangkan HMI. Politik itu juga harus bermoral, nilai-nilai moralitas apa yang harus diambil, yaitu nilai-nilai keislaman yang bersifat universal, seperti kesetaraan, keadilan, dan lainnya yang bersifat universal. Universalitas Islam dalam menata kehidupan berbangsa termasuk dalam pembentukan karakter bangsa.³³⁹

Sedangkan karakter bangsa mengacu pada KEMENDIKNAS BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT KURIKULUM tahun 2010.

Bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini.³⁴⁰

1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, kehidupan individu, masyarakat, bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
2. Pancasila; negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila.

³³⁹Wawancara dengan, Khamim Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2017.

³⁴⁰Kementerian Pendidikan Nasional, *LITBANG, Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan nilai-nilai Budaya untuk Daya Saing dan Karakter Bangsa: Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: Pusat Kurikulum, 2010), hlm. 8-10.

Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara.

3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan diberbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang palinng operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Berdasarkan keempat sumber tersebut, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini.

Tabel 2 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 2010

NILAI	DESKRIPSI
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya orang yang selalu dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada ketentuan dan peraturan
5. Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan kesungguhan dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikannya dengan maksimal
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
8. Demokratis	Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
9. Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar
10. Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
11. Cinta Tanah Air	Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa
12. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya

	untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain
13. Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain
14. Cintai Damai	Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya
15. Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan dirinya
16. Peduli Lingkungan	Sikap yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam.
17. Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
18. Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan

Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010.³⁴¹

E. Prinsip Implementasi Pendidikan Nilai Karakter

Beberapa prinsip yang digunakan dalam pendidikan karakter antara lain.

1. Berkelanjutan: bermakna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan suatu proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dan suatu satuan pendidikan.
2. Melalui semua mata pelajaran

³⁴¹Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan...*, hlm. iii.

3. Pengembangan nilai budaya dan karakter bangsa melalui berbagai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam Standar Isi (SI).
4. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan
5. Materi pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.

Proses pendidikan dan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik, serta pengajaran tidak bersifat indoktrinatif.³⁴²

Dengan berbagai problem dalam ranah karakter bangsa di atas, maka HMI menawarkan suatu konsep karakter bangsa yang senafas dengan jiwa bangsa Indonesia dan umat Islam. Sebagaimana dalam wawancara penulis terhadap SEKJEN Majelis Nasional KAHMI, yang diwawancarai mengatakan:

Menurut Subandrio, bahwa sejak kelahiran HMI dua hal selalu dibawah yaitu masalah keislaman dan masalah keindonesiaan. Dua sisi itu mirip mata uang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Kalau ada kader HMI yang memisahkan pembahasan keislaman dan keindonesiaan, maka itu keliru. Karena kelahiran HMI memang dilatar belakangi dengan dua hal itu. Karena pada waktu itu sedang masa-masanya mempertahankan kemerdekaan, dan pada waktu itu disadari ekspresi keislaman dari mahasiswa-mahasiswa Islam saat itu tidak kelihatan. Maka dengan adanya HMI kegiatan-kegiatannya tentu saja diwarnai keislaman dan keindonesiaan. Karakter bangsa, kembali pada kelahiran Indonesia. Indonesia dilahirkan merupakan kumpulan banyak budaya di Indonesia, suku dan bahasa banyak, itu tentu akan susah untuk tidak tercerai-berai kalau tidak ada suatu hal yang mengikat. Oleh karena itu Pancasila itu sebagai salah satu ikatan yang dijadikan sebagai basis supaya bangsa Indonesia tetap menghargai budaya dari masing-masing etnis yang ada yang diharapkan terjadi sinergitas satu sama lain dan menjadi budaya bangsa Indonesia dan itu salah satu fondasi karakter bangsa.³⁴³

³⁴²*Ibid.*, hlm. 11-14.

³⁴³Wawancara dengan, Subandrio di Karangrajan Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2017.

Kemudian kelanjutan wawancara penulis terhadap Subandrio, mengenai perkaderan HMI dan kesiapannya, yang diwawancarai mengatakan:

Menurut Subandrio: Perkaderan HMI harus ada inprovmen-inprovmen, dunia perkembangannya luar biasa, perubahan dunia tidak seperti deret hitung dan deret ukur, tetapi perkembangannya eskpodensial, dan tentu harus diimbangi oleh sistem perkaderan untuk mengantisipasi perkembangan yang demikian massif dan cepat. Kita menyadari itu, olehnya itu memang beberapa tokoh HMI dan KAHMI berpikir bagaimana agar sistem perkaderannya itu diipmrov sehingga mampu mengantisipasi perubahan zaman yang demikian cepat. Seharusnya berbeda sistem perkaderan HMI saat ini, jangan masih memakai seperti pula yang dulu, karena masalah-masalah yang dihadapi berbeda. Kalau tetap tidak ada perubahan pasti ketinggalan dan kita akan ditinggalkan orang. Justru karena kita menyadari bahwa perkembangan dunia tidak hanya Indonesia, tetapi juga dunia yang luar biasa cepatnya, maka sistem perkaderan HMI harus juga mampu mengantisipasi perkembangan yang massif dan cepat. Sebab kalau tidak pasti akan ditinggalkan oleh mahasiswa.³⁴⁴

F. Kendala-kendala HMI Cabang Yogyakarta dalam Implementasi Pembangunan Karakter Bangsa

Oleh karena itu, untuk menguatkan dan memberikan nilai optimal bagi pengkaderan HMI yang mengarah pada pembentukan karakter terutama pada sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan *kritisisme*, serta orientasi kepada kemandirian dan profesionalisme, maka ada tiga hal yang harus diberi perhatian serius:

1. Rekrutmen calon kader. Dalam hal ini, HMI harus menentukan prioritas rekrutmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan

³⁴⁴Wawancara dengan, Subandrio di Karangkajen Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2017.

dan pengembangan diri secara berkelanjutan, memiliki orientasi kepada prestasi yang tinggi dan potensi *leadership*, serta memiliki komitmen untuk aktif dalam memajukan organisasi.³⁴⁵

2. Proses perkaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. *Ketiga*, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif untuk perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong semangat belajar dan bekerja keras, menciptakan ruang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap kritis yang melahirkan pandangan *futuristik* serta menciptakan media untuk merangsang kepedulian terhadap lingkungan sosial.³⁴⁶

Pendidikan karakter bagi HMI yaitu memasyarakatkan budaya prestasi (*Achievement Culture*). Budaya yang didasarkan pada dorongan individu dalam sekolah dalam suasana yang mendorong diri pada usaha keras untuk adanya independensi keilmuan adalah keberhasilan dan prestasi kerja. Budaya ini sudah seharusnya berlaku di dunia pendidikan tentang independensi dalam belajar, penelitian dan pengabdian. Sehingga lebih menekankan terciptanya manusia yang profesional, mandiri dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya.³⁴⁷

³⁴⁵PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXIX...*, hlm. 71.

³⁴⁶*Ibid.*

³⁴⁷PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 275.

Dalam jalannya suatu proses pada organisasi maupun lembaga pendidikan pasti terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat. Dimana dapat dilihat dalam beberapa faktor, terdapat beberapa faktor dari internal maupun eksternal yang ikut menentukan kesuksesan suatu proses tersebut. Muhaimin menjelaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu berkompetensi di dunia global, dan sekaligus akan berdampak pula pada rendahnya produktivitas dan pendapatan para warga negaranya.³⁴⁸ Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kualitas SDM sangat mempengaruhi jalannya proses pendidikan dan juga akan dapat berakibat pada produktivitas suatu lembaga.

Sama halnya dengan dunia pendidikan dalam organisasi pun juga terdapat komponen internal yang turut menjadi pendukung dan penghambat jalannya suatu proses diorganisasi. Jika dalam pendidikan proses tersebut dikenal dengan pembelajaran maka dalam organisasi-organisasi termasuk HMI, pembelajaran tersebut dikenal dengan istilah perkaderan. Faktor-faktor internal tersebut juga tidak lepas dari ketiga komponen yang telah dijelaskan diatas yaitu hardware, Software, dan brainware.

Selain faktor internal juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari eksternal organisasi atau lembaga pendidikan yakni para *stakeholder* organisasi. *Stakeholder* merupakan unsur penting yang harus

³⁴⁸Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2011), hlm. 20.

diketahui sejak awal oleh manajer sebuah organisasi. Mutu serta pelayanan suatu pendidikan akan mempengaruhi *stakeholder* dari sebuah organisasi.³⁴⁹

Faktor pendukung dari keberhasilan organisasi ialah partisipasi dan keterlibatan dari orang-orang atau para *stakeholder*, serta ide-ide atau konsep-konsep yang dimasukkan dari luar yang dapat digunakan oleh organisasi.³⁵⁰ Namun *stakeholder* juga menjadi penghambat suatu organisasi atau lembaga jika partisipasi serta dukungan dari para *stakeholder* sangat kurang, yang berakibat organisasi sulit untuk mengembangkan mutu suatu pendidikan.

Sama seperti faktor internal, suatu proses perkaderan di HMI juga terdapat beberapa faktor penghambat jalannya proses perkaderan dari eksternal HMI. Faktor yang berasal dari eksternal meliputi para senior dan juga alumni HMI, organisasi lainnya yang berada di wilayah perguruan tinggi, serta masyarakat dan juga instansi-instansi yang telah ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan HMI.

Pola perkaderan HMI ini disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi dan arah perkaderan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta tantangan dan kesempatan yang berkembang dilingkungan eksternal HMI.³⁵¹

Perkaderan HMI diorientasikan kepada proses kader dalam pembentukan karakter bangsa. Perkaderan adalah kunci pertama dalam pembentukan karakter bangsa dan peserta atau kader-kader baru paling penting bagi HMI sebagai

³⁴⁹Ibid, hlm. 137.

³⁵⁰J.Winarji, *Motivasi &Pemotivasian dalam Manajemen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

³⁵¹PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 308.

organisasi perkadera. Maka ada hal yang harus diberi perhatian serius. *Pertama*, rekrutmen calon kader. Dalam hal ini, HMI harus menentukan prioritas rekrutmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan diri secara berkelanjutan, memiliki orientasi kepada prestasi yang tinggi dan potensi *leadership*, serta memiliki komitmen untuk aktif dalam memajukan organisasi.

3. Proses perkaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. *Ketiga*, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif untuk perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong semangat belajar dan bekerja keras, menciptakan ruang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap kritis yang melahirkan pandangan *futuristik* serta menciptakan media untuk merangsang kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Poin kedua dan ketiga di atas telah dilaksanakan HMI Cabang Yogyakarta dengan sebaik-baiknya sebagaimana penulis paparkan di pembahasan di atas pada implementasi pembentukan karakter bangsa HMI Cabang Yogyakarta. Namun poin pertama di atas sebagai pintu pertama melakukan pembentukan adalah perekrutan calon-calon anggota HMI yang dituntut seleksai dan memprioritaskan yang berpotensi untuk melakukan akselerasi perubahan lebih baik dan transformatif.

Namun kendala perekrutan kader HMI Cabang Yogyakarta selama ini dan sampai tahun 2018 ini setiap komisariat memiliki kendala tersendiri dan terutama setiap komisariat yang berada pada kampus tertentu, memiliki tantangan dan kendala yang cukup rumit. Maka hemat penulis bahwa keberlangsungan kaderisasi HMI Cabang Yogyakarta sampai saat ini yang tergolong sudah baik itu di atas perjuangan yang rumit dan kerja keras yang terus berkobar.

Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Bagian keempat, paragraf 1, pasal 84, ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:

- a. Dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- b. Dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan
- c. Dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.³⁵²

Kenyataan di beberapa universitas di Yogyakarta masih terjadi belenggu yang kuat untuk memenjarakan pemikiran mahasiswa dengan pemaksaan pada

³⁵²Citra Umbara, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas...”, hlm. 328.

keinginan dan ideologi kampus. Tidak ada ruang bebas untuk mengkaji berbagai disiplin ilmu, padahal kampus apalagi universitas merupakan lembaga pendidikan yang bersifat umum di Indonesia. Semua mahasiswa dari berbagai golongan mazhab diterima, tetapi ketika sudah masuk dalam kampus, terjadi pemaksaan pemahaman. Sangat bertentangan dengan konsep karakter bangsa yang salah satu syaratnya memberi ruang eksplorasi pada mahasiswa untuk menumbuhkan skill dan menimba pengalaman dari berbagai hal yang produktif.

Karakter bangsa bagi HMI yaitu membangun manusia Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur moral kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa yang dioperasionalkan melalui sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang unggul.³⁵³ Kenyataan sampai saat ini kampus masih seperti ruang pengajian, di dalamnya penuh suguhan doktrin untuk taat pada mazhab atau golongan tertentu. Sementara upaya pencerdasan tidak terbuka, dan keunggulan mahasiswa diberbagai bakat dan potensinya kurang diperhatikan.

Dalam Anggaran Dasar HMI pasal 7 ditegaskan bahwa HMI merupakan organisasi mahasiswa,³⁵⁴ dilanjut pasal 8 yaitu berfungsi sebagai organisasi kader,³⁵⁵ dan pasal 9 HMI memiliki peran sebagai organisasi perjuangan.³⁵⁶ Demikian itu menegaskan bahwa HMI merupakan organisasi berbasis kampus, kampus sebagai mitra, kampus sebagai wadah eksistensi, dan

³⁵³PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII...*, hlm. 193.

³⁵⁴PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXIX...*, hlm. 71.

³⁵⁵*Ibid.*

³⁵⁶*Ibid.*

kampus ladang merekrut kader-kader terbaik untuk diolah dan lebih dimantapkan di HMI sebagai persiapan kader umat dan kader bangsa.

Fakta di beberapa kampus saat ini, HMI hampir tidak memiliki hubungan apalagi keharmonisan dengan kampus. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ketua Umum HMI Komisariat Avicena Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tentang, bagaimana hubungan antara pihak kampus dan pengurus HMI Komisariat Avicena dalam membentuk kualitas Mahasiswa di kampus di UMY ?. Ketua Umum Komisariat Avicena UMY yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Sukriadi Nuhri, Di kampus kami tidak memperlihatkan bahwa kami kader HMI, karena adanya kendala dan ketakutan mahasiswa, jadi kalau berpartisipasi di kampus itu atas nama sendiri. Apabila kita ingin mengetahui informasi-informasi di kampus mereka tidak harus mengetahui latar belakang kita dari HMI. Apabila dia mengetahui latar belakang kita, maka informasi sulit kita ketahui. Tidak ada hubungan kami dengan pihak kampus dengan mengatasnamakan HMI. Menempel tulisan, meminjam fasilitas tidak boleh di kampus.”³⁵⁷

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Umum HMI Komisariat Tunas Bangsa UMY tentang, hubungan antara pihak kampus dan pengurus HMI Komisariat Tunas Bangsa dalam membentuk kualitas Mahasiswa di kampus di UMY. Ketua Umum Komisariat Tunas Bangsa UMY yang diwawancarai mengatakan:

“Menurut Restu Pamuji, Di UMY, organisasi eksternal ruang geraknya di kampus sangat dibatasi. Open rekrutmen HMI pun tidak diperbolehkan, sehingga untuk membentuk kualitas kita benar-benar terpisah dengan kampus. Kampus tidak memfasilitasi dan tidak mendukung, otomatis kita berjalan sendiri untuk membangun kualitas itu.”³⁵⁸

³⁵⁷Wawancara dengan, Sukriadi Nuhri di Wirobrajan Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

³⁵⁸Wawancara dengan, Restu Pamuji di Kasihan Bantul Yogyakarta, tanggal 12 Januari 2018.

Ungkapan ini menunjukkan bahwa kampus UMY telah terjadi dinding pemisah terhadap kegiatan mahasiswa terutama pada organisasi ekstra kampus termasuk HMI yang selama ini telah terbukti mampu mencetak generasi-generasi unggul. Sistem pendidikan di HMI sangat sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, serta keislaman dan keindonesiaan menjadi landasan pembangunan karakter bangsa sejak awal berdirinya.

Taufiq Hidayat mengatakan bahwa HMI merupakan organisasi yang konsisten memilih lahan garap dunia kemahasiswaan, HMI bukan saja dituntut untuk memperhatikan dunia kampus, tetapi setiap pemikiran, sikap dan perilakunya juga tetap bersubstansikan paradigma kemahasiswaan. Meskipun secara formal organisatoris HMI tidak hadir secara langsung di lingkungan kampus, tetapi atas semangat pengabdianya HMI mencoba untuk membantu dunia kampus dalam melahirkan kader-kader bangsa yang berkualitas.³⁵⁹

Dengan demikian dipahami bahwa HMI merupakan organisasi mahasiswa yang menjadikan kampus sebagai mitra dan lahan untuk mencari dan melahirkan generasi-generasi bangsa berkualitas. Tetapi HMI saat ini mengalami diskriminasi di sebagian besar kampus, baik swasta maupun negeri. Memang sejarah pelumpuhan gerakan mahasiswa dalam mencetak dan mempersiapkan kader bangsa telah dimulai sejak tahun 1978.

Sejak tahun ini diberangus kegiatan mahasiswa dengan lahirnya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Josoef melalui Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), mulai

³⁵⁹ Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 326.

diterapkan secara resmi melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Nomor 01/V/1978 tanggal 19 April 1978. Tujuannya yaitu sebagai bagian integral sebagai upaya depolitisasi kampus, serta meredam aktivis politik mahasiswa secara umum.³⁶⁰

Sejak peraturan 1978, sangat terasa kondisi kampus banyak berseberangan dengan aktivis mahasiswa dan organisasi mahasiswa eksta kampus, sampai tahun 2018 ini masih terpelihara ketidakharmonisan itu dan menyebabkan mahasiswa banyak buta terhadap kepedulian sosial, karena yang disuguhkan adalah sikap individual, membayar SPP dan SKS tepat waktu dan lulus cepat, bekerja dan berkeluarga. Seruan kampus untuk memperhatikan kondisi kebangsaan yang terjadi saat ini dan segera turun langsung mengatasi dari mahasiswa dan birokrasi kampus dan merupakan tanggungjawab, adalah barang langka yang tidak akan ditemukan.

Kampus sudah merasa senang dan puas atas pemasukan ekonomi yang terus melimpah dari semester ke semester yang disetor mahasiswanya tanpa ampunan, terlalu asyik di menara gading, di singgah sana berdiri dan menonton apa yang sedang terjadi di sekeliling, sehingga pihak kampus tidak terjun langsung mengatasi ketimpangan, kezaliman dan ketidakadilan.

Penulis dalam wawancara dengan Ketua Umum HMI Komisariat Tunas Bangsa UMY tentang, aktivitas pengurus HMI Komisariat Tunas Bangsa dalam membentuk kualitas dan karakter Mahasiswa di kampus di UMY. Ketua Umum Komisariat Tunas Bangsa UMY yang diwawancarai mengatakan:

³⁶⁰Dody Rudianto, *Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional*, (Cet. I; Jakarta: PT Golden Terayon Press, 2010), hlm. 17.

“Menurut Restu Pamuji, karena UMY merupakan turunan Muhammadiyah, memiliki aliran, sedangkan HMI menerima semuanya. Sehingga organisasi eksternal dibatasi ruang geraknya, hanya IMM yang diberi ruang gerak. Meski HMI berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun generasi, tetapi ada aturan yang baru bahwa organisasi yang boleh di kampus UMY yaitu internal seperti IMM, BEM, UKM, untuk eksternal seperti HMI tidak diperbolehkan.”³⁶¹

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Komisariat Avicena dalam wawancara mengatakan:

“Menurut Sukriadi Nuhri, HMI dianggap ilegal di kampus, karena di dalam UUD Muhammadiyah yang baru itu sendiri disebutkan bahwa selain dari IMM, dan organisasi intra kampus dilarang memakai fasilitas kampus. Adanya diskriminasi di kampus, itu salah satu penghambat kita untuk merekrut teman-teman yang mau berorganisasi di kampus. Kendala selanjutnya keresahan teman-teman seperti ketika dosen atau tata usaha mengetahui latar belakang kita HMI, kita dipersulit. Jadi kadang kita menutup-nutupi latar belakang kita sebagai kader HMI, karena ketakutan itu akan adanya kesulitan dalam perkuliahan kita.

Pernyataan ini menegaskan kurangnya sinergi kampus dengan berbagai elemen yang berjuang untuk memperbaiki umat dan bangsa menjadi penyebab belum terbentuknya karakter bangsa sampai saat ini. Kampus belum menjalankan prinsip kebhinnekaan, toleran, dan kebebasan akademik. Padahal dalam UU RI nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, berdasarkan pertimbangan pada huruf c ditegaskan;

“Bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.”³⁶²

³⁶¹Wawancara dengan, Restu Pamuji di Kasihan Bantul Yogyakarta, tanggal 12 Januari 2018.

³⁶²Citra Umbara, “*Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*”. (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

Undang-undang ini menegaskan supaya pendidikan tinggi menciptakan toleransi, demokratis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, profesional yang berbudaya dan kreatif. Toleransi dan demokratis merupakan kunci dalam memberikan kesempatan yang sama dan sebebasnya pada mahasiswa untuk berproses, menempa diri, di manapun dia kehendaki sesuai keinginan, bakat dan kesenangannya demi terciptanya karakter bangsa.

Kerisauan terhadap belum terbentuknya karakter bangsa yang diinginkan sejak 1945 sampai tahun 2010 menyebabkan Menteri Pendidikan Indonesia, Muhammad Nuh mengagendakan arus utama pembangunan nasional yang berorientasi pada karakter bangsa.

Itu sebabnya pada tanggal 14 Januari 2010 sedang dibahas dan disusun bersama-sama Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa dengan berbagai kementerian, lembaga nonkementerian dan lembaga nonpemerintah yang terkait, seperti Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Yayasan Jati Diri Bangsa. Dalam penyusunan Kebijakan Nasional ini juga menggali masukan dari para pakar, praktisi, tokoh masyarakat, pemuka agama, budayawan, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan karakter bangsa.³⁶³

Pendidikan karakter di lembaga formal dan non-formal di masa Sekolah Dasar (SD) sampai SMA, masih lebih bersifat doktrin. Sedangkan ditingkatan mahasiswa mestinya bukan lagi doktrin dan pemaksaan suatu pandangan tertentu yang dicekoki pada mahasiswa. Di perguruan tinggi yang harus diutamakan

³⁶³Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional...*, hlm. i.

adalah membuka cakrawala wawasannya, kesadaran pada mahasiswa atas tanggungjawabnya sebagai generasi-generasi masa depan harapan bangsa dan negara dengan memotivasi untuk mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya untuk dibentuk selama masih menjadi mahasiswa demi menghadapi tuntutan global yang lebih kompleks.

Pendidikan di perkaderan HMI sejak tingkat satu atau Basic Training, diverifikasi ulang pemahaman itu supaya tidak sekedar doktrin dan ritual-ritual, namun menjalankan aktivitas dengan penuh kesadaran. Ketika melakukan aktivitas atau pekerjaan dipahami makna terdalam dari pekerjaan itu, kesadaran sangat ditekankan, jiwa kritis, idealisme, dan tanggungjawab pengabdian kemudian hari telah terletak dipundak pemuda terutama di HMI sudah disampaikan tugasnya sebagai kader umat dan kader bangsa.

Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Bagian keempat, paragraf 1, pasal 84, ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan:

- (a) Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta

d. Toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.

(b) Menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.³⁶⁴

Generasi kita sekarang sudah masuk era Asean Community, dan kita juga masuk dalam teritorial Global Society. Maka persaingan semakin luas dan bebas tanpa sekat. Sesama warga Asean bisa keluar masuk negara-negara anggota Asean secara bebas. Para orang berkualitas, profesional memasuki arena baru untuk merambah karier dan aktivitas yang lebih luas dan menjanjikan. Pertanyaannya adalah bagaimana generasi bangsa Indonesia saat ini?. Sudah mampukah bersaing dalam skala luas ini?. Apa kontribusi kita pada peradaban dunia atau dalam global society ?

Generasi muda kita harus dipersiapkan maksimal memiliki karakter, yaitu karakter yang tidak hanya pada kesalehan individu, namun merambah pada kesiapan dan diri berkontribusi dalam skala luas. Bung Karno pernah menyatakan

“Kalau aku melihat orang-orang tua di depanku ini, yang terbayang padaku hanya kuburan-kuburan yang menantikan isinya. Tapi kalau aku melihat wajah pemuda-pemudi itu, aku lantas kembali menjadi muda, menjadi kuat, karena di wajah pemuda-pemudi itu terbentang harapan Indonesia.”³⁶⁵

³⁶⁴Citra Umbara, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas...”, hlm. 328-329.

³⁶⁵Anand Krishna, *Youth Challenges*....., hlm. 113.

Anak muda yang bagaimana?, yaitu yang berkualitas, yang bisa memilih jalan dan tindakan yang tepat dan bisa menghindari tindakan yang tidak baik bagi dirinya dan orang lain. Melestarikan alam, flora dan fauna, membawa masyarakat mencapai kejayaan dan kemerdekaan dan menjaga keberlangsungan planet dunia ini menjadi lebih baik untuk generasi akan datang.

Setiap generasi muda Indonesia harus memiliki jiwa menatap hari esok lebih baik, QS. al-Hasyr; 59: [18]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³⁶⁶

Cita-cita pendidikan menurut Syafei yaitu anak-anak kita itu perlu belajar bekerja, sehingga mereka pandai mempergunakan tangannya di samping memakai otaknya. Hendaknya pada anak-anak itu diajarkan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan pembawaan dan kemauannya bagi penghidupannya kelak. Mewujudkan cita-cita itu Syafei mendirikan perguruan yang dinamakan INS (Indonesische Nederlandsche School) pada tahun 1926.³⁶⁷

Gagasan Syafei ini sebagai antithesis atas realitas pendidikan kolonial di masa itu yang mempersiapkan murid untuk menjadi buruh pada kantor-kantor

³⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 549.

³⁶⁷I. Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*. (Cet. VI; Bandung: CV Ilmu, 1976), hlm. 187-188.

pemerintah atau perusahaan-perusahaan milik orang asing. Nampaknya konteks pendidikan di masa kolonial belum bergeser sampai pada tahun 2017 ini yang sudah 91 tahun lamanya. Pendidikan hari ini tidak untuk menjawab problem dan kebutuhan masyarakat, namun lebih pada permainan bisnis yang terlembaga dan berlomba memasang iklan. Siapa lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang lebih hebat pencitraan dan iklannya maka akan banyak muridnya.

(c) Tiga langkah pembentukan karakter

- a. Terapi Kognitif, seperti memperbaiki cara berfikir dengan cara (mengosongkan benak dari berbagai bentuk pemikiran yang salah, menyimpang, tidak berdasar, baik dari segi agama maupun akal yang lurus), pengisian (mengisi kembali benak dengan nilai-nilai baru dari sumber keagamaan, yang membentuk kesadaran baru, logika baru, arah baru, dan lensa baru dalam cara memandang berbagai masalah). Kontrol (mengontrol pikiran-pikiran baru yang melintas dalam benak sebelum berkembang menjadi gagasan yang utuh), dan doa (pencerahan ilahi dalam berpikir).
- b. Terapi mental, dengan cara pengarahan (arah perasaan yang jelas), penguatan (menguatkan perasaan dalam jiwa, adanya keyakinan, kemauan, dan tekad sebelum melakukan suatu tindakan). Kontrol (memunculkan kekuatan tertentu yang berfungsi mengendalikan semua warna perasaan), dan doa (mengharapkan adanya dorongan Ilahi yang membantu semua proses pengarahan, penguatan, dan pengendalian mental).

- c. Perbaiki fisik, dengan cara memadukan tiga unsur (gizi makanan, olahraga, dan istirahat) dengan baik.³⁶⁸

Bahkan lebih parah saat ini, di mana lembaga pendidikan dari bawah sampai perguruan tinggi berlomba memproduksi peserta didik dan sarjana dengan sebanyak-banyaknya, secara instan tanpa didukung kualitas dan kesiapan lapangan kerja.

Secara umum proses pembelajaran ditunjukkan untuk pencapaian suatu kompetensi tertentu yang sering cenderung mengabaikan pembentukan karakter dan sering dianggap alamiah atau sudah melekat sejak manusia lahir. Karakter bukan hanya karena sifat bawaan tetapi bisa dibentuk melalui kebiasaan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah bisa memperburuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan sekarang ini masih melahirkan generasi yang ahli dalam pengetahuan sains dan teknologi, demikian bukan suatu prestasi karena pendidikan seharusnya memproduksi generasi berkeperibadian unggul sekaligus menguasai ilmu.³⁶⁹

Sebaliknya juga kalau hanya menekankan pada pengetahuan agama dan moral tanpa skill atau keunggulan ilmu pengetahuan umum, juga belum disebut manusia unggul atau berkarakter.

Sistem seleksi masuk Perguruan Tinggi berskala nasional, ukurannya telah melalui proses psikometris yang matang, hanya saja ranah yang diukur untuk menyeleksi hanya pada ranah kognitif. Ranah afektif (sikap terhadap belajar dan

³⁶⁸Daryanto dan Suryatri Darmiatun, *Implementasi Pendidikan Karakter...*, hlm. 7-8.

³⁶⁹Daryanto dan Suryatri Darmiatun, *Implementasi Pendidikan Karakter...*, hlm. 4.

ilmu pengetahuan, motivasi belajar di Perguruan Tinggi, kepemimpinan, hubungan interpersonal) dan ranah psikomotorik (keterampilan menggunakan anggota tubuh untuk menyelesaikan tugas) masih diabaikan. Dampaknya lulusan Perguruan Tinggi hanya memiliki kompetensi kognitif. Hasil survei menunjukkan bahwa belum ada keseimbangan antara mata pelajaran keahlian dan pembentukan karakter peserta didik sebagai calon manusia bekerja.³⁷⁰

Mata pelajaran lain perlu diberikan seperti kepemimpinan visioner, budaya kerja, administrasi publik dan bisnis. Karakter lulusan yang terlalu *low profile* dan kurang asertif harus diminimalkan, lulusan cenderung kurang aktif dalam memunculkan gagasan baru, inisiatif kurang terasah. Pembentukan pribadi yang berkarakter dapat ditempuh dengan pengembangan kegiatan. Salah satu kegiatan yang ditempuh adalah pembekalan *Success Skill* pada peserta didik. *Succes Skill* yaitu keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk terus mengembangkan dirinya. *Succes Skill* mencakup tiga pilar yaitu, *learning skill* (keterampilan belajar), *thinking skill* (keterampilan berpikir), *living skill* (keterampilan hidup).³⁷¹

G. Otokritik Sistem Pendidikan dalam Implementasi Pembangunan Karakter Bangsa

Barat memandang karakter lebih pada moral, sebab di sana intelektual, skill, kreativitas, pendidikan telah maju. Di dunia Islam seperti di Indonesia, karakter pada awalnya dipandang sebagai moral, pada saat ini moral itu runtuh akibat kurang skill, kurang pendidikan, kurang kreativitas. Oleh karena itu,

³⁷⁰*Ibid.*, hlm. 4-5.

³⁷¹*Ibid.*, hlm. 5.

karakter bangsa Indonesia tidak relevan lagi kalau hanya bicara moral, karena moral memiliki relasi sangat erat dengan skill, kreativitas, kecakapan.

Karakter bangsa saat ini harus terintegrasi moral, skill, kreativitas, pendidikan, intelektual. Sebaik apapun moral yang dimiliki dan sekuat apapun kelompok agamis atau kelompok tertentu mempertahankan moralitas, mempertahankan keyakinan yang sudah final sebagai benteng diri dan masyarakatnya menghadapi arus global, akan tergilas sendiri dan akan runtuh pertahanan itu dengan derasnya gempuran pengaruh budaya dan hegemoni asing. Maka tidak pas lagi dunia pendidikan mengajarkan siswa dan mahasiswanya untuk bertahan, dan penuh kesabaran atas apa yang terjadi kemudian hari.

Saat ini anak didik harus diajarkan perlawanan, kompetitif, kemenangan, dan menyerang kebudayaan asing dengan cara yang baik dan ilmiah, yaitu memperkuat diri dengan kreativitas, inovatif, orientasi pada produk yang relevan pada kebutuhan masyarakat. Penguatan insan cipta yang dibangun untuk menandingi produk-produk asing yang telah membuat masyarakat Indonesia terpasung dengan ketergantungan sejak ia lahir sampai mati.

Banyak video-video dianggap lucu di media, seperti di whatsapp, line, facebook, dll, yang menjadi viral dan terjadi proses peniruan yang bersifat dangkal. Kenapa dangkal karena rata-rata yang lucu-lucu itu tidak memberi kesan berarti dan mereka mengakui hanya biasa-biasa saja. Tetapi bisa berhari-hari ditiru oleh masyarakat bahkan lebih parah yang banyak memfirkankan itu dari siswa

dan mahasiswa. Aku kok merasa janggal, kenapa kalau ideo-video yang berbasis keilmuan, bernuansa pendidikan, atau perenungan tidak menjadi viral?.

Apaka memang mental dan otak kita bangsa Indonesia sampai 2018 ini masih belum matang. Sebagaimana sering ada candaan bahwa “otak yang paling mahal di dunia ini adalah otaknya orang Indonesia, karena masih asli, masih original, belum terpakai, masih tersegel”. Buktinya banyak arah perjalanan negerinya dari pemikiran asing, bahkan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang begitu banyak terbentang dari Sabang sampai Maraoke, lebih banyak dipikirkan dan dikelolah oleh asing. Sedangkan Sumber Daya Manusianya masih belum bisa membangun bangsa dan negaranya dengan cepat dan berkualitas. Segala sektor masih bobrok, ambruk dan krisis.

Segala sektor di Indonesia ini mengalami kemunduran, termasuk kemunduran dan ketertinggalan Indonesia di ranah pendidikan. Tradisi membaca, tradisi belajar orang Indonesia masih sangat rendah. Kesadaran substansi ilmu pengetahuan belum meresap, masih cenderung formalitas, citraan. Lebih prioritas mengejer ijazah, IPK tinggi daripada menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi paling lucunya adalah, kalau murid ke sekolah tidak ada guru, atau sedang libur, mereka sangat senang dan gembira.

Di tingkat mahasiswa juga demikian parah, banyak di facebook atau media lainnya curhat bahwa kesal pergi ke kampus tidak ada dosennya, jadi pulang ke kos atau ke kediaman tinggalnya. Nah, apa sih yang dimaksud kuliah? Apa bedanya kuliah dengan belajar? Menurut saya sama saja, istilahnya saja yang

lebih elit (kuliah). Kalau kuliah sama dengan belajar, apakah belajar itu hanya pada dosen, apakah belajar hanya pada guru?. Pemahaman seperti ini sangat keliru tertanam dalam diri pelajar dan mahasiswa. Belajar itu sangat banyak sumbernya, bisa melalui membaca buku, diskusi, kerja kelompok, dan lainnya.

Penyempitan ruang belajar menjadikan siswa dan mahasiswa sempit cara berfikirnya dan cenderung hanya imitasi pemikiran dan imitasi pemahaman dari guru ke murid. Tidak terbiasa melakukan dialog, bantahan, diskusi, sanggahan, kritikan pada guru dan dosen. Hal demikian ini sangat bergantung pada guru dan dosen. Pertanyaanya adalah, apakah guru dan dosen di Indonesia sudah memenuhi semua standar kelayakan dan kapabilitas mumpuni dalam mengajar dan mendidik?. Apakah disiplin ilmu yang mereka miliki sanggup menyalurkan ke semua peserta didiknya, untuk menumbuhkan bakat, potensi dan kreativitasnya.

Bukankah di negeri ini masih sangat banyak guru dan dosen yang tidak suka belajar, tidak bergairah menambah ilmunya dengan tuntutan kontemporer. Tradisi belajar guru dan dosen masih rendah. Tradisi kreativitas juga masih rendah, bagaimana kalau yang dijumpai adalah guru dan dosen yang tidak bersinergi dan tidak mampu merespon secara cepat kondisi masa kini dan tidak sigap menangkap masa depan?. Tidakkah berbahaya kalau hanya mengandalkan ilmu dari guru dan dosen saja?.

Seperti halnya Perguruan Tinggi, Institut, Universitas, Sekolah Tinggi dan lainnya hanyalah istilah elit dalam menggambarkan sekolah lanjutan yang lebih tinggi pasca sekolah atas seperti SMA, SMK, MA, dll, intinya adalah sekolah.

Pertanyaannya adalah apakah itu sekolah?. Persepsi yang keliru selama ini masih mayoritas menganutnya bahwa sekolah dan kuliah itu adalah proses pendidikan atau proses ilmu yang berlangsung dengan dua pihak yaitu antara guru dan murid atau dosen dan siswa. Maka ketika guru dan dosen tidak ada dianggap tidak sekolah, dianggap tidak belajar, dan banyak memang tidak belajar sehingga memilih keluyuran, jalan-jalan, romantisme, atau pulang ke tempat kediaman.

Padahal sekolah itu bukan gedung, bukan bangunan, tapi sekolah itu adalah proses belajar bersama. Jadi sekolah adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar bersama, baik ada guru atau tidak ada guru harus tetap berlangsung kegiatan belajar. Itu sebabnya semua sekolah, atau semua perguruan tinggi memiliki perpustakaan, atau tempat belajar lainnya, karena itu bagian dari proses pendidikan di sekolah. Guru dan dosen tidak bisa mengajar tanpa murid atau mahasiswa, tetapi murid dan mahasiswa bisa belajar tanpa guru dan dosen.

Paling bermasalah selama ini sekolah dan perguruan tinggi dibangun super mewah dan menjadi adu gengsi bangunan mana tercantik mana tidak, mana besar mana tidak. Bangun megah dijadikan ukuran kemajuan pendidikan, ukuran kualitas lembaga pendidikan, ukuran strata sosial tinggi atau rendah, dan sebagai promosi dalam menarik pelajar melakukan investasi bisnis yang dijemakan dalam SPP, Uang Pembangunan, Uang SKS, Uang Ujian, Uang Kegiatan, dan uang-uang lainnya.

Semua urusan uang dalam dunia pendidikan, tetapi bukan pengetahuannya yang dibangun, bukan kapasitas siswa dan mahasiswa dibangun, bukan kreativitas

dan inovasi yang diciptakan. Di sinilah keterjebakan kita memahami dan memperlakukan lembaga pendidikan. Tampilan luar yang dihias namun kematangan dari dalam tidak dihias.

Dalam polarisasi aktivitas dan karakter mahasiswa terbagi tiga kelompok:

1. Kelompok mahasiswa puritan yaitu mahasiswa yang kehadirannya di kampus hanya fokus pada suatu tujuan yaitu belajar, mengikuti perkuliahan, menimba ilmu pada jurusan yang telah dipilih, dan segera menyelesaikan studi dengan menjadi sarjana.
2. Kelompok mahasiswa intelektual yang di samping melaksanakan tugas belajar sesuai bidang studi yang telah dipilih, masih meluangkan waktu untuk memperkaya pengetahuan lain di luar bidang studinya dan menuangkan gagasan-gagasan, pemikiran untuk perbaikan kehidupan masyarakat, umumnya mengikuti grup diskusi, mengurus pers kampus, atau aktif menulis di koran umum.
3. Mahasiswa aktivis, yang di samping aktif mengikuti perkuliahan, juga melakukan studi di luar mata kuliah, mempelajari segala hal mengenai seluk beluk kehidupan kemasyarakatan untuk memperluas pengetahuan umumnya seperti mengenal kehidupan sosial politik dan kenegaraan, juga aktif melakukan gerakan aksi (tindakan nyata) untuk mengubah keadaan masyarakat dan negara, umumnya aktif di organisasi kemahasiswaan baik di intra kampus maupun di ekstra kampus. Melancarkan aksi gerakan massa yang berhadapan langsung dengan

pemerintah atau lembaga-lembaga kenegaraan lain, dan banyak bersentuhan dengan aktivitas sosial di masyarakat.³⁷²

Dari ketiga polarisasi mahasiswa di atas, sangat nampak situasi saat ini dalam dunia kampus bahwa poin pertama yang mendominasi yaitu mahasiswa puritan, bahkan sedang menjadi ciri khas dan karakter mayoritas mahasiswa saat ini. Bahkan birokrasi kampus dan dosen selalu mengkampanyekan bahwa ingat tujuan orang tua kalian memasukkan di kalian di kampus untuk belajar, jadi kuliah yang rajin dan segera selesai. Pertanyaannya adalah apakah manusia atau mahasiswa hanya bertugas belajar?.

Apakah belajar hanya duduk manis dalam ruangan yang sempit dipenjara dengan tembok dan adem karena dibumbui pendingin ruangan. Apakah ilmu hanya untuk kepentingan diri dan ditransfer menjadi selebar ijazah kemudian dilacurkan kiri-kanan masuk keluar perusahaan atau tempat kerja, dan diobral dengan sangat murah tanpa kemanusiaan, tidak sebanding tenaga yang keluar dibanding upah yang didapat. Juga bukan sebagai pemilik perusahaan atau bukan pemilik alat pekerjaan, tetapi sebagai cukong atau pmbantu perusahaan untuk memperkaya pihak konglomerat dan pemilik perusahaan yang setiap hari merampas hak-hak rakyat, baik dari segi lahan, lingkungan tercemar, dan ancaman kelangsungan hidup manusia, tumbuhan dan hewan.

Dalam hemat penulis, tiga polarisasi di atas, telah bertambah lagi tiga polarisasi mahasiswa saat ini yaitu:

³⁷²Dody Rudianto, *Gerakan Mahasiswa.....*, hlm. 16-17.

- a. Mahasiswa sambil kerja mencari uang untuk pemabayaran SPP, SKS, kebutuhan sehari-hari dan pungutan liar lainnya di kampus, aktivitas mahasiswa tetap berjalan dan belajar sesuai disiplin ilmu yang telah dipilih kemudian sambil kerja disesuaikan waktu kosong dari mata kuliah.
- b. Mahasiswa sambil senang-senang, hiburan, pacaran, nonton, traveling, belanja-belanja dan lainnya.
- c. Mahasiwa sambil main gadget, media sosial, main game dan lainnya.

Bahkan banyak mahasiswa gara-gara game, online, dan semacamnya membuat terbengkalai aktivitas kampusnya, tidak masuk kuliah dan datang atau tidak datang ke kampus semaunya, yang penting bayar SPP dan persyaaratan lain, maka masih dianggap normal bagi kampus dan semester tetap naik tingkat. Bahkan pihak kampus tidak risau dengan keadaan itu, sementara kalau ada mahasiswa tidak masuk kuliah karena melakukan aktivitas sosial, meluruskan kebijakan kampus yang tidak transparan dan menentang birokrasi kampus yang memberi kebijakan yang tidak pro mahasiwa, maka ditindak, dicekal, dirusak nilainya bahkan ada yang diancam Drop Out (DO). Sungguh aneh memang dalam dunia kampus saat ini.

Kurangnya aktivitas atau gerakan sosial yang disuguhkan pada mahasiswa, menyebabkan mahasiswa terjatuh pada lembah game, gadget, hiburan. Tugas atau pekerjaan rumah yang kurang menambah bobot mahasiswa sekedar formalitas dan banyak yang kopi paste, serta ujian yang bebas membuka buku dan internet adalah

sikap pura-pura dalam ujian, intinya adalah ujian, dan yang bagi kampus menerapkan sistem pembayaran SKS sebagai syarat ujian, maka kegiatan ini sebagai panen uang pada mahasiswanya.

Sebagaimana wawancara penulis dengan MOT LK1 HMI Komisariat ADAB UIN Sunan Kalijaga, yang diwawancarai mengatakan:

Menurut Binti Maisaroh bahwa, kegiatan teman-temannya di lingkungan kos yang tidak berorganisasi ternyata habis juga waktunya malah ditempat yang keliru, jalan-jalan, belanja-belanja, hedonis, konsumerisme, pacaran, nonton, main gadget dan lainnya. Sehingga bagi saya, aktivitas organisasi seperti saya dan kader HMI lainnya di organisasi HMI justru waktu dimanfaatkan mengurus organisasi serta menambah wawasan diri dan pengalaman organisasi.³⁷³

Dengan data ini menunjukkan bahwa justru kuliah sambil aktif di organisasi mahasiswa atau kepemudaan, kita minim sikap individual karena sibuk bersosial, dinamika kehidupan dimengerti, serta problematikan keumatan dan kebangsaan terpampang di hadapan kita ditambah pengkajian menjadikan mahasiswa peka terhadap kondisi yang melilit masyarakat. Sebelum sarjana, mahasiswa yang aktif di organisasi dan gerakan sudah mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga sambil kuliah dan aktivitas organisasi juga ada persiapan memupuk skill untuk bersaing setelah sarjana atau minimal menyiapkan beberapa perencanaan sebagai alternatif ketika jalan yang dipilih mengalami kebuntuan.

³⁷³Wawancara dengan, Binti Maisorah di LK1 Kom. Adab, Wonosari Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2017.

Modal pengetahuan seperti ini, ketika sudah sarjana dia menerima resiko atas keharusan yang dihadapi, meningkatkan kepercayaan diri dan optimis serta bisa eksis di manapun aktivitas ia pilih. Jaringan dan modal bergaul dan bersosial telah dimiliki dan telah terlatih selama berorganisasi. Sementara mahasiswa yang pengetahuan dan perhatiannya hanya pada kuliah, dan berambisi hanya mengejar angka-angka IPK dan modal gelar sarjana, serta dibuai mimpi oleh berbagai dosen yang menceritakan manisnya dunia luar, akan mengalami stres dan kekagetan yang besar ketika sudah sarjana dan mendapati banyak jalan buntu serta kurang siapnya menerima kenyataan ketimpangan sosial di hadapannya.

Di sinilah pentingnya memperharhatikan kondisi kebangsaan atau minimal kondisi masyarakat sekitar, dan itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab pada semua mahasiswa yang berkesempatan mengenyam dunia pendidikan tinggi. Maka tidak memperhatikan bangsa dan negara, serta tidak mempersiapkan diri atau generasi muda untuk memperbaiki umat, bangsa dan negara merupakan dosa-dosa sosial yang terus dipikul.

H. Otokritik Perkaderan HMI Cabang Yogyakarta dalam Implementasi Pembangunan Karakter Bangsa

HMI di kampus UIN Sunan Kalijaga, termasuk maju di semua komisariatnya yang terdiri dari delapan komisariat, tetapi minim lahan ruang di eksekutif kampus karena dikuasai oleh PMII. Sementara, HMI komisariat yang berada di kampus swasta termasuk melemah secara kualitas, dan kuantitas.

penataan organisasi dan SDM, tetapi mayoritas menguasai Lembaga Eksekutif Mahasiswa, seperti BEM, LEM, DEMA, HMJ, dan lainnya.

Salah satu kendala perekrutan kader baru di UIN karena tidak dikuasainya eksekutif mahasiswa. Termasuk di UMY, HMI mengalami perlawanan, karena tuan rumah belum terbuka untuk menumbuhkan kualitas Mahasiswa dengan memberi kebebasan dan ruang yang luas untuk berproses seluas-luasnya. Di Kampus UIN, STAIN, maupun IAIN, tidak semua mahasiswa atau hanya sebagian mahasiswa dari kelompok NU, karena seleksi masuk Perguruan Tinggi tidak ada yang mengkhususkan golongannya harus sesuai ideologi kampus.

Sebaliknya di UMY, atau Kampus berbasis Muhammadiyah, tidak semua juga mahasiswa atau hanya sebagian mahasiswa yang dari golongan Muhammadiyah, selebihnya dari golongan NU atau lainnya masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah, karena ilmu tidak terbatas pada golongan mazhab tertentu atau golongan ideologi tertentu. Maka harus terbuka pihak kampus memberi ruang atau wadah dan kebebasan pada mahasiswanya untuk membentuk karakter dan watak mereka masing-masing sesuai keinginannya.

Harus HMI Cabang Yogyakarta harus keluar dari kepentingan dan ego politik jika itu terjadi, dan memperhatikan kualitas dan pertumbuhan komisariat yang berbasis di kampus swasta terutama di kampus umum. Karena saat ini lahannya sudah kembali setelah dibak habis oleh CGMNI di era 1960-an. Seperti UAD, Mercubuana (UMB), Janabadra. Mercubuana sangat diberi kelonggaran untuk HMI memimpin, tetapi.

HMI di Yogyakarta tidak bisa mengandalkan senior atau alumni HMI semata, karena kebanyakan tidak berdomisili di Yogyakarta atau kembali pada daerahnya sebagai pendatang. Maka bimbingan senior atau alumni yang diharapkan terutama pada kampus swasta, bisa diambil alih oleh pengurus HMI di atas komisariat seperti KORKOM, terutama pengurus HMI tingkat Cabang. Harus selalu hadir.

Basis-basis HMI di perguruan tinggi umum dilumpuhkan oleh CGMI dengan cara mengeliminasi pengaruh HMI pada lembaga-lembaga kemahasiswaan, dengan keadaan seperti itu harapan HMI lebih banyak bertumpu pada perguruan tinggi agama atau IAIN, tetapi di sinipun HMI justru mendapat saingan dari PMII.³⁷⁴

Demikian inilah yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, HMI mengalami perlawanan yang cukup rumit baik dalam perekrutan perkaderan HMI, begitupun di lembaga-lembaga intra kampus. Bahkan ada HMI Komisariat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pertarungan Ketua DEMA atau HMJ karena sudah merasa dikalah dan selalu dicurangi, sehingga ikut pun cuma buang waktu dan tenaga. Sebagaimana wawancara penulis pada Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia mengatakan:

“Menurut Mulkhan Andreza, di fakultas Tarbiyah seperti pemilu, kami kader dari HMI Tarbiyah, melihat adanya kejanggalan dalam pemilihan Ketua DEMA, Ketua HMJ. Kader HMI Tarbiyah bersikap tidak mengikuti, bersikap tidak ambil andil di pemilu itu, karena hanya dikuasai satu kelompok. Tidak ada komunikasi dan dialog bagaimana mengembangkan Fakultas. Kita sering membangun komunikasi dengan saling mengundang seperti undangan menghadiri

³⁷⁴Fauzan Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*. (Cet. III; Jakarta Pusat: PB PMII, 2015), hlm. 67.

LK1 HMI, respon lumayan bagus itu dari HMI MPO, dan IMM Tarbiyah dan biasanya datang, yang tidak pernah datang dan tidak pernah mengundang adalah PMII, tertutup, sehingga lingkungan sosial di fakultas cukup susah menerima informasi apa kegiatan Fakultas.³⁷⁵

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, dia mengatakan, “hampir tidak ada hubungan, kecuali dosen-dosen yang kebetulan latar belakangnya HMI mereka memiliki kepedulian yang lebih dari lainnya. Secara kelembagaan tidak ada mitra dengan kampus.”³⁷⁶ Sedangkan Ketua Umum HMI Komisariat Syariah UIN Sunan Kalijaga, dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Nadhruna’im Abdilah, Secara umum hubungan HMI dan kampus kurang baik. Secara khusus kita punya alumni-alumni dari HMI, cukup baik. Kita diarahkan menyeimbangkan bagaimana kita bisa berpengaruh di kampus dengan adanya HMI. Ketika diketahun kita kader HMI, secara umum kita kurang diperhatikan. Internalisasi nilai-nilai di kampus, kurang baik. PSKH (Pusat Studi Konsultasi Hukum), HMI terlibat sampai sekarang, tetapi belakangan ini kader HMI didiskualifikasi dalam pemilihan direktur. Upaya kerjasama dengan kampus, diarahkan kader masuk di UKM fakultas di kampus, seperti KPK (Komisi Pemerhati Konstitusi), kader sekitar 50%. UKM yang lain, OLAHRAGA, AL-MIZAN (Dakwah Kampus, atau Studi Agama), MENWA, sedikit kader HMI terlibat. Kemudian DEMA dan BEM kader HMI Komisariat Syariah kurang mendapat tempat.”³⁷⁷

Dengan demikian, HMI Cabang Yogyakarta sudah waktunya melirik kampus swasta terutama kampus umum, untuk melebarkan kekuatannya kembali sebagai organisasi yang independen. HMI di manapun berada sangat mudah diterima karena modal independennya. Selanjutnya niat tulus yang diperlukan untuk memperbaiki umat dan bangsa melalui dunia perkaderan. Konsen HMI

³⁷⁵Wawancara dengan, Mulkhan Andreza di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

³⁷⁶Wawancara dengan, Jeki Sahrawi di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2018.

³⁷⁷Wawancara dengan, Nadhruna’im Abdilah di Kebun Laras Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018.

terutama tingkat komisariat dan Cabang seharusnya menitikberatkan aktivitasnya pada perkaderan.

Produk berkualitas harus tumbuh dan bersinergi semua disiplin ilmu. Tetapi perkembangan HMI kunci utamanya adalah perkaderan, berarti selalu membutuhkan mahasiswa untuk diajak masuk HMI dalam berjuang bersama. Artinya, kampus merupakan lahan garap yang menjadi mitra HMI, maka harus ada pengaruh di dalam kampus, seperti menjadi ketua-ketua di Lembaga Intra Kampus. Kalau pun belum bisa meraih kekuatan di kampus, untuk terus berkembang lebih produktif, banyak cara lain meraut massa seperti menampilkan semua skill dan kualitas kader HMI, maka mahasiswa yang predikat cerdas dan logic, tentu akan melirik sesuatu yang dianggapnya lebih baik.

Kemudian, jurusan-jurusan yang sangat strategis di era informasi dan kemajuan teknologi ini sangat penting menjadikan kampus umum sebagai basis tumbuhnya kekuatan ekonomi, teknologi, pertanian, pemerintahan, dan lainnya, dan pembentukan kader yang latar belakang umum pendidikannya, disempurnahkan dengan nilai-nilai keislaman. Maka kader di kampus umum bisa berkembang pesat dengan persiapan yang dimiliki dan memperlakukan teknologi, ekonomi dan lainnya dengan sejalan nilai-nilai keislaman. Sedangkan di kampus yang latar belakang Islam, semakin kaya atas gagasan perpaduan antara agama dan sains, keduanya bisa saling menganyam.

Saat ini sudah disadari sendiri kemajuan manusia secara global yang telah melanda Indonesia juga bahwa, tidak cukup pendidikan hanya pada ranah diskusi,

kajian, pemikiran, tetapi sudah tiba waktunya dipadukan dengan kekuatan ekonomi dan teknologi. Sebagaimana dikatakan Lafran Pane;

Pada zaman sekarang, yang membuat suatu perubahan sosial yang diutamakan adalah penguasaan teknologi. Karena itulah HMI saat ini lebih memfokuskan gerakannya untuk bisa menguasai teknologi sekaligus mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan teknologi. Islam tidak akan bisa dijalankan dengan sempurna kalau dirinya masih terjajah pendidikannya, spiritual maupun materialnya. Untuk membebaskan keterjajahan itu dibutuhkan profesionalisme dari para anggota dan alumni HMI dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷⁸

Hampir semua komisariat dalam lingkup cabang Yogyakarta menggalakkan penguasaan teknologi dan menjadikan teknologi sebagai gerakan sosial. Era informasi ini menuntut kader HMI bergerak pada ranah itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa HMI kurang bergerak lagi di lapangan seperti demonstran sebagaimana dilakukan para pendahulu HMI, ungkapan itu sudah keliru, karena zaman telah berubah. Kader HMI Cabang Yogyakarta saat ini memiliki corak pada penulisan-penulisan di media, literasi, pengembangan wacana, sebagai wadah dalam gerakan sosial.

Pertanyaannya adalah, apakah tradisi menulis. Literasi dan memproduksi wacana bisa menjadi alat perubahan sosial ?. Bisa, bahkan itu relevan, karena menulis dibutuhkan pembaca, pembaca akan dipengaruhi cara berpikirnya dan perubahan sosial ditentukan oleh cara berpikir.

³⁷⁸Lafran Pane, *4 Tulisan...*, hlm. 113-114.

Hanya saja, bangsa Indonesia belum peka terhadap tradisi membaca dengan bacaan yang bermutu, begitupun dengan menulis dengan bermutu, karena masih banyak menganggap itu sesuatu yang berat. Tetapi disisi lain, kalau bacaan yang ringan bahkan hoax, itu sudah menjangkiti generasi pembelajar saat ini bahkan pada masyarakat umum dan yang masyarakat awam yang giat dengan teknologi tetapi tidak memiliki wawasan luas dan kritis.

Apalagi sejak munculnya group-group di media mulai dari Facebook, Google, Twitter, Line, Whatsaap, Instagram, dan lainnya, semua media ini banyak bacaan dan justru yang menjadi gejala dan banyak masalah. Di dalamnya bukan hanya bacaan dan tulisan hoax dan kurang bermutu yang mudah dikonsumsi dan diproduksi secara massif, tetapi media ini dijadikan tempat eksistensi di dunia publik yang bersifat konsumtif dan traveling, jalan-jalan, santai, hura-hura, dan lainnya.

Permainan game juga sangat mengancam generasi bangsa saat ini, mulai sejak belum masuk sekolah PAUD sampai mahasiswa (yang notabene generasi muda tongkat estafet perubahan bangsa dan negara). Banyak yang terlena dengan permainan game, anak-anak, remaja maupun yang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mahasiswa maupun mahasiswi. Kecanduan internet merupakan suatu penyakit yang sudah mewabah, semua ini karena tidak terbentuknya paradigma yang baik dan kepekaan terhadap perubahan umat dan bangsa lebih baik. Karakter bangsa belum terbentuk pada generasi muda saat ini.

Sampai tahun 2018 ini, Indonesia dirundung sangat banyak masalah di seluruh sektor. Utang negara makin membengkak, eksploitasi alam oleh orang asing makin bertambah, ketidak-adilan makin banyak, kemiskinan, busung lapar, impor, penggusuran pada rakyat kecil makin menjadi-jadi untuk mendirikan bangunan atau usaha-usaha pemilik modal, baik dalam negeri maupun dari asing. Pendidikan makin jauh dari tujuannya, pihak kampus tidak bersentuhan langsung terhadap persoalan keindonesiaan. Budaya bangsa makin terkikis, pemimpin negeri makin pragmatis, tidak berpihak pada rakyat, dan partai yang oportunis.

Sementara dalam teori pendidikan “membebaskan” yang digalakkan Paulo Freire sebagaimana dalam uraian Hujair AH. Sanaky bahwa pendidikan membebaskan akan melahirkan individu dan kelompok yang kritis, demikian itu untuk melakukan perubahan sosial, kultural, politik, dan ekonomi. Pendidikan bertujuan mengembangkan manusia sedemikian rupa supaya semua pengetahuan yang diperoleh sebagai proses untuk memahami tatanan kehidupan secara kritis, analisis, kreatif, sehingga pelajar dan pengajar setara. Pengajar membantu yang belajar untuk menghadapi kemapanan sosial (*status quo*) dengan prinsip bahwa ketidakadilan sosial itu diciptakan, karena itu bisa diubah. Maka pembelajar tumbuh dengan keberpihakan pada kelompok *dhuafa*’ dan terdzalimi.³⁷⁹

Di sisi lain, generasi muda harapan bangsa untuk merubah Indonesia lebih baik, sekarang dan kemudian hari justru saat ini mayoritas generasi muda,

³⁷⁹Hujair AH. Sanaky, *Pembaruan Pendidikan Islam: Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 144.

terutama mahasiswa yang sukanya jalan-jalan, santai-santai, main game, dan lainnya. Sangat nampak tidak memikirkan kondisi umat dan bangsa saat ini bahkan banyak yang hancur sekolah dan kuliahnya gara-gara game. Game saat ini semakin hari semakin bertambah dan selalu diburu oleh pelajar bahkan mahasiswa. Persoalan seperti ini telah banyak di hadapan mata kita, lalu apakah generasi seperti demikian diharap untuk memperbaiki umat dan bangsa kemudian hari ?. Nampaknya sangat sulit atau bahkan menjadi beban negara. Sebab sejak dini tidak terbangun suatu konsep dan pemikiran yang baik, dan tidak melihat kondisi masyarakat yang merasakan penderitaan serta mengupayakan solusinya.

Lembaga pendidikan terutama kampus, kurang memberi perhatian atas penyembuhan atau menanggulangan penyakit yang melanda generasi muda dan mahasiswa yang kecanduan internet yang mengarah pada pemborosan waktu dan kerusakan. Di HMI, tentu kader-kadernya tidak semuanya sadar dan ada juga yang masuk pada kategori kecanduan internet dan menghabiskan waktunya pada hal yang kurang produktif. Tetapi ketika aktif di HMI, itu terus mendapatkan keseimbangan, sebab banyak proses kaderisasi di dalamnya yang membuat waktunya banyak memikirkan hal-hal yang lebih berguna pada dirinya, masyarakat dan negara. Seperti HMI Cabang Yogyakarta

Persoalan media dan teknologi sudah membawa banyak masalah di Indonesia di beberapa tahun belakang ini terutama memuncak sejak 2016 sampai 2017. Seperti berita hoax, ujaran kebencian, fitnah dan lainnya, yang sangat mudah diproduksi dan sangat digemari generasi Indonesia, dan itu secara otomatis mempengaruhi pikiran dan tindakan. Tindakan itu dipengaruhi oleh pikiran,

sebagaimana dikatan Jalaluddin Rachmat, bahwa “perubahan sosial yang bergerak melalui rekayasa sosial harus dimulai dengan perubahan cara berpikir. Mustahil ada perubahan ke arah yang benar kalau kesalahan berpikir masih menjebak benak kita.”³⁸⁰

Persoalan sosial dengan segala bentuknya yang disebabkan melalui media maya telah diupayakan beberapa tahun lalu dengan menerbitkan beberapa aturan atau Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).³⁸¹

UU ITE pasal 28 ayat (2) merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya. Maka penggunaan pasal 28 ayat (2) ITE semakin bertambah tahun semakin meningkat, ini karena elemennya lebih luas, dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menysar penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibanding UU lainnya. Beberapa kasus yang menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE umumnya terfokus kepada penyebaran kebencian agama, dan

³⁸⁰Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi?*, (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.

³⁸¹UU RI “Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, dikutip dari <https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf>, diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 jam 17.40 WIB.

belum pernah digunakan terkait kasus-kasus penyebar kebencian berbasis ras dan etnis, kasus tersebut di antaranya yaitu:

Pertama, kasus Sandy Hartono yang diadili Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2011. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2011 Nomor : 347/Pid.B/2011/PN.PTK ia terbukti membuat akun facebook palsu dan memasukkan gambar-gambar maupun kalimat yang berisikan penghinaan terhadap agama Islam. Ia di pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).³⁸²

Kedua, kasus Alexander Aan yang diadili di Pengadilan Muaro Sumatera barat tahun 2012, berdasarkan putusan No 45 /PID.B/2012/PN.MR. Ia di hukum dua tahun penjara dan 3 bulan serta denda 100 juta karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)” berdasarkan putusan pengadilan ia terbukti telah Terdakwa telah membuat di Akun Facebook Terdakwa (Group

³⁸²ICJR, “Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkat”, dikutip dari <http://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebar-kebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 jam 19.25 WIB.

Ateis Minang) yang bernama Alex Aan, email indesgate@yahoo.co.id berupa tulisan yang menghina agama.³⁸³

Ketiga kasus, Kasus Muhamad Rokhisun yang diadili di pengadilan negeri Pati tahun 2013, berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. Ia dipidana penjara selama: 5 (lima) dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Ia terbukti “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” dengan cara membuat status atau kata-kata yang menyerang serta menista agama.³⁸⁴

Keempat, kasus I Wayan Hery Christian, ia divonis penjara tujuh bulan karena terbukti bersalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palu. Putusan menyatakan bahwa ia terbukti melakukan tindakan penistaan agama melalui sarana informasi teknologi sesuai pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Ia membuat status yang melecehkan di media sosial karena merasa terganggu suara takbir menyambut Idul Adha. Ternyata status I Wayan Hery tersebut tersebar luas di masyarakat dan akhirnya dilaporkan warga ke polisi. Ia dan pihak keluarga juga telah meminta maaf kepada masyarakat luas atas perbuatannya.³⁸⁵

Itu sebabnya ketika persoalan sosial melalui dunia maya semakin memuncak di tahun 2016, maka diterbitkan lagi UU ITE yang baru, UU RI No. 19

³⁸³*Ibid.*

³⁸⁴*Ibid.*

³⁸⁵*Ibid.*

tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁸⁶ Di penghujung tahun 2016, pasal ini digunakan dalam kasus dugaan penyebar kebencian berbasis agama dalam kasus Buni Yani, dan yang terbaru pasal-pasal dalam UU ITE ini juga digunakan menyerang penulis buku Jokowi Undercover yang diduga melakukan penyebar kebencian, dan masih banyak kasus serupa lainnya.

Melihat fenomena ini, para penegak hukum diharap harus lebih cermat lagi dalam menangani kasus yang berkaitan dengan ITE, supaya lebih tepat dan adil terhadap publik dan di sisi lain juga tetap menghidupkan kebebasan publik dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Cara lain dalam menanggulangi persoalan itu, harus juga dinetralisir dengan bacaan-bacaan yang bermutu, dan bacaan bermutu itu harus terus dibaca oleh generasi muda yang menginginkan perubahan yang lebih baik, kritis dan memiliki gairah meneliti setiap informasi yang sampai padanya. Dalam ajaran Islam pun telah diuraikan anjuran sikap kritis terhadap setiap informasi yang sampai pada diri kita. Sebagaimana dalam al-Qur'an Qs. al-Hujurat; 49: [6]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ ۖ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu

³⁸⁶UU RI, “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dikutip dari, <https://www.slideshare.net/internetsehat/uu-19-tahun-2016-revisi-uu-ite>, diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 jam 20.15 WIB.

tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”³⁸⁷

Anjuran dalam al-Qur'an ini merupakan dorongan penelitian, tradisi akademik yang kuat, tradisi membaca yang besar, gairah intelektual muslim harus kuat, sebagai komitmen dalam perbaikan dan perubahan sosial yang lebih baik. Era informasi ini telah menuntut kita untuk menjewantahkan kandungan nilai isi al-Qur'an tersebut. Tetapi sehebat apapun dalam berkontribusi pada teknologi, kalau belum menguasai, memiliki dan bahkan belum memproduksi sendiri, maka kebenaran yang disampaikan di media bisa saja dicekal atau tidak dimuat sebab bertentangan keinginan dan orientasi dari yang menguasai atau pemilik media. Maka orang Islam wajib hukumnya bergerak pada penciptaan teknologi sendiri, dan wajib hukumnya menguasai teknologi di berbagai cabangnya, karena perubahan sosial saat ini sangat ditentukan oleh informasi.

Sangat mengherankan bagi penulis bahwa di dalam lingkup cabang seperti HMI Cabang Yogyakarta, memiliki 21 Komisariat, tetapi hanya komisariat di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saja termasuk maju dan tetap eksis, padahal ruang gerak dan perlawanan dari berbagai sektor begitu kuat. Masih banyak juga kampus umum yang belum disentuh oleh HMI, atau HMI Yogyakarta belum memiliki komisariat di dalamnya, sehingga potensi mahasiswa Islam untuk mengasah kemampuan dan skillnya melalui HMI belum memiliki wadah. Seperti Kampus Alma-Ata, mahasiswanya kadang ikut di UMY supaya bisa ber-HMI.

³⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 517.

Sementara HMI di tingkat komisariat di Swasta, terutama yang umum, seperti terbengkalai dan kehabisan tenaga. Seperti Komisariat di Kampus Janabadra, Insan Cita kampus Taman Siswa, Hemengkubuwono IX kampus Widyamataaram, Komisariat Psikologi dan Mercubuana di kampus Mercubuana, termasuk kewalahan dalam segala sektor, baik kader, pengurus, SDM, maupun alumni.

Islam tidak identik dengan kampus Islam, karena kampus umum pun masih banyak mayoritas Islam. Maka pengajaran di Latihan Kader HMI, baik LK1, LK2, LK3, dan ruang perkaderan lainnya harus mensinergikan kurikulum dan materi wajibnya yang mewadahi kebutuhan semua mahasiswa Islam baik yang menempuh pendidikan di Kampus basis agama, begitupun di kampus umum.

Dari wawancara penulis terhadap Ketua Umum HMI Komisariat Mercubuana, dia mengatakan:

“Menurut Elfrian Fajar Ismail, selama ini cenderung HMI disalah pahami kader bahwa hanya latar belakang pendidikan Islam saja yang tepat di HMI, maka terjadi pesimis dan berproses tidak maksimal. Bisa jadi dari pola pendidikan HMI yang menyebabkan stigma seperti itu. Keluhan mereka di komisariat swasta harus didengar dan diperhatikan kualitas dan pengelolaan organisasinya, baik dari pengurus maupun pada kadernya. Mahasiswa supaya tidak terlihat hanya bisa bepolitik praktis, karena banyak juga yang di ranah keilmuan, profesi, skill, dan lainnya.³⁸⁸

Oleh karena itu BEM, DEMA atau semacamnya langkah penting dalam memberi pengaruh baik pada kampus dan mahasiswa. Penguasaan simpul kekuatan itu menjadikan HMI mudah menyalurkan tujuannya. Kemudian paling penting juga adalah kualitas dan kreativitas yang matang harus di miliki mahasiswa

³⁸⁸Wawancara dengan Elfrian Fajar Ismail di Yogyakarta, tanggal 13 Januari 2018.

supaya tidak terlihat hanya bisa bepolitik praktis, karena banyak juga yang di ranah keilmuan, profesi, skill, dan lainnya.

HMI Cabang Yogyakarta termasuk kaku dalam melakukan aktivitas perkaderan terutama LK1 sebagai pintu awal menghimpun dan membentuk kader. HMI Cabang Yogyakarta tekstual terhadap pedoman perkaderan, meskipun hampir semua komisariat ada tema yang ditentukan dalam melakukan LK1, yang dianggap sesuai dengan kebutuhan kader, tetapi pelaksanaannya sama saja secara keseluruhan, materinya tetap sesuai di pedoman perkaderan serta lima materi wajib. HMI Cabang Yogyakarta sangat taat mengikuti aturan dalam pedoman perkaderan, di sisi lain penulis mendapat badai kritik dari BPL Cabang maupun pengurus HMI Komisariat sejajaran bahwa Pedoman Perkaderan yang disusun oleh PB HMI sudah ketinggalan zaman, banyak hal yang kurang direspon dan tidak tersentuh padahal itu sudah kebutuhan masa kini.

Demikian komentar di lapangan, sudah mengetahui kendala dan kekurangan terhadap pedoman perkaderan yang dicetuskan di pusat, namun belum ada keberanian merancang sendiri pola perkaderan yang khas Cabang Yogyakarta (otonomi), supaya perkaderan HMI sesuai kebutuhan mahasiswa dan tantangan masa kini. Tiga hari tiga malam minimal perkaderan, dan ada yang sampai lima hari atau enam hari, tetap saja hanya 5 materi wajib, atau kalau ada tambahan hanya 1, atau 2, dan itu kadang tidak sesuai dengan tema yang diusung.

Menurut saya bahwa HMI Cabang Yogyakarta penting merumuskan otonomi perkaderan khas kebutuhan kader dan khas kebutuhan zaman. Bisa saja

diperbanyak materi dengan memecah 5 materi wajib, dikembangkan namun tetap sistematis dan terarah pada setiap materi wajib. Hal ini penting sebagai kesempatan pada kader-kader HMI yang sudah memenuhi kualifikasi untuk mendapat ruang memandu atau mengisi materi. Terutama pada ruang mengisi materi, bisa menambah gairah kader untuk terus melakukan kaderisasi lanjutan seperti LK2, SC, LK3, Sekolah NDP, atau pelatihan lainnya karena sejak masih semester pertengahan atau masih muda, sudah mendapat kesempatan untuk mentransformasi ilmu di ruang perkaderan.

Dalam wawancara Sekertaris Umum Badan Pengelolah Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta, periode 2016-2017, dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Muslim Pohan, selain 5 materi wajib HMI yang diisi semua kader HMI yang sudah SC, ada tambahan materi suplemen berbeda-beda setiap Komisariat sesuai kebutuhannya, seperti simulasi sidang, pelatihan orasi, jurnalistik, analisis sosial dan lainnya itu bebas dan bisa diisi oleh pemateri yang masih LK1”.³⁸⁹

Artinya sedangkan LK1 bisa mengisi, apalagi LK2, atau yang sudah SC, tetapi hemat penulis bahwa meskipun ada tambahan materi suplemen masih kurang dalam ruang penumbuhan para kader-kader HMI untuk terus berproses lebih intens dan lebih tinggi. Lain juga komentar dari Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta periode 2015-2016, dalam wawancara dia mengatakan:

“Menurut Syaifuddin Aziz Al-Azizy, bahwa seharusnya BPL Cabang melakukan Follow-Up, Up-Grading, diskusi, dan lainnya karena itu juga aturan perkaderan khusus pasca LK2, cara seperti itu produktif dan memancing daya baca, daya kritis, daya intelektual kader HMI, sekaligus sebagai wadah untuk berkembang.”³⁹⁰

³⁸⁹Wawancara dengan, Muslim Pohan di Gedung Pusat Kebudayaan Lafran Pane Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2018.

³⁹⁰Wawancara dengan, Syaifuddin Aziz Al-Azizy, di Gedung Pusat Kebudayaan Lafran Pane Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2018.

Hemat penulis bahwa itu memang sudah sejatinya yang dilakukan kader Pasca LK2 HMI, dan itu sudah dilakukan meski tidak selalu berkumpul dalam suatu forum tertentu, namun ketika pun ada follow-up bersama sebagai ruang diskusi, juga selalu butuh ruang untuk mentransfer ke tempat lain khususnya di materi LK1 HMI.

Seringkali kader yang tidak mendapat kesempatan menjadi pemateri di LK1 karena terbatasnya materi dan pemateri sudah termasuk paten karena itu terus dipercayakan mengisi, sehingga di follow-up baru dipakai. Masalah yang kemudian muncul ketika penyampaian tidak bagus atau tidak sekualitas penyampaian pemateri di LK1, hal ini memicu kader kurang semangat datang kajian atau bahkan tidak mau datang, karena merasa kurang mendapat ilmu baru. Bukannya pendalaman justru yang mengisi lebih muda dan terkesan juga masih baru mulai belajar mengisi materi.

Mestinya di follow-up itu rata-rata dosen atau KAHMI yang dipakai sebagai pemateri, kader bisa lebih semangat dan bisa mendapat informasi banyak tentang HMI masa lalu dan membandingkan masa kini untuk mempersiapkan perbaikan masa depan.

Pengurus HMI komisariat juga harus semua paham tentang sistem perkaderan yang bukan hanya pada LK1 HMI. Tetapi banyak pengurus komisariat, aturan dan pola perkaderan LK1 saja tidak dipahami karena semuanya diserahkan pada BPL atau pemandu, itupun sifatnya situasional seperti momen LK1. Setelah LK1 itu yang paling pokok apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter kader. Maka kajian dan up-grading perkaderan harus

diperbanyak, yang selama ini hanya ada up-grading kepengurusan sebelum RAK, atau awal kepengurusan.

Persaingan antar kader sangat penting dalam ranah perkaderan, karena itu persaingan yang menumbuhkan. Perebutan lahan untuk tumbuh dan terus mengasah diri itu sangat diperlukan. Maka ruang transformasi pengetahuan harus dibuka lebar dengan berbagai perombakan. Terutama Yogyakarta, merupakan kota pendidikan dan akses referensi sangat banyak, maka sangat strategis merangsang gairah intelektual kader.

Banyak kader HMI Cabang Yogyakarta nanti semester lima atau atau tujuh baru LK2, atau SC, sehingga pengabdianannya pada ranah kekaderan sempit dan banyak memikirkan dan melakukan kegiatan syarat penyelesaian study atau sarjana seperti PPL, KKN, atau skripsi. Karena kurangnya ruang sebagai pematari atau instruktur di LK1 dan follow-up, menyebabkan merasa kurang terpakai meskipun sudah SC, hal ini bisa memunculkan pesimis untuk melanjutkan selalu perkaderan. Bisa dihitung berapa yang sudah LK2, SC, LK3, masih termasuk sedikit.

Bahkan yang sudah 1, 2 atau 3 tahun setelah SC, masih juga belum mengisi materi di ruang perkaderan dan masih memandu, karena senior yang biasanya selalu mengisi materi, masih dipercayakan karena dianggap itu yang lebih tepat. Padahal bisa saja kader yang masih muda lebih hebat dari senior asalkan tumbuh gairah terus untuk belajar dan ada ruang mengaplikasikannya.

Ruang aplikasi ini sebagai pendorong jiwanya untuk terus tumbuh, bergerak dinamis.

HMI memandang manusia sama dan itu merupakan ulasan NDP HMI bab II. Artinya setiap kader HMI punya kesempatan tumbuh dan HMI menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu. Bahkan mengapresiasi kader yang terus mau berproses. Apalagi ketua umum HMI Komisariat, mestinya setiap ketua umum komisariat wajib mengisi materi di LK1, terutama di LK1 di komisariatnya sendiri, hal ini sangat bermanfaat demi memunculkan wibawa pada kader baru dan pengurusnya. Serta ada gairah terus belajar dan mempersiapkan selalu dirinya untuk mengkader.

Kebosangan juga sering muncul pada peserta training ketika sudah terlalu lama pemateri, seperti 4 jam, 5 bahkan 8 jam hanya diisi 1 pemateri meskipun ada waktu istirahat. Tetapi kader juga butuh banyak perbandingan pemateri lain dan menginginkan suasana lain. Jadi bisa 1 materi wajib, 3 orang yang membawakan atau dipecah beberapa materi yang berkaitan dan berkesinambungan setiap materi wajib. Meski hanya 2 atau 3 jam setiap pemateri, tetapi dikali 3 atau 4 pemateri, maka hasilnya bisa lebih dapat.

Materi di luar materi wajib yang telah ditentukan dalam pedoman perkaderan bukanlah disebut materi suplemen atau materi tambahan dan hanya bersifat sunnah. Bisa saja bersifat wajib ketika memang itulah kebutuhan kader-kader di mana situasi dan kondisi itu berada. Karena pedoman perkaderan di

tingkat pusat, tidak pernah mengalami perubahan selama puluhan tahun belakangan ini, sementara zaman terus berganti dan terus maju.

Keterlambatan merespon masa kini dan kemudian hari telah terjadi di tubuh HMI. Harus ada keberanian merumuskan sendiri pola perkaderan sesuai kebutuhan dan tetap mengcover materi wajib yang sifatnya umum dan standar nasional. Tetapi kegiatan di luar materi wajib termasuk banyak, seperti Forum Group Diskusi (FGD), olahraga, ice breaking, atau permainan (game) yang menumbuhkan jiwa sosial, kekompakan, komunikasi dan lainnya antar peserta training, itu juga penting. Sebagaiman dalam suatu uraian di bawah ini.

Selama menggunakan model pembelajaran kooperatif, anak-anak secara aktif terlibat dengan anak-anak dan materi pembelajaran lainnya. Keberhasilan penerapan model ini adalah kegiatan atau program yang harus direncanakan dan disusun dengan tugas yang berkaitan dengan tujuan belajar. Adapun beberapa bentuk model ini adalah:

1. Diskusi berpasangan untuk bertukar pikiran.
2. Kumpulkan informasi yang banyak dalam waktu singkat dengan membagi kelompok siswa.
3. Bermain peran (role playing), anak bermain keterampilan sosial.
4. Bermain dengan mencari jejak (labirin atau peta).

Terdapat model pembelajaran kognitif sosial (Kognitif-sosial model pembelajaran). Tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial anak melalui strategi pembelajaran kognitif sosial yang efektif untuk

memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempraktikkan perilaku sosial dalam berbagai konteks sosial.³⁹¹

I. Bagan Nilai-nilai Karakter Bangsa HMI Cabang Yogyakarta

Nilai-nilai karakter bangsa secara keseluruhan di HMI Cabang Yogyakarta, berdasarkan penelitian, maka penulis mendeskripsikannya dalam bagan di bawah ini.

Tabel 19 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa HMI Cabang Yogyakarta.

NILAI	DESKRIPSI
1. Budaya Prestasi	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain
2. Tekun belajar	Tradisi membaca yang kuat, diskusi, kajian, bedah buku, dan mengembangkan kemampuan ilmiahnya yang selalu didayagunakan bagi lingkungannya
3. Zuhud	Taat beribadah, selalu mendekatkan diri pada Allah

³⁹¹Rafika Bayu Kusumandari Istyarini, "Caracter Education Development Model-Based E-Learning and Multiple in Telegency: ind Childhood in Central Java", *Global Journal of Computer Sciency and Teknology H Information & Technology*. "(2015) Vol. 15. No. 3, hlm.

4. Tawadhu	Perilaku yang rendah hati, tidak sombong, menganggap sama sesama manusia, menghargai setiap orang punya kelebihan masing-masing
5. Kejuangan	Sifat yang selalu peka dan militan menjawab kehidupan lingkungan sekitarnya sehingga mampu tampil usaha <i>amar ma'ruf nahi mungkar</i> secara ikhlas
6. Akhlakul karimah	Perilaku keseharian yang memberi pengaruh baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara baik secara individual, komunal maupun secara organisasi
7. Jiwa Kepemimpinan	Bersifat amanah, adil, benar, jujur, ikhlas serta penyeru, pengayom, penyantun, cerdas, berilmu dan terampil
8. Akademis	Berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, berpikir rasional, objektif, kritis. Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan, selalu tanggap menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran. Sanggup berdiri sendiri dengan penguasaan ilmu pengetahuan sesuai ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun teknis. Sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai prinsip-prinsip perkembangan
9. Pencipta	Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain lebih sekedar yang ada dan bergairah menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dan berangkat dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaruan. Bersikap independen dan terbuka, tidak isolatif. Insan yang potensi kreatifnya dapat berkembang, mampu melaksanakan kerja kemanusiaan bernapaskan ajaran Islam
10. Pengabdian	Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak. Bukan hanya hanya membuat dirinya baik tetapi juga kondisi sekelilingnya baik. Bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan

	sesama
11. Bernapaskan Islam	Pola pikir dan pola lakunya dijiwai dari Islam tanpa memakai sebutan Islam (atau simbolis) tapi mengedepankan substansi, isi, makna. Islam menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Ajaran Islam membentuknya pribadi yang utuh, tidak dilema sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Mengintegrasikan sukses
12. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain
13. Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain
14. Cintai Damai	Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya
15. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan
16. Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi
17. Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
18. Tanggung jawab	Selalu berjuang mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai Taqwa kepada Allah SWT. Korektif terhadap setiap langkah yang berlawanan, watak yang sanggup memikul akibat-akibat perbuatannya. Sadar bahwa menempuh jalan yang benar memerlukan keberanian moral. Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan, dan jauh dari sikap apatis. Percaya diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai “ <i>khalifah fil ard</i> ”, yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan

19. Integritas	Yakni kepribadian yang terbentuk sebagai pribadi muslim yang menyadari tanggung jawab kekhalifahannya di muka bumi, sehingga citra akhlakul karimah senantiasa tercermin dalam pola pikir, sikap dan perbuatannya.
20. Kualitas Intelektual	Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu (<i>sain</i>) pengetahuan (<i>knowledge</i>) yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam.
21. Profesional	Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengetahuan ke dalam perbuatan nyata sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya secara konsepsional, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal shaleh.
22. kemandirian	Yaitu segala usaha pembinaan kepribadian mandiri dalam mewujudkan kader yang kreatif dan inovatif yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai islam.
23. Berprinsip integratif	Mengarahkan cara berfikir dan sikap secara menyeluruh, terhubung, tidak parsial dan tidak mendikotomikan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya.
24. Keseimbangan	Prinsip keseimbangan merupakan keharusan dalam pengembangan dan pembinaan diri sehingga tidak adanya kepincangan dan kesenjangan antara material, spritual maupun unsur jasmani, dan rohani.
25. Prinsip kesamaan	Tidak membedakan-bedakan antara satu kader orang dengan lainnya, tidak membedakan antara suku, ras, agama, mengedepankan kemanusiaan. Memahami bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang wajar dan baik.
26. Kasih Sayang	Prinsip kasih sayang merupakan sifat dasar dari Tuhan YME. Sebagaimana kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, maka sudah seharusnya manusia menirukan segala sifat yang ada pada-Nya,

	menifestasi dari sifat-sifat Tuhan tersebut sepatutnya pula teraktualisasikan dalam proses kehidupan. Prinsip ini mengarahkan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi dan watak kebaikan, dan kecenderungannya selalu pada kebenaran.
27. Keteladanan	Manusia bukan hanya bertugas menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran, tetapi juga turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan dalam kesehariannya.
28. Ketaatan	Prinsip ketaatan ini lahir dari adanya ketundukan (din) dan sikap pasrah (al-islam) sehingga membentuk satu kesatuan dan sikap menaati setiap aturan-aturan yang telah diberlakukan. Sebab, tidak ada ketaatan tanpa adanya ketundukan dan sikap pasrah terhadap sesuatu yang sedang diyakininya. Memahami bahwa setiap pribadi hendaknya menaati segala aturan-aturan sosial kehidupan yang diiringi oleh pengamalan dalam lingkup keseharian. Prinsip ketaatan ini bersumber pada kebijakan, baik yang dihasilkan secara nyata dalam perintah Allah, rasul, maupun dari masyarakat atau dari para pemimpin yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan.
29. Memiliki gairah Kognitif	Memperbaiki cara berfikir dengan cara (mengosongkan benak dari berbagai bentuk pemikiran yang salah, menyimpang, tidak berdasar, baik dari segi agama maupun akal yang lurus). Pengisian (mengisi kembali benak dengan nilai-nilai baru dari sumber keagamaan, yang membentuk kesadaran baru, logika baru, arah baru, dan lensa baru dalam cara memandang berbagai masalah). Kontrol (mengontrol pikiran-pikiran baru yang melintas dalam benak sebelum berkembang menjadi gagasan yang utuh), dan doa (pencerahan ilahi dalam berpikir).
30. Memiliki mental yang kokoh	Pengarahan (arah perasaan yang jelas), penguatan (menguatkan perasaan dalam jiwa, adanya keyakinan, kemauan, dan tekad sebelum melakukan suatu tindakan).

	Kontrol (memunculkan kekuatan tertentu yang berfungsi mengendalikan semua warna perasaan), dan doa (mengharapkan adanya dorongan Ilahi yang membantu semua proses pengarahan, penguatan, dan pengendalian mental).
31. Berjiwa Wirausaha	Pelatihan wirausaha dan mempraktekkannya.

BAB V

PENUTUP

a) Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan:

- a. HMI memiliki konsep karakter bangsa sejak awal berdirinya sampai saat ini. Paling khas di HMI karakter bangsanya adalah keserasian antara Islam dan Indonesia.
- b. Implementasi pembangunan karakter bangsa di HMI Cabang Yogyakarta telah berjalan selama ini dan memang arah perkaderan HMI dalam rangka pembentukan karakter kader-kadernya terutama pada karakter bangsa. Hal pembentukan karakter bangsa yang telah dilakukan HMI diantaranya:
 - 1) Pembentukan Intelektual ke-HMI-an.
 - a) Wawasan Kebangsaan
 - b) Penanaman Cinta Tanah Air
 - c) Pemahaman dan nilai-nilai Pancasila pada kader HMI.
 - d) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
 - e) Komitmen terhadap NKRI.
 - 2) Profesionalisme
 - 3) Kemandirian
 - 4) Pembentukan Keilmuan Kader
 - 5) Merespon Lingkungan Sosial

c. Kendala Implementasi Pembentukan Karakter Bangsa HMI Cabang Yogyakarta

Kendala perekrutan kader HMI Cabang Yogyakarta selama ini dan sampai tahun 2018 ini setiap komisariat memiliki kendala tersendiri dan terutama setiap komisariat yang berada pada kampus tertentu, memiliki tantangan dan kendala yang cukup rumit.

b) Saran

1. Pada HMI jauh sebelum dicetuskannya pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi, HMI sudah memiliki model dan konsep karakter bangsa. Begitupun HMI Cabang Yogyakarta dalam rangkaian banyak perkaderannya telah bergerak selama ini pada pembentukan karakter bangsa pada kader-kadernya. Hanya saja selama ini mengekspresikan atau menjewantahkan masih belum banyak yang dilakukan kader HMI terutama pada dunia pendidikan.
2. Hendaknya lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi, membuka diri terhadap HMI, supaya HMI bisa menjalankan aktifitas yang produktifnya dalam mencetak kader umat dan kader bangsa. Perguruan Tinggi bagi HMI adalah mitra, dan di situlah basis perkaderan. Mesti adanya dialog atau kajian bersama HMI dan lembaga pendidikan supaya bisa saling menganalisis pola pembentukan karakter bangsa dalam konsep HMI dan membandingkan konsep karakter yang sudah ada selama ini, dan bisa lebih baik ketika keduanya dikombinasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Uhbiyanti Nur., 1991, *Ilmu Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Alfas, Fauzan., 2015, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*. Cet. III; Jakarta Pusat: PB PMII.
- Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025.
- Citra Umbara., 2016, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas & Peraturan-Pemerintah RI Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Wajib Belajar*. Cet. I; Bandung: Citra Umbara.
- Citra Umbara., 2012, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Cet. I; Bandung: Citra Umbara.
- Creswell, John W., 2015, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Fife Approaches*, Alih bahasa Ahmad Lintang Lazuardi, Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daryanto., Darmiatun Suryatri., 2013, *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Cet. I; Yogyakarta: Gava Media.
- Departemen Agama RI., 2012, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Sukses Publishing.
- Djamal, M.. 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumhur, I., Danasuparta., 1976, *Sejarah Pendidikan*. Cet. VI; Bandung: CV Ilmu.
- Elfi Suharni, Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Kompleks UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22 Mei 2017.
- Gunawan, Heri., 2014, *Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Rahmat Dede., *Psikologi Kepribadian dalam konseling*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibnu Badar al-Tabany, Trianto., 2014, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group.
- ICJR, “Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkat”, dikutip dari <http://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebar-kebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.
- Istyarini, Rafika Bayu Kusumandari., 2015, “Caracter Education Development Model-Based E-Learning and Multiple in Telegency: ind Childhood in

- Central Java”, *Global Journal of Computer Sciency and Teknologi H Information & Technology*.”Vol. XV. No. 3, 2015, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kementerian Pendidikan Nasional LITBANG., 2010, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Daya Saing dan Karakter Bangsa: Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pusat Kurikulum.
- Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum., 2010, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa; Pedoman Sekolah*. Jakarta: Balitbang.
- Kesuma, Dharma., 2012, *Pendidikan karakter kajian teori dan praktik disekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koesoema A, Doni., 2010, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Gramedia.
- Korps Pengader HMI Cabang Yogyakarta., 1995, *Pedoman Kursus Pengader HMI*. Yogyakarta: LAPMI.
- Krishna, Anand., 2010, *Youth Challenges and Empowerment*. Cet. II; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lickona, Thomas., 2014, *Educatin For Character*, alih bahasa Lita S, Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik, Cet. II; Bandung: Nusa Media.
-, 2016, *Character Matters*, alih bahasa Juma Abdu Wamaungo & Jean Antunes Rudolf Zien, Persoalan Karakter. Cet. IV; Jakarta: Remaja PT Bumi Aksara.
-, 2016, *Educating For Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, alih bahasa Juma Abdu Wamaungo, Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab. Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Maragustam., 2016, *Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*. Cet. II; Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Martoyo, Susilo., 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Megawangi, Ratna., 2004, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Star Energy.
- Moleong, Lexi J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin., 2011, *Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukhtar, Sidratahta., 2006, *HMI dan Kekuasaan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Muslich, Masnur., 2012, *Pendidikan Karakter Menjawab tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Naim, Ngainun., 2012, *Character Building*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nata, Abuddin., 2010, *Metodologi Studi Islam*. Cet. XVII; Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Patilima, Hamid., 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Bandung: Alfabeta.
- PB HMI., 2010, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVII*. Jakarta: PB HMI.
-, 2013, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVIII*. Jakarta: PB HMI.
-, 2015, *Hasil-hasil Kongres HMI XXIX*. Jakarta: PB HMI.
- Pedoman Perkaderan Nasional Himpunan Mahasiswa Islam, *Hasil Lokakarya Perkaderan Nasional*, dilaksanakan di Jakarta, 18-22 April 1992.
- Pemerintah Republik Indonesia., 2010, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta.
- Prabu Mangkunegara, Anwar., 2006, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- PT Tiara Wacana Yogya., 1991, *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Ranuwihardjo, Dahlan., 2000, *Menuju Pejuang Paripurna*. Cet. I; Jakarta: CV. Subeka Agung.
- Rudianto, Dody., 2010, *Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional*. Cet. I; Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Saddam, Master Of Training (MOT) LK1 HMI Komisariat Ahmad Dahlan, Gedung Pemuda Ambarbinangun Yogyakarta, 26 November 2016.
- Samani, Muchlas., Hariyanto., 2012, *Konsep dan model Pendidikan Karater*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanaky, Hujair AH., 2015, *Pembaruan Pendidikan Islam: Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju Masyarakat Madani Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Satria, Hariqo Wibawa., 2011, *Lafran Pane: Jejak Hikayat dan Pemikirannya*. Cet. II; Jakarta Selatan: Penerbit Lingkar.
- Sanjaya, Wina., 2012, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Cet. V; Jakarta: Kencana.
- Sitompul, Agussalim., 2008, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: CV Mizaka Galiza.
-, 2008, *Menyatu Dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman Keindonesiaan HMI, 1947-1997*. Jakarta: Mizaka Galiza.

-, 2008, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*. Jakarta: CV Misaka Galiza.
-, 2008, *HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik*. Cet. II; Jakarta: CV Misaka Galiza.
- Soekarno., 2006, *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Media Persindo.
- Solichin., 2010, *HMI Candradimuka Mahasiswa*. Cet. I; Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation.
- Sugiyono., 2015, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XIII; Bandung: Alfabeta.
-, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. XV; Bandung: Alfabeta.
-, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Tanja, Victor., 1982, *HMI Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Teguh S, Ambar & Rosidah., 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Kaderisasi FSBKU, dkk., 2006, *Kaderisasi Organisasi Rakyat: Pengalaman Lima Organisasi Rakyat*. Bandung: Cet. I; Garis Pergerakan dan Pergerakan-People Centered Advocacy Institute.
- UU RI “Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, dikutip dari <https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.
- UU RI, “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dikutip dari, <https://www.slideshare.net/internetsehat/uu-19-tahun-2016-revisi-uu-ite>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.
- Wibowo., 2012, *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Cet. IV; Raja Grafindo Persada.
- Winardi., 2015, *Manajemen Perubahan: The Management of Change*. Jakarta: Cet. VI; Prenadamedia Group.
- Winarji, J., 2001, *Motivasi & Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno., 2015, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Cet. IV; Bumi Aksara.
- Winkel, W.S & Hastuti Sri., 2004, *bimbingan dan konseling di institusi pendidikan*. Jogjakarta: Media abadi.
- Zubaedi., 2011, *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana.

Zusnani, Ida., 2013, *Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa*. Cet. I; Platinum.